



WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6947);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 19);

15. Peraturan...

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Berita Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
21. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sibolga Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2018 Nomor 20);
22. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sibolga Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2025 Nomor 36);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

dan

WALI KOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Perencanaan...

7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 2029 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan pada Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.

16. Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
20. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
21. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
23. Bersifat Indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
24. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
25. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

26. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
27. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
28. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
29. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
30. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
31. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.

BAB II RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih Tahun 2024.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, Sasaran, Strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan Kerangka Pendanaan Bersifat Indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJMD Provinsi Sumatera Utara, RPJPD dan RTRW Daerah.

Pasal 3...

- (3) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (4) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan RPJMD lingkup Daerah kepada Wali Kota.
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. terjadinya bencana alam;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik social budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran daerah; dan/atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sibolga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2021 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8...

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini Dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 20 Agustus 2025

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK

Diundangkan di Sibolga

Pada tanggal 20 Agustus 2025

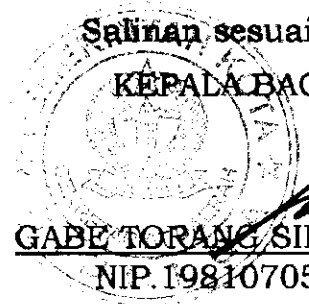
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

ROSIDAH LUBIS

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2025 NOMOR 73

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (1-75/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.
NIP.19810705 200804 1 001

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA SIBOLGA
TAHUN 2025-2029**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH
KOTA SIBOLGA TAHUN 2025-2029**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Sibolga dahulu merupakan sebuah bandar kecil di Teluk Tapian Nauli dan terletak di Pulau Poncan Ketek. Pulau kecil ini dekat dengan Kota Sibolga yang sekarang. Bandar ini diperkirakan telah berdiri sekitar abad ke-18 dengan pemimpinnya yang pada masa itu dikenal dengan julukan Datuk Bandar. Awalnya, nama Sibolga diberikan oleh orang Batak yang datang ke Tapian Nauli. Ia berasal dari Silindung. Sebelum sampai di Teluk Tapian Nauli, orang Batak Silindung tersebut takjub dengan pemandangan air laut yang sungguh luas, sehingga mereka memberi perairan tersebut nama Sibolga. Sibolga sendiri berarti "balga" atau air yang besar.

Sibolga merupakan kota terkecil di Indonesia. Kota dengan luas wilayah 10,77 kilometer persegi, terletak di pesisir barat pulau Sumatera dengan membujur sepanjang pantai dari utara ke selatan di Kawasan Teluk Tapian Nauli. Berjarak sekitar 350 KM dari Medan. Sibolga terbagi menjadi daratan pantai, lereng, dan pegunungan. Kota ini memiliki ketinggian antara 0-200 m di atas permukaan laut. Kemiringan lahan pada wilayah kota ini bervariasi, mulai dari 0-2% hingga lebih dari 40%. Iklim kota ini pun termasuk cukup panas dengan maksimum suhu mencapai 32

°C dan minimum 21.6 °C. Curah hujan di Sibolga pun cenderung tidak teratur di sepanjang tahunnya. Dengan sempitnya lahan sibolga dan padatnya penduduk maka sibolga sulit untuk membangun karena tidak adanya lahan.

Sibolga cukup strategis, karena berada di tepi laut, yang menjadikannya kaya akan sektor perikanan. Oleh karena itu, Sibolga pun diakui sebagai Kota Ikan. Memiliki satu oleh-oleh khas, yakni ikan asin. Jika ingin mendapatkan olahan ikan asin yang terkenal di sibolga bisa mendatangi kelurahan Pasar belakang Kecamatan Sibolga Kota. Tak hanya ikan Asin Sibolga juga memiliki kuliner khas yang tak kalah menarik, yakni Nasi Tua. Kuliner khas yang tak kalah menarik, yakni nasi Tua. Kuliner khas ini berbahan dasar ketan yang disiram dengan kuah manis. Karena lokasinya yang strategis, sibolga kerap menjadi kota perlintasan bagi para warga Sumatera Utara, dari satu daerah ke daerah lainnya. Sejak dulu, sibolga dikenal sebagai jalur antar daerah di Sumatera Utara. Kota ini pun menjadi akses dari Pulau Nias menuju Tapanuli hingga ke Medan. Banyak orang luar yang menetap di Sibolga dengan etnis yang berbeda-beda. Hal itu membuat kota ini dijuluki sebagai Negeri Berbilang Kaum. Kota ini pun memiliki tradisi yang terkenal dari daerah pesisir Tapanuli, yaitu Mandi Balimo-Limo. Kegiatan ini dilakukan sebelum memasuki bulan suci Ramadan dengan melakukan mandi-mandi di sungai dengan membawa bekal disertai air limau yang telah dicampur dengan daun pandan wangi. Sedangkan tradisi Malopeh dilaksanakan pada akhir bulan Ramadan. Pada tradisi ini, masyarakat membeli daging untuk dimasak sehari sebelum hari Lebaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah daerah

berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Peraturan terbaru terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yang diterbitkan pada 10 Februari 2025. Peraturan ini menjadi landasan bagi perencanaan pembangunan daerah, termasuk RPJMD, di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Selain Perpres, ada juga Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan Perangkat Daerah (PD). Dokumen

perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, mulai dari Rancangan Teknokratik (Rantek) RPJMD. Penyusunan RPJMD harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pelantikan kepala daerah terpilih. Apabila penyelenggara pemerintahan daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah (Perda) RPJMD dalam waktu tersebut, maka kepala daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya selama 3 (tiga) bulan.

Penyusunan RPJMD Kota Sibolga Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Kota Sibolga Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Kota Sibolga Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Kota Sibolga Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Kota Sibolga Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Gambar 1. 1 Wali dan Wakil Wali Kota Sibolga



Sumber: Dokumentasi Pemko Sibolga

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi dan misi, program kepala daerah terpilih yaitu Akhmad Syukri Nazry Penarik sebagai Wali Kota Sibolga dan Pantas Maruba Lumban Tobing sebagai Wakil Wali Kota Sibolga yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dengan masa Jabatan Tahun 2025-2030, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2025 dan telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 di Jakarta berdasarkan hasil Pemilukada Serentak pada tanggal 27 November 2024.

Penyusunan RPJMD disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Organisasi Perangkat Daerah, lintas organisasi Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja

dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Visi dan Misi kepala daerah terpilih diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga.

Dokumen perencanaan jangka menengah yang dimaksud pada penjelasan sebelumnya merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu dokumen perencanaan untuk periode waktu lima tahun yang akan datang. Selain janji-janji politik atau Visi Misi Kepala Daerah Terpilih yang harus diterjemahkan pada RPJMD, hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, isu-isu strategis serta potensi-potensi unggulan juga harus diakomodir dalam RPJMD Kota Sibolga. Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan dimaksud mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya.

Aspek penyelarasan selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, dalam Pasal 10 mengamanatkan bahwa penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang didalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Keseluruhan hal tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut diamanatkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

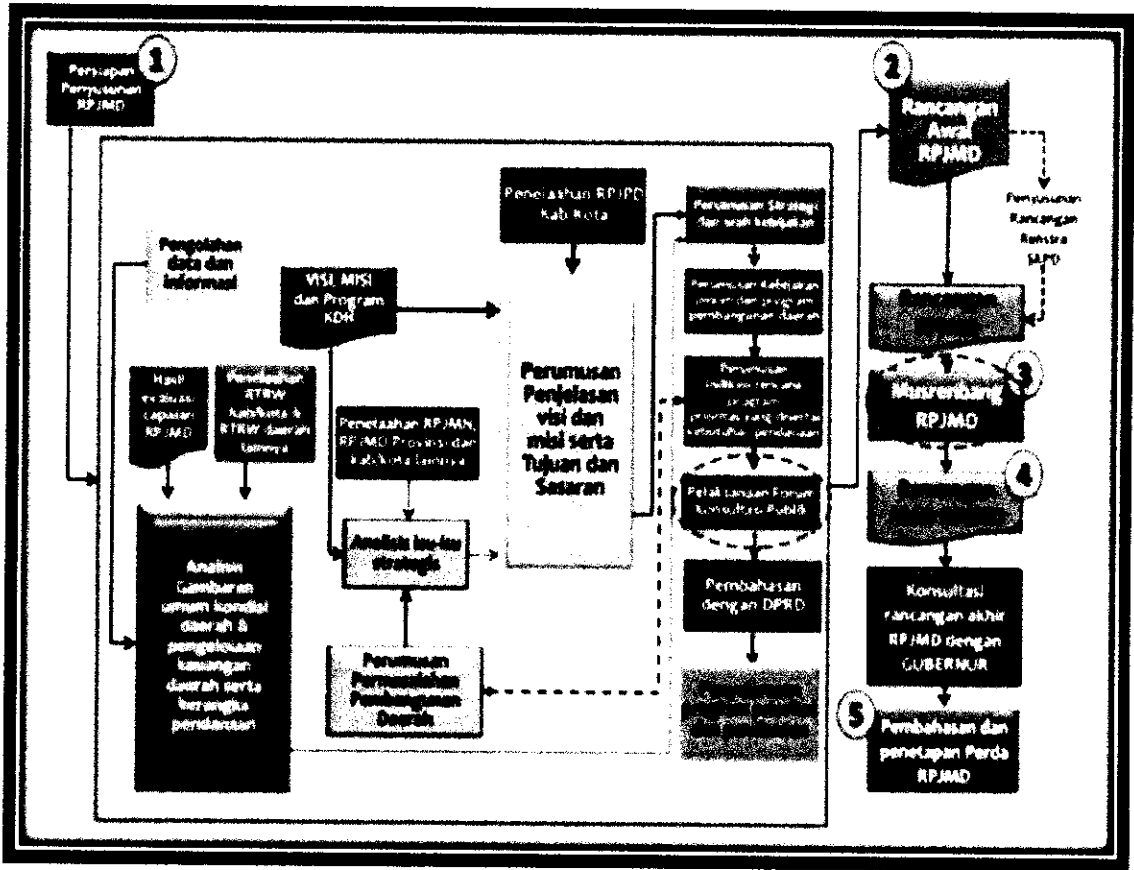
Sebagai tindaklanjutnya, pemerintah Kota Sibolga berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah Kota Sibolga juga harus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki Kota Sibolga.

Secara proses, RPJMD disusun dengan memperhatikan pendekatan yaitu teknokratik, partisipatif, politis, pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, pendekatan holistik-tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial. Pendekatan teknokratik menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (*stakeholder*) dalam pengambilan keputusan perencanaan. Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan RPJMD mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dibahas

bersama DPRD dan ditetapkan dalam peraturan daerah. Pendekatan perencanaan bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*), yaitu penyusunan perencanaan pembangunan diselaraskan melalui musyawarah di tingkat kota sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah. Pendekatan Holistik-tematik yaitu dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan Integratif dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah serta pendekatan Spasial dengan mempertimbangkan dimensi ke-ruang-an dalam perencanaan.

Gambar berikutnya merupakan proses penyusunan RPJMD secara rinci, Pendekatan inilah yang digunakan dalam perencanaan pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Sibolga Tahun 2025-2029 untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan efisien. Dengan mengintegrasikan berbagai aspek dan mempertimbangkan dimensi keruangan, perencanaan pembangunan diharapkan dapat mencapai tujuan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga Tahun 2025-2029 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan *stakeholders* dan pemangku kepentingan.

Gambar 1. 2 Proses Penyusunan RPJMD



Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dengan dilantiknnya Walikota dan Wakil Walikota Sibolga pada tanggal 20 Februari 2025, maka masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota adalah 2025-2030 dan penyelesaian penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJMD 6 bulan setelah pelantikan kepala daerah. Demikian pula dengan komitmen pembangunan berkelanjutan yang disematkan dalam visi, misi dan program prioritas Walikota dan Wakil Walikota.

Peran RPJMD sebagai dokumen strategis Lima Tahunan yang menjadi operasionalisasi dari RPJPD 2025-204, serta sebagai acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah.

1.2 Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Sibolga tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024 tentang Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6947);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
22. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang

- Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

- tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 33. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
 34. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77);
 35. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 929);

36. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029.
37. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
38. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12)
39. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sibolga Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2018 Nomor 20);
40. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 36).
41. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nauli (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembar Daerah Kota Sibolga Nomor 25).
42. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Sibolga Nauli (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2024 Nomor 70, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 35).

Selain dasar hukum di atas, penyusunan RPJMD Kota Sibolga.

1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya

Penyusunan RPJMD Kota Sibolga Tahun 2025-2029 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap I Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sibolga Tahun 2025-2029 dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka Panjang daerah. Selanjutnya RPJMD nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang menjabarkan RPJMD menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kemudian, pelaksanaan RPJMD Kota Sibolga Tahun 2025-2029 ini nantinya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Sibolga yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan tahunannya, RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

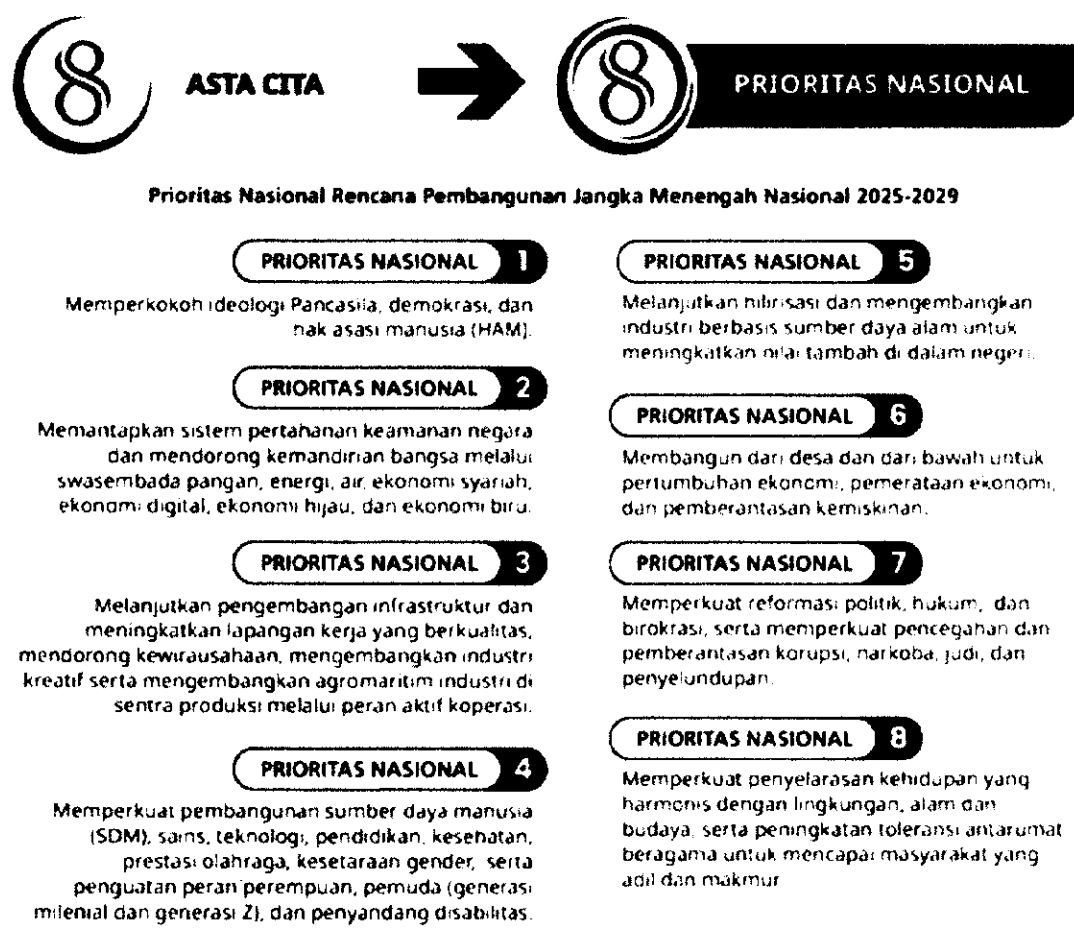
1) Hubungan RPJMD Kota Sibolga dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

RPJMD Kota Sibolga Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat Pusat dan Daerah, sehingga dalam penyusunannya memperhatikan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 melalui penyelarasan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar di bawah ini.

Gambar 1. 3 Hubungan antar Dokumen



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2025.

2) **Hubungan RPJMD Kota Sibolga dengan RPJPD dan RKPD**
Penyusunan RPJMD Kota Sibolga berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap I Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sibolga Tahun 2025-

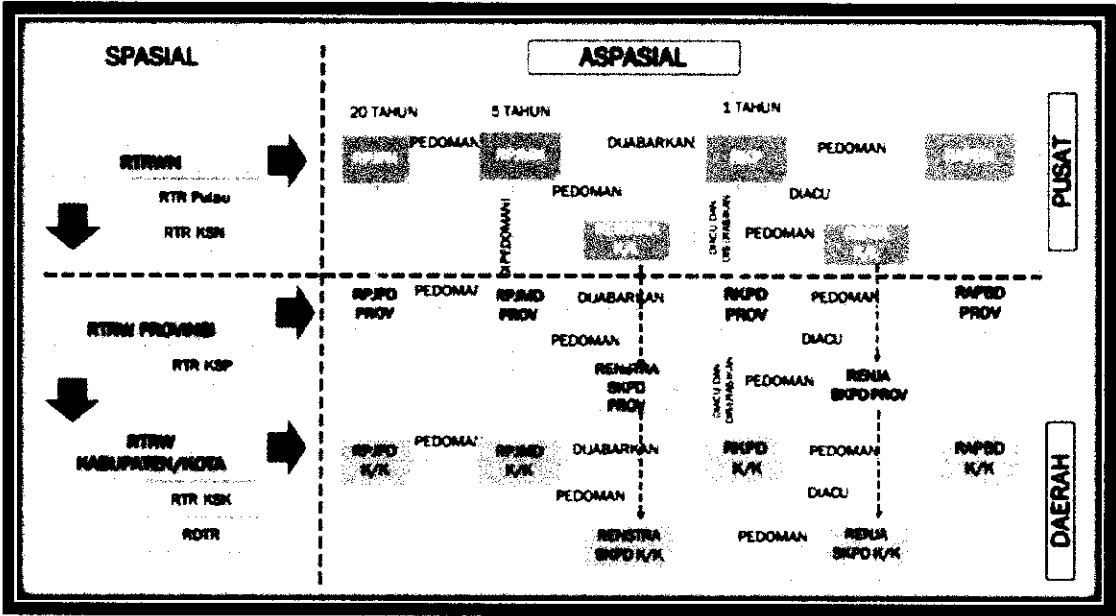
2045 dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka Panjang daerah.

Selanjutnya RPJMD nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang menjabarkan RPJMD menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kemudian, pelaksanaan RPJMD Kota Sibolga Tahun 2025-2029 ini nantinya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Sibolga yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Dalam pelaksanaan tahunannya, RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

3) *Hubungan RPJMD Kota Sibolga dengan RTRW Kota Sibolga*

Penyusunan RPJMD Kota Sibolga juga berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sibolga 2017-2037 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 tentang RTRW Kota Sibolga Tahun 2017-2037, melalui penyelarasan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka Panjang maupun jangka menengah Daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.

Gambar 1. 4 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kota Sibolga Tahun 2021-2026 dan RTRW Kota Sibolga Tahun 2017-2037



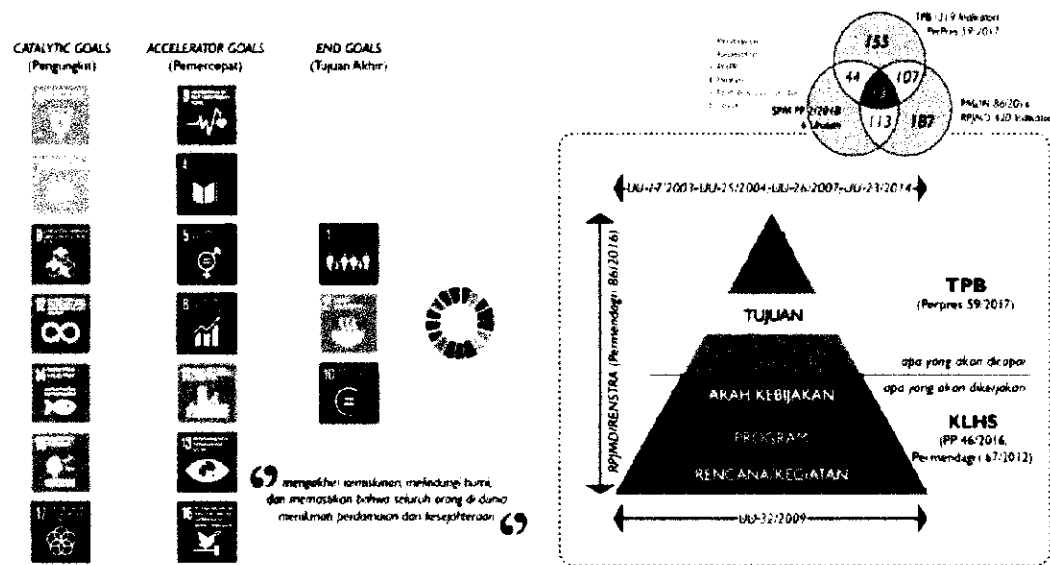
Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

RPJMD Kota Sibolga juga memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan sebagaimana tujuan dari RTRW Kota Sibolga. Keterhubungan RPJMD dengan RTRW sebagaimana pada gambar sebelumnya.

4) **Hubungan RPJMD Kota Sibolga dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Sibolga**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJMD. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

Gambar 1. 5 Keterhubungan RPJMD dan KLHS

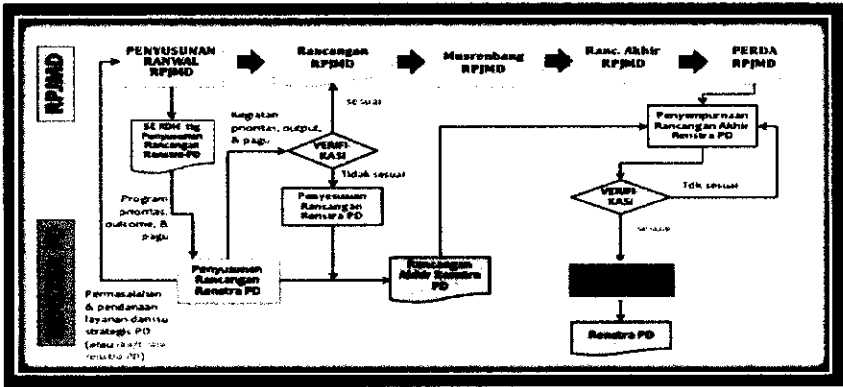


Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas.

5) Keterhubungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sibolga 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Sibolga Tahun 2025-2029.

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah (PD). Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Sibolga. Keterhubungan RPJMD dengan Renstra PD sebagaimana pada gambar berikut ini:

Gambar 1. 6 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kota Sibolga Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029



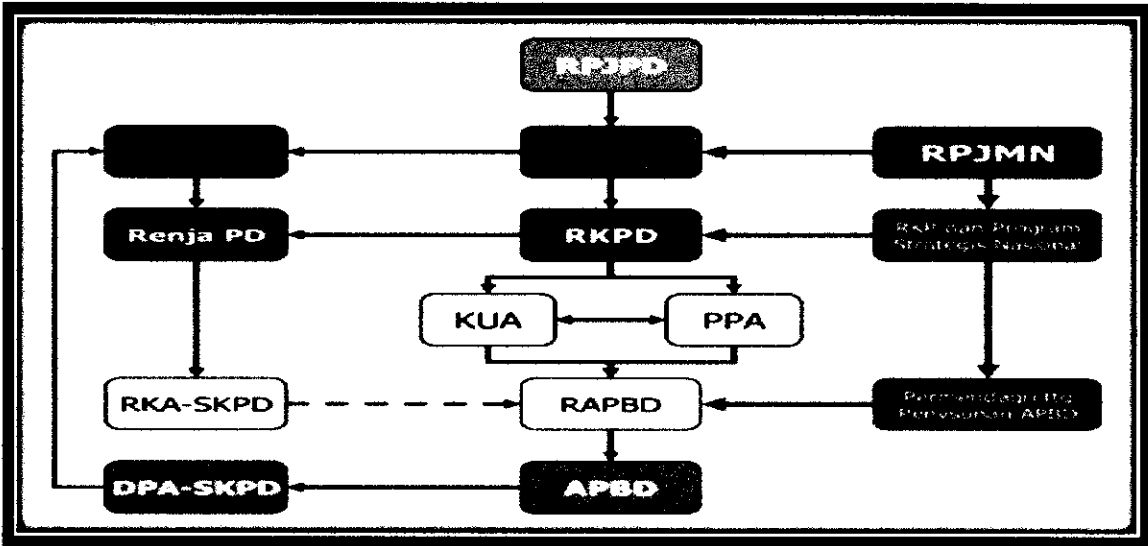
Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Renstra PD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan PD disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Renstra PD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran PD (RKA-OPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

6) Keterhubungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sibolga Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sibolga Tahun 2025, 2026, 2027, 2028 dan 2029.

Pelaksanaan RPJMD Kota Sibolga Tahun 2025-2029 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda), dan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat lingkungan, kelurahan, kecamatan hingga Kota. Selain aspirasi masyarakat yang dilakukan melalui pelaksanaan musrenbangda, juga dilakukan penjaringan aspirasi masyarakat dalam bentuk hasil reses DPRD. Hasil Reses ini merupakan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagai bahan dalam penyusunan RKPD. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran serta bahan penyusunan Rencanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Keterhubungan RPJMD dengan RKPD sebagaimana pada gambar berikut ini:

Gambar 1. 7 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kota Sibolga Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Kota Sibolga



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen RPJMD Kota Sibolga Tahun 2025-2029 adalah sebagai acuan dan rencana induk pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan RPJMD juga dimaksudkan untuk mengimplementasikan komitmen Kepala Daerah terpilih menjadi arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah sebagai acuan perumusan prioritas pembangunan tahunan dalam RKPD.

1. Maksud penyusunan RPJMD Kota Sibolga Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah Kota Sibolga, masyarakat, dunia usaha, dan stakeholder lainnya) dalam mewujudkan visi misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga terpilih, dalam rangka mewujudkan Sibolga yang Peduli, Amanah dan Setia untuk Masyarakat yang Sejahtera.
2. Tujuan penyusunan RPJMD Kota Sibolga Tahun 2025-2029, adalah:
 - a. Tersusunnya RPJMD Tahun 2025-2029 yang dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian

- target pembangunan Jangka Menengah Nasional; dan
- b. Tersusunnya RPJMD Tahun 2025-2029 yang memberikan ruang optimal bagi pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah
 - c. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD;
 - d. Menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih;
 - e. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
 - f. Memungkinkan terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi dan kolaborasi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

RPJMD Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029. RPJMD Kota Sibolga 2025-2029 sebagai perwujudan dari visi-misi Kepala Daerah yang akan diimplementasikan melalui Program dan Kegiatan dengan tolak ukur indikator yang menjadi acuan dalam penentuan arah keberhasilan pembangunan.

1.5 Sistematika Penulisan

RPJMD Tahun 2025-2029 terdiri atas sekurang- kurangnya terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan Latar belakang, Dasar hukum penyusunan, Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Kota Sibolga

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Gambaran Umum daerah menjelaskan beberapa aspek yaitu: Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah, Aspek Pelayanan Umum, dan menjelaskan Gambaran Keuangan Daerah dan berbagai permasalahan pembangunan serta isu strategis daerah

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2025-2029 disertai dengan tujuan dan sasaran RPJMD. Selain itu menjelaskan berbagai strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat daftar Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dan indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah 2025-2029, menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat Kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA SIBOLGA

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kota Sibolga terletak di tepi pantai Barat Pulau Sumatera bagian Utara yakni di Teluk Tapan Nauli, ± 350 km Selatan Kota Medan, ibukota Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis wilayah Kota Sibolga terletak pada posisi 01° 42’ LU sampai dengan 01° 46’ LU dan 98° 46’ BT sampai dengan 98° 48’ BT dan secara fisik berada dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Tengah. Batas Sebelah Utara, Timur, Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Sebelah Barat Berbatasan dengan Teluk Tapan Nauli/Kabupaten Tapanuli Tengah.

Secara rinci letak geografis dan luas wilayah, batas dan jarak 4 Kecamatan ke Pusat Kota Sibolga disajikan pada Tabel di bawah.

Tabel 2. 1 Letak dan Geografis Kota sibolga dan
Kecamatannya

Daerah	Uraian		Keterangan
SIBOLGA	Letak Kota Sibolga	LU	01°42'- 01°46'
		BT	98°46'- 98°48'
	Luas Wilayah		10,77 km ²
	Daratan Sumatera		8,89 km ² (82,56%)
	Daratan Kepulauan		1,88 km ² (17,44%)
	Batas Wilayah		
	Sebelah Utara		Kabupaten Tapanuli Tengah
	Sebelah Timur		Kabupaten Tapanuli Tengah
	Sebelah Selatan		Kabupaten Tapanuli Tengah
	Sebelah Barat		Teluk Tapan Nauli
SIBOLGA UTARA	Letak	LU	010 42"-010 44"
		BT	980 46" - 980 48"
	Letak Di atas Permukaan Laut		0 – 54 m
	Luas Wilayah		333,33 ha
	Batas Wilayah		

Daerah	Uraian		Keterangan
	Sebelah Utara		Kabupaten Tapanuli Tengah
	Sebelah Selatan		Sungai Aek Doras dan Kecamatan Sibolga Kota
	Sebelah Barat		Teluk Tapan Nauli
	Sebelah Timur		Kabupaten Tapanuli Tengah
	Jarak Kantor Camat ke Kantor Walikota		0,30 km
SIBOLGA KOTA	Letak	LU	010 42"-010 44"
		BT	980 45" - 980 47"
	Letak Di atas Permukaan Laut		0 - 8 m
	Luas Wilayah		273,23 ha
	Batas Wilayah		
	Sebelah Utara		Kecamatan Sibolga Utara
	Sebelah Selatan		Kecamatan Sibolga Sambas
	Sebelah Barat		Kecamatan Sibolga Utara
	Sebelah Timur		Kabupaten Tapanuli Tengah
	Jarak Kantor Camat ke Kantor Walikota		0,60 km
	Letak	LU	01°43'- 01°44'
		BT	98°47'- 98°48'
SIBOLGA SELATAN	Letak Di atas Permukaan Laut		0 - 29 m
	Luas Wilayah		313,85 ha
	Batas Wilayah		
	Sebelah Utara		Kabupaten Tapanuli Tengah
	Sebelah Selatan		Teluk Tapan Nauli
	Sebelah Barat		Kecamatan Sibolga Sambas
	Sebelah Timur		Kabupaten Tapanuli Tengah
	Jarak Kantor Camat ke Kantor Walikota		3,4 km
	Letak	LU	01°43'- 01°44'
		BT	98°46'- 98°47'
	Letak Di atas Permukaan Laut		0 - 13 m
	Luas Wilayah		156,59 ha
SIBOLGA SAMBAS	Batas Wilayah		
	Sebelah Utara		Kecamatan Sibolga Utara
	Sebelah Selatan		Teluk Tapan Nauli
	Sebelah Barat		Kecamatan Sibolga Kota
	Sebelah Timur		Kecamatan Sibolga Selatan

Daerah	Uraian	Keterangan
	Jarak Kantor Camat ke Kantor Walikota	1,0 km

Sumber: BPN Kota Sibolga

Peta Wilayah Administrasi Kota Sibolga dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2. 1 Peta Wilayah administrasi Kota Sibolga



Sumber: Citra Satelit

2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

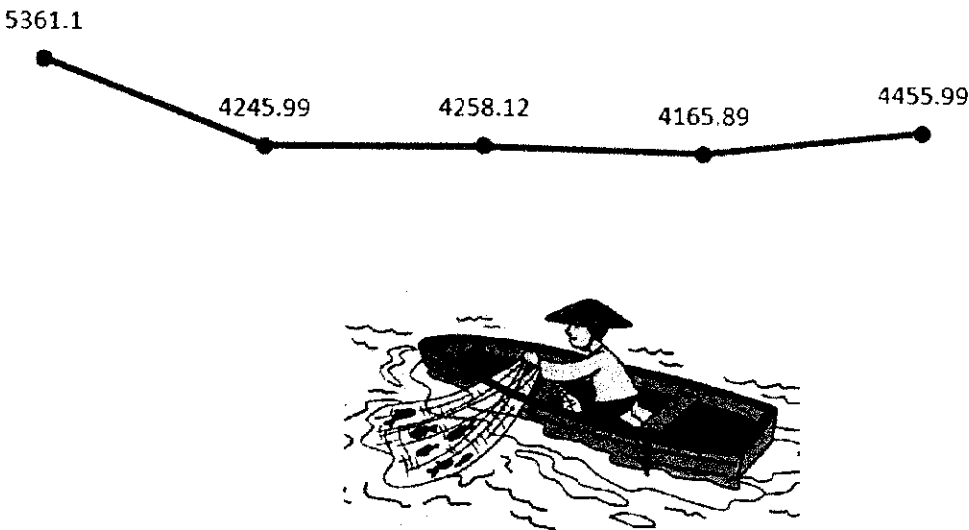
Kota Sibolga, dengan julukan "Kota Ikan", memberikan kontribusi signifikan terhadap wilayah sekitarnya, terutama dalam sektor perikanan dan ekonomi. Letak strategisnya di pesisir pantai barat Sumatera memungkinkan hasil perikanan yang melimpah dan menjadi primadona di daerah tersebut.

Berikut adalah beberapa kontribusi utama Kota Sibolga terhadap wilayah sekitarnya:

a. Potensi Perikanan dan Kelautan

Kota Sibolga dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Pulau Sumatera. Perikanan laut menjadi sektor utama yang mendukung perekonomian Kota Sibolga, dengan nelayan yang menangkap ikan di perairan Teluk Tapani Nauli, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Nias, Aceh Selatan, hingga perairan Sumatera Barat dan Bengkulu. Berbagai jenis hasil pengolahan perikanan yang diproduksi di Kota Sibolga mempunyai nilai ekonomis tinggi yaitu ikan teri, ikan asin, lobster, kepiting, rajungan, cumi-cumi, ikan tenggiri dan tepung ikan.

Grafik 2. 1 Produksi perikanan dan kelautan kota Sibolga tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS

Perkembangan produksi jumlah perikanan dan kelautan di Kota Sibolga pada tahun 2020 sebesar 5.361,10 ton. Sedangkan pada tahun 2021 menjadi 4.245,99 ton. Produksi perikanan pada tahun 2022 naik sebesar 4.258,12 ton. Produksi perikanan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi sebesar 4.165,89 ton. Produksi perikanan pada tahun 2024

naik menjadi 4.455,99 ton. Dari data ini bisa kita lihat bahwa ada kecenderungan tren kenaikan di tahun 2024. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya peningkatan sarana dan prasarana produksi, pemanfaatan teknologi tepat guna serta pendampingan dan pemberdayaan masyarakat perikanan. Pemerintah Kota Sibolga akan terus berupaya untuk meningkatkan produksi melalui program yang mendukung terhadap pencapaian terhadap produksi tersebut diantaranya 1) pengelolaan perikanan tangkap; 2) Pengelolaan perikanan budidaya; 3) Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; 4) Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

b. Potensi Pariwisata

Potensi pariwisata di Kota Sibolga telah didukung berbagai sarana dan prasarana fasilitas umum penunjang kepariwisataan yang terus dibenahi dan dikembangkan, sehingga memberikan daya tarik dan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Sibolga serta mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat dan Pendapat Asli Daerah (PAD) di Kota Sibolga. Sesuai dengan perhitungan PDRB dasar tahun 2010 pariwisata masuk dalam sektor jasa lainnya. Sektor ini meliputi kegiatan jasa hiburan, kesenian dan kreatifitas dan rekreasi lainnya. Kontribusi sektor ini pada laju pertumbuhan ekonomi PDRB Kota Sibolga sebesar 2,69%.

2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem secara operasional dilakukan dengan menggunakan pendekatan keruangan yaitu menyusun peta daya dukung dan daya tampung lingkungan

hidup jasa ekosistem sebanyak jenis jasa ekosistem yang dikaji (20 jasa ekosistem). Sesuai pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 tentang Norma Standar Prosedur dan kriteria Pengendalian Pembangunan Ekoregion pada pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion, menyebutkan bahwa Ruang lingkup inventarisasi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup terdiri dari:

- a. Daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup wilayah pulau dan kepulauan;
- b. Daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup sektor; dan/atau
- c. Daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup subyek lainnya seperti daerah aliran sungai, karst, pesisir dan laut, danau, Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Ekonomi Khusus, serta subyek ekosistem esensial lainnya.

Daya dukung dan daya tampung sumberdaya alam dan lingkungan hidup disusun berdasarkan:

- a. Pendekatan kemampuan kapasitas dan ketersediaan sumber daya alam;
- b. Pendekatan kemampuan kapasitas biologi wilayah untuk memproduksi sumber daya dan menyerap limbahnya;
- c. Pendekatan kemampuan layanan jasa ekosistem, meliputi jasa penyedia, jasa pengatur, jasa pendukung dan jasa budaya; dan/atau
- d. Pendekatan lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan

Daya dukung pangan secara keseluruhan Kota Sibolga Telah Terlampaui, dengan kondisi defisit sebesar 37.978.299.000 Kkal/Tahun. Kondisi daya dukung pangan terlampaui tersebut terdapat di seluruh kecamatan. Dengan memperhitungkan penambahan jumlah penduduk dan

perubahan guna lahan, ketersediaan/suplai kalori pangan berdasarkan jumlah komoditi pangan dan hewani penghasil kalori pangan di Kota Sibolga surplus sejak tahun 2025 sebesar 143,79 Milyar kkal/tahun (belum terlampaui) dan pada tahun 2045 tetap surplus sebesar 1.355,34 milyar Kkal/tahun.

Jika hanya mempertimbangkan suplai air dari limpasan air hujan, maka status daya dukung penyediaan seluruh Kota Sibolga sudah terlampaui dengan defisit sebesar 7.371.077,35 m³/tahun, tetapi ada 3 kecamatan yang daya dukung airnya belum terlampaui, yaitu Kecamatan Sibolga Utara, Kecamatan Sibolga Kota, dan Kecamatan Sibolga Selatan. Defisit/terlampaui terdapat di Kecamatan Sambas, dimana kebutuhan air yang besar untuk penggunaan lahan Kawasan Pelabuhan. Dengan menggunakan pasokan air sungai sebesar 12.109.824 m³/tahun maka daya dukung air pada Kota Sibolga belum terlampaui dengan surplus 4.738.746,65 m³/tahun. Dari penghitungan proyeksi daya dukung penyediaan air di atas, diperlihatkan bahwa kondisi daya dukung penyediaan air di Kota Sibolga Belum Terlampaui mulai tahun 2025 hingga tahun 2045. Pada tahun 2025 surplus sebesar 2.277.885,72 m³./tahun dengan surplus yang menurun pada tahun 2045 menjadi 2.234.711,05 m³/tahun.

a. Penggunaan Lahan

Kota Sibolga memiliki berbagai penggunaan lahan, penggunaan lahan dapat digunakan dalam berbagai jenis analisis daya dukung daya tampung lingkungan hidup. Data pola ruang eksisting Kota Sibolga didapatkan dari rencana tata ruang wilayah Kota Sibolga tahun 2017 – 2037. Berikut tabel pola ruang eksisting

1. Rencana pola ruang wilayah kota terdiri atas :
 - a. Kawasan lindung
 - b. Kawasan budidaya

2. Kawasan hutan lindung seluas lebih kurang 224,98 Ha meliputi :
 - a. Pulau poncan ketek di Kecamatan Sibolga Kota seluas lebih kurang 4,64 Ha;
 - b. Pulau poncan gadang di Kecamatan Sibolga Kota seluas lebih kurang 91,18 Ha;
 - c. Pulau panjang dan pulau babi di Kecamatan Sibolga Utara seluas lebih kurang 51,89 Ha;
 - d. Pulau sarudik di Kecamatan Sibolga Sambas seluas lebih kurang 10,81 Ha;
 - e. Kawasan hutan lindung di Kota Sibolga yang tersebar dibeberapa kecamatan dengan luas lebih kurang 66,47 Ha
3. Kawasan perlindungan setempat seluas kurang lebih 40,92 Ha meliputi :
 - a. Kawasan sempadan sungai seluas 3,43 Ha;
 - b. Kawasan sempadan pantai seluas 8,23 Ha;
 - c. Kawasan sempadan Jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) seluas 29,26Ha.
4. RTH Kota seluas kurang lebih 236,72 hektar atau 35,68 % dari luas wilayah terbangun, yang meliputi :
 - a. Kawasan RTH Publik seluas kurang lebih 136,43 hektar atau sebesar 20,56 % dari luas kawasan terbangun;
 - b. Kawasan RTH Privat seluas kurang lebih 100,29 hektar atau sebesar 15,12 % dari luas kawasan terbangun.
5. Rencana kawasan peruntukan perumahan mencakup seluas 235,07 Ha, meliputi :
 - a. Perumahan kepadatan tinggi seluas kurang lebih 76,99 Ha;
 - b. Perumahan kepadatan sedang seluas kurang lebih 122,65 Ha;
 - c. Perumahan kepadatan rendah seluas kurang lebih 35,43 Ha

b. Daya dukung dan daya tampung

Daya dukung lingkungan adalah kemampuan suatu lingkungan atau bumi untuk mendukung kehidupan makhluk hidup di atasnya, mencakup aspek ekonomi, lingkungan, budaya, dan demografi, dalam hal ini daya dukung memiliki batas maksimal dalam mendukung kebutuhan makhluk hidup. Konsep utama dari daya dukung adalah perbandingan antara ketersediaan (supply) dan kebutuhan (demand). Hal ini sangat penting untuk dikaji karena ketersediaan (supply) jumlahnya terbatas dan kebutuhan (demand) jumlahnya terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada perencanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga, mengakomodir Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang memuat substansi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Jasa Ekosistem. Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) digambarkan melalui perbandingan antara jumlah sumber daya yang dapat dikelola terhadap jumlah konsumsi penduduk (Cloud dalam Soerjani, dkk., 1987). Perbandingan ini menunjukkan bahwa daya dukung lingkungan berbanding lurus terhadap jumlah sumber daya lingkungan dan berbanding terbalik dengan jumlah konsumsi penduduk. Status Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) diperoleh dari pendekatan kuantitatif melalui perhitungan selisih dan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan untuk masing-masing jasa ekosistem (Norvyani, 2016). antara lain daya dukung lahan pangan, daya dukung lahan dan daya dukung air. Ketiga daya dukung tersebut mengukur bagaimana kebutuhan atas dasar pangan, lahan dan kebutuhan air berdasarkan pada standar kebutuhan tertentu.

1. Daya Dukung Penyediaan Air

Sumber daya air yang tersedia di suatu wilayah dapat berupa sumber air tanah dan air permukaan. Ketersediaan

air tanah yang dimiliki suatu wilayah adalah air tanah pada akuifer bebas dengan jumlah sebesar kemampuan lahan pada wilayah tersebut menyerap air hujan. Untuk menjaga kelestarian sumberdaya air, air tanah dalam yang merupakan air pada akuifer tertekan tidak diperhitungkan dalam penghitungan ketersediaan air, karena air tanah dalam dikategorikan sebagai non-renewable resources (sumberdaya tidak terbarukan). Sementara sumber air permukaan dapat bersumber dari air sungai, air danau, situ, bendungan yang ada di wilayah tersebut dan atau dipasok/dialirkan dari luar wilayah.

Daya dukung air ditinjau dari ketersediaan air (supply air) dan kebutuhan air (demand air) terdapat dihitung melalui ketersediaan air dengan pendekatan limpasan air dan potensi mata air yang dibandingkan dengan kebutuhan air dari total kebutuhan air domestik dan non domestik. Melalui perhitungan berikut:

$DDA = SA - DA$ dimana : DDA adalah Daya Dukung Air, SA Ketersediaan Air, dan DA adalah Kebutuhan Air.

a. Ketersediaan Air

Potensi jasa penyediaan air bersih bagi Kota Sibolga dapat terbagi atas: air permukaan maupun air tanah. Karena tidak diperoleh data air tanah, daya dukung penyediaan air permukaan di wilayah Kota Sibolga dihitung dari limpasan air hujan.

Penghitungan debit air limpasan akan menggunakan Metoda Rasional. Penghitungan limpasan air hujan menggunakan metoda rasional. Debit limpasan yang dimaksud adalah debit limpasan air hujan dan debit limpasan domestik. Debit limpasan air hujan mempertimbangkan beberapa parameter, yaitu : koefisien limpasan, intensitas hujan, dan luas area tangkap. Koefisien limpasan merupakan penjumlahan pembobotan dari parameter permukaan. Perhitungan debit rencana menggunakan rumus berikut :

$SA = 10 \times C \times I \times A$ dimana : SA = ketersediaan air (m³/tahun)
 C = koefisien pengaliran/limpasan air tertimbang I = intensitas curah hujan (mm/tahun) A = luas daerah tangkapan hujan (Ha) Koefisien limpasan air tertimbang (C) merupakan koefisien laju run off surface yang dipengaruhi oleh jenis tutupan lahan. Perhitungan koefisien limpasan air tertimbang (I) menggunakan rumus berikut:

$$C = \frac{\sum(C_i \times A_i)}{\sum A_i}$$

Tabel 2. 2 Koefisien Limpasan Air Permukaan Kota Sibolga

No	Deskripsi Tutupan Lahan	Nilai Ci
1	Hutan Tropis	< 0,03
2	Hutan Produksi	0,05
3	Semak Belukar	0,07
4	Persawahan	0,15
5	Pertanian, Perkebunan	0,4
6	Permukiman	0,7
7	Jalan Aspal	0,95
8	Bangunan Padat	0,7 – 0,9
9	Bangunan Terpencar	0,3 – 0,7
10	Atap Rumah	0,7 – 0,9
11	Jalan Tanah	0,13 – 0,5
12	Lapis keras kerikil batu pecah	0,35 – 0,7
13	Lapir keras beton	0,7 – 0,9
14	Taman, Halaman	0,05 – 0,25
15	Tanah Lapang	0,1 – 0,3
16	Kebun Lalang	0 – 0,2

Tabel 2. 3 Limpasan Air Permukaan Kota Sibolga

Penutup Lahan	Luas (Ha)	Koef.	A*Koef.
Bangunan non-permukiman lain	0,73656	0,5	0,3683
Bangunan permukiman desa	11,2362	0,5	5,6181
Bangunan permukiman kota	393,717	0,5	196,86
Hutan lahan rendah primer kerapatan tinggi	114,567	0,03	3,437
Hutan lahan rendah sekunder kerapatan sedang	267,926	0,04	10,717
Hutan lahan tinggi sekunder kerapatan	6,38805	0,04	0,2555
Penutup Lahan	Luas (Ha)	Koef.	A*Koef.
sedang			
Kaw. Pelabuhan	5,6152	0,5	2,8076
Kebun campuran	8,86432	0,4	3,5457
Ladang/tegalan dengan palawija	0,1609	0,3	0,0483
Lahan terbuka lain	14,3195	0,3	4,2958
Semak	32,1486	0,07	2,2504
Semak belukar	180,121	0,07	12,609
Sungai	1,53109	0,05	0,0766
Tubuh air lain	2,02156	0,05	0,1011
Total	1039,35	0,2338	242,99
Sedia Air Limpasan (m3/tahun) (10*Koef. Tertimbang*Curah Hujan*Total Luas) Curah Hujan = 3.850 mm/tahun	9.355.060,85		
Air Baku Sungai (m3/tahun) Air Sungai = 0,48 m3/detik	15.137.280,00		
Pasokan Air Total (m3/tahun) (Air Limpasan + Air Baku Sungai)	24.492.340,85		

Debit limpasan air hujan ditentukan koefisien limpasan air hujan yang berbeda untuk setiap tipe tutupan lahan. Secara keseluruhan penutup lahan di Kota Sibolga, koefisien limpasan air permukaan tertimbang sebesar 0,233788. Ketersediaan air (limpasan air permukaan) per tahun di wilayah Kota Sibolga, sebesar 9.355.060,85 m3/tahun, yang terbesar pada Kecamatan Sibolga Selatan dan paling sedikit di Kecamatan Sibolga Sambas. Dengan debit Sungai yang dikelola oleh PDAM Tirtanauli sebesar 0,48 m3/detik, sehingga ketersediaan air bersih di Kota Sibolga sebesar 24.492.340,85 m3/tahun.

Tabel 2. 4 Ketersediaan Air Limpasan Per Kecamatan Sibolga

Kecamatan	Ketersediaan Air Limpasan (m3/tahun)
Sibolga Kota	2.141.370,41
Sibolga Sambas	1.502.086,09
Sibolga Selatan	3.067.104,21
Sibolga Utara	2.644.500,14
Kota Sibolga	9.355.060,85

b. Kebutuhan Air

Berdasarkan Buku Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah (Kemen LHK, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor PDLKWS, 2019), menjelaskan bahwa standar kebutuhan air hidup layak bagi rumah tangga (domestik) dan non domestik disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 5 Standar Kebutuhan Air Domestik dan Non Domestik

No	Jenis Kebutuhan Air	Debit
1	Rumah Tangga	86,4 m3/kapita/tahun
2	Sawah Irigasi	10.368 m3/ha/tahun
3	Sawah Tadah Hujan	5.184 m3/ha/tahun
4	Sawah Pasang Surut	5.184 m3/ha/tahun
5	Ladang	7.776 m3/ha/tahun
6	Perkebunan	11.664 m3/ha/tahun
7	Kebun Campuran	7.776 m3/ha/tahun
8	Tanaman Campuran	7.776 m3/ha/tahun
9	Lahan terbangun	5 m3/ha/hari
		30 % kebutuhan domestik
10	Kawasan Industri	0,4 liter/ha/detik
12	Bandar Udara	10 liter/ha/detik
13	Pelabuhan Laut	50 liter/ha/detik

Kebutuhan air dengan penjumlahan kebutuhan domestik dan kebutuhan non domestik, $DA = DAd + DAnd$ Keterangan : DAd : kebutuhan air domestik (m3 /tahun) $DAnd$: kebutuhan air non domestik (m3 /tahun).

Tabel 2. 6 Kebutuhan Air Bersih Guna Lahan Wilayah Kota Sibolga 2022

Kecamatan	Kebutuhan Air GL (m3/tahun)		
Sibolga Selatan	309.766,14		
Sibolga Utara	210.650,67		
Kota Sibolga	9.664.607,11		

Penggunaan Lahan	Luas	D	Kebutuhan Air
Bangunan non-permukiman lain	0,73656	1.825,00	1.344,22
Bangunan permukiman desa	11,2362	1.825,00	20.506,03
Bangunan permukiman kota	393,717	1.825,00	718.534,15
Hutan lahan rendah primer kerapatan tinggi	114,567		0,00
Hutan lahan rendah sekunder kerapatan sedang	267,926		0,00
Hutan lahan tinggi sekunder kerapatan sedang	6,38805		0,00
Kaw. Pelabuhan	5,6152	1.576.800,00	8.854.042,63
Kebun campuran	8,86432	7.776,00	68.928,95
Ladang/tegalan dengan palawija	0,1609	7.776,00	1.251,12
Lahan terbuka lain	14,3195	0,00	0,00
Semak	32,1486	0,00	0,00
Semak belukar	180,121	0,00	0,00
Sungai	1,53109	0,00	0,00
Tubuh air lain	2,02156	0	0,00
Total	1.039,35		9.664.607,11

Tabel 2. 7 Kebutuhan Air Bersih Guna Lahan Per Kecamatan Wilayah Kota Sibolga Pada Tahun 2022

Kecamatan	Kebutuhan Air GL (m3/tahun)
Sibolga Kota	177.040,69
Sibolga Sambas	8.967.149,61

Dengan data jumlah penduduk tahun 2022 yang dijelaskan sebelumnya, kebutuhan air dihitung dengan mengalikan jumlah penduduk dan kebutuhan rumah tangga 86,4 m3/tahun/kapita. Kebutuhan air penjumlahan kebutuhan domestik dan kebutuhan non domestik, dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 8 Kebutuhan Air Bersih Kota Sibolga Pada Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Air Domestik	Kebutuhan Air GL	Total
Sibolga Kota	16.587	1.433.116,80	177.040,69	1.610.157,49
Sibolga Sambas	22.236	1.921.190,40	8.967.149,61	10.888.340,01
Sibolga Selatan	35.169	3.038.601,60	309.766,14	3.348.367,74
Sibolga Utara	22.455	1.940.112,00	210.650,67	2.150.762,67
Kota Sibolga	96.447	8.333.020,80	9.664.607,11	17.997.627,91

Kebutuhan air bersih berdasarkan jumlah penduduk dan distribusi guna lahan membutuhkan air mencapai 17.997.627,91 m3/tahun, terbesar di Kecamatan Sibolga Sambas.

c. Daya Dukung Penyediaan Air Bersih

Berdasarkan suplai air dari limpasan air hujan, daya dukung penyediaan air bersih bagi Kota Sibolga Telah Terlampaui dengan total defisit 8.642.567,05 m3/tahun. Dengan kondisi terlampaui pada Kecamatan Sibolga Sambas dan Kecamatan Sibolga Selatan. Namun, apabila memperhitungkan ketersediaan air sungai maka status daya dukung menjadi Belum Terlampaui dengan surplus sebesar 6.494.712,95 m3.

Tabel 2. 9 Daya Dukung Penyediaan Air Kota Sibolga Tahun 2022

Kecamatan	Ketersediaan Air Limpasan	Kebutuhan Air	Surplus/Defisit	Daya Dukung
Sibolga Kota	2.141.370,41	1.610.157,49	531.212,92	BELUM TERLAMPAUI
Sibolga Sambas	1.502.086,09	10.888.340,01	-9.386.253,91	TERLAMPAUI
Sibolga Selatan	3.067.104,21	3.348.367,74	-281.263,53	TERLAMPAUI
Sibolga Utara	2.644.500,14	2.150.762,67	493.737,47	BELUM TERLAMPAUI
Kota Sibolga	9.355.060,85	17.997.627,91	-8.642.567,05	TERLAMPAUI

d. Proyeksi Penyediaan Air Bersih

Untuk proyeksi daya dukung air bersih tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan peningkatan kebutuhan air domestik akibat pertumbuhan penduduk juga mempertimbangkan proyeksi perubahan lahan, karena itu berikut perubahan penggunaan lahan tahun 2022 menjadi

penggunaan lahan tahun 2045 berdasarkan peruntukan lahan.

Tabel 2. 10 Proyeksi Perubahan Guna Lahan dan Jumlah Penduduk 2025-2029

Penggunaan Lahan	2022	2045		2025	2026	2027	2028	2029
Bangunan Permukiman	405,69	363,03	-1,85	400,13	398,27	396,42	394,56	392,71
Kaw. Pelabuhan	5,62	5,62	0,00	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62
Hutan	388,88	202,27	-8,11	364,54	356,43	348,31	340,20	332,09
Pertanian	9,03	385,52	16,37	58,13	74,50	90,87	107,24	123,61
Terbuka	226,59	78,70	-6,43	207,30	200,87	194,44	188,01	181,58
Badan Air	3,55	4,22	0,03	3,64	3,67	3,70	3,73	3,76
Total	1.039,35	1.039,35		1.039,35	1.039,35	1.039,35	1.039,35	1.039,35
Jumlah Penduduk	96.447			96.486	96.499	96.512	96.524	96.537

Tabel 2. 11 Proyeksi Daya Dukung Penyediaan Air Bersih di Kota Sibolga Tahun 2025-2029

Penggunaan Lahan	2025		2026		2027		2028		2029	
	Ketersediaan	Kebutuhan	Ketersediaan	Kebutuhan	Ketersediaan	Kebutuhan	Ketersediaan	Kebutuhan	Ketersediaan	Kebutuhan
Bangunan Permukiman		730.730,15		726.845,40		723.460,65		720.075,90		716.691,15
Kaw. Pelabuhan		8.854.042,63		8.854.042,63		8.854.042,63		8.854.042,63		8.854.042,63
Hutan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Lahan Pertanian		452.039,18		579.325,55		706.611,92		833.898,29		961.184,66
Lahan Terbuka		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Badan Air		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ketersediaan	24.492.340,25		24.492.340,25		24.492.340,25		24.492.340,25		24.492.340,25	
Kebutuhan GL		10.036.311,96		10.160.213,58		10.284.115,20		10.408.016,82		10.531.918,44
Kebutuhan Domestik		8.336.390,40		8.337.513,60		8.338.636,80		8.339.673,60		8.340.796,80
Kebutuhan Air Total		18.372.702,36		18.497.727,18		18.622.752,00		18.747.690,42		18.872.715,24
Surplus Air	6.119.638,49		5.994.613,07		5.869.588,05		5.744.600,63		5.619.625,61	
Daya Dukung	Daya Terpenuhi		Daya Terpenuhi		Daya Terpenuhi		Daya Terpenuhi		Daya Terpenuhi	

Dengan mengasumsikan ketersediaan air yang konstan, kondisi daya dukung penyediaan air di Kota Sibolga Belum Terlampaui hingga tahun 2029. Terdapat surplus sebesar 6.119.638,49 m3 pada tahun 2025, dan menurun surplusnya pada tahun 2029 menjadi 5.619.625,61 m3. Penurunan surplus terjadi karena perluasan lahan pertanian.

2. Daya Dukung Penyediaan Pangan

Daya Dukung Pangan Tahun 2022

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya serta keseimbangan antar keduanya. Manusia membutuhkan kalori untuk menjalankan aktivitasnya. Kalori/energi tersebut didapatkan dari bahan-bahan pangan. Kebutuhan pangan tersebut disediakan oleh sumber daya alam Kota Sibolga berupa pangan hewani dari daging ternak dan hasil perikanan yang menghasilkan kalori. Perhitungan kalori dilakukan dengan

menggunakan satuan kalori per 100 gram sesuai informasi yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan pada Tabel Komposisi Pangan Indonesia 2017. Sumber kalori pangan terdiri dari berbagai komoditi hewani berupa daging ternak dan unggas, dan ikan.

Tabel 2. 12 Produksi Pangan dan Kalori Kota Sibolga Tahun 2022

	Sapi Potong	Kerbau	Kambing	Babi	Ayam Pedaging	Itik
<i>kkal/100 gr</i>	273	79	149	453	298	321
Sibolga Utara	0,65	5,59	0,01	0,00	0,00	
Sibolga Kota	1,79	10,16	1,74	71,12	432,28	1,20
Sibolga Selatan	10,58	192,78	0,16	0,00	181,75	
Sibolga Sambas	0,16	6,27	0,05	0,00	35,18	
Kota Sibolga	13,18	214,80	1,96	71,12	649,21	
	Sapi Potong	Kerbau	Kambing	Babi	Ayam Pedaging	Itik
<i>kkal/100 gr</i>	273	79	149	453	298	321
Sibolga Utara	1.774.500,00	4.416.100,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00
Sibolga Kota	4.886.700,00	8.026.400,00	2.592.600,00	322.173.600,00	1.288.194.400,00	3.852.000,00
Sibolga Selatan	28.883.400,00	152.296.200,00	238.400,00	0,00	541.615.000,00	0,00
Sibolga Sambas	436.800,00	4.953.300,00	74.500,00	0,00	104.836.400,00	0,00
Kota Sibolga	35.981.400,00	169.692.000,00	2.920.400,00	322.173.600,00	1.934.645.800,00	3.852.000,00

Selain produksi komoditi pangan hewani yang terdapat di setiap kecamatan, kota Sibolga juga memperoleh ketersediaan pangannya dari produksi ikan. Pada tahun 2022 dihasilkan produksi ikan sebesar 32.904,63 ton. Dengan kandungan kalori 109 kkal per 100gr, maka dihasilkan 35.866.046.700 kkal dalam satu tahun. Sehingga, total produksi penyediaan kalori di Kota Sibolga pada tahun 2022 sebesar 38.335.311.900 kkal.

Tabel 2. 13 Daya Dukung Penyediaan Kalori Kota Sibolga Tahun 2022

Kecamatan	Penyediaan Kalori	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Kalori Penduduk	Surplus/Defisit	Daya Dukung
Sibolga Utara	6.205.500,00	22.455	17.211.757.500,00	-17.205.552.000,00	TERLAMPAUI
Sibolga Kota	1.629.725.700,00	16.587	12.713.935.500,00	-11.084.209.800,00	TERLAMPAUI
Sibolga	723.033.000,00	35.169	26.957.038.500,00	-26.234.005.500,00	TERLAMPAUI
Selatan					
Sibolga Sambas	110.301.000,00	22.236	17.043.894.000,00	-16.933.593.000,00	TERLAMPAUI
Kota Sibolga	2.469.265.200,00	96.447	73.926.625.500,00	-71.457.360.300,00	TERLAMPAUI

Standar kebutuhan kalori masyarakat Indonesia adalah sebesar 2.100 kkal/hari. Jika hanya menghitung penyediaan kalori dari pangan yang dihasilkan di darat, maka kondisi Daya Dukung Penyediaan Pangan di Kota Sibolga Tahun 2022 berada dalam status Terlampaui di Seluruh Kecamatan dengan defisit sebesar 71.457.360.300,00 kkal. Namun, dengan menghitung

penyediaan kalori dari produksi ikan, maka defisit penyediaan kalori menjadi 33.122.048.400,00 kkal.

a. Proyeksi Daya Dukung Pangan

Proyeksi daya dukung penyediaan pangan dihitung dengan mempertimbangkan perubahan guna lahan. Produksi kalori pada tahun 2022 dibandingkan dengan luas lahan penyedia pangan menghasilkan produktivitas kalori per luas lahan. Lahan penyedia pangan di Kota Sibolga diproduksi di lahan pertanian untuk ternak besar, ternak kecil, dan unggas. Sementara, komoditi ikan diproduksi dari laut dan diasumsikan menghasilkan nilai produksi yang sama/konstan setiap tahunnya.

Tabel 2. 14 Proyeksi Daya Dukung Pangan Kota Sibolga Pada Tahun 2025-2029

Penggunaan Lahan	2022 (Ha)	2045 (Ha)	Perubahan/tahun	2025	2026	2027	2028	2029
Lahan Pertanian	9,03	385,52	16,37	58,13	74,50	90,87	107,24	123,61
Produksi Kalori Tahun 2022								
Lahan Pertanian	2.449.265.206,00							
Perikanan	35.866.046.700,00							
Produktivitas (Produksi Kalori/Luas Lahan)								
Lahan Pertanian	273.596.274,44			273.596.274,44	273.596.274,44	273.596.274,44	273.596.274,44	273.596.274,44
Produksi Ikan/Perikanan (kalori)				31.776.912.256,30	34.208.445.833,59	36.727.979.316,99	39.246.512.800,99	41.765.046.283,79
Lahan Perikanan				15.994.045.650,00	20.305.391.133,59	24.861.932.416,99	29.340.466.100,39	33.818.999.581,79
Perikanan				31.866.046.700,00	35.866.046.700,00	35.866.046.700,00	35.866.046.700,00	35.866.046.700,00
Proyeksi Kebutuhan (kalori)								
(Jl Penduduk x Kebutuhan Kalori)								
Jumlah Penduduk				96.486	96.499	96.512	96.524	96.537
Kebutuhan Kalori Pangan (2.100 kkal/orang/hari)				73.956.519.000,00	73.966.483.500,00	73.976.448.000,00	73.985.646.000,00	73.995.610.500,00
Surplus/Defisit (kkal)				-22.185.606.649,81	-17.717.037.666,41	-13.248.468.683,01	-8.779.133.199,61	-4.310.564.216,21
Daya Dukung				Terlampai	Terlampai	Terlampai	Terlampai	Terlampai

Ketersediaan/suplai kalori pangan berdasarkan jumlah komoditi pangan dan hewani penghasil kalori pangan di Kota Sibolga telah berstatus daya dukung pangan Sudah Terlampaui sejak tahun 2025 dengan defisit sebesar 22.185.606.649,81 kkal dan pada tahun 2029 tetap Terlampaui namun dengan defisit yang menurun menjadi 4.310.564.216,21 kkal. Penurunan defisit ini disebabkan oleh peningkatan penggunaan lahan pertanian dalam pola ruang RTRW.

3. Daya Tampung Lahan

Menghitung daya tampung berdasarkan arahan rasio tutupan lahan dengan asumsi masing-masing arahan rasio

tersebut dipenuhi maksimum, dan dengan anggapan luas lahan yang digunakan untuk permukiman hanya 50% dari luas lahan yang boleh tertutup/terbangun (30% untuk fasilitas dan 20% untuk jaringan jalan serta utilitas lainnya). Kemudian dengan asumsi 1 KK memerlukan lahan seluas 100 m². Menurut data BPS Sumatera Utara Tahun 2020, banyaknya anggota rumah tangga sebanyak 4,7 jiwa per KK. Daya tampung merupakan perbandingan antar jumlah penduduk terhadap daya tampung lahan. Untuk tahun 2022, daya tampung lahan masih berada dalam kondisi idealnya. Secara keseluruhan daya tampung lahan penduduk Kota Sibolga telah 56,50% dari kemampuan lahan ideal, paling besar di Kecamatan Sibolga Selatan dan relatif paling kecil di Kecamatan Sambas. Semakin besar persen daya tampung maka semakin tinggi/penuh lahan yang sudah dimanfaatkan, dan ketersediaan lahan untuk pengembangan lahan semakin terbatas. Sehingga harus dikembangkan kebijakan efisiensi, pengembangan permukiman vertikal, dan reklamasi.

Tabel 2. 15 Daya Tampung Lahan Penduduk Kota Sibolga Tahun 2022

Kecamatan	Kawasan Dapat Dibangun (Ha)	Kapasitas Tampung (jiwa)	Jumlah Penduduk 2022	Daya Tampung Lahan (%)
Sibolga Kota	147,63	34.693	22.455,00	64,72
Sibolga Sambas	135,12	31.753	16.587,00	52,24
Sibolga Selatan	206,92	48.626	35.169,00	72,33
Sibolga Utara	193,16	45.393	22.236,00	48,99
Kota Sibolga	682,84	160.465	96.447,00	60,10

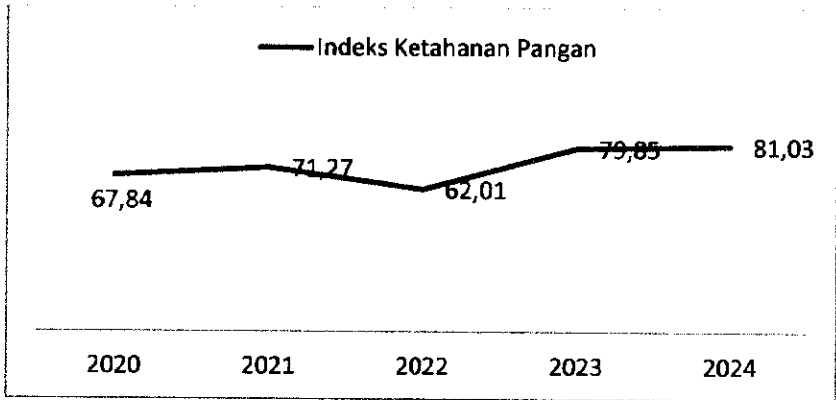
2.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

a. Indeks Ketahanan pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat ketahanan pangan suatu negara atau wilayah. Ketahanan pangan itu sendiri merujuk pada kondisi di mana semua orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan sesuai dengan preferensi mereka untuk

menjalani hidup yang aktif dan sehat. Indeks Ketahanan Pangan sering digunakan oleh organisasi internasional seperti The Economist Intelligence Unit (EIU), yang menyusun Global Food Security Index (GFSI), untuk menilai dan membandingkan ketahanan pangan antar negara. Negara-negara dengan skor tinggi di indeks ini dianggap memiliki ketahanan pangan yang lebih baik, sementara negara dengan skor rendah sering kali menghadapi tantangan dalam hal produksi pangan, akses, dan stabilitas pasokan pangan.

Grafik 2. 2 Indeks Ketahanan Pangan



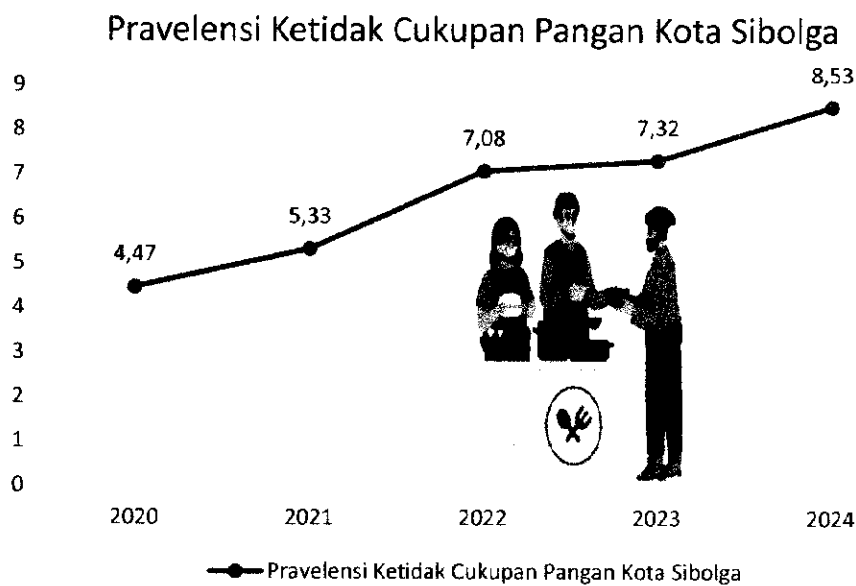
Sumber: Badan Pangan Nasional.

Kota Sibolga secara konsisten menjaga ketahanan pangan, pada periode 2022-2024 Indeks Ketahanan Pangan Kota Sibolga selalu meningkat. Peningkatan ini merupakan hasil dari kinerja Pemerintah Kota Sibolga dalam menjaga stok pangan di lumbung-lumbung yang berada di Kawasan Kota Sibolga.

b. Pravelensi Ketidak Cukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan pangan merujuk pada persentase atau proporsi penduduk yang mengalami kekurangan pangan atau tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, bergizi, dan aman untuk hidup sehat dan aktif. Ketidakcukupan pangan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari sisi akses ekonomi (ketidakmampuan membeli pangan yang cukup), distribusi pangan, maupun ketersediaan pangan yang tidak memadai.

Grafik 2. 3 Prevelensi Ketidak Cukupan Pangan Kota Sibolga



Ketidakcukupan pangan dapat terjadi pada tingkat individu, rumah tangga, atau bahkan pada tingkat negara, dan dampaknya sangat luas, mempengaruhi kesehatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Negara-negara dengan tingkat ketidakcukupan pangan yang tinggi biasanya menghadapi tantangan dalam hal kemiskinan, ketidaksetaraan ekonomi, dan masalah sosial lainnya.

c. **Konsumsi Listrik Per Kapita**

Kondisi energi di Kota Sibolga pada periode 2020–2024 didominasi oleh ketergantungan pada energi listrik yang disuplai dari sistem interkoneksi Sumatera serta pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Tabel 2. 16 Listrik Rumah Tangga Kota Sibolga 2020 s/d 2024

Variabel	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk		89.584	89.932	90.366	91.265	91.747
Listrik Rumah Tangga (VA)	450 VA per jiwa	40.312.800	40.469.400	40.664.700	41.069.250	41.286.150

Listrik	40% listrik rumah tangga	16.125.120	16.187.760	16.265.880	16.427.700	16.514.460
Total (VA)	Total	56.437.920	56.657.160	56.930.580	57.496.950	57.800.610

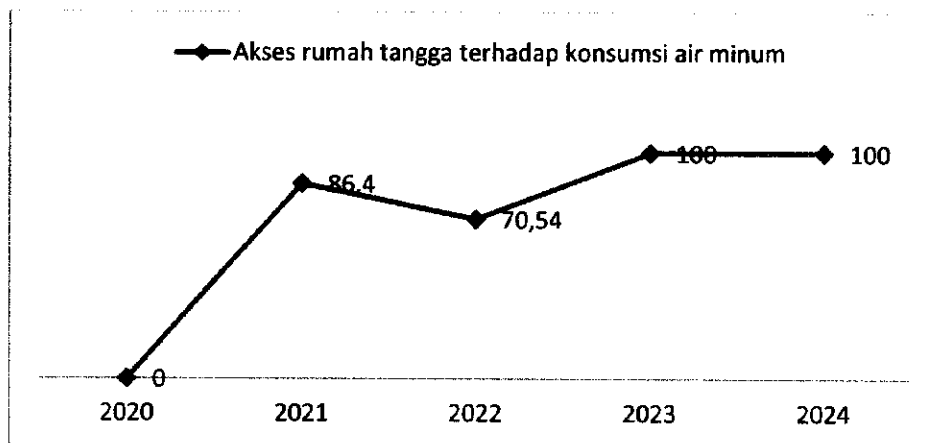
Sumber: BPS Kota Sibolga (Data Diolah)

Konsumsi listrik per kapita Kota Sibolga pada periode 2020–2024 menunjukkan tren naik secara bertahap seiring pemulihan ekonomi dan peningkatan akses listrik. Tantangan ke depan adalah meningkatkan efisiensi energi dan memperluas pemanfaatan energi terbarukan agar mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

d. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Pada tahun 2020 hingga 2024, kondisi air di Kota Sibolga menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga telah memiliki akses terhadap sumber air minum layak. Namun, akses rumah tangga terhadap air minum aman (yang memenuhi standar kualitas fisik, kimia, dan mikrobiologi) masih perlu ditingkatkan karena sebagian sumber air, terutama air tanah, rentan terhadap pencemaran di kawasan padat penduduk dan pesisir. Ketersediaan dan kualitas air minum yang aman sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia karena berperan langsung dalam menjaga kesehatan, mendukung status gizi, serta mencegah penyakit akibat air tercemar. Akses air minum yang baik juga menjadi indikator penting dalam pembangunan berkelanjutan, karena berhubungan erat dengan ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat, dan produktivitas kota. Namun Pemerintah Kota Sibolga sudah menyelesaikan permasalahan akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum.

Grafik 2. 4 Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum



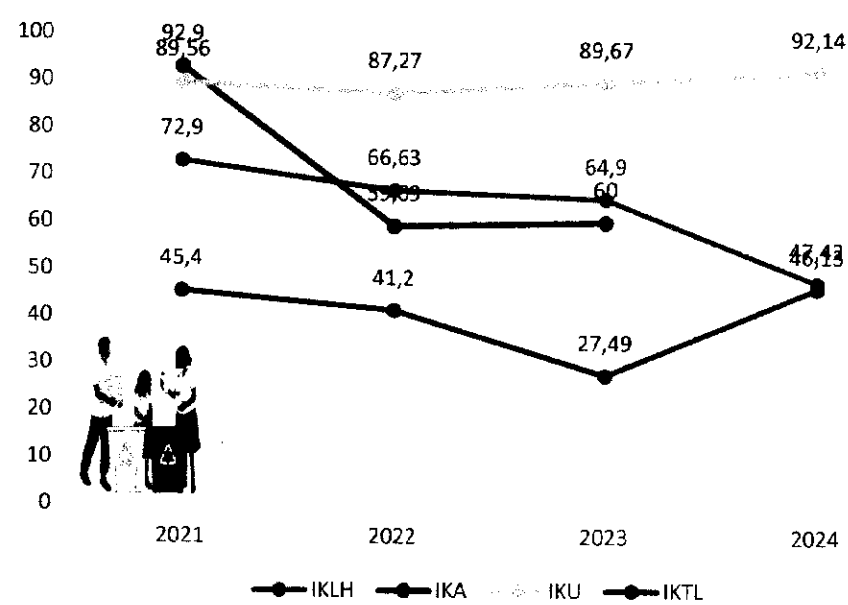
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk menilai kondisi kualitas lingkungan suatu daerah atau negara. IKLH biasanya menggabungkan berbagai indikator yang mencerminkan status kesehatan lingkungan, serta dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan tersebut. Tujuan dari indeks ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keberlanjutan lingkungan hidup dan efektivitas kebijakan dalam menjaga kualitas lingkungan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL). Merujuk pada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 - 2045, aspek lingkungan hidup menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan jangka panjang nasional maupun daerah selama 20 tahun mendatang. Oleh karena itu kinerja pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan daerah menjadi salah satu hal yang penting. Indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi salah satu indikator yang relevan terhadap

kualitas lingkungan hidup adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Grafik 2. 5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



Mengukur kualitas lingkungan hidup secara holistik memerlukan data yang komprehensif dan konsisten dari berbagai sumber, yang terkadang sulit didapatkan, terutama di daerah terpencil. Namun, dengan adanya indeks ini, pembuat kebijakan dapat merancang dan menerapkan kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi lingkungan, serta masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup. Selain indeks kualitas lingkungan hidup, capaian lingkungan hidup berkualitas di Kota Sibolga juga diukur berdasarkan indikator berikut:

Tabel 2. 17 Capaian Lingkungan Hidup Berkualitas di Kota Sibolga Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi	33,23	32,33	42,5	NA	100

Layak dan Aman					
Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	0,08	2,39	0,00	0,41	0,43
Indeks Kualitas Air		92,90	59,09	60	-
Indeks Kualitas Udara		89,56	87,27	89,67	92,14
Indeks Kualitas Tutup Lahan		45,40	41,2	27,49	46,13

Sumber: Bappeda Kota Sibolga (data diolah)

Sanitasi Aman mengacu pada rumah tangga yang memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang memadai dan aman, yang dapat mendukung kesehatan dan kesejahteraan penghuninya. Akses ini sangat penting karena sanitasi yang buruk dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti penyakit yang ditularkan melalui air (waterborne diseases) dan gangguan kesehatan lainnya. Selain itu, fasilitas persampahan terkait pengumpulan dan pengolahan sampah juga menjadi indikator yang diukur dalam capaian ini.

2.1.6 Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim di Kota Sibolga, seperti halnya wilayah lain, melibatkan upaya untuk mengurangi risiko, meningkatkan kesiapan, dan mempercepat pemulihan dari dampak negatif bencana alam dan perubahan iklim. Ini mencakup berbagai tindakan, mulai dari mitigasi struktural (seperti pembangunan infrastruktur

yang tahan bencana) hingga mitigasi non-struktural (seperti peningkatan kesadaran masyarakat dan pengembangan sistem peringatan dini).

1. Perubahan Iklim, Kelestarian Lingkungan dan Mitigasi Bencana.

Munculnya kesadaran kolektif global mengenai masalah perubahan iklim (climate change) saat ini mempengaruhi strategi pembangunan di semua negara. Wujud dari makin maraknya kesadaran kolektif global atas dampak dari fenomena perubahan iklim adalah makin mengemukanya strategi pembangunan ekonomi yang harus menempatkan kesadaran akan daya dukung lingkungan alam pada prioritas yang tinggi. Bila hal tersebut tidak dilakukan, rangkaian bencana alam akibat ulah manusia dan dampak industrialisasi akan makin sering terjadi dan dapat membahayakan umat manusia sendiri. Selain itu penurunan kualitas lingkungan memberi dampak terhadap produktivitas dan tingginya biaya produksi. Meningkatnya frekuensi kejadian berbagai jenis bencana alam dengan skala dan intensitasnya mengharuskan pemerintah menyusun rencana aksi yang sistematis dan kongkrit mulai dari pra bencana, pada saat tanggap darurat dan pada pasca terjadinya bencana (rehabilitasi-rekonstruksi). Hal ini disebabkan setiap bencana menimbulkan permasalahan kemanusiaan yang serius serta dampak sosial bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi. Bencana yang umumnya terjadi dalam waktu singkat menghancurkan hasil pembangunan yang telah dirintis dan diperjuangkan dalam waktu yang lama. Selain menimbulkan korban jiwa, bencana menghancurkan perumahan, area pertanian dan perkebunan, infrastruktur perekonomian, infrastruktur publik, komunikasi dan transportasi, instalasi pengadaan air dan energi, serta bidang-bidang penting dan strategis lainnya. Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Sibolga,

berdasarkan data yang tersedia, menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi. Kota Sibolga, termasuk dalam kategori wilayah yang rentan terhadap bencana, terutama banjir dan tanah longsor.

Tabel 2. 18 Indeks Resiko Bencana Kota Sibolga

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Resiko Bencana	0	167,20	167,20	167,20	165,92
Indeks Ketahanan Daerah	NA	NA	NA	0,28	0,33

Sementara Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan di daerah dengan mengimplementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya. Kewenangan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait dengan kebencanaan dapat dilaksanakan secara lintas sektor, melalui pelaksanaan rencana kerja masing-masing unit OPD dan penganggaran daerah yang disusun berdasarkan koordinasi Bappeda di tataran daerah. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam program kegiatan lintas sektor ini diharapkan dapat berlangsung lebih baik dengan adanya instrumen kebijakan ini. Kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang diindikasikan sebagai kawasan

yang sering terjadi bencana. Faktor rawan bencana di Kota Sibolga dipengaruhi oleh proses geologi berupa tektonik, hidrogeologi, sedimentasi dan klimatologi yang dapat menghasilkan produk kebencanaan antara lain banjir, abrasi, gerakan tanah/longsor, kekeringan dan angin puting beliung sedangkan dari faktor aktifitas manusia dampaknya akan semakin meningkat dengan pertumbuhan populasi penduduk dan perkembangan pembangunan seperti banjir bandang, kebakaran hutan, kebakaran permukiman dan kegagalan industri. Kawasan rawan bencana alam yang terdapat di Kota Sibolga yaitu: kawasan sepadan sungai yang rawan banjir dan daerah pantai yang rawan gelombang pasang dan abrasi pantai. Di wilayah Kota Sibolga, terdapat beberapa kecamatan yang merupakan kawasan rawan bencana. Potensi bencana di Kota Sibolga sangat beragam, ada bencana yang potensinya tahunan banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan ada pula yang potensinya tidak dapat ditentukan seperti gempa bumi dan tsunami. Berdasarkan inventarisasi sejarah kejadian bencana dan potensi kejadian bencana. Berdasarkan metode pengkajian risiko bencana, berikut merupakan identifikasi potensi bencana per kecamatan di Kota Sibolga.

Tabel 2. 19 Identifikasi Potensi Bencana Per Kecamatan di Kota Sibolga Tahun 2024

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	BENCANA ALAM						JUMLAH
			Banjir	Rawan Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Longsor	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tsunami	Dan Lain - lain	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Hutabarangan						3	3
		Angin Nauli			2			1	3
		Huta Tonga - tonga							0
		Sibolga Ilir			1	2		3	6
		Simare -mare			6			1	7

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	BENCANA ALAM						JUMLAH
			Banjir	Rawan Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Longsor	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tsunami	Dan Lain - lain	
		Kota Baringin						1	1
		Pasar Baru							0
		Pasar Belakang		2				2	4
		Pancuran Gerobak						1	1
		Pancuran Kerambil							0
		Pancuran Dewa			1			1	2
		Pancuran Pinang						1	1
		Pancuran Bambu							0
		Aek Habil						1	1
		Aek Manis			4				4
		Aek Muara Pinang	4		2				6
		Aek Parombunan			7	1		3	11
			4	2	23	3	0	18	50

Sumber: BPBD Kota Sibolga

Berdasarkan sejarah kejadian bencana dari BPBD Kota Sibolga tercatat setidaknya 453 kejadian bencana di Kota Sibolga selama 8 tahun terakhir. Berikut merupakan rekapitulas data jumlah kejadian bencana di Kota Sibolga selama 8 tahun terakhir :

Tabel 2. 20 Rekapitulasi Data jumlah Kejadian bencana di kota Sibolga Tahun 2016-2024

Jenis Bencana	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Banjir	1	7	7	8	0	0	0	4	4	31
Rawan Gelombang Ekstrim dan Abrasi	7	2	0	0	0	0	0	0	2	11
Longsor	35	42	27	19	9	9	9	33	23	206

Kebakaran Hutan dan Lahan	1	8	0	1	8	13	6	4	3	44
Tsunami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dan Lain - lain	14	15	5	17	13	38	10	31	18	161

Berdasarkan data dalam tabel yang menggambarkan bencana berdasarkan jenisnya dari tahun 2016 hingga 2024, terlihat bahwa bencana banjir terjadi sebanyak 31 kali, dengan frekuensi tertinggi pada tahun 2019 sebanyak 8 kali. Bencana tanah longsor tercatat terjadi sebanyak 206 kali, dengan puncaknya pada tahun 2017 sebanyak 42 kali. Kebakarn Hutan dilaporkan terjadi 44 kali, dengan puncaknya pada tahun 2021 sebanyak 13 kali, sementara bencana gelombang tinggi atau abrasi terjadi sebanyak 11 kali, dengan kejadian tertinggi pada tahun 2016 sebanyak 7 kali. Sehingga pada tahun 2019 merupakan tahun dengan frekuensi bencana banjir, dan tanah longsor yang sangat tinggi menunjukkan kondisi cuaca ekstrem yang signifikan pada tahun tersebut, Tahun 2016 juga menonjol dengan tingginya kejadian gelombang tinggi, masing-masing mengindikasikan adanya variabilitas iklim yang cukup besar sepanjang dekade tersebut.

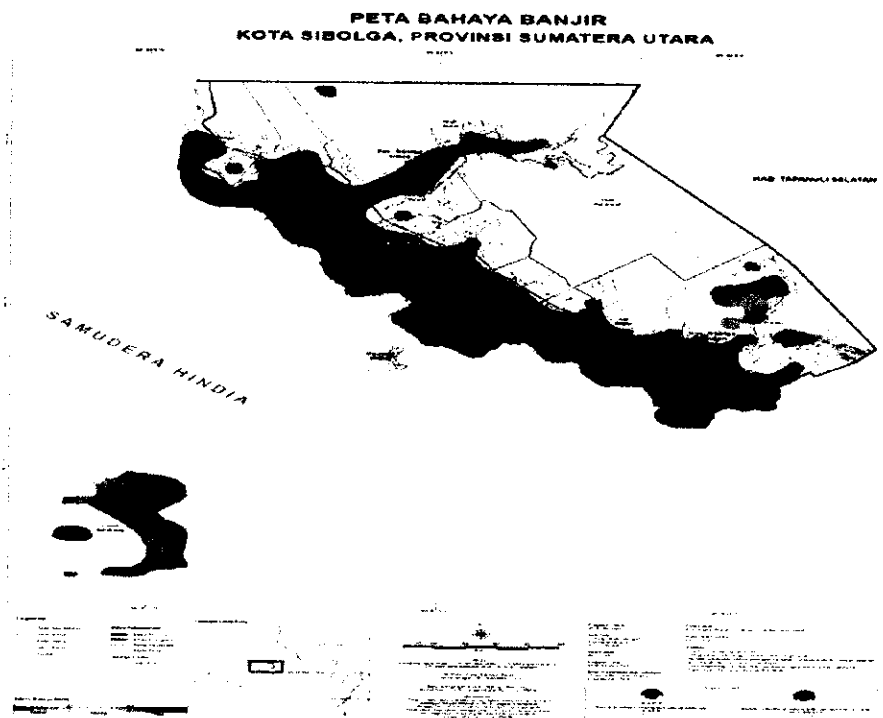
2. Wilayah Rawan Bencana Alam

Wilayah rawan bencana di Kota Sibolga terdiri dari 5 kawasan rawan bencana yaitu rawan banjir; rawan gelombang ekstrim dan abrasi; tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan serta kawasan rawan tsunami.

a. Kawasan rawan banjir

Berdasarkan peta bahaya banjir Kota Sibolga diketahui bahwa total wilayah terancam bencana banjir di Kota Sibolga adalah seluas 43.24 % (473. 04 Ha) yang meliputi wilayah Kecamatan Sibolga Utara, Sibolga Kota, Sibolga Selatan, dan Sibolga Sambas. Tersaji dalam Gambar.

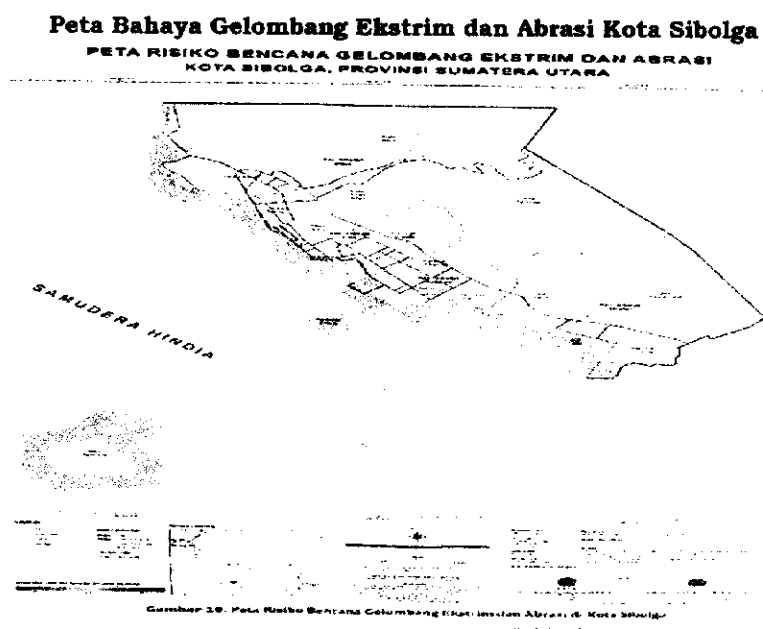
Gambar 2. 2 Peta Bahaya Banjir di Kota Sibolga.



b. Kawasan rawan gelombang ekstrim dan abrasi

Berdasarkan Peta Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kota Sibolga diketahui bahwa total wilayah terancam bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kota Sibolga adalah seluas 19,09 % (208.89 Ha) yang meliputi wilayah Kecamatan Sibolga Utara, Sibolga Kota, Sibolga Selatan dan Sibolga Sambas. Tersaji dalam Gambar.

Gambar 2. 3 Peta Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kota Sibolga

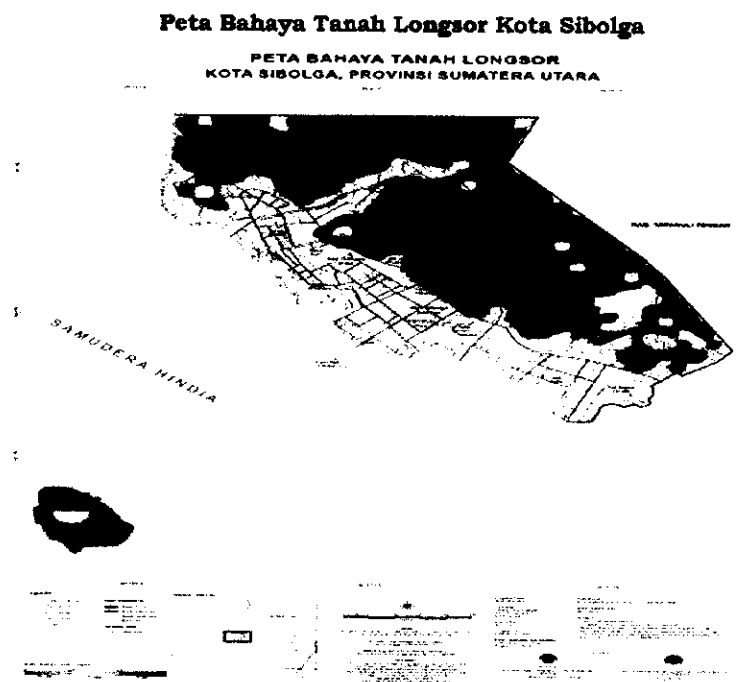


(sumber : inarisk.bnpb.co.id dan Inarisk Personal)

c. Kawasan rawan tanah longsor

Berdasarkan Peta Bahaya Tanah Longsor Kota Sibolga diketahui bahwa total wilayah terancam bencana tanah longsor di Kota Sibolga adalah seluas 55% (601.65 Ha) yang meliputi wilayah sebagian besar di Kecamatan Sibolga Utara, dan sebagian kecil di Sibolga Kota, Sibolga Selatan dan Sibolga Sambas. Tersaji dalam Gambar.

Gambar 2. 4 Peta Bahaya Tanah Longsor Kota Sibolga

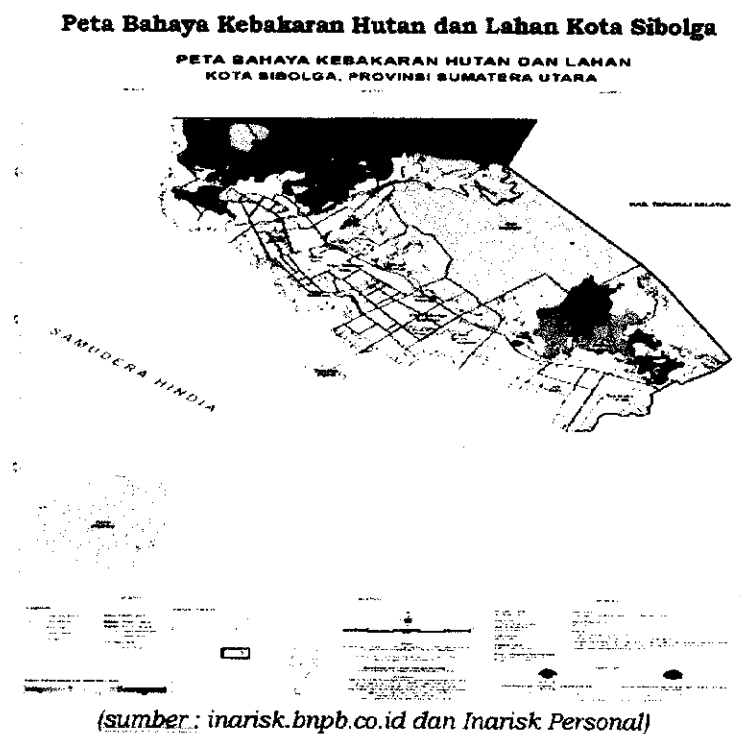


(sumber : inarisk.bnpb.co.id dan Inarisk Personal)

d. Kebakaran Hutan dan Lahan

Berdasarkan Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Sibolga diketahui bahwa total wilayah terancam bencana kebakaran hutan dan lahan di Kota Sibolga adalah seluas 57,51% (629,19 Ha) yang meliputi wilayah Kecamatan Sibolga Utara, Sibolga Kota, Sibolga Selatan dan Sibolga Sambas. Tersaji dalam Gambar.

Gambar 2. 5 Peta Bahaya Kebakaran hutan dan Lahan Kota Sibolga

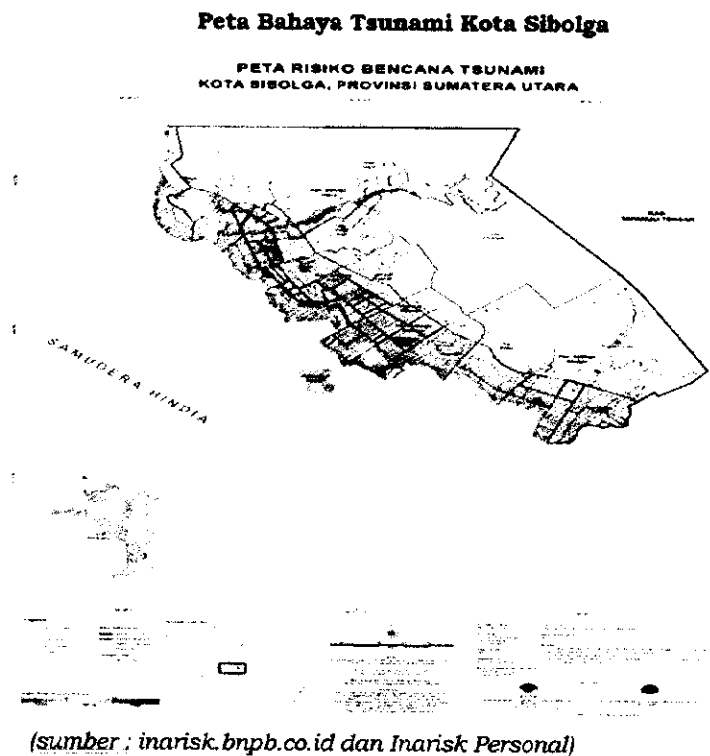


e. Kawasan Rawan *Tsunami*

Ancaman bencana *Tsunami* dapat dibagi menjadi 3 kelas indeks ancaman. Komponen dari indeks tersebut adalah peta estimasi ketinggian genangan tsunami/peta bahaya tsunami. Indeks rendah, tinggi genangan kurang dari 1 meter. Indeks sedang, tinggi genangan antara 1-3 meter. Indeks tinggi, tinggi genangan lebih dari 3 meter.

Berdasarkan Peta Bahaya *Tsunami*, Kota Sibolga diketahui bahwa total wilayah terancam bencana *Tsunami* di Kota Sibolga adalah seluas 29,53% (323,10 Ha) yang meliputi sebagian kecil wilayah Kecamatan Sibolga Utara, sebagian besar Sibolga Kota, dan sebagian kecil Sibolga Selatan dan Sibolga Sambas.

Gambar 2. 6 Peta Bahaya Tsunami Kota Sibolga



2.1.7 Demografi

Penduduk Kota Sibolga menurut Profil Kependudukan tahun 2024 sebesar 100.282 jiwa yang terdiri dari 50.556 jiwa laki-laki dan 49.726 jiwa perempuan. Penduduk terbesar berada di Kecamatan Sibolga Selatan dengan 37.266 jiwa dan terkecil berada di Kecamatan Sibolga Kota dengan 17.086 jiwa. Dengan luas wilayah 10.77 km², maka kepadatan rata-rata 9.311 jiwa/km².

1) Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan jumlah penduduk Kota Sibolga tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kevalidan dan kualitas dari database kependudukan secara nasional, seperti ketunggalan NIK, data anomali, data ganda, dan data non aktif sebagai indikator analisis sinkronisasi database secara nasional. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 2,36%.

Tabel 2. 21 Jumlah Penduduk Kota Sibolga Tahun 2020-2024 Menurut Jenis Kelamin

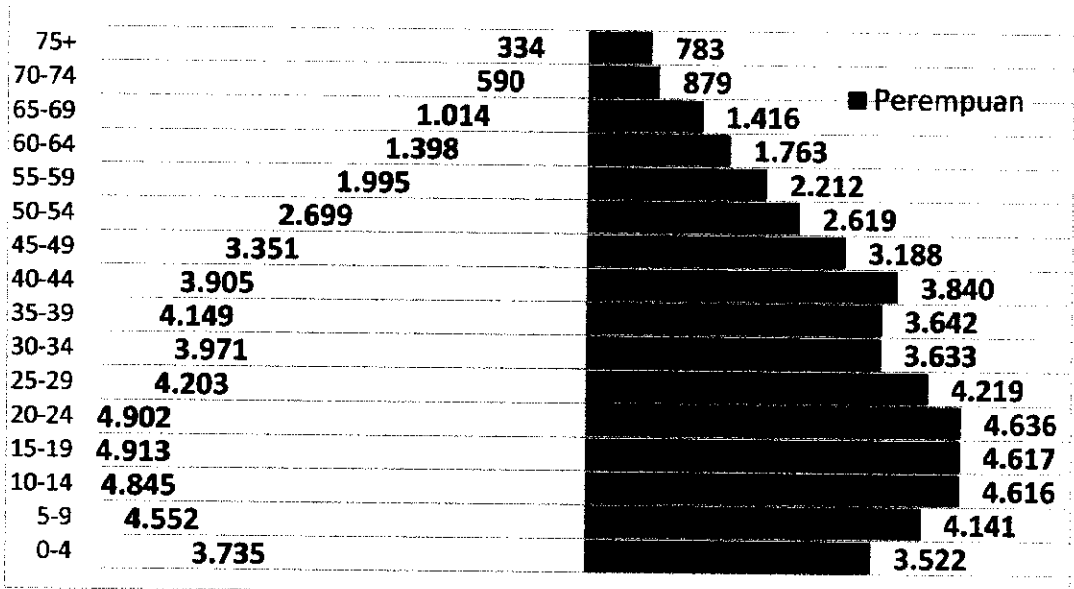
Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total
2020	47.546	47.138	94.684
2021	47.771	47.327	95.098
2022	48.447	48.000	96.447
2023	49.663	49.060	98.723
2024	50.556	49.726	100.282

Sumber: Data diolah. Profil Kependudukan 2021-2025

2) Kelompok umur dan Piramida Penduduk

Berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin penduduk Kota Sibolga tahun 2024, tampak bahwa struktur penduduk termasuk dalam konstruktif dengan piramida yang memiliki bentuk seperti guci terbalik atau sarang tawon.

Grafik 2. 6 Kelompok Umur dan Piramida Penduduk di Kota Sibolga, 2024



Sumber : Data Profil Kependudukan Kota Sibolga

Karakteristik piramida konstruktif penduduk di atas menunjukkan:

- o Jumlah kelompok umur muda sedikit
- o Menurunnya tingkat kelahiran dan kematian
- o Meningkatnya angka harapan hidup
- o Perlambatan pertumbuhan penduduk

- o Jumlah penduduk usia kerja relatif lebih besar daripada jumlah anak-anak dan orang tua

3) Net Migration Rate

Angka migrasi netto Kota Sibolga tahun 2024 mempunyai nilai positif yaitu sebesar 2.69 yang berarti dari 1000 penduduk Kota Sibolga akan terjadi migrasi masuk ke Kota Sibolga sebanyak 2 sampai 3 orang, faktor pendorong migrasi masuk adalah ekonomi yaitu menyangkut pekerjaan disusul faktor keluarga.

Tabel 2. 22 Net Migration Rate Kota Sibolga Tahun 2024

Kecamatan	Migrasi Masuk	Migrasi keluar	Net Migration Rate
Sibolga Utara	854	905	-2.20
Sibolga Kota	748	751	-0.18
Sibolga Selatan	1701	1320	10.34
Sibolga Sambas	925	983	-2.55
Jumlah	4228	4228	2.69

Sumber : Data Profil Kependudukan Kota Sibolga

Tabel 2. 23 Distribusi Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan, Jenis Kelamin dan Kecamatan Kota Sibolga Tahun 2024

Jenis Pekerjaan	WILAYAH														
	Kecamatan Sibolga Utara			Kecamatan Sibolga Kota			Kecamatan Sibolga Selatan			Kecamatan Sibolga Sambas			KOTA SIBOLGA		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Belum/Tidak Bekerja	3.396	2.936	6.332	2.394	2.288	4.682	5.424	4.667	10.291	3.239	3.011	6.250	14.453	13.102	27.555
Mengurus Rumah Tangga	0	4.102	4.102	0	3.357	3.357	0	7.156	7.156	0	4.369	4.369	0	18.984	18.984
Pelajar/Mahasiswa	2.660	2.477	5.137	1.874	1.689	3.563	4.539	4.059	8.598	2.610	2.289	4.899	11.683	10.514	22.197
Pensiunan	134	218	352	72	55	127	103	83	186	81	105	186	390	461	851
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	340	468	808	148	177	325	306	441	747	209	305	514	1.003	1.391	2.394
Tentara Nasional Indonesia (TNI)	84	0	84	48	1	49	186	0	186	30	0	30	348	1	349
Kepolisian RI (Polri)	33	1	34	68	7	75	36	0	36	52	1	53	189	9	198
Perdagangan	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	1	2	1	3
Pelani/Peketun	65	44	109	29	25	54	63	50	113	36	20	56	193	139	332
Peternak	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
Nelayan/Perikanan	727	9	736	418	2	420	2.455	0	2.455	1.463	6	1.469	5.063	17	5.080

Industri	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Konstruksi	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
Transportasi	23	0	23	4	0	4	69	0	69	38	0	38	134	0	134
Karyawan Swasta	409	161	590	339	157	496	486	197	683	280	144	424	1.514	679	2.193
Karyawan BUMN	35	19	54	32	14	45	57	19	76	24	15	39	148	67	215
Karyawan BUMD	12	4	16	8	3	11	16	7	23	17	7	24	53	21	74
Karyawan Honorier	107	92	199	48	42	90	148	126	274	69	64	133	372	324	696
Buruh Harian Lepas	1.645	272	1.917	977	127	1.044	1.998	402	2.400	901	179	1.080	5.461	980	6.441
Buruh Tani/Perkebunan	15	4	19	6	0	6	20	10	30	2	2	4	43	16	59
Buruh Nelayan/Perikanan	199	10	209	148	2	150	753	20	773	253	2	255	1.353	34	1.387
Buruh Peternakan	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	3	3
Pembantu Rumah Tangga	0	10	10	0	5	5	0	7	7	0	11	11	0	33	33
Tukang Cukur	1	0	1	4	0	4	3	0	3	8	0	8	16	0	16
Tukang Listrik	1	0	1	0	0	0	2	0	2	1	0	1	4	0	4
Tukang Batu	3	0	3	0	0	0	6	1	7	3	0	3	12	1	13
Tukang Kayu	5	0	5	1	0	1	10	0	10	2	0	2	18	0	18

Tukang Sol Sepatu	2	0	2	0	1	1	1	0	1	0	0	0	3	1	4
Tukang Las/Pandai Besi	4	0	4	2	0	2	7	0	7	1	0	1	14	0	14
Tukang Jahit	6	13	19	5	3	8	10	10	20	5	4	10	27	30	57
Penata Rias	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	8	3	3
Penata Rambut	0	3	3	0	5	5	1	1	2	1	1	2	2	10	12
Mekanik	8	0	8	7	0	7	21	0	21	7	0	7	43	0	43
Seniman	1	0	1	0	0	0	2	0	2	1	0	1	4	0	4
Imam Masjid	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
Pendeta	13	3	16	7	1	8	18	4	22	6	1	7	44	9	53
Pastor	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
Wartawan	3	0	3	2	1	3	5	0	5	0	0	0	10	1	11
Ustadz/Mubaligh	0	0	0	0	0	0	4	0	4	3	0	3	7	0	7
Promotor Acara	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Wakil Walikota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Anggota DPRD Kab./Kota	2	0	2	2	0	2	3	3	6	0	0	0	7	3	10
Dosen	6	5	11	1	1	2	6	6	12	4	7	11	17	19	36
Guru	40	99	139	29	57	86	49	175	224	32	104	136	150	435	585

Pengacara	2	1	3	1	0	1	2	0	2	0	0	0	5	1	6
Notaris	0	0	0	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	5	5
Arsitek	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Konsultan	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Dokter	4	9	13	13	17	30	4	12	16	3	7	10	24	45	69
Bidan	0	28	28	0	18	18	0	41	41	0	25	25	0	112	112
Perawat	1	13	14	4	7	11	11	26	37	3	11	14	19	57	76
Apoteker	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	3	3
Penyiar Radio	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
Pelaut	12	0	12	2	0	2	13	0	13	22	0	22	49	0	49
Sopir	134	0	134	41	0	41	106	0	106	47	0	47	328	0	328
Pedagang	54	126	180	140	109	249	130	192	322	128	95	223	452	522	974
Perangkat Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Berawan/Biarawati	2	15	17	0	35	35	0	0	0	0	1	1	2	51	53
Wiraswasta	1.392	391	1.783	1.507	451	2.058	1.857	401	2.258	1.958	354	2.352	6.814	1.637	8.451
Pekerjaan Lainnya	2	2	4	0	0	0	4	0	4	2	2	4	8	4	12
Jumlah	11.643	11.557	23.200	8.424	8.862	17.086	18.942	18.324	37.266	11.547	11.183	22.730	50.566	49.726	100.282

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Sesuai dengan tabel diatas bahwasanya Kota Sibolga berdasarkan mata pencaharian utama dapat dilihat pada tahun 2024 yaitu : 1) Wiraswasta dengan jumlah sebesar

8.541 jiwa; 2) Buruh harian lepas dengan jumlah sebesar 6.441 jiwa; 3) Nelayan/perikanan dengan jumlah sebesar 5.080 jiwa.

4) Proyeksi Penduduk

Kota Sibolga sebagai salah satu pusat perkembangan di wilayah Sumatera Utara, telah menunjukkan dinamika penduduk yang signifikan. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, total penduduk di kota ini pada tahun 2022 mencapai 96.447 jiwa. Angka ini menandai pertumbuhan populasi sebesar 1.439 jiwa dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 2021, yang tercatat sejumlah 95.008 jiwa. Perubahan ini, meskipun terbilang kecil, merefleksikan tren pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di Sibolga.

Pertumbuhan penduduk terbesar terpantau di Kecamatan Sibolga Selatan, yang populasi warganya mencapai 35.169 jiwa. Kecamatan ini, dengan jumlah penduduknya yang dominan, menjadi kawasan penting dalam perencanaan dan pengembangan kota. Selain Sibolga Selatan, terdapat juga kecamatan lain yang kontribusinya penting dalam komposisi penduduk keseluruhan. Data jumlah penduduk per kecamatan di tahun 2022 ini memberikan gambaran yang jelas tentang distribusi populasi dan area-area yang memerlukan perhatian lebih dalam perencanaan pembangunan.

Tabel 2. 24 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Sibolga 2025-2045

Tahun	2022	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	90.366	92.244	95.133	98.783	102.428	105.643

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

Menurut data BPS Sumatera Utara, jumlah penduduk Kota Sibolga pada tahun 2025, jumlah penduduk

diperkirakan akan mencapai 92.240 jiwa. Proyeksi ini menunjukkan kenaikan yang konsisten seiring dengan perkembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup. Selanjutnya, pada tahun 2030, diperkirakan akan terjadi lonjakan menjadi 95.130 jiwa, yang menandakan pertumbuhan penduduk sekitar 3,8 % dari tahun 2025. Kemudian, pada tahun 2035, jumlah ini akan meningkat lagi, mencapai angka 98.780 jiwa. Lanjut ke tahun 2040, proyeksi penduduk kota ini meningkat menjadi 102.428 jiwa, dan akhirnya pada tahun 2045, diperkirakan penduduk Kota Sibolga akan bertambah menjadi 105.643 jiwa.

Trend pertumbuhan ini menegaskan kebutuhan untuk memahami dinamika demografis dalam kerangka waktu yang panjang. Pentingnya proyeksi ini terletak pada kemampuan pemerintah dan pemangku kebijakan untuk merencanakan dan mengimplementasikan strategi pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memprediksi jumlah penduduk dan kebutuhan sarana serta prasarana yang sesuai, pemerintah dapat memastikan bahwa pertumbuhan penduduk akan diimbangi dengan peningkatan fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, dan infrastruktur lainnya. Pendekatan proaktif ini juga mendukung upaya dalam memitigasi potensi masalah seperti kepadatan penduduk, pengangguran, dan tekanan pada sumber daya alam. Dengan demikian, proyeksi penduduk menjadi komponen kritis dalam perencanaan pembangunan jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Sibolga dan memastikan keberlanjutan sumber daya untuk generasi yang akan datang.

Namun, peningkatan ini juga memberikan indikasi akan kebutuhan untuk perencanaan yang matang dalam aspek-aspek infrastruktur dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan layanan publik lainnya. Peningkatan populasi yang signifikan ini akan menuntut

peningkatan kapasitas layanan publik dan infrastruktur, serta penanganan masalah lingkungan yang mungkin timbul sebagai akibat dari tekanan demografis.

Kebijakan dan strategi pembangunan yang proaktif diperlukan untuk mengelola pertumbuhan ini agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi penduduk Kota Sibolga. Ini termasuk peningkatan investasi dalam pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, dan pengembangan kebijakan yang mendukung keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

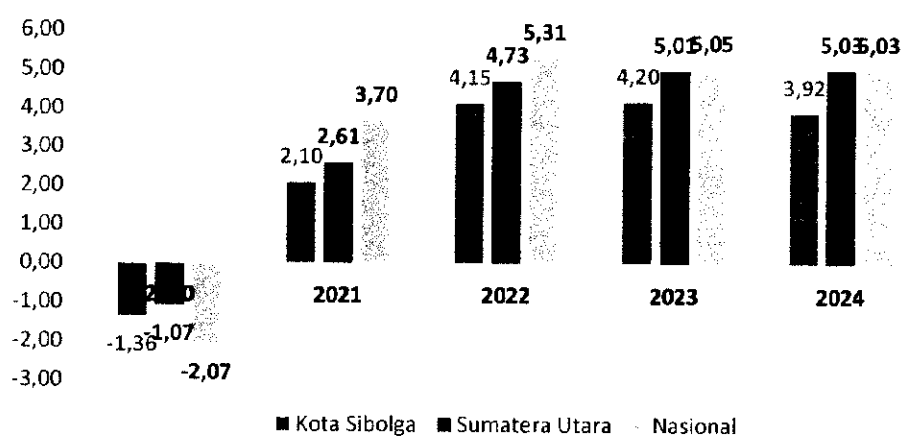
Aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan tentang kondisi ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial dan budaya. Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kota Sibolga.

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kota Sibolga selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi dan cenderung mengikuti pola pertumbuhan ekonomi provinsi. Pada tahun 2020 Perekonomian Kota Sibolga mengalami kontraksi (-1,36%). Namun sejak tahun 2021 kembali tumbuh positif (2,10%) seiring dengan upaya pemulihan ekonomi. Ekonomi Kota Sibolga Tahun 2022 tumbuh sebesar (4,15 %), dan kembali tumbuh pada tahun 2023 menjadi (4,20%), namun mengalami penurunan (3,92%) pada tahun 2024.

Grafik 2. 7 Pertumbuhan Ekonomi Kota Sibolga, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: Data diolah. BPS,BPS Sumut, BPS Sibolga

Pertumbuhan ekonomi Kota Sibolga tahun 2024 sebesar 3,92 persen didukung oleh sektor lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 5,47%; Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,19%, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 5,10% dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 4,74%. Pertumbuhan sektor perekonomian secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 25 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Sibolga Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (persen)

LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,33	-3,41	1,97	2,26	2,64
B. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00
C. Industri Pengolahan	-2,20	7,03	4,09	3,84	4,02
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,87	3,86	3,93	2,19	1,75
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,24	-0,78	4,17	2,34	2,04
F. Konstruksi	-6,40	2,82	1,98	3,93	2,92
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,90	4,90	5,66	5,29	4,74
H. Transportasi dan Pergudangan	-5,58	3,60	7,26	6,72	5,19

LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023	2024
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,72	0,55	8,86	6,08	5,47
J. Informasi dan Komunikasi	6,87	7,82	5,29	2,93	0,94
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,02	5,89	4,75	4,67	5,10
L. Real Estate	2,43	0,95	3,10	2,41	2,12
M,N. Jasa Perusahaan	-1,73	-0,05	8,86	3,98	4,42
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,24	-0,23	-0,13	2,49	3,97
P. Jasa Pendidikan	2,47	4,27	4,56	3,85	3,99
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0,72	-1,41	4,80	5,42	4,47
R,S,T,U. Jasa lainnya	-3,92	2,87	8,15	4,02	4,21
PDRB ADHK	-1,36	2,10	4,15	4,20	3,92

Sumber: Data diolah

2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

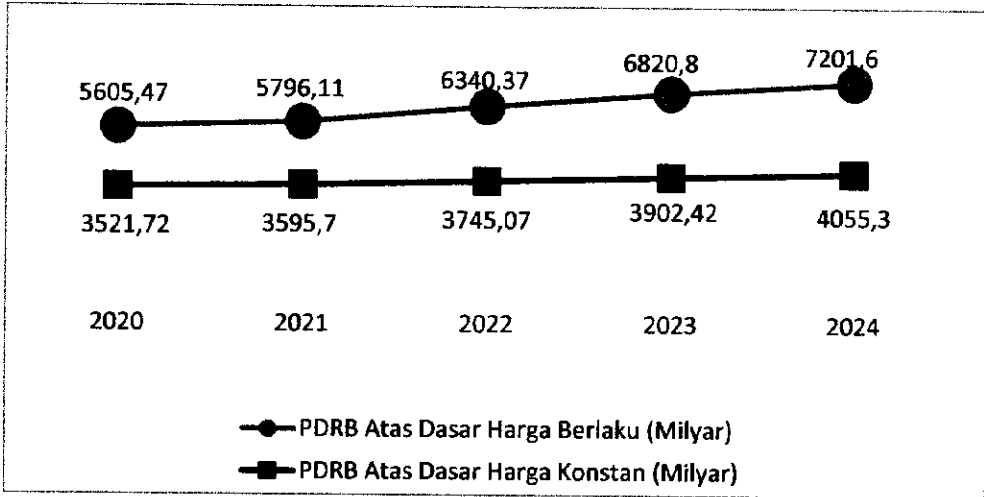
PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB menjadi salah satu indikator untuk mengukur kondisi ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu. Perhitungan PDRB terbagi menjadi dua, yakni atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku dihitung dengan menggunakan harga-harga pada tahun perhitungan sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mengacu pada tahun yang dijadikan dasar perhitungan.

Nilai pertumbuhan ekonomi didapatkan dari perhitungan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disuatu wilayah. PDRB juga dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian dalam periode tertentu. Dalam perhitungannya PDRB dibedakan menjadi dua, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku dihitung dengan menggunakan harga tahun berjalan yang digunakan untuk

mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur suatu ekonomi daerah. Sedang PDRB atas dasar harga konstan dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar yakni tahun 2010, perhitungan ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil yang tidak dipengaruhi oleh kenaikan harga atau inflasi. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan data PDRB atas dasar harga konstan ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang.

Berdasarkan data PDRB atas dasar harga berlaku bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Sibolga semakin meningkat, nilai PDRB atas dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2024 mencapai 7201,60 Milyar rupiah, secara nominal nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 380,08 Milyar rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 6820,80 Milyar rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi beberapa kategori dan kenaikan harga. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB mengalami kenaikan dari 3902,42 Milyar rupiah pada tahun 2023 menjadi 4055,30 Milyar rupiah tahun 2024. Ada kenaikan sebesar 152,88 milyar rupiah yang didorong oleh kenaikan produksi beberapa kategori. Hal ini menjadikan selama tahun 2024, Sibolga mengalami pertumbuhan sebesar 3,92 persen.

Grafik 2. 8 Perkembangan PDRB atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Konstan 2010 di Kota Sibolga



Sumber : BPS Kota Sibolga, 2024

Kinerja sektor tertinggi yang berkontribusi terhadap PDRB ADHB Kota Sibolga Tahun 2024 adalah sektor Perdagangan Besar, dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1.998,33 Milyar Rupiah, diikuti sektor Pertanian, Kehutanan, dan perikanan sebesar 1.280,41 Milyar Rupiah. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 26 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kota Sibolga Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Kategori	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	1.130,47	1.096,49	1.179,67	1.257,24	1.280,41
Pertambangan dan Penggalian	0,13	0,13	0,14	0,15	0,15
Industri Pengolahan	260,46	288,55	321,18	338,60	364,13
Pengadaan Listrik dan Gas	5,47	5,71	6,07	6,30	6,41
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16,54	16,61	17,46	18,12	19,19
Konstruksi	676,48	713,60	772,00	829,96	861,47
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.452,13	1.539,08	1.727,09	1.871,86	1.998,33

Kategori	2020	2021	2022	2023	2024
Transportasi dan Pergudangan	488,46	519,42	589,45	660,45	716,52
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	278,37	280,22	310,19	334,98	359,79
Informasi dan Komunikasi	69,22	75,39	81,70	85,38	86,48
Jasa Keuangan dan Asuransi	136,70	150,26	168,62	181,92	191,66
Real Estate	278,76	288,18	206,42	318,70	327,21
Jasa Perusahaan	31,16	31,73	36,67	39,54	41,88
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Dan Jaminan Sosial Wajib	453,54	452,07	457,65	482,29	527,07
Jasa Pendidikan	235,98	246,62	265,24	279,92	294,98
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	72,96	72,81	79,12	91,98	100,60
Jasa lainnya	18,62	19,24	21,70	23,42	25,31
PDRB	5.605,47	5.796,11	6.340,37	6.820,80	7.201,60

Sumber: BPS Kota Sibolga, 2024

Kinerja sektor tertinggi pada PDRB ADHK pada tahun 2024 mengalami peningkatan. Kategori lapangan usaha yang paling besar menghasilkan PDRB ADHK tahun 2024 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu sektor Perdagangan Besar, dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1.145,55 Milyar Rupiah diikuti oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan perikanan sebesar 725,19 Milyar Rupiah serta sektor kontruksi sebesar 443,86 Milyar Rupiah. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 27 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kota Sibolga Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Kategori	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	701,55	677,60	690,93	706,56	725,19
Pertambangan dan Penggalian	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Industri Pengolahan	156,02	166,99	173,82	180,50	187,76
Pengadaan Listrik dan Gas	4,66	4,84	5,03	5,14	5,23
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,59	11,50	11,98	12,26	12,51

Kategori	2020	2021	2022	2023	2024
Konstruksi	395,76	406,92	414,97	431,27	443,86
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	937,21	983,13	1.038,77	1.093,74	1.145,55
Transportasi dan Pergudangan	307,58	318,66	341,79	364,76	383,70
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	179,16	180,15	196,12	208,05	219,42
Informasi dan Komunikasi	58,09	62,63	65,94	67,87	68,51
Jasa Keuangan dan Asuransi	87,14	92,27	96,65	101,16	106,32
Real Estate	167,57	169,16	174,4	178,61	182,40
Jasa Perusahaan	19,42	19,41	21,13	21,97	22,94
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Dan Jaminan Sosial Wajib	264,16	263,54	263,20	269,76	280,47
Jasa Pendidikan	172,94	180,33	188,55	195,80	203,62
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	46,23	45,58	47,77	50,36	52,61
Jasa lainnya	12,53	12,89	13,94	14,50	15,11
PDRB	3.521,72	3.595,70	3.745,07	3.902,42	4.055,30

Sumber : BPS Kota Sibolga, 2024

Metode Analisis Tipologi Klassen atas PDRB Sibolga

Dengan menggunakan basis data PDRB pada tabel di atas, kegunaan Metode Analisis Klassen untuk membantu pemerintah dan *stakeholders* dalam mengidentifikasi sektor-sektor yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Analisis ini mendasarkan pengelompokkan suatu sektor dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total PDRB Kota Sibolga dan dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu: sektor prima, sektor potensial, sektor berkembang, dan sektor terbelakang. Penentuan kategori suatu sektor ke dalam empat kategori di atas didasarkan pada laju pertumbuhan kontribusi sektoral dan rerata besar kontribusi sektoralnya terhadap PDRB. Hasil Analis Tipologi Klassen PDRB Kota Sibolga dapat ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 2. 28 Tipologi Klassen Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan

Lapangan Usaha	Rerata laju pertumbuhan	Rerata Kontribusi	Sektor
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,91%	20,14%	Berkembang
B. Pertambangan dan Penggalian	1,96%	0,00%	Tertinggal
C. Industri Pengolahan	3,80%	4,60%	Tertinggal
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,74%	0,13%	Potensial
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,72%	0,32%	Tertinggal
F. Konstruksi	3,46%	11,46%	Berkembang
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,42%	26,19%	Prima
H. Transportasi dan Pergudangan	5,11%	8,88%	Prima
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,45%	4,98%	Potensial
J. Informasi dan Komunikasi	4,34%	1,63%	Potensial
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,94%	2,54%	Tertinggal
L. Real Estate	3,84%	4,59%	Tertinggal
M,N. Jasa Perusahaan	4,16%	0,55%	Potensial
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,53%	7,51%	Berkembang
P. Jasa Pendidikan	4,75%	4,80%	Potensial
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,45%	1,30%	Tertinggal
R,S,T,U. Jasa lainnya	2,69%	0,38%	Tertinggal
PDRB ADHK	3,95%		

Sumber: Data diolah.

Mencermati tabel di atas, maka strategi Pemerintah Kota Sibolga 5 tahun ke depan adalah mempertahankan Sektor Prima dan mengembangkan Sektor Berkembang menjadi Sektor Prima. Perlu menjadi perhatian juga, untuk menjadikan sektor Potensial menjadi sektor Berkembang dan Sektor Tertinggal menjadi Sektor Potensial membutuhkan waktu yang lebih lama dapat mencapai 5-10 tahun.

Metode Analisis Location Quotient (LQ) dan Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ) atas PDRB Sibolga dengan PDRB Provinsi Sumatera Utara

Perhitungan LQ pada umumnya digunakan untuk mengidentifikasi komoditas unggulan dan merupakan pendekatan yang digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan perekonomian yang menjadi pemacu pertumbuhan. Dalam

metode LQ, kegiatan ekonomi daerah terbagi menjadi dua bagian yakni sektor basis dan non-basis. Sektor basis merupakan sektor yang spesialisasinya lebih tinggi dibandingkan sektor-sektor lain karena mampu memenuhi permintaan pasar di daerah sendiri maupun memenuhi permintaan pasar di luar daerah. Kedua merupakan sektor non-basis atau sektor lokal. Sektor ini tidak unggul dan spesialisasinya cenderung lebih rendah karena hanya mampu melayani pasar di wilayah atau daerah sendiri.

Dalam mengatasi kelemahan analisis LQ, digunakanlah perkembangan dari analisis LQ yakni analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ). Analisis DLQ memperlihatkan reposisi atau perubahan sektoral dari analisis LQ. Hasil olah data PDRB Kota Sibolga dan PDRB Provinsi Sumatera Utara tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 29 Analisis LQ dan DLQ Kota Sibolga dibandingkan Provinsi Sumatera Utara

LAPANGAN USAHA	Analisis			
	LQ		DLQ	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,76	BB	0,75	BB
B. Pertambangan dan Penggalian	0,00	BB	0,00	BB
C. Industri Pengolahan	0,26	BB	0,26	BB
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,94	BB	0,94	BB
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,25	BASIS	3,25	BASIS
F. Konstruksi	0,91	BB	0,90	BB
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,50	BASIS	1,50	BASIS
H. Transportasi dan Pergudangan	2,05	BASIS	2,05	BASIS
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,23	BASIS	2,22	BASIS
J. Informasi dan Komunikasi	0,54	BB	0,53	BB
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,87	BB	0,87	BB
L. Real Estate	1,08	BASIS	1,08	BASIS
M,N. Jasa Perusahaan	0,62	BB	0,62	BB
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,26	BASIS	2,26	BASIS
P. Jasa Pendidikan	2,36	BASIS	2,36	BASIS
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,36	BASIS	1,36	BASIS
R,S,T,U. Jasa lainnya	0,71	BB	0,70	BB

Sumber: Data diolah, BPS Kota Sibolga, BPS Sumut

Dari tabel di atas, terlihat bahwa sektor Basis Kota Sibolga dengan kontribusi di atas pertumbuhan Provinsi Sumatera

Utara meliputi sektor (E) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, (G). Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, (H). Transportasi dan Pergudangan, (I). Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, (L). Real Estate, (O). Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, (P). Jasa Pendidikan, (Q). Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang melebihi nilai di atas angka 1.

3. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan seringkali dipahami dalam pengertian yang sangat sederhana yaitu sebagai keadaan kekurangan uang, rendahnya tingkat pendapatan dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup sehari-hari. Untuk Kota Sibolga gambaran garis kemiskinan, penduduk dan persentase kemiskinan tersebut pada tabel berikut.

Tabel 2. 30 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Di Kota Sibolga, 2020-2024

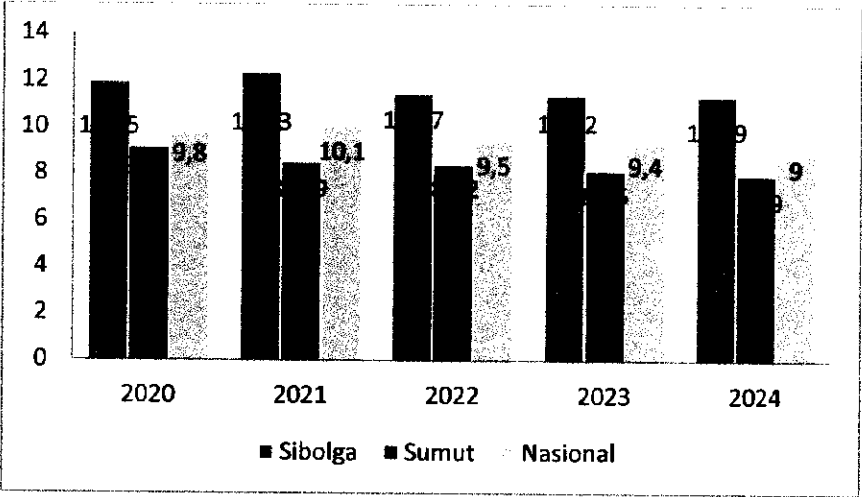
Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
		Jumlah (000)	Persentase
2020	453.786	10,49	11,95
2021	485.527	10,80	12,33
2022	516.367	10,05	11,47
2023	568.188	10,02	11,42
2024	612.818	9,99	11,39

Sumber : Survei Ekonomi Nasional, SDA. 2024

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sepanjang kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah penduduk miskin menunjukkan penurunan, hanya pada tahun 2021 mengalami kenaikan mencapai 10.800 ribu jiwa dikarenakan pandemi Covid-19. Garis kemiskinan pada tahun 2024 mencapai Rp.568.188 dengan persentase penduduk 11,42% menjadi 11,39% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan penduduk memiliki rata-rata pengeluaran dibawah garis kemiskinan.

Jika dibandingkan dengan Nasional, kondisi tingkat kemiskinan Sibolga masih berada dibawah Sumatera Utara dan Nasional. Hal ini menunjukkan Kondisi kemiskinan masih kurang efektif sehingga diperlukan upaya dalam penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan mengevaluasi terhadap program penyelesaian masalah kemiskinan.

Grafik 2. 9 Perkembangan Persentase Kemiskinan Kota Sibolga dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kota Sibolga, 2024

4. Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan perkembangan pembangunan non fisik dalam jangka panjang, yang direpresentasikan oleh tiga dimensi yaitu 1) umur panjang dan sehat; 2) pengetahuan dan; 3) kualitas hidup yang layak. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah daerah tergolong maju, berkembang atau terbelakang dan juga digunakan untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Pengukuran IPM memberikan manfaat diantaranya adalah 1) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia; 2) menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara; dan 3) digunakan sebagai salah satu dasar penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sibolga dari

Tahun 2020 ke Tahun 2024 semakin membaik. Peningkatan IPM terjadi pada seluruh dimensi. Pada tahun 2024 IPM Kota Sibolga sebesar 77,52.

Tabel 2. 31 Tabel IPM Kota Sibolga Tahun 2020-2024

Tahun	IPM	SDG	SDG	SDG	Pengeluaran
2020	73,63	72,97	13,16	10,40	11.473,00
2021	75,87	73,21	13,28	10,41	11.540,00
2022	76,69	73,75	13,30	10,43	12.135,00
2023	77,07	74,02	13,42	10,44	12.285,00
2024	77,52	74,19	13,43	10,45	12.713,00

Sumber : Data Diolah. BPS Kota Sibolga. 2024

Capaian IPM Sibolga sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 terus membaik, dari 75,56 tahun 2020 meningkat menjadi 77,52 pada tahun 2024 diatas angka Sumatera Utara dan Nasional, meskipun masih dibawah angka Padang Sidempuan untuk Pantai Barat.

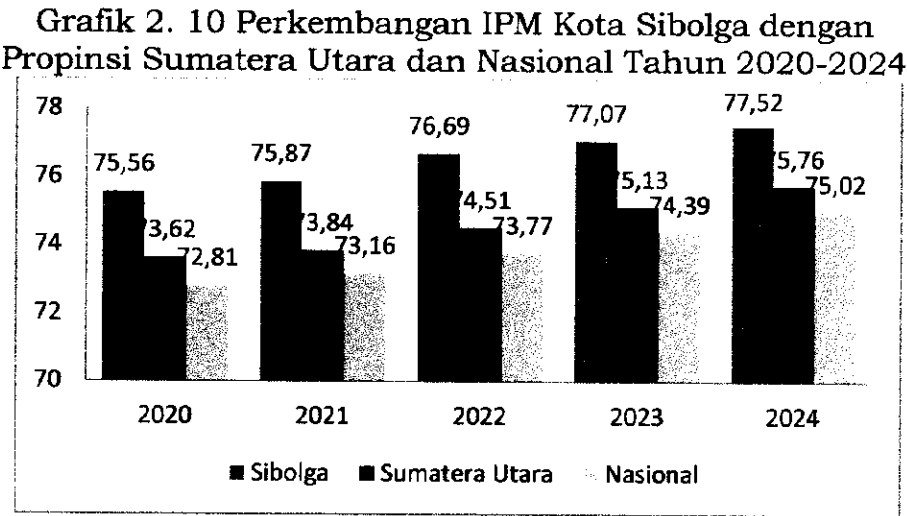
Tabel 2. 32 Perbandingan IPM Kota Sibolga, Pantai Barat, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	72,81	73,16	73,77	74,39	75,02
Sumatera Utara	73,62	73,84	74,51	75,13	75,76
Mandailing Natal	70,89	71,31	72,17	72,65	73,44
Tapanuli Selatan	73,16	73,37	73,96	74,58	75,18
Tapanuli Tengah	71,10	71,48	72,18	72,77	73,34
Padang Lawas Utara	71,69	71,96	72,77	73,45	74,16
Padang Lawas	70,08	70,48	71,41	72,16	73,10
Sibolga	73,63	75,87	76,69	77,07	77,52
Padangsidempuan	76,93	77,19	77,73	78,10	78,61

Sumber : BPS Sumatera Utara, 2024

Peningkatan IPM Kota Sibolga mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat cenderung semakin membaik, seiring dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peningkatan IPM juga menunjukkan

semakin meningkatnya tingkat daya beli dan pendapatan masyarakat sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan dan tingkat pendidikan yang ditandai dengan bertambahnya usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan meningkatnya konsumsi daya beli perkapita masyarakat Kota Sibolga. Kenaikan IPM ini seharusnya menjadi pemacu peran nyata dari segenap komponen masyarakat Kota Sibolga agar diperoleh hasil yang lebih optimal. Akan tetapi perlu disadari bahwa hasil ini merupakan investasi pembangunan jangka panjang yang tidak berdampak instan pada investasi langsung.



Sumber : Data Diolah. BPS Kota Sibolga. 2024

Pada perbandingan di Tingkat Provinsi Sumatera Utara di tahun 2024, Kota Sibolga memiliki peringkat Indeks Pembangunan Manusia ke-7 dengan nilai sebesar 77,52. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara, Indeks Pembangunan Manusia Kota Sibolga berada pada urutan kedua setelah Kota Padangsidempuan. Sebagian besar kabupaten/kota di Pantai Barat kategori sedang dan tinggi.

Tabel 2. 33 IPM Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Nias	62.55	63.37	64.3	65.15	66.13
Mandailing Natal	70.89	71.31	72.17	72.65	73.44
Tapanuli Selatan	73.16	73.37	73.96	74.58	75.18
Tapanuli Tengah	71.1	71.48	72.18	72.77	73.34
Tapanuli Utara	75.77	76.06	76.43	76.86	77.48
Toba Samosir	76.81	77.03	77.58	77.83	78.44
Labuhan Batu	73.08	73.16	73.96	74.7	75.20
Asahan	72.35	72.55	73.18	73.59	74.17
Simalungun	74.19	74.33	74.68	75.17	75.88
Dairi	73.63	73.89	74.6	75.18	75.88
Karo	75.4	75.81	76.37	76.88	77.49
Deli Serdang	76.11	76.21	76.86	77.16	77.56
Langkat	73.14	73.5	74.03	74.33	74.85
Nias Selatan	62.78	63.24	64.05	64.98	65.87
Humbang Hasundutan	70.7	71.28	72.05	72.49	73.33
Pakpak Bharat	70.3	70.65	71.57	72.3	73.09
Samosir	71.56	71.75	72.57	72.93	73.77
Serdang Bedagai	71.93	72.25	72.89	73.4	74.15
Batu Bara	70.57	70.8	71.75	72.56	73.14
Padang Lawas Utara	71.69	71.96	72.77	73.45	74.16
Padang Lawas	70.08	70.48	71.41	72.16	73.10
Labuhan Batu Selatan	72.86	73.15	73.59	74.23	75.11
Labuhan Batu Utara	73.47	73.73	74.61	75.45	76.20
Nias Utara	63.17	63.63	64.55	65.44	66.42
Nias Barat	62.58	63.05	63.96	64.68	65.66
Kota Sibolga	75.56	75.87	76.69	77.07	77.52
Kota Tanjung Balai	73.48	73.78	74.73	75.42	75.95
Kota Pematang Siantar	78.75	79.17	79.71	80.46	81.17
Kota Tebing Tinggi	76.4	76.65	77.39	78.17	78.68
Kota Medan	81.31	81.58	82.13	82.61	83.23
Kota Binjai	76.45	76.57	77.5	78.11	78.67
Kota Sibolga	73.63	75.87	76.69	77.07	77.52
Kota Gunungsitoli	70.22	70.51	71.11	71.55	72.30
Sumatera Utara	73.62	73.84	74.51	75.13	75.76

Sumber : Data Diolah. BPS Kota Sibolga 2024

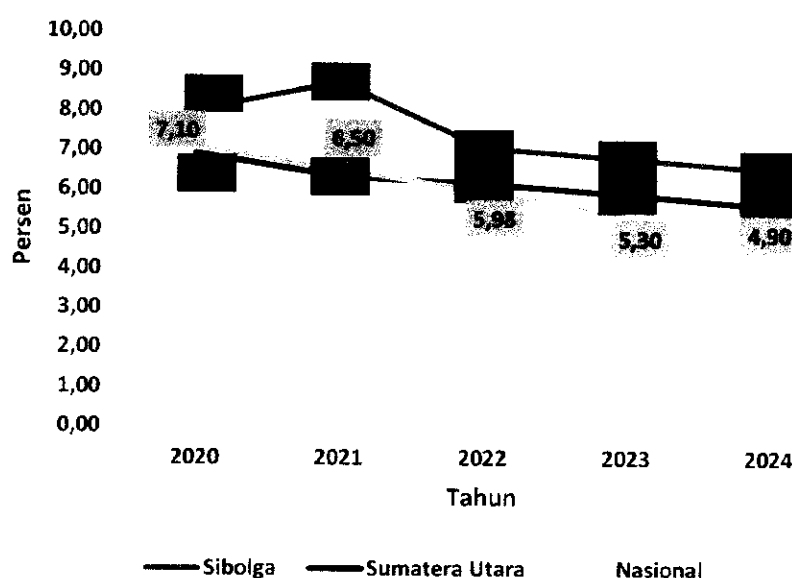
5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Kualitas permasalahan angkatan kerja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian besar dalam melakukan perencanaan pembangunan. Karakteristik

angkatan kerja sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan penduduk, terutama jika dilihat secara ekonomi makro. Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat berapa besar jumlah pengangguran disuatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengidentifikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 mempunyai tren fluktuatif dengan angka tingkat pengangguran. Pada tahun 2020, TPT Kota Sibolga sebesar 8 persen dan ditahun 2024 mencapai 6,52 persen yang berarti diantara 100 orang angkatan kerja ditemukan 6 orang penganggur. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dengan nasional, Kota Sibolga lebih tinggi. Permasalahan pengangguran menjadi perhatian serius dari pemerintah untuk mencegah dan mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang timbul dari ketidakstabilan lapangan pekerjaan.

Grafik 2. 11 Perkembangan TPT Kota Sibolga



Sumber : BPS Sumatera Utara, 2024, Statistik Indonesia

Berdasarkan data posisi relatif TPT Kabupaten/Kota Pantai Barat menempati urutan ke empat teratas sebesar 6,52, capaian Kota Sibolga diatas rata-rata Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

Tabel 2. 34 Perbandingan TPT Kota Sibolga, Pantai Barat, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	7,10	6,50	5,98	5,30	4,90
Sumatera Utara	6,91	6,33	6,16	5,89	5,60
Mandailing Natal	6,5	6,12	7,64	7,45	7,22
Tapanuli Selatan	4,42	4	3,65	3,49	3,41
Tapanuli Tengah	7,54	7,24	7,97	7,81	7,45
Padang Lawas Utara	3,11	3,19	4,31	4,42	3,99
Padang Lawas	4,11	4,07	5,9	5,75	5,47
Sibolga	8,00	8,72	7,05	6,79	6,52
Padangsidempuan	7,45	7,18	7,76	7,57	7,17

Sumber : BPS Sumatera Utara, 2024 , Statistik Indonesia

6. Rasio Gini

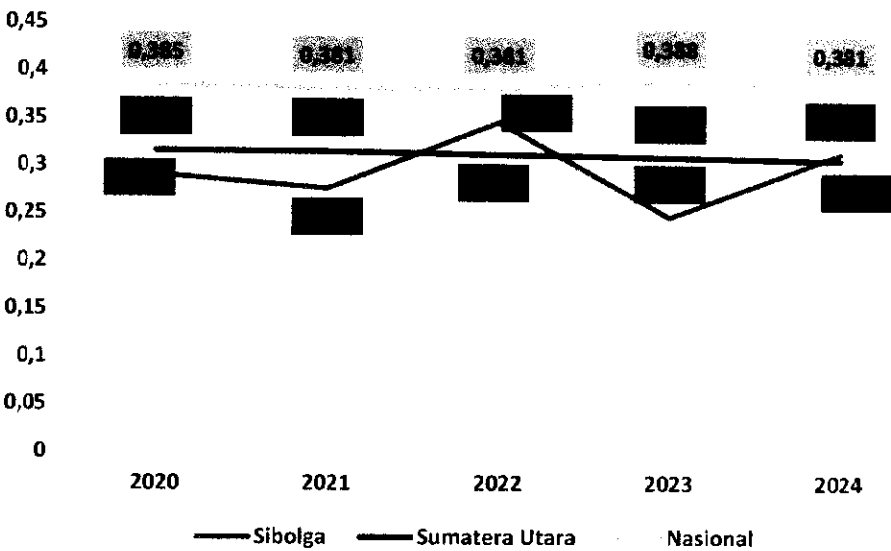
Rasio gini adalah sebuah metode statistik untuk mengukur ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan atau kekayaan suatu populasi. Rasio gini memiliki rentang nilai antara 0 dan 1,0 mengidentifikasikan kesetaraan sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama), sementara 1 mengidentifikasikan ketidaksertaraan sepurna (satu orang memiliki seluruh pendapatan). Semakin tinggi nilai rasio gini, semakin tinggi tingkat ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan.

Ketimpangan akan semakin parah jika tingkat kesejahteraan masyarakat kelompok berpendapatan bawah tumbuh dengan lambat atau bahkan turun, sedangkan tingkat kesejahteraan kelompok berpendapatan atas tumbuh dengan cepat. hal ini akan menjadi serius apabila kedua masalah tidak ditangani dengan baik, yang akhirnya menimbulkan dampak negatif.Ketimpangan akan selalu ada dalam proses pembangunan, khususnya pada tahap-tahap awal pembangunan, namun ketimpangan yang semakin

melebar akan melahirkan ketidakpuasan dan menimbulkan keresahan yang berujung pada berbagai macam konflik. Sedangkan perkembangan indikator pemerataan distribusi pendapatan selanjutnya yang sering dipakai adalah Rasio Gini.

Di Kota Sibolga perkembangan Rasio Gini dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Sedangkan di Pantai Barat Sumatera Utara Kota Sibolga berada dibawah Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Tapanuli Tengah dan Mandailing Natal. Kota Sibolga masih dibawah Provinsi Sumatera Utara dan relatif lebih baik dengan Nasional. Pemerintah Kota Sibolga perlu upaya untuk memperluas lapangan pekerjaan dan mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat. Secara lengkap dapat dilihat di grafik berikut.

Grafik 2. 12 Perkembangan Rasio Gini Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Sumatera Utara, 2024

Tabel 2. 35 Perbandingan Rasio Gini Kota Sibolga, Pantai Barat, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional

	2020	2021	2022	2023	2024
Mandailing Natal	0.248	0.240	0.244	0.249	0.250
Tapanuli Selatan	0.202	0.257	0.209	0.219	0.206
Tapanuli Tengah	0.355	0.292	0.233	0.241	0.234

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Padang Lawas Utara	0.228	0.255	0.245	0.241	0.223
Padang Lawas	0.265	0.253	0.227	0.225	0.224
Sibolga	0.291	0.276	0.346	0.246	0.313
Padangsidempuan	0.354	0.310	0.275	0.267	0.296

Sumber : BPS Sumatera Utara, 2024 , Statistik Indonesia

Pada tahun 2020, Kota Sibolga mengalami kontraksi ekonomi dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar -1,36 persen, yang disertai meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 8 persen dan tingkat kemiskinan sebesar 11,95 persen. PDRB per kapita tercatat sebesar 62,57 dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,63 dan indeks Gini 0,291 yang mencerminkan ketimpangan distribusi pendapatan. Tahun 2021 menunjukkan awal pemulihan dengan LPE naik menjadi 2,10 persen dan PDRB per kapita meningkat menjadi 64,18 juta meskipun kemiskinan sedikit naik ke 12,33 persen, yang disertai meningkatnya TPT menjadi 8,72 persen, penurunan indeks Gini ke 0,276, serta kenaikan IPM ke 75,87.

Pada 2022, LPE meningkat signifikan menjadi 4,15 persen, disertai dengan kenaikan PDRB per kapita menjadi 69,83 juta, penurunan kemiskinan menjadi 11,47 persen, dan TPT turun ke 7,05 persen. IPM naik menjadi 76,69, meskipun indeks Gini sedikit meningkat ke 0,346 menunjukkan perbaikan kesejahteraan secara umum. Tahun 2023 mencatat LPE 4,20 persen, PDRB per kapita sebesar 74,74 juta, kemiskinan menurun ke 11,42 persen, TPT turun menjadi 6,79 persen, dan IPM naik ke 77,07, meskipun indeks Gini turun ke 0,246, menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi mulai berjalan lebih merata dan inklusif.

Pada 2024, mencatat LPE 3,92 persen, PDRB per kapita 78,77 juta, IPM meningkat ke 77,52, TPT menurun ke 6,52 persen, kemiskinan turun di 11,39 persen, dan indeks Gini meningkat menjadi 0,313, menandakan adanya ketimpangan yang masih perlu diwaspadai. Hubungan yang selaras antar

indikator tersebut mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan telah turut mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat secara merata di Kota Sibolga.

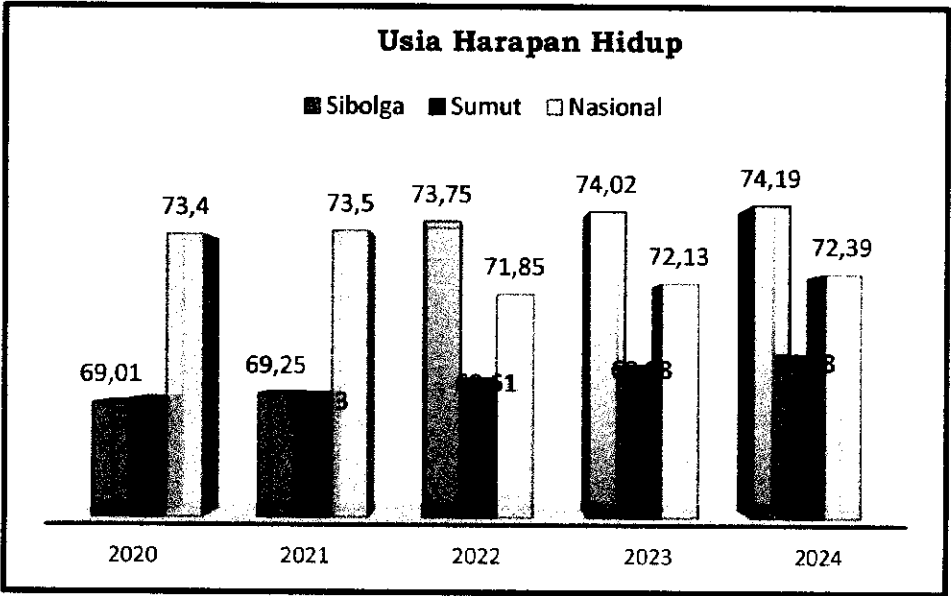
2.2.2 Kesehatan untuk semua

Upaya peningkatan dimensi Kesehatan dengan meningkatkan angka harapan hidup sesuai dengan Langkah-langkah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan secara merata.

1. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup menggambarkan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ketahun. Adanya perbaikan pada pelayanan melalui keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan dapat diindikasikan dengan adanya peningkatan angka harapan hidup saat lahir. Usia Harapan Hidup lima tahun terakhir cenderung meningkat. Untuk tahun 2020 penduduk Kota Sibolga memiliki harapan untuk hidup hingga 69,01 tahun dan tahun 2024 memiliki harapan untuk hidup hingga 74,19 tahun.

Grafik 2. 13 Usia Harapan Hidup Kota Sibolga Tahun



Sumber: Data Diolah. BPS Kota Sibolga 2024

2. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga adalah satu kesatuan keluarga inti (ayah, ibu, dan anak) sebagaimana dinyatakan dalam Kartu Keluarga. Untuk menyatakan bahwa suatu keluarga sehat atau tidak digunakan sejumlah penanda atau indikator. Dalam rangka pelaksanaan Program Indonesia Sehat telah disepakati adanya 12 indikator utama untuk penanda status kesehatan sebuah keluarga, antara lain yaitu 1) Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB); 2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan; 3) Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap; 4) Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif; 5) Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan; 6) Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar; 7) Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur; 8) Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan; 9) Anggota keluarga tidak ada yang merokok; 10) Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); 11) Keluarga mempunyai akses sarana air bersih; 12) Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat. Berdasarkan indikator tersebut, dilakukan penghitungan Indeks Keluarga Sehat (IKS) dari setiap keluarga.

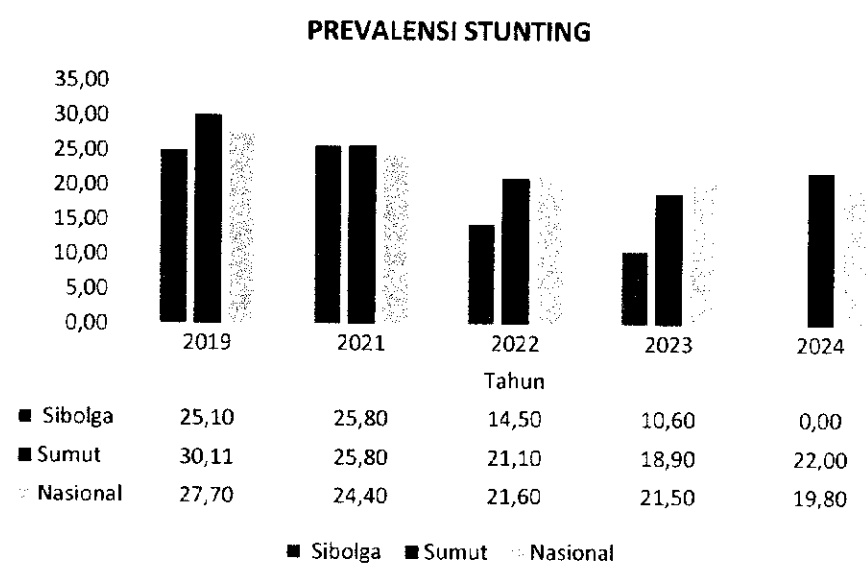
3. Prevalensi Stunting

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) karena kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya praktik pengasuhan yang kurang baik, terbatasnya layanan kesehatan, kurangnya akses makanan bergizi dan kurangnya akses air bersih serta sanitasi yang layak.

Masalah gizi kronis merupakan akibat kurang optimalnya pertumbuhan janin dan bayi di usia dua tahun

pertama kehidupannya, terutama gabungan dari kurangnya asupan gizi, paparan terhadap penyakit yang tinggi serta pola pengasuhan yang kurang tepat. Semua faktor ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, yang akhirnya dapat menyebabkan meningkatnya beban penyakit dan kematian pada balita. Data Pravalensi Stunting di Kota Sibolga menurut SSGI memiliki angka (tinggi badan menurut umur) tahun 2021 sebesar 25,8, tahun 2022 sebesar 14,5% dan hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 sebesar 10,6 %. Sedangkan untuk tahun 2024 data stunting Kota Sibolga sampai dengan saat ini belum dirilis SSGI dalam angka.

Grafik 2. 14 Angka Prevalensi Stunting Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : Data SSGI, SKI Tahun 2020-2024

Sementara data Prevalensi Stunting Balita Stunting pada Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-ppgbm) pada setiap puskesmas yang ada di Kota Sibolga menunjukan angka 3,26% tahun 2023.

Tabel 2. 36 Prevalensi Stunting Balita Stunting pada Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e ppgbm) Tahun 2023

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Balita	Jumlah Balita Stunting	Persentase (%)
1	Sibolga Selatan	Aek Habil	2.845	42	1,48
		Parombunan			
2	Sibolga Kota	Sambas	1.023	36	3,52
3	Sibolga Utara	Pintu Angin	1.477	50	3,39
4	Sibolga Sambas	Pelabuhan Sambas	1.766	104	5,89
Jumlah			7.111	232	3,26

Sumber: Data entri e-PPGBM 2023

2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Upaya peningkatan dimensi Rata2 lama sekolah, Harapan lama sekolah, Angka Literasi/Numerasi, indeks pembangunan literasi masyarakat, indeks literasi digital.

1. Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Capaian Rata-rata Lama Sekolah penduduk di Kota Sibolga menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020 Rata-rata Lama Sekolah penduduk di Kota Sibolga sebesar 10,40 tahun. Capaian Harapan Lama Sekolah penduduk Kota Sibolga menunjukkan kecenderungan meningkat. Capaian Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah dapat dilihat padatabel berikut:

Tabel 2. 37 Tabel Harapan Lama Sekolah Kota Sibolga Tahun 2020-2024

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah
2020	10.40	13.16
2021	10.41	13.28
2022	10.43	13.30
2023	10.44	13.42
2024	10.45	13.43

Sumber : BPS Kota Sibolga. 2024

2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat literasi masyarakat dalam berbagai aspek, seperti

kemampuan dasar, fungsional, informasi, dan digital. IPLM adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/ kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

IPLM disusun berdasarkan berbagai unsur, seperti pemerataan layanan perpustakaan, ketersediaan koleksi, jumlah tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat, perpustakaan yang dibina sesuai standar, keterlibatan masyarakat, dan jumlah anggota perpustakaan. IPLM Kota Sibolga tahun 2020-2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi terjadi penurunan di tahun 2024 dari 85,3 pada tahun 2023 menjadi 72, 96 di tahun 2024, namun baik secara nasional maupun di tingkat provinsi, IPLM Kota Sibolga untuk dua tahun terakhir ini masih diatas, provinsi maupun nasional seperti yang terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 38 Perbandingan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2024

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Sibolga	45.00	47.00	68.46	85.3	72.96
Sumatera Utara				56.1	62.39
Nasional				69.42	73.52

Sumber : BPS Kota Sibolga. 2024

2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia mencakup berbagai program untuk melindungi pekerja dari risiko sosial, seperti kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, dan kehilangan pekerjaan. Meskipun cakupan ini terus ditingkatkan, terutama untuk pekerja informal, masih terdapat tantangan dalam mencapai target kepesertaan yang optimal. Pemerintah daerah didorong

untuk mempercepat peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui alokasi anggaran dan berbagai program dukungan. Pemerintah Kota Sibolga terus melakukan berbagai upaya dan program untuk agar cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat terus meningkat, memberikan perlindungan yang lebih luas bagi seluruh pekerja di Kota Sibolga.

Tabel 2. 39 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kota Sibolga Tahun 2021-2024.

	2021	2023	2024
Sibolga	64,20	67,84	52,84

Sumber: Data diolah

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari kualitas Sumber Daya Manusia yang mengenyam pendidikan tinggi dan mempunyai keahlian serta menguasai teknologi yang dibutuhkan didunia kerja. Tingkat partisipatif angkatan kerja di Kota Sibolga fluktuatif dengan angka TPAK tahun 2020 sebesar 70,38%, kemudian mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 65,85% dan semakin membaik di tahun 2024 sebesar 70,83%.

Apabila dibandingkan dengan dengan TPAK Provinsi Sumatera Utara tahun 2024, Kota Sibolga masih dibawah angka Provinsi Sumatera Utara dengan selisih 0,53 persen. Sedangkan di Pantai Barat Sumatera Utara Kota Sibolga berada dibawah Padang Lawas, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Padang Lawas Utara. Kota Sibolga masih dibawah Provinsi Sumatera Utara dan relatif lebih baik dengan Nasional, seperti terlihat digrafik berikut.

Tabel 2. 40 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	Sibolga	Provinsi Sumatera Utara	Nasional
2020	70,38	68,67	67,8
2021	71,19	69,1	67,8
2022	65,85	69,53	68,6
2023	71,18	71,06	69,5
2024	70,83	71,36	70,63

Sumber : BPS Sumatera Utara, 2024

Tabel 2. 41 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Sibolga, Pantai Barat dan Provinsi Sumatera Utara 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Mandailing Natal	65,94	69,79	71,15	63,07	64,42
Tapanuli Selatan	78,54	74,38	74,53	75,64	75,68
Tapanuli Tengah	70,91	75,05	76,51	74,52	75,72
Padang Lawas Utara	66,04	76,82	70,33	73,41	73,01
Padang Lawas	76,93	75,23	75,1	78,14	77,52
Sibolga	70,38	71,19	65,85	71,18	70,83
Padang Sidempuan	73,24	68,69	64,41	68,9	68,53

Sumber : BPS Sumatera Utara, 2024

2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Indeks kerukunan Umat beragama, indeks pembangunan kebudayaan

1. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan instrumen utama yang dijadikan sebagai alat pengukuran bagi capain program-program kerukunan. IKUB diukur dengan mengacu pada tiga dimensi utama yaitu, toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Data IKUB dikeluarkan oleh Balitbang Kemenag baik secara nasional maupun ditingkat provinsi, akan tetapi untuk tingkat kabupaten/Kota termasuk Kota Sibolga belum tersedia, sehingga yang dianalisis adalah IKUB Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, sedangkan untuk Kota Sibolga akan diproxykan kepada kegiatan Forum litas agama atau FKUB Kota Sibolga.

Tabel 2. 42 Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Sibolga, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

Provinsi/ Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Sibolga					
Sumatera Utara		77,40		77,10	
Nasional	67,46	72,39	73,09	76,02	

Sumber: Balitbang Kemenag

2. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen yang disusun dengan tujuan memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. IPK terdiri dari 31 indikator yang dikelompokkan kedalam tujuh dimensi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender, sehingga IPK dapat menjadi cerminan dari bagaimana kebudayaan menjadi penggerak pembangunan yang berkelanjutan.

2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

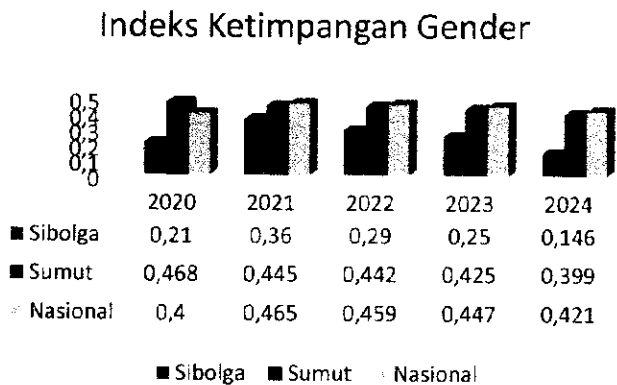
Indeks perlindungan anak, Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, Indeks Ketimpangan Gender, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pembangunan Pemuda

1. Indeks Ketimpangan Gender

Ketimpangan gender adalah perbedaan atau kesenjangan yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan dalam akses terhadap hak, sumber daya, dan peluang. Kondisi ini dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, pekerjaan, politik, dan sosial. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan adanya potensi capaian pembangunan manusia yang hilang akibat adanya kesenjangan gender dalam dimensi Kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. IKG Kota

Sibolga empat tahun terakhir mengalami penurunan, hal ini mengindikasikan bahwa kesenjangan gender semakin menurun.

Grafik 2. 15 Indeks Ketimpangan Gender Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: Data Diolah. BPS Kota Sibolga 2024

Perkembangan IPG Kota Sibolga sepanjang tahun 2020-2024 cenderung relatif stabil. Jika dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara, Kota Sibolga masih berada diatas rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia perempuan di Kota Sibolga semakin membaik. Hal ini dapat dilihat ditabel berikut ini.

Tabel 2. 43 Perbandingan IPG Kota Sibolga, Pantai Barat, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	91,06	91,06	91,63	91,85	91,85
Sumatera Utara	90,67	90,73	91,06	91,31	91,5
Mandailing Natal	93,24	93,47	93,42	93,68	93,88
Tapanuli Selatan	90,86	90,74	90,99	90,63	90,75
Tapanuli Tengah	94,93	94,93	94,95	95,23	95,38
Padang Lawas Utara	87,92	88,06	88,1	88,26	88,47
Padang Lawas	85,75	85,94	86,24	86,56	86,97
Sibolga	97,63	97,89	97,9	98,01	98
Padangsidempuan	97,67	97,87	97,92	97,53	97,46

Sumber : BPS Sumatera Utara, 2024

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan

dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi. Indeks yang dibentuk yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan. IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender sudah terbangun melalui partisipasi perempuan di poltik, pengambilan keputusan, dan ekonomi.

Indeks Pemberdayaan Gender Kota Sibolga menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan cenderung menurun dari 73,03 di tahun 2020 menjadi 65,89 di tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 – 2023 nilai IDG Kota Sibolga berada diatas Provinsi Sumatera Utara, namun di tahun 2024 berada dibawah Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2. 44 Perbandingan IDG Kota Sibolga, Pantai Barat,Provinsi Sumatera Utara dan nasional Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	75,57	76,26	76,59	76,9	77,62
Sumatera Utara	67,52	67,79	69,33	69,18	72,45
Mandailing Natal	70,01	71,9	73,56	73,73	66,37
Tapanuli Selatan	69,61	69,25	70,95	71,61	66,1
Tapanuli Tengah	74,05	74,39	74,56	76,81	79,25
Padang Lawas Utara	67,99	68,14	68,98	67,41	67,49
Padang Lawas	55,43	57,61	56,37	58,95	54,35
Sibolga	73,03	71,84	72,84	75,14	65,89
Padang Sidempuan	65,72	65,99	66,43	66,85	76,54

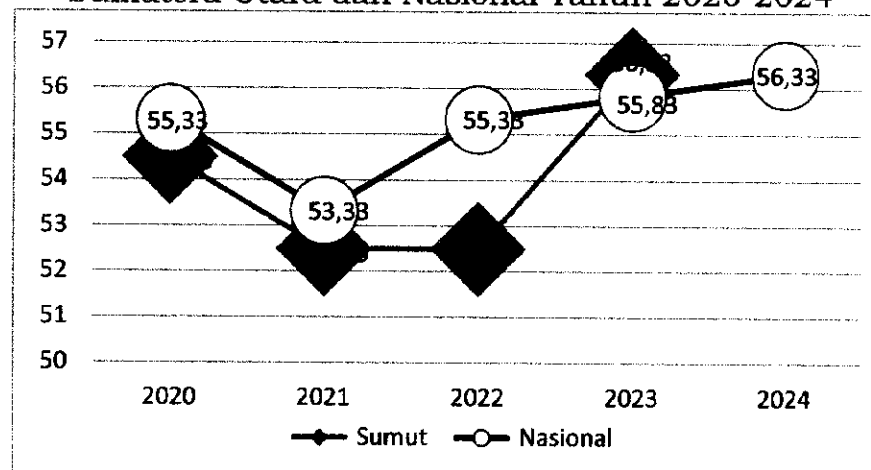
Sumber : BPS Sumatera Utara, 2024

3. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. IPP digunakan sebagai tolok ukur pembangunan berdasarkan tiga lapisan, yaitu pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan serta partisipasi dalam berbagai bidang kehiduan yang dipetakan dalam 5 domain dengan 15 indikator penyusunnya. Data IPP untuk Kota Sibolga tidak tersedia, sehingga yang dianalisi adalah IPP Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

Kondisi IPP Provinsi Sumatera Utara mengalami perkembangan fluktuatif namun memiliki tren cenderung meningkat meskipun peningkatannya tidak signifikan. Pada Tahun 2020 nilai IPP Provinsi Sumatera Utara 55,33 yang kemudian turun menjadi 52,5 di tahun 2021 dan meningkat menjadi 56,33 di tahun 2023. Kondisi yang serupa juga terjadi pada nilai IPP Nasional, dimana nilai IPP mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan dan nilainya sempat turun pada tahun 2021.

Grafik 2. 16 Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : Kementerian Pemuda dan Olahraga. 2024

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

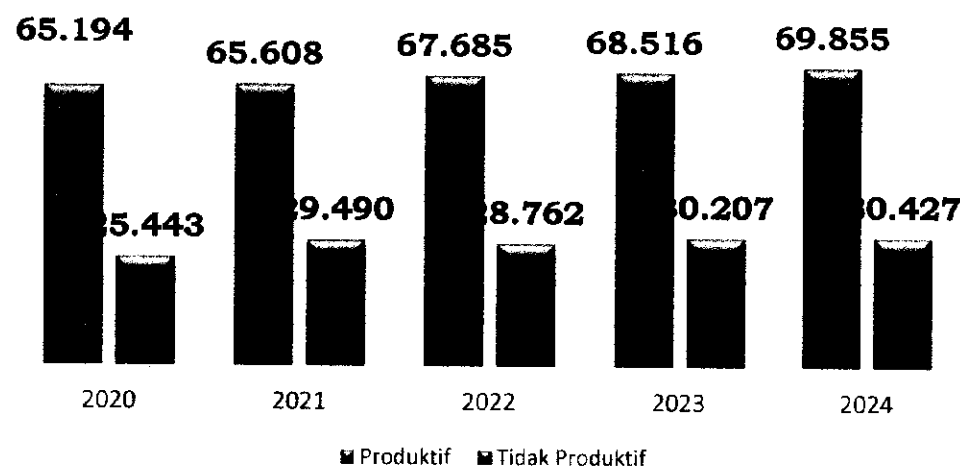
Daya saing daerah adalah kemampuan perusahaan, industri, daerah, negara, atau antar daerah menghasilkan faktor pendapatan dan faktor pekerjaan yang relatif tinggi dan berkesinambungan untuk menghadapi persaingan internasional. Oleh karena itu dalam konteks kabupaten/kota sebagai sebuah organisasi, daya saing diartikan sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.

2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

1. Angka Ketergantungan

Berdasarkan kelompok umur dalam 5 Tahun terakhir, Penduduk Kota Sibolga terbesar berada pada kelompok umur produktif. Untuk tahun 2024 sebesar 69.855 jiwa (69,66%). Data ini memberikan informasi penting terkait dengan pembangunan sosial, pasar tenaga kerja, dimana Kota Sibolga memiliki penduduk yang berada di usia produktif, sehingga kebutuhan tenaga kerja dapat relatif terpenuhi dengan adanya penduduk kelompok umur usia produktif. Penduduk Kota Sibolga berdasarkan kelompok umur, disajikan dalam grafik berikut:

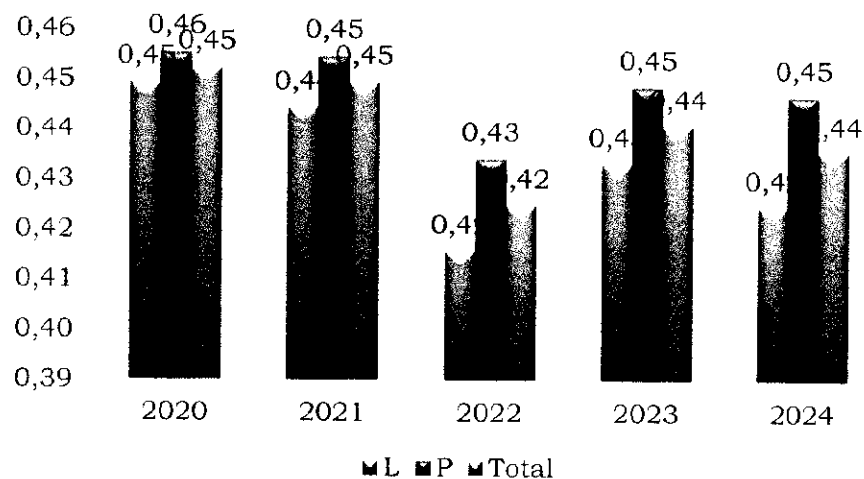
Grafik 2. 17 Penduduk Kota Sibolga Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020-2024



Sumber: data diolah, profil kependudukan Kota Sibolga.

Rasio ketergantungan Kota Sibolga dari tahun 2020 sebesar 0,45 ke tahun 2024 sebesar 0,44 menunjukkan trend menurun walaupun sangat kecil sebesar 0,01. Dari pembahasan di atas terlihat bahwa penduduk usia produktif menanggung beban terbesar pada usia 0-14 tahun.

Grafik 2. 18 Rasio Ketergantungan Kota Sibolga Tahun 2020-2024



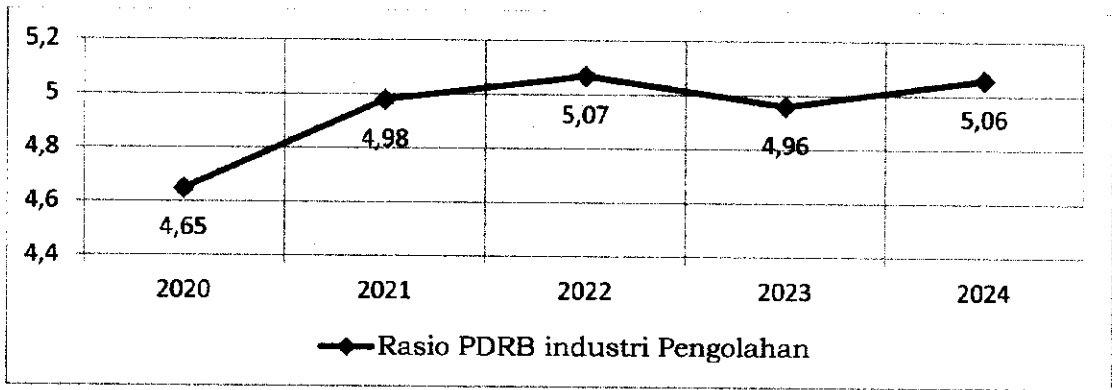
Sumber: Data diolah, profil kependudukan Kota Sibolga.

2.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

1. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB industri pengolahan Kota Sibolga tahun 2020 hingga 2024 mengalami tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2020 rasio PDRB industri pengolahan di Kota Sibolga berada di angka 4,65% dan mengalami kenaikan hingga tahun 2022 di angka 5,07%. Namun pada tahun 2023 sektor ini mengalami sedikit penurunan menjadi 4,96%. Kemudian di tahun berikutnya kembali mengalami kenaikan menjadi 5,06%. Berikut Rasio PDRB industri pengolahan Kota Sibolga tahun 2020-2024:

Grafik 2. 19 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kota Sibolga tahun 2020-2025

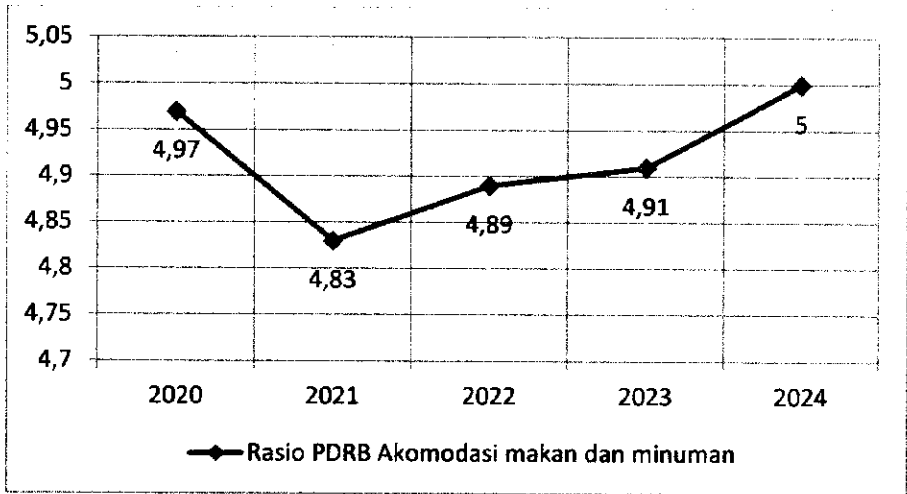


Sumber: BPS Kota Sibolga 2025

2. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Rasio penyediaan akomodasi makan dan minum Kota Sibolga dari tahun 2020 hingga tahun 2024 terlihat mengalami tren fluktuatif. Pada tahun 2020, rasio PDRB sektor akomodasi makan dan minum berada di angka 4,97 % dari total PDRB Kota Sibolga. Rasio ini mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 4,83%. Namun pada tahun 2022 hingga 2024 terus mengalami kenaikan menjadi 5 % dari total PDRB Kota Sibolga. Rasio PDRB akomodasi makan dan minum Kota Sibolga tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 20 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kota Sibolga Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kota Sibolga 2025

3. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif di Kota Sibolga belum tersedia secara spesifik dalam data yang tersedia. Namun data PDRB Kota Sibolga secara keseluruhan pada tahun 2023 mencapai Rp. 6.820,80 miliar (atas dasar harga berlaku) dan Rp. 3.902,42 miliar (atas dasar harga konstan 2010). Ekonomi Kota Sibolga pada tahun 2023 juga menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,20% dibandingkan tahun sebelumnya.

4. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan ekonomi hijau dan biru di Indonesia merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan inklusif. Kedua konsep ini memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi. Ekonomi hijau berfokus pada transisi menuju aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dengan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Sementara ekonomi biru memanfaatkan potensi sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain indikator indeks ekonomi hijau dan indeks ekonomi biru Indonesia, dalam capaian penerapan ekonomi hijau dan biru juga dilakukan pengukuran pada porsi EBT dalam bauran energi primer. Porsi EBT dalam bauran energi primer adalah persentase kontribusi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) terhadap total konsumsi energi primer suatu negara dalam periode tertentu. Namun hingga dokumen ini dimuat data pendukung untuk Kota Sibolga masih belum tersedia.

5. Rasio Kewirausahaan

Rasio Kewirausahaan adalah persentase atau proporsi jumlah wirausaha (atau pemilik usaha) dari total angkatan kerja dalam suatu negara atau wilayah. Dengan kata lain, rasio kewirausahaan mengukur seberapa banyak orang yang menjadi wirausaha dibandingkan dengan jumlah keseluruhan orang yang bekerja atau memiliki potensi untuk bekerja. Rasio kewirausahaan sering digunakan sebagai indikator penting dalam ekonomi karena mencerminkan tingkat aktivitas bisnis dan potensi pertumbuhan ekonomi.

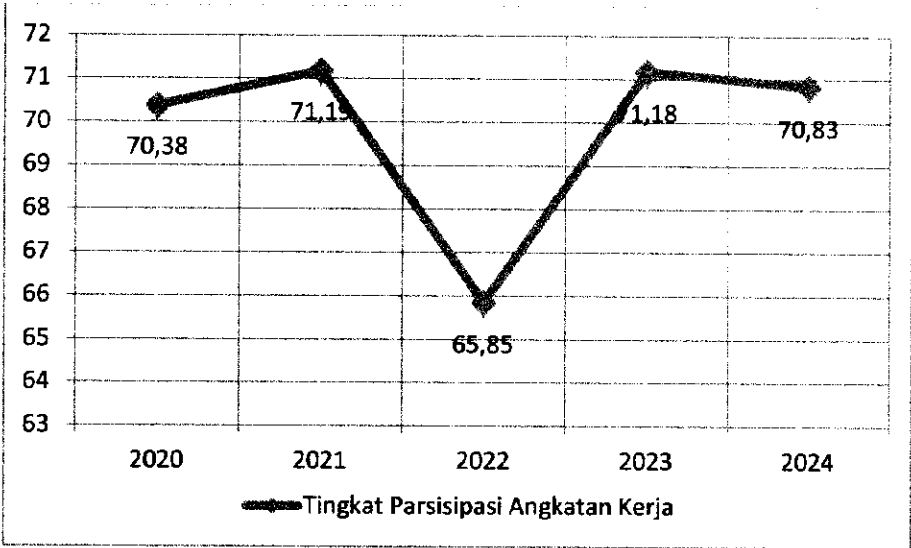
6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memberikan gambaran mengenai penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Angka TPAK digunakan sebagai

dasar untuk mengetahui jumlah penduduk yang aktif bekerja atau mencari pekerjaan. Semakin tinggi nilai TPAK, semakin besar proporsi penduduk usia kerja yang terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif. BPS mengelompokkan nilai TPAK menjadi tiga kategori, yaitu: tinggi ($TPAK \geq 70$), sedang ($50 < TPAK < 70$), dan rendah ($TPAK \leq 50$).

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPKA) di Kota Sibolga menunjukkan tren yang naik turun. Pada tahun 2020 TPKA Kota Sibolga tercatat sebesar 70,38% dengan kategori “tinggi”. Di tahun berikutnya mengalami kenaikan sebesar 71,19%, namun mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2022 yaitu sebesar 65,85%. Dan pada tahun 2023 dan 2024 kembali mengalami kenaikan di angka 70,83%. Berikut Grafik TPAK Kota Sibolga Tahun 2020-2024.

Grafik 2. 21 TPAK Kota Sibolga Tahun 2020-2024.



Sumber: BPS Kota Sibolga 2020-2024

7. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah menjadi alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat inovasi dan kemajuan di suatu wilayah, seperti negara bagian, provinsi, atau kota. Tujuan dari indeks ini adalah untuk mengukur sejauh mana

suatu daerah berhasil dalam mengembangkan inovasi di berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, teknologi, lingkungan, dan pelayanan publik. Indeks Inovasi Daerah berfungsi untuk membantu pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami dan mendorong inovasi dalam pembangunan daerah. Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri, perkembangan Indeks Inovasi Daerah Kota Sibolga menunjukkan kondisi yang baik. Pada tahun 2020 dan 2021 Indeks Inovasi Kota Sibolga tergolong kurang inovatif, namun pada tahun 2024, indeks tersebut meningkat dan masuk dalam kategori inovatif. Berikut adalah tabel Indeks Inovasi Daerah di Kota Sibolga dan Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2020-2024.

Tabel 2. 45 Indeks Inovasi Daerah Kota Sibolga dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks Inovasi Daerah			
	Kota Sibolga		Provinsi Sumatera Utara	
2020	28	Kurang Inovatif	1.578	Sangat Inovatif
2021	6,3	Kurang Inovatif	39,41	Inovatif
2022	38,2	Inovatif	54,36	Inovatif
2023	8	Kurang Inovatif	53,76	Inovatif
2024	38,64	Inovatif	59,93	Inovatif

Sumber: SK Menteri Dalam Negeri

2.3.3 Transformasi Digital

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)

Indeks masyarakat Digital merupakan instrumen pengukur untuk menilai kematangan digital masyarakat, sebagai cerminan kesiapan di era digital. Pengukuran ini mencakup empat pilar utama yaitu Infrastruktur dan Ekonomi Digital, Keterampilan Digital, Pemberdayaan Digital, dan Pekerjaan Digital.

Nilai Indeks Masyarakat Digital Sibolga Tahun 2022 sebesar 31,13 dengan kategori rendah dan ditahun 2024 capaian sebesar 39,25 dengan kategori cukup, turun 1,64

poin dari tahun 2023. Jika dibandingkan dengan Sumatera Utara dan Nasional, Indeks Masyarakat Digital Kota Sibolga masih berada dibawah Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 46 Perbandingan Indeks Masyarakat Digital Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2022-2024

Tahun	Kota Sibolga	Provinsi Sumatera Utara	Nasional
2022	31.13	36.27	37.8
2023	40.89	44.27	43.18
2024	39.25	41.22	43.34

Sumber: Indeks Masyarakat Digital Indonesia, 2024

2.3.4 Integrasi Ekonomi Domestik Global

1. Pembentukan Modal Tetap Bruto, Ekspor Barang dan Jasa

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dalam penyajian PDRB berdasarkan pengeluaran lebih menjelaskan tentang proporsi pendapatan yang diinvestasikan dalam bentuk investasi fisik. Disisi lain, komponen ini juga dapat diartikan sebagai representasi dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan untuk investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung dalam proses produksi di berbagai sektor usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi dalam negeri maupun dari impor.

PMTB Kota Sibolga menunjukkkan peningkatan baik secara nominal maupun secara riil. Namun berbeda bila dilihat dari peranannya, proporsi PMTB terbesar selama lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 18,68 % dan cenderung menurun pada tahun 2024 sebesar 17,89 %. Pertumbuhan PMTB secara keseluruhan dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2020 pertumbuhan PMTB mengalami pertumbuhan negatif ymag signifikan di angka - 2,10 %. Hal ini dipengaruhi oleh pandemi Covid-19.

Tabel 2. 47 Perkembangan PMTB Kota Sibolga Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Total PMTB					
ADHB (Milyar Rp)	1.045,31	1.082,53	1.162,50	1.253,52	1.288,50
ADHK (Milyar Rp)	657,82	673,09	694,52	716,89	733,69
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	18,65	18,68	18,33	18,38	17,89
Pertumbuhan (% ADHK)	-2,10	2,32	3,18	3,22	2,34

Sumber: BPS Kota Sibolga

2. Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor barang dan jasa merupakan transaksi perdagangan barang dann jasa dari penduduk (residen) ke bukan penduduk (nonresiden). Salah satu komponen PDRB pengeluaran dari sisi permintaan adalah ekspor dan dari sisi penyediaan adalah impor. Ekspor netto (net ekspor) merupakan hasil dari nilai ekspor dikurangi dengan nilai impor. Berikut ini merupakan perkembangan net ekspor barang dan jasa Kota Sibolga tahun 2020-2024.

Tabel 2. 48 Perkembangan net ekspor barang dan jasa Kota Sibolga tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Total nilai net ekspor					
ADHB (Miliar Rp)	319,35	348,27	413,29	448,33	475,03
ADHK 2010 (Miliar Rp)	325,28	351,17	386,80	418,00	461,55
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	5,70	6,01	6,53	6,57	6,60

Sumber: BPS Kota Sibolga

Dari tabel diatas ekspor netto Kota Sibolga dari tahun 2020 sampai dengan 2024 bernilai positif dan cenderung mangalami kenaikan. Kontribusi ekspor netto terhadap PDRB Kota sibolga selama periode 2020-2024 mengalami peningkatan. Kontribusi komponen ini pada tahun 2020 sebesar 5,70% dan mengalami kenaikan sampai tahun 2024 yaitu sebesar 6,60%.

2.3.5 Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1. Indeks Infrastruktur / Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Indeks Infrastruktur adalah salah satu indikator yang membentuk Indeks Pembangunan Kota atau City Development Index (CDI), yang digunakan untuk mengukur kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses ke fasilitas dasar. Fasilitas dasar yang menjadi komponen Indeks Infrastruktur meliputi akses jalan, air bersih, sanitasi, listrik, dan telepon. Semakin tinggi nilai Indeks Infrastruktur, semakin baik tingkat pembangunan di suatu kota.

Pada tahun 2024 Panjang jalan di Kota Sibolga mencapai 65,76 Km. Sepanjang 51,98 Km adalah jalan Kabupaten/Kota dan sisanya adalah jalan Provinsi dan jalan Negara. Sepanjang 27,52 Km kondisi jalan di Kota Sibolga berkondisi Baik atau 41,84 % dari total panjang jalan. Dan hanya 3,12 Km yang memiliki kondisi rusak berat atau 4,74% dari total panjang jalan. Adapun kondisi jalan di Kota Sibolga dari tahun 2020-2024 diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 49 Kondisi Jalan Di Kota Sibolga Tahun 2020-2024

Kondisi	Kota (Km)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Baik	36,09	31,27	24,02	24,02	27,12
Sedang	3,11	11,93	8,22	8,22	8,22
Rusak ringan	13,63	-	17,18	17,18	14,72
Rusak berat	3,21	8,78	2,56	2,56	1,92
Total Panjang jalan	56,04	51,98	51,98	51,98	51,98

Sumber: Dinas PUPR Kota Sibolga

Infrastruktur lainnya seperti akses air bersih menunjukkan bahwa air bersih yang disalurkan PDAM Tirta Nauli Kota Sibolga pada tahun 2024 mengalami peningkatan bila dibandingkan pada tahun sebelumnya. Air yang disalurkan kepada konsumen tahun 2023 sebanyak

4.942.807 m³ naik menjadi 5.166.412 m³ pada tahun 2024. Sektor rumah tangga adalah sektor pengguna air terbanyak berdasarkan jenis pelanggan yaitu sebesar 91%. Sementara itu, pada tahun 2024 tercatat penggunaan listrik di Kota Sibolga sudah mencapai 100% rumah tangga baik listrik PLN maupun non PLN. Data lengkap mengenai indeks infrastruktur/indeks kualitas layanan infrastruktur untuk Kota Sibolga saat ini belum tersedia.

2. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

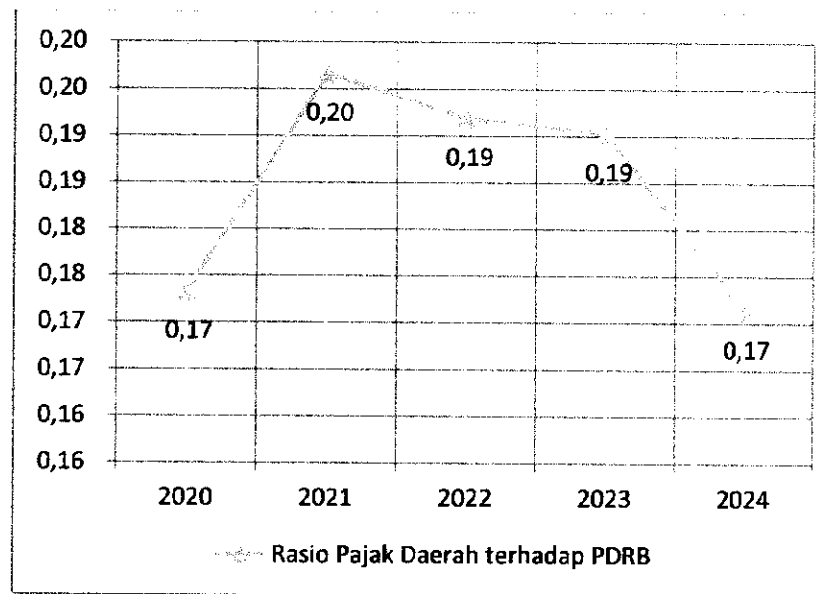
Pada tahun 2020 jumlah rumah layak huni di Kota Sibolga sebesar 73,26%. Namun pada tahun 2024 jumlah rumah layak huni meningkat menjadi 97%.

2.3.6 Stabilitas Ekonomi Makro

1. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah menjadi indikator yang digunakan untuk menilai kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Indikator ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui berbagai sumber pajak, seperti pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Pada tahun 2020 rasio pajak daerah terhadap PDRB berada di angka 0,17%. Pada tahun 2021 sampai 2023 mengalami kenaikan menjadi 0,19%. Namun pada tahun 2024 rasio pajak daerah terhadap PDRB kembali mengalami penurunan di angka 0,17%. Berikut perkembangan rasio pajak daerah terhadap PDRB tahun 2020-2024:

Grafik 2. 22 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Sibolga

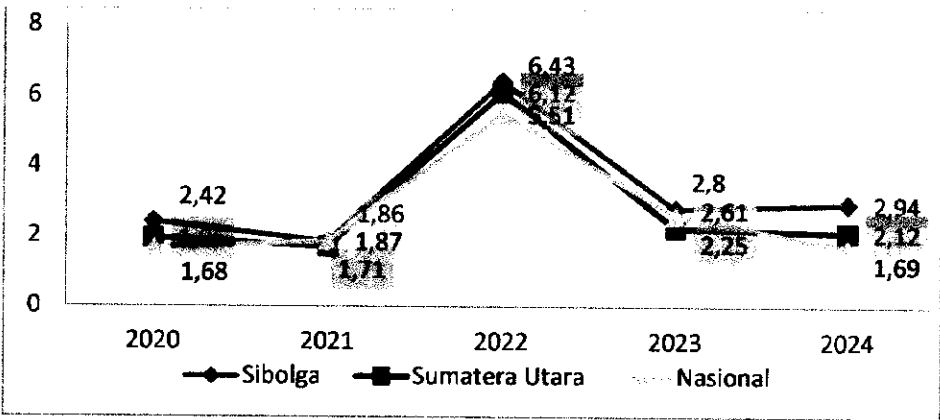


Sumber: BPS Kota Sibolga 2025 (data diolah)

2. Inflasi

Inflasi di Kota Sibolga selama kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dikatakan fluktuatif, namun berdasarkan penggolongannya inflasi di Kota Sibolga termasuk ringan, karena masih dibawah 10% pertahunnya. Hal ini disebabkan oleh terkendalinya harga beberapa komoditas pangan utama dan berfungsinya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Sibolga. Inflasi Kota Sibolga tahun 2020 menunjukkan 2,42%, tahun 2022 sebesar 6,14% kemudian menunjukkan penurunan ditahun 2024 yaitu 2,94 % dan Inflasi di Kota Sibolga lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, hal dapat dilihat ditabel berikut ini :

Grafik 2. 23 Perkembangan Inflasi Kota Sibolga dengan Propinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kota Sibolga, 2024

Tabel 2. 50 Inflasi Beberapa Kota di Sumatera Utara dan Indonesia

Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Sumatera Utara	1.96	1.71	6.12	2.25	2.12
Sibolga	2.42	1.86	6.43	2.8	2.94
Pematangsiantar	2.78	2.12	6.16	2.3	
Medan	1.76	1.7	6.1	2.19	
Padangsidempuan	3.27	1.49	6.4	2.95	
Gunungsitoli	5.32	0.54	5.74	2.35	
Nasional	1.68	1.87	5.51	2.61	1.69

Sumber : BPS, data diolah

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Secara keseluruhan, pelayanan umum di Kota Sibolga menunjukkan adanya kemajuan, namun masih banyak tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kepada seluruh masyarakat. Pemerintah perlu terus berupaya untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta memastikan pemerataan akses terhadap layanan dasar di seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah yang lebih terpencil. Dengan peningkatan dalam aspek pelayanan umum, kualitas hidup masyarakat Kota Sibolga dapat semakin berkembang dan mendukung kemajuan secara keseluruhan.

2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Kota Sibolga saat ini sedang melakukan upaya perbaikan tata kelola pemerintahan dengan cara meningkatkan pemahaman, komitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance, untuk itu seluruh perangkat daerah agar melakukan perbaikan yang konsisten dan berkualitas. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja dan kualitas birokrasi Pemerintah Kota Sibolga akan semakin meningkat, serta memberikan dampak nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Indikator-indikator yang mendukung regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum di Kota Sibolga merupakan indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan reformasi di bidang hukum, termasuk perbaikan regulasi, penegakan hukum, akses terhadap keadilan, dan transparansi dalam proses hukum. Indeks ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan sistem hukum yang adil, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2024, Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kota Sibolga pada tahun 2024 adalah 2,24 dengan kategori "Cukup". IRH bertujuan untuk meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan public.

2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-Government Index) adalah indikator yang digunakan untuk menilai tingkat penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam layanan pemerintahan di suatu daerah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah telah beralih ke sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efisien dan transparan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 mengenai Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, Indeks SPBE Kota Sibolga tergolong baik dengan nilai mencapai 2,24 dengan predikat “Cukup”. Namun, nilai ini masih di bawah Indeks SPBE Provinsi Sumatera Utara yang mencapai 3,21 dengan kategori “Baik”. Dalam perbandingan relatif, nilai Indeks SPBE Kota Sibolga menempatkannya di peringkat 32 dari 34 Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

3. Indeks Pelayanan Publik

Berdasarkan PermenPAN RB No. 17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk menilai kinerja pelayanan publik di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia. Penilaian ini didasarkan pada beberapa aspek, yaitu Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kota Sibolga mengukur kinerja pelayanan publik di berbagai instansi di daerah tersebut. IPP digunakan untuk menilai kualitas pelayanan publik berdasarkan beberapa aspek, seperti kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi. Untuk penilaian IPP Kota Sibolga adalah Pemerintah Kota Sibolga aktif dalam melakukan penilaian pelayanan publik, termasuk melalui survei kepuasan masyarakat. Penilaian ini dilakukan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara juga

melakukan penilaian pelayanan publik di Kota Sibolga untuk memberikan masukan kepada pemerintah.

Pada tahun 2024, IPP Kota Sibolga yang dievaluasi oleh Ombudsman mencapai nilai 92,61, yang termasuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi dan kategori A, yang merupakan opini kualitas tertinggi.

4. Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional merupakan indikator penting untuk menilai tingkat integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah. Indeks ini bertujuan untuk memantau, mengevaluasi, dan memperbaiki praktik antikorupsi, serta mendorong terciptanya budaya integritas di sektor publik. Dengan adanya indeks ini, diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang bersih, jujur, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Indeks Integritas Nasional (INN) Kota Sibolga tidak memiliki data yang spesifik. Namun, secara umum, Indeks Integritas Nasional (INN) merupakan alat ukur yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menilai tingkat integritas di instansi publik, termasuk pemerintah daerah. Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dikembangkan KPK juga digunakan untuk mengukur risiko korupsi di instansi tersebut.

5. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum di Kota Sibolga merupakan indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan reformasi di bidang hukum, termasuk perbaikan regulasi, penegakan hukum, akses terhadap keadilan, dan transparansi dalam proses hukum. Indeks ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan sistem hukum yang adil, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada tahun

2024, Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kota Sibolga pada tahun 2024 adalah 2,24 dengan kategori "Cukup". IRH bertujuan untuk meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan public.

6. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-Government Index) adalah indikator yang digunakan untuk menilai tingkat penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam layanan pemerintahan di suatu daerah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah telah beralih ke sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efisien dan transparan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 mengenai Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, Indeks SPBE Kota Sibolga tergolong baik dengan nilai mencapai 2,24 dengan predikat "Cukup". Namun, nilai ini masih di bawah Indeks SPBE Provinsi Sumatera Utara yang mencapai 3,21 dengan kategori "Baik". Dalam perbandingan relatif, nilai Indeks SPBE Kota Sibolga menempatkannya di peringkat 32 dari 34 Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

7. Indeks Pelayanan Publik

Berdasarkan PermenPAN RB No. 17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk menilai kinerja pelayanan publik di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia. Penilaian ini didasarkan pada beberapa aspek, yaitu Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kota Sibolga mengukur kinerja pelayanan publik di berbagai instansi di daerah tersebut. IPP digunakan untuk menilai kualitas pelayanan publik berdasarkan beberapa aspek, seperti kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi. Untuk penilaian IPP Kota Sibolga adalah Pemerintah Kota Sibolga aktif dalam melakukan penilaian pelayanan publik, termasuk melalui survei kepuasan masyarakat. Penilaian ini dilakukan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara juga melakukan penilaian pelayanan publik di Kota Sibolga untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Pada tahun 2024, IPP Kota Sibolga yang dievaluasi oleh Ombudsman mencapai nilai 92,61, yang termasuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi dan kategori A, yang merupakan opini kualitas tertinggi.

8. Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional merupakan indikator penting untuk menilai tingkat integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah. Indeks ini bertujuan untuk memantau, mengevaluasi, dan memperbaiki praktik antikorupsi, serta mendorong terciptanya budaya integritas di sektor publik. Dengan adanya indeks ini, diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang bersih, jujur, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Indeks Integritas Nasional (INN) Kota Sibolga tidak memiliki data yang spesifik. Namun, secara umum, Indeks Integritas Nasional (INN) merupakan alat ukur yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menilai tingkat integritas di instansi publik,

termasuk pemerintah daerah. Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dikembangkan KPK juga digunakan untuk mengukur risiko korupsi di instansi tersebut.

2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial

Menjamin kepastian hukum dan keadilan dengan Stabilitas politik akan menghasilkan pemerintahan efektif dan responsif, keamanan nasional yang tangguh menciptakan lingkungan aman, sedangkan stabilitas ekonomi mendukung kesejahteraan masyarakat. Ketika keempat aspek ini terwujud, negara akan memiliki fondasi yang kuat untuk melaksanakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, menarik investasi, menciptakan pekerjaan yang layak dan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Hal ini dapat di jelaskan dengan indikator sebagai berikut:

Persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kota Sibolga selama periode 2020 hingga 2024 mencerminkan bahwa seluruh pelaksanaan dan penegakan Perda di Kota Sibolga bila dilihat dari Indikator Kinerja Utama masih belum memenuhi target.

2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Sibolga dapat diukur menggunakan berbagai instrumen, termasuk data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sibolga dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). IDSD mengukur kemampuan ekonomi daerah untuk mencapai pertumbuhan kesejahteraan yang berkelanjutan, termasuk indikator seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan lain-lain.

2.3.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu dilihat capaian indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah. Indikator kinerja utama Perangkat Daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level intermediate outcome, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan target tersebut bersumber dari RPJMD Tahun 2021-2026. IKU PD/IKK merupakan indikator kinerja sasaran RPJMD yang juga merupakan IKU pemerintah daerah, serta indikator kinerja sasaran seluruh Renstra Perangkat Daerah yang juga merupakan IKU perangkat daerah.

Selain itu dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Berikut capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang dikutip berdasarkan dokumen Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah yang telah diterima, yaitu sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib

Fokus layanan urusan pemerintahan wajib memiliki peran yang sangat Penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.

Dengan melaksanakan urusan pemerintahan wajib dengan baik, pemerintah daerah tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menciptakan landasan yang kuat bagi kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, pemerintah harus terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat sistem pendukung, dan memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan hak-hak mereka tanpa terkecuali.

a. Pendidikan

Salah satu pengukuran kualitas Pendidikan di Kota Sibolga adalah melalui Indeks Pendidikan. Dimana Indeks Pendidikan sering digunakan sebagai alat untuk memantau kemajuan dan perbandingan antar negara atau wilayah dalam mencapai tujuan pendidikan, serta untuk merancang kebijakan dan intervensi yang tepat untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Indeks Pendidikan sering kali mencakup berbagai faktor, seperti:

1. Aksesibilitas: Persentase anak-anak usia sekolah yang terdaftar di institusi pendidikan, tingkat partisipasi siswa dari kelompok-kelompok rentan, dan jarak fisik antara sekolah dengan rumah siswa.
2. Kualitas Pengajaran: Ini mencakup kualifikasi guru, rasio siswa-guru, dukungan pembelajaran, dan pembaruan kurikulum.
3. Hasil Akademik: Nilai tes standar, tingkat kelulusan, tingkat kelulusan, dan pencapaian siswa lainnya dalam hal pengetahuan dan keterampilan akademik.
4. Kesenjangan: Ini mencakup kesetaraan gender dalam akses dan partisipasi pendidikan, serta kesetaraan dalam hasil pendidikan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda.
5. Efisiensi: Efisiensi sistem pendidikan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia, seperti

anggaran pendidikan, fasilitas fisik, dan waktu pengajaran.

- 6. Inklusivitas: Sejauh mana sistem pendidikan mengakomodasi siswa dengan kebutuhan khusus, termasuk siswa dengan disabilitas.

Pada Tahun 2020 sampai dengan 2021 terjadi peningkatan sebesar 0.13 poin, Tahun 2021 sampai dengan 2022 terjadi kenaikan sebesar 0.03 poin, dan tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 juga meningkat sebesar 0.13 poin, dan 2023 sampai dengan tahun 2024 meningkat sebesar 0.02 poin. Kondisi Indeks Pendidikan di Kota Sibolga dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. 51 Indeks Pendidikan Kota Sibolga Tahun 2020 -2024

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pendidikan	18,36	18,49	18,52	18,64	18,66

Sumber : Dinas Pendidikan dan kebudayaan kota Sibolga

Selain Indeks Pendidikan tersebut di atas ada beberapa indikator lain yang menjadi tolok ukur Kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan menjadi salah satu acuan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kinerja pemerintahan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 52 Indikator Pendidikan Kota Sibolga Tahun 2020 s.d 2024

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Layanan urusan Wajib Dasar, meliputi:									
Pendidikan, meliputi:									
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),	0								
Angka Partisipasi Kasar PAUD	23.59	79.04	22.81	85	80.01	95	87.24	100	77.48
Angka Partisipasi Kasar SD	0	100.75	95.34	100.75	92.92	100.75	94.69	100.75	94.69
Angka Partisipasi Kasar SMP	0	105.92	102.87	105.92	148.27	105.92	152.75	105.92	152.75

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Angka pendidikan yang ditamatkan,									
Angka Partisipasi Murni SD	0	98.94	88.77	88.23	82.53	89.12	84.1	98.94	84.1
Angka Partisipasi Murni SMP	0	105.92	71.52	105.92	83.29	105.92	85.81	105.92	85.81
Angka Partisipasi Sekolah SD	0	98.94	103.12	98.94	92.92	98.94	94.69	98.94	98.36
Angka Partisipasi Sekolah SMP	0	99	85.48	99	148.27	99	152.75	99	98.36
Angka Putus Sekolah SD	0	0.67	0.32	0.62	0.02	0.63	0	0.44	0
Angka Putus Sekolah SMP	0	0.79	0.07	0.71	0.07	0.57	0	0.49	0
Angka Kelulusan SD	0	100	100	100	100	100	100	100	100
Angka Kelulusan SMP	0	100	100	100	100	100	100	100	100
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	0	90	85.48	95	101.6	95	101.6	100	100
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	0	100	100	100	100	100	100	100	100
Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	0	100	100	100	100	100	100	100	100
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	0	0.28	0.24	0.28	0.24	0.22	0.22	100.00	
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah,	0	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar,	0	1:17	1:17	1:17	1:17	1:17	1:17	1:17	1:17
Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah,	0	1:17	1:13	1:17	1:13	1:17	1:13	1:17	1:13
Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar,	0	1:16:31	1:16:31	1:16:31	1:16:31	1:16:31	1:16:31	1:16:31	1:16:31
Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata,	0	1:17:12	1:17:12	1:17:12	1:17:12	1:17:12	1:17:12	1:17:12	1:17:12
Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar,	0	95	96	96	100	96	100	96	100
Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki,	0	99.71	99	99.71	99.71	99.75	99.99	99.8	99.99
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara), dan	0	99.71	99	99.75	99.71	99.75	99.99	99.8	99.99
Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / DIV.	0	98.26	86	98.26	86.86	99	94.36	99	91.24

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga

b. Kesehatan

1) Dinas Kesehatan

Kondisi kesehatan di Kota Sibolga diprioritaskan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat, salah satu indikator pendukung adalah Indeks Kesehatan, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 53 Indeks Kesehatan Kota Sibolga Tahun 2020 s.d 2024

Indikator	Realisasi				
Indeks Kesehatan	2020	2021	2022	2023	2024
		91,90	95,17	97,68	83,3

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Sibolga

Selain itu derajat kesehatan juga dilihat dari Capaian Indikator Utama Pembangunan Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 2. 54 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	0	19	4,8	18	4,1	17	3,11	15	1.2
Angka kelangsungan hidup bayi	0	989		990	995	992	1669/1.000 kelahiran hidup	993	998
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	0	30	0	29	15	28	0	27	1.27
Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	0	7	3,78	11,6	7,7	5	3,1	4	1.27
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	0	217	60	205	0	194	62,26	183	120
Rasio posyandu per satuan balita	0	12	12	12	12	12	1012,2	12	11,7
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0	0.25/1 penduduk	0,25	0.25/1.000 pend	0.25/1.000 pend	0.25/1.000 pend	0.26/1.000 pend	0.25/1.000 pend	0.25/1.000 pend
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0	0.03/1.000 penduduk	0,03	0.03/1.000 pend	0.03/1.000 pend	0.03/1.000 pend.	0.03/1.000 pend.	0.03/1.000 pend.	0.03/1.000 pend
Rasio dokter per satuan penduduk	0	1.1/1.000 penduduk	1,23	1.1/1.000 pend	1.1/1.000 pend	1.1/1.000 pend	145,674 /1.000 pend	1.2/1.000 pend	2,4/1.000 pend
Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0	10.7/1.000 penduduk	11,27	10.7/1.000 pend	1,0	10.9/1.000 pend	10.4/1.000 pend	11/1.000 pend	3,52/1.000 pend
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	0	95	100	95	56,18	0,95	482,7	95%	91.91

Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	0	90%	97,96%	92	67,47	0,92	99,8%	95%	26%
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	0	100%	11,80	100	51,77	100%	5,9%	100%	0
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	0	100%	100%	100	100	100%	0,1%	100%	100%
Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)									
Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	0	100%	65,44%	100%	51,77	100%	27,6%	100%	61.21%
Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	0	100%	0%	100%	0	100%	100%	100%	8.14
Cakupan balita pneumonia yang ditangani	0	0.23%	0%	0,3	0	0.30%	0	0,4%	100%
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	0	73.70%	86,88%	74	59	75%	41,26%	76%	45.68%
Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0	352	384	387	452	422	411	457	0.22
Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0	4.6	3,42	4,5	6,2	4.3	1,20	4,3	2.49
Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	0	44%	48,84%	47	59	48%	72,68%	49%	45.68%
Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	0	93%	93.52%	93,5	89	94%	78,37%	94,5%	100%
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	0	80.60%	100%	81	100	82%	100%	83%	100%
Penderita diare yang ditangani	0	93%	100%	94	100	94.50%	100%	95%	100%
Angka kejadian Malaria	0	1.148	9.13	1	9	1	0	1	0
Tingkat kematian akibat malaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0
Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0

Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0	0.04%	0.06%	1	0,05	1%	0,16%	1%	128.59 %
Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	0	93%	58.85%	93	90	94%	12,53%	94%	10%
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	0	100%	55.78%	100	55,78	100%	100%	100%	100%
Cakupan kunjungan bayi	0	90%	98.74%	90	68,26	90%	100%	90%	100%
Cakupan puskesmas	0	125%	125%	125	125	125%	125%	125%	125%
Cakupan pembantu puskesmas	0	82,35%	82.35%	82,35	82,30	82,35%	82,35%	82,35%	82,35%
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	0	92%	97.40%	92	67,45	95%	97,4%	95%	90.50%
Cakupan pelayanan nifas	0	90%	97.96%	92	61,66	92%	86,6%	95%	95%
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	0	90%	100.00%	90	21,91	90%	87,78%	90%	15%
Cakupan pelayanan anak balita	0	90%	93.29%	92	74,61	92%	95,6%	95%	100%
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan	0	70%	100%	77	0	79%	61%	81%	78%
Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	0	1929	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	0	100%	56%	100%	0%	100%	100%	100%	100%
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	0	100%	0%	100%	100%	100%	0	100%	0%
Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	0	100%	99,95%	100%	99,95	100%	99,8%	100%	96%
Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	0	100%	97,96%	100%	97,96	100%	94%	100%	94.61%
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	0	100%	99,57%	100%	99,57	100%	100%	100%	95.56%
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	0	100%	93,29%	100%	93,29	100%	95,6%	100%	100%
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0	100%	37,65%	100%	37,65	100%	100%	100%	93%

Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94.98%
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas me dapatkan skrining kesehatan sesuai standar	0	100%	97,15%	100%	70,05%	100%	99,1%	100%	99.10%
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0	100%	88,23%	100%	37,90%	100%	91,1%	100%	91.23%
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0	100%	100%	100%	59,10%	100%	95,2%	100%	97.81%
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	0	100%	100%	100%	54,47%	100%	98,4%	100%	100%
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	0	100%	52,67%	100%	52%	100%	100%	100%	129.53 %
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	0	100%	84,04%	100%	84%	100%	107%	100%	113%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Sibolga

2) RUMAH SAKIT UMUM Dr. F. L. TOBING

Selain itu pelayanan kesehatan di Kota Sibolga terlihat dari pelayanan dan penanganan masalah kesehatan melalui Enam indikator yaitu Pencapaian Persentase BOR (Bed Occupancy Rate) dan Rata- rata AVLOS (Average Length of Stay, TOI (Turn Over Interval), BTO (Bed Turn Over), NDR (Net Death Rate), GDR (Gross Death Rate). Capaian Pelayanan Rumah Sakit Umum Dr. F. L. Tobing dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 55 Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit
Umum Dr.F.L. Tobing Tahun 2020-2024

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
1. BOR (Bed Occupancy Rate)	0	33%	31%	40%	32%	45%	33%	50%	47%
2. AVLOS (Average Lenght of Stay)	0	4 Hari	4 hari	4 Hari	4 hari	4 Hari	4 Hari	4 Hari	4 Hari
3. TOI (Turn Over Interval)	0	10 hari	9 hari	10 hari	8 hari	10 hari	7 hari	5 Hari	5 Hari
4. BTO (Bed Turn Over)	0	20 Kali	29 Kali	22 Kali	30 Kali	25 Kali	31 Kali	37 Kali	10 Kali
5. NDR (Net Death Rate)	0	20%	14,5%	19/1000	16/1000	18/1000	14.50%	17%	13%
6. GDR (Gross Death Rate)	0	55%	49,5%	53/1000	44,7/1000	50/1000	40.20%	48/1000	31/1000

Sumber: Rsu Dr. F.L.Tobing Kota Sibolga

Kondisi Pelayanan RSUD Dr. F. L. Tobing Kota Sibolga yang tidak mencapai target dapat dilihat pada BOR (Bed Occupancy Rate) atau Persentase pemakaian tempat tidur belum mencapai target dari 50% dengan realisasi 47% tahun 2024, BTO (Bed Turn Over) atau rata-rata jumlah pasien yang menggunakan satu tempat tidur secara bergantian juga belum mencapai target dari 37 kali dengan realisasi 10 kali tahun 2024, upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan seperti service excellen, komunikasi secara efektif dan pelayanan prima, dan menjamin akses bagi pelayanan bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan serta meningkatkan fasilitas di RSUD Dr. F. L. Tobing.

c. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan pada Pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan maka salah satu ketercapaian dapat dilihat dari beberapa indikator lain yang mendukung prioritas pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 56 Indikator Kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	0	77,14	79,49	86,90	86.9	85	92.5	89.01	58.62
Persentase drainase dalam kondisi baik	0	100	88,54	100	88,54	100	89.1	5.45	7.13
Persentase rumah tangga yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	0	100	86,4	100	70.54	100	100	84.25	100
Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	0	100	49,6	100	56.93	100	35.9	80	35.9

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga

Kondisi Jalan Baik di Kota Sibolga merupakan salah satu indikator penting dalam penilaian infrastruktur transportasi yang ada. Jalan yang baik memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian, mobilitas masyarakat, serta konektivitas antarwilayah. Keberadaan jalan yang memadai sangat berperan dalam mempercepat arus distribusi barang, mempermudah akses ke fasilitas kesehatan, pendidikan, dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

Pada umumnya, Kota Sibolga memiliki jaringan jalan yang luas dan beragam, yang meliputi jalan nasional, provinsi, hingga jalan kabupaten/kota. Kondisi jalan baik di Kota Sibolga mengacu pada jalan-jalan yang terpelihara dengan baik, bebas dari kerusakan berat, dan dapat dilalui dengan aman dan nyaman oleh berbagai jenis kendaraan. Dari table dibawah ini dapat dilihat Jenis Permukaan Jalan baik, sedang dan rusak di Kota Sibolga pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 57 Jenis Permukaan Jalan Baik, Sedang, Dan Rusak di Kab/Kota Tahun 2024

Kota	Jenis Permukaan Jalan		
	Baik	Sedang	Rusak
Sibolga	24.43 km	8.43 km	23.18 km

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga

Jalan aspal tetap menjadi yang paling dominan dan mendukung kelancaran transportasi, sementara jalan beton dan tanah/kerikil masih berperan penting di daerah-daerah tertentu. Pemerintah Kota Sibolga perlu terus focus pada pembangunan infrastruktur jalan agar dapat menciptakan konektivitas yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Kota Sibolga. Kondisi Panjang jalan dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 2. 58 Panjang jalan Kota menurut jenis permukaan

Kota	Jenis Permukaan Jalan			
	Aspal (Hotmix)	Aspal (Lapen)	Beton	Kerikil
Sibolga	33.62 km	2.2 km	11.77 km	8.45 km

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga

- d. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
- Capaian Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 59 Capaian Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2020-2024

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, meliputi:									
Rasio rumah layak huni,	0	0.12	13.82	0.12	56	0.12	56	0.12	56
Rasio permukiman layak huni,	0	0.80	73.55	0.8		0.8			0.8

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Cakupan ketersediaan rumah layak huni,	0	0.73	97.09	0.74	77	0.75	0	0.76	
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau,	0	0.73	98.24	0.74	98.24	0.75	98.24	0.76	98.24
Persentase pemukiman yang tertata,	0	0.80		0.8	80	0.8		0.8	
Persentase lingkungan pemukiman kumuh,	0	0.15	1.72	0.14	11	0.13	0	0.12	
Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan,	0	0.15	10.83	0.15	11	0.15	0	0.15	
Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan,	0	0.27	15.96	0.26	23	0.25		0.24	
Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU,	0	0.80	58.14	80	0.8	0.8	0	0.8	

Sumber: Dinas PKPLH Kota Sibolga

Penanganan kawasan kumuh di Kota Sibolga pada tahun 2020 mencapai angka 0,54 hektar atau 0,13%. Sedangkan pada tahun 2021 luasan kawasan kumuh yang tertangani 27,01 hektar atau 6,57%. Untuk tahun 2022 luasan kawasan kumuh yang tertangani mencapai 1,35 hektar atau 0,33%. Untuk tahun 2023 luasan kawasan kumuh yang tertangani 43,22 ha atau 10,52%, dan capaian untuk tahun 2024 adalah 66,42 ha.

Tabel 2. 60 Penangan Kawasan Kumuh di Kota Sibolga Tahun 2020-2024

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Sibolga Utara	59,10 Ha	55,28 Ha	35,11 Ha	26,08 Ha	25,34 Ha
Sibolga Kota	22,73 Ha	21,5 Ha	21,5 Ha	18,08	18,08 Ha
Sibolga Sambas	21,38 Ha	30,62 Ha	23,486 Ha	18,27 Ha	14,76 Ha
Sibolga Selatan	98,86 Ha	90,68 Ha	73,58 Ha	55,52 Ha	55,52 Ha

e. Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat merupakan aspek yang sangat penting dalam menciptakan kondisi kehidupan yang aman, nyaman, dan sejahteraan bagi setiap warga negara. Ketiga elemen ini saling terkait dan memiliki peran yang besar dalam memastikan bahwa masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang harmonis, bebas dari gangguan, ancaman, atau kekhawatiran yang dapat mengganggu kesejahteraan mereka.

f. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp)

Capaian Indikator Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Sibolga dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 61 Capaian Indikator Satpol PP Kota Sibolga 2020-2024

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, meliputi:									
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas),	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,keindahan),	0	70	61	17	17	12	12	12	12
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota,	0	71.16	24.62	71.16	71.16	71.16	71.16	71.16	71.16
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), dan	0	15	10.01	15	9.19	15	11.3	15	8.07
Persentase Penegakan PERDA.	0	32	11	31	10	11	6	11	4

Sumber: Satpol PP Kota Sibolga

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Persentase Penegakan PERDA dan PERKADA yang ditegakkan, pada tahun 2024 ada 4 (empat) kasus yang dapat diselesaikan. Pencapaian kinerja ini dipengaruhi faktor kesadaran masyarakat yang semakin baik terhadap peraturan dan

kebijakan Pemerintah, sehingga ketertiban dan ketenteraman masyarakat meningkat.

g. Penanggulangan Bencana

Berdasarkan hasil pengukuran indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) 2024 Kota Sibolga memiliki nilai 165,92 Ancaman bencana di Kota Sibolga adalah Gempa bumi, tsunami, tanah longsor, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan. Capaian Indikator Penanggulangan Bencana Kota Sibolga dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 62 Kondisi Penanggulangan Bencana Kota Sibolga 2020-2024

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Indeks risiko bencana (IRB)	0		167.20	151.3	167.20	147.7	167,20	165.00	165,92

Sumber : BPBD Kota Sibolga 2024

Dari Tabel diatas, Indeks Resiko Bencana mengalami penurunan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan Kota Sibolga dalam mengantisipasi dan mitigasi dalam menghadapi Bencana yang terjadi di Kota Sibolga.

h. Sosial

Pembangunan kesejahteraan merupakan salah satu tujuan utama dalam pembangunan daerah, termasuk di Kota Sibolga. Pencapaian kesejahteraan tidak hanya terfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, akses terhadap pekerjaan yang layak, dan pemerataan pembangunan. Pada tahun 2024, Kota Sibolga terus berupaya untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakatnya melalui berbagai program dan kebijakan yang mengutamakan keberlanjutan dan inklusivitas, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Capaian Indikator Sosial Kota Sibolga dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 63 Capaian Indikator Sosial Kota Sibolga 2020-2024

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya,	0	0	0	10	20	20	0	30	0
Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial,		Sesuai dengan Permensos RI No.09 Tahun 2018 Panti sosial bukan urusan Dinas Sosial Kab/Kota							
Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial,	0	0	0	0	0	33	0	0	0
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat,	0	0	51	80	77	80	37	80	78
Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana	0	0	51	80	77	80	37	80	78

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
tanggap darurat lengkap,									
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	0	0	0	10	217	20	295	30	269

Sumber: Dinas Sosial Kota Sibolga

2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar merujuk pada berbagai kegiatan pemerintahan yang tidak langsung berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, namun tetap memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan dan pengembangan daerah. Meskipun tidak secara langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar berfokus pada aspek-aspek yang meningkatkan efisiensi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, menciptakan kesejahteraan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial.

a. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah, termasuk di Kota Sibolga. Kualitas, keterampilan, serta jumlah tenaga kerja yang tersedia menjadi penentu utama dalam mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata. Kota Sbolga, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan keragaman sektor ekonomi, menghadapi tantangan dan peluang dalam mengoptimalkan tenaga kerjanya agar dapat berkontribusi maksimal terhadap kemajuan daerah. Capaian Indikator Tenaga Kerja di Kota Sibolga dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 64 Capaian Indikator Tenaga Kerja Kota Sibolga 2020-2024

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Tenaga kerja, meliputi:									
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun,									
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB),	0	5	0	5	0	5	3	5	1
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan,	0	1128	26	1270	236	1771	69	1693	133
Keselamatan dan perlindungan,	0	12337	5000	16449	5000	20562	9000	24674	2000
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek:	0	24674	5000	25908	5000	27553	9000	29198	2000
Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah,	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Besaran Pemeriksaan Perusahaan,	0	23	23	23	23	23	23	23	23
Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan,	0								
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi,	0	70	60	70	20	75	20	75	15
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat,	0	70	60	70	c	75	20	75	0
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan		70	60	70	0	75	40	75	0

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021	2022	2023	2024				
kewirausahaan, dan	0								

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga

b. Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

Perkembangan capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 65 Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021	2022	2023	2024				
b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, meliputi:									
b.1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah,	0	15.2	0.002	18	0.06	20	0.0059	24	0.2
b.2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR,	0	25	100	25	0.25	25	0.15	30	15
b.3. Partisipasi perempuan di lembaga swasta,	0	5506	0.04	5510	1239	5560	1270	5570	0.03
b.4. Rasio KDRT:	0	5	0.4	4	3	3	3	2	2
b.5. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur:	0	0		0		0		0	
b.6. Partisipasi angkatan kerja perempuan,	0	24.42	0.65	25.42	0.17	26.42	0.16	27.42	0.58
b.7. Cakupan perempuan dan snak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu,	0	11	3	10	15	8	7	6	23
b.8. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit,	0	10	2	9	6	8	4	7	9
b.9. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan	0	5	0	4		3		2	0

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu,									
b.10.Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,	0	1	0	0	0	0	0	0	0
b.11.Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum,	0	11	0	10	0	9	0	8	10
b.12.Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.13.Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan,	0	1	0	0	2	0		0	
b.14.Rasio APM perempuan/laki-laki di SD,	0	87.42		88.12	0	88.82	0	89.52	
b.15.Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP,	0	89.66		90.16	0	90.66	0	91.16	
b.16.Rasio APM perempuan /laki-laki di SMA,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.17.Rasio APM perempuan /laki-laki di Perguruan Tinggi,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.18.Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun, dan	0	0.98	0	0.93	0	0.88	0	0.83	0
b.19.Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian.	0	24.64	0.6	25.64	0.17	26.64	0.16	27.69	0.06

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga

c. Pangan

Pola pangan yang sehat dan bergizi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan di Kota Sibolga. Dalam konteks ini, pola pangan mengacu pada kebiasaan, pilihan, dan keberagaman makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-

hari. Pola pangan yang baik harus mencakup keberagaman konsumsi pangan yang dapat memenuhi kebutuhan gizi secara seimbang, serta mempertimbangkan ketersediaan pangan lokal yang berkelanjutan. Skor Pola Pangan Harapan memiliki peran penting dalam menilai tingkat keberagaman konsumsi pangan di kalangan penduduknya. Sebagai provinsi dengan keragaman suku, budaya, dan tradisi kuliner yang tinggi, pola makan masyarakat Kota Sibolga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pangan lokal serta tradisi dan kebiasaan makan yang sudah lama berkembang di daerah tersebut.

Kemudian, Beberapa Indikatornya yang telah mencapai target adalah Ketersediaan Pangan Utama yang merupakan aspek penting dalam pembangunan sektor Ketersediaan Pangan Utama tahun 2024 dengan target 70% dengan realisasi 79.26%, Ketersediaan energi perkapita energi yang terkandung dalam makanan yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari tahun 2024 dengan target 2,084.90 kalori dengan realisasi 2,292 kalori dan Ketersediaan protein perkapita jumlah pangan yang tersedia untuk dikonsumsi per kapita penduduk dalam bentuk protein untuk tahun 2024 dengan target 55.8% dengan realisasi 83.95%. Sementara untuk Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan dari tahun 2024 dengan target 85% tetapi realisasi nol (0). Capaian indikator ketahanan pangan dan produksi peternakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 66 Capaian Indikator Pangan Kota Sibolga
Tahun 2020-2024

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Pangan, meliputi:									
Ketersediaan pangan utama,	0	70	0	70	0	70	116	70	79.26
Ketersediaan energi perkapita	0	2,084.90	0	2,084.90	5324	2,084.90	5,324	2,084.90	2,292

Ketersediaan protein perkapita	0	55.8	0	55.8	157.98	55.8	157.98	55.8	83.95
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.	0	70	0	80	0	85	0	85	0

Sumber: Dinas Perikanan

d. Lingkungan Hidup

Ketercapaian Pembangunan Lingkungan Hidup di dukung oleh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dimana IKLH Pada Tahun 2023 IKLH mengalami peningkatan ditahun 2024 mencapai sebesar 73,96 poin dari 73,96 poin. Nilai IKU Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 67 Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kota Sibolga Tahun 2020-2024

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Lingkungan hidup, meliputi:									
Kabupaten/Kota, meliputi:	0								
Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota,	0	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	1	0	1	0
Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota,	0	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	0	0	2	2
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi,	0	0	0	0	0	53.91	60	0	0
Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air,	0	53.71	57.76	53.81	59.09	91.83	89.67	91.93	92.14
Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara,	0	91.63	89.48	91.73	87.27	47.41	27.49	49.14	46.13
Hasil Pengukuran Indeks kualitas Lingkungan	0	43.96	45.4	45.68	46	47.41	27.49		

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota,	0					22.32	22.32	22.32	22.32
Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota,	0	22.32	22.32	22.32	22.32	4.464	4.464	4.464	4.464
Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA,	0		4.464	4.464	4.464	100	4.464	100	100
Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional,	0	100	100	100	100	22.32	22.32	22.32	22.32
Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional,	0	22.32	22.32	22.32	22.32	100	100		
Penetapan hak MHA,									
Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan,	0	0	0	0	0	100	100		
Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana,	0	0	0	0	0	100	100		

Sumber: Dinas PKPLH Kota Sibolga

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa semua indikator indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2024 telah dirilis. Beberapa Indikator juga mengalami capaian naik turun, dengan ini akan menjadi fokus Pemerintah Kota Sibolga dalam menjalankan Program dan kegiatan yang berkaitan dengan Lingkungan hidup di Kota Sibolga.

e. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan tiga aspek

penting dalam sistem pemerintahan yang berfungsi untuk memberikan layanan dasar kepada masyarakat, khususnya dalam rangka pengelolaan data kependudukan, pelaksanaan pencatatan status sipil, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Ketiganya memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta mendukung pembangunan yang merata, terutama di daerah- daerah pedesaan. Capaian Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 68 Capaian Indikator Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meliputi:									
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0	100	100	100	98,6	100	97,1	100	99,82
Rasio bayi berakte kelahiran	0	97,5	100	98	100	98,4	100	99	100
Rasio pasangan berakte nikah	0	75	78,02	78	77,54	80	83,19	83	84,95
Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	0	100	100	100	100	100	100	100	100
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	0	100	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	0	100	100	100	98,6	100	97,1	100	99,82
Cakupan penerbitan akta kelahiran	0	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah mencapai target.

f. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan

kebijakan di bidang kelembagaan masyarakat, partisipasi dan ketahanan masyarakat serta pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna. 17 (tujuh belas) kelurahan aktif menjalankan program kegiatan disetiap kelompok binaan PKK sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 69 Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020-2024

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, meliputi:									
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik,	0	17	17	17	17	17	17	17	17
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM),	0	17	0	17	0	17	0	17	0
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK,	0	17	10.045	17	10.045	17	10.045	17	10.045
Persentase LSM aktif,	0	38		38		38		38	
Persentase LPM Berprestasi,	0	17	0	17	0	17	0	17	0
Persentase PKK aktif,	0	515	452.63	515	455.46	515	442.23	515	442.23
Persentase Posyandu aktif,	0	171	100.36	171	147.76	171	163.56	171	171
Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masvarakat, dan	0	17	2.2	17	2.2	17	6.33	17	4.25
Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat.	0								

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga

g. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pelayanan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), beberapa hal yang perlu diperhatikan meliputi peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan aksesibilitas, dan penguatan sosialisasi dan advokasi.

Peningkatan Kualitas Pelayanan:

- Memastikan pelayanan KB terpadu dan berkualitas, termasuk penyediaan alat kontrasepsi yang lengkap, layanan kesehatan reproduksi yang memadai, dan konseling yang efektif.
- Meningkatkan pelatihan dan pembinaan SDM DPPKB, khususnya petugas lapangan (PLKB), agar memiliki kompetensi yang memadai dalam memberikan pelayanan.
- Menetapkan standar waktu pelayanan dan memastikan kepatuhan terhadap standar tersebut.
- Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja pelayanan dan melakukan perbaikan berkelanjutan.

Peningkatan Aksesibilitas:

- Menjamin aksesibilitas pelayanan KB bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di daerah terpencil atau sulit.
- Menyediakan layanan KB di berbagai fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas, klinik swasta, dan fasilitas kesehatan lainnya.
- Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan media massa, untuk meningkatkan aksesibilitas.

Penguatan Sosialisasi dan Advokasi:

- Meningkatkan sosialisasi dan advokasi program KB kepada masyarakat, baik melalui media cetak, media elektronik, media sosial, maupun kegiatan sosialisasi langsung.
- Melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam sosialisasi, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan PLKB.
- Menggunakan pendekatan yang relevan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

- Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan program KB, baik di tingkat keluarga, masyarakat, maupun pemerintah.

Tabel 2. 70 Capaian Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga Tahun 2020-2024

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Laju pertumbuhan penduduk (LPP),	0	0,42	1,13	0,42	1,13	0,42	1,13	0,42	1,13
Total Fertility Rate (TFR);	0	2,65	2,6	2,64	2,29	2,59	2,24	2,52	
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB,	0	50%	100%	51%	100%	52%	100%	53%	100%
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk;	0	20%	100%	30%	100%	40%	100%	50%	100%
Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk,	0	0	2	1	3	1	4	1	4
Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan,	0	0	3	2	3	2	3	2	3
Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan,	0	1	1	2	1	2	1	3	1
Rata-rata jumlah anak per keluarga,	0	3,7		3,6		3,5		3,4	
Ratio Akseptor KB,									
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49;	0	69,75		69,8	44,84	69,85	47,86	69,9	56
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan	0	14	14,9	14	18,7	14	8,3	0	0

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)									
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun,	0	2	1,38	2	2,37	2	1,88	2	2
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need),	0	13,4	22,69	13	24,02	12,65	23,76	11,5	19,3
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP),	0	60,16%		60,3	66,22	60,45	59,9	60,85	59
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi,	0	45,10%		45,3	54,72	45,4	62,47	45,7	63,02
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB,	0	70%	54%	72%	85%	73%	70%	74%	50%
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB,	0	70%	50,02%	73%	42,60%	74%	61,00%	75%	60,57%
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB,	0	70%	44%	72%	7%	73%	43,39%	74%	10%
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan,	0	25%	25%	25%	100%	50%	100%	50%	100%
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa,	0	75%	70%	77%	70%	77%	70%	78%	71%
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk,	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri,	0	65%	50%	65%	51,25%	65%	85,21%	65%	67,01%
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan,	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat,	0	70%	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan,	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa,	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS),	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cakupan kelompok keciatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga,	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak,	0	1260	780	1290	887	1290	1148	1310	2461
Rata-rata usia kawin pertama wanita, dan	0	20	23,9	20	24,1	21	23,4	21	22,8
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes.	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

h. Perhubungan

Untuk mengukur ketercapaian kinerja Pemerintah Kota Sibolga terhadap perhubungan yang menjadi kewenangan Kota dapat dilihat dari ketercapaian beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 2. 71 Capaian Indikator Perhubungan Kota Sibolga Tahun 2020-2024

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Perhubungan, meliputi:									
Jumlah arus penumpang angkutan umum,	0	1,611,855	1,255,778	1,692,448	1,408,063	1,777,070	1,555,556	1,865,924	1,555,875

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Rasio ijin trayek,	0	0.066	0.01	0.071	0.001	0.075	0	0.08	0
Jumlah uji kir angkutan umum,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis,	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Persentase layanan angkutan darat,	0	0.077	0.011	0.077	0.01	0.077	0.009	0.077	0.086
Persentase kepenilangan KIR angkutan umum,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pemasangan Rambu-rambu,	0	71.05	0	76.94	0	82.82	4.16	88.7	1.43
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan:	0	0.012	0.03	0.012	0.033	0.012	0.028	0.012	0.028
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum, dan	0	1,611,855	1,255,778	1,692,448	625,000	1,777,070	1,555,556	785,269	1,555,875
Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun.	0	12,083	19,165	33,000	81,219	36,300	82,088	39,930	70,530

Sumber: Dinas Perhubungan

i. komunikasi Dan Informatika

Sektor Komunikasi dan Informatika mempunyai peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mendukung pencapaian clean goverment dan good goverment melalui e-government. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Capaian Indikator komunikasi dan Informatika Kota Sibolga dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 72 Capaian Indikator Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga Tahun 2020-2024

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Komunikasi dan informatika, meliputi:									

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan,	0	100	0	100	0	100	0	100	0
Cakupan Layanan Telekomunikasi,	0	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon,	0	70	71	71	72	72	73	73	74
Proporsi rumah tangga dengan akses internet, dan	0	30	31	31	32	32	33	33	34
Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi.	0	40	42	42	43	43	44	44	45

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE telah ditetapkan. SPBE mempunyai tujuan utama yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis, efektif, transparan dan akun tabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Kota Sibolga mulai mengimplementasikan SPBE di beberapa layanan pemerintah Kota Sibolga.

Tabel 2. 73 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2020-2024

Indikator	Realisasi				
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2020	2021	2022	2023	2024
	1.40	1.00	1.76 (kurang)	2.24 (cukup)	n/a

Sumber: Laporan Evaluasi SPBE Kementerian PAN dan RB

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Sibolga adalah langkah penting dalam menuju pemerintahan yang lebih modern, transparan, efisien, dan responsif.

j. Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Indikator Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan komitmen pemerintah Kota Sibolga dalam memberdayakan

UMKM melalui peningkatan akses permodalan, digitalisasi, dan formalisasi usaha, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Sibolga. Pemerintah Kota Sibolga juga fokus pada upaya formalisasi UMKM, yakni dengan mendorong UMKM untuk berstatus formal, diharapkan mereka dapat mengakses berbagai fasilitas dan dukungan yang tersedia, serta meningkatkan kredibilitas dan daya saing di pasar. Capaian Kota Sibolga dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 74 Capaian Indikator Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Koperasi, usaha kecil dan menengah, meliputi									
Persentase koperasi aktif,	0	72%	41%	72,5%	41%	73%	42%	73,5%	42%
Persentase UKM non BPR/LKM aktif,	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Persentase BPR/LKM aktif, dan	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Persentase Usaha Mikro dan Kecil.	0	80%	4%	81%	16%	82%	6%	83%	9%

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga

k. Penanaman Modal Dan Perizinan

Penanaman modal merupakan salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di suatu daerah. Di Kota Sibolga, penanaman modal dari investor domestik memainkan peran krusial dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan infrastruktur, dan mendukung pengembangan sektor-sektor strategis seperti industri, pertanian, dan pariwisata. Dalam konteks ini, sistem

perizinan yang efektif dan efisien menjadi salah satu faktor kunci yang mendukung kelancaran investasi dan pembangunan di daerah tersebut. Capaian Indikator Penanaman Modal dan Perizinan Kota Sibolga dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 75 Capaian Indikator Penanaman Modal Tahun 2020-2024

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Penanaman modal, meliputi:									
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/ PMA),	7	5	5	5	5	5	36	5	1004
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/ PMA),		2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	396,356,647,815	2,500,000,000	420,442,271,037	2,500,000,000	390,928,145,229
Rasio daya serap tenaga kerja, dan		10	3,83	10	2,63	10	2,87	10	1,85
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah).		9,475	8,45	8,45	396,356,647,815	396,356,647,815	420,442,271,037	420,442,271,037	390,928,145,229

Sumber: Dinas PMPPTSP Kota Sibolga

1. Kepemudaan Dan Keolahragaan

Tujuan pembangunan kepemudaan dan olahraga adalah menjadikan pemuda dan atlit yang berkarakter dan berdaya saing. Untuk membentuk karakter dan kompetensi/ daya saing maka diperlukan pendidikan yang baik dan berkualitas. Capaian Kinerja Kepemudaan dan Keolahragaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 76 Capaian Kinerja Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2020-2024

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Kepemudaan dan olahraga, meliputi:									
Persentase organisasi pemuda yang aktif,	0	65%	46%	65%	100%	66.31%	100%	66.97%	70.83%
Persentase wirausaha muda,	0	10%	4.26%	10%	12.10%	10.10%	4.40%	5%	3.65%
Cakupan pembinaan olahraga,	0	100%	89.47%	100%	100%	100%	100%	100%	94%
Cakupan Pelatih yang bersertifikasi,	0	73%	100%	73%	52.83%	76.51%	52.83%	77.27%	78.13%
Cakupan pembinaan atlet muda,	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	30%	27.80%
Jumlah atlet berprestasi, dan	0	1	1	5	23	42	44	31	31
Jumlah prestasi olahraga.	0	1	1	3	3	3	5	4	4

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sibolga

m. Statistik

Sektor Statistik mempunyai peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mendukung kebijakan pelaksanaan satu data yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data. Kebijakan satu data ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Selanjutnya untuk pelaksanaan urusan statistik dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diberikan kewenangan dalam hal Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dengan tujuan untuk mengetahui kecenderungan (tren) yang akan terjadi pada masa datang, menentukan prioritas, sebagai acuan dalam evaluasi dan pengendalian kegiatan, serta untuk memperkirakan antisipasi terhadap resiko dan hambatan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan. Untuk capaian

Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi di Kota Sibolga dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 77 Data Statistik Sektoral Yang Terintegrasi Tahun 2020-2024

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Statistik, meliputi:									
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi,	0	Ada	60	Ada	40	Ada	40	Ada	60
Buku "Sibolga Dalam Angka", dan	0	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Buku "PDRE".	0	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi pada tahun 2023 sebesar 40% dan tahun 2024 juga telah mencapai target sebesar 60%.

n. Persandian

Pemerintahan Daerah, sub urusan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan kewenangan yaitu :

1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah provinsi melalui: (a) Pembelajaran dan Peningkatan Kapabilitas mengenai Sandi dan Sistem Keamanan Informasi dan; (b) Pengumpulan, Pemutakhiran dan Peningkatan Keamanan Informasi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota;
2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah provinsi, melalui Pengumpulan, Pemutakhiran dan Penyelarasan Sandi antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Capaian Indikator Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 78 Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah Tahun 2020-2024

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Persandian, meliputi:									
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah,	0	0	0	30	30	40	30	50	30

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga

Capaian ini berasal dari jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang telah menggunakan menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah sebanyak 30 (tiga puluh) Organisasi Perangkat Daerah.

o. Kebudayaan

Kebudayaan Kota Sibolga merupakan salah satu warisan yang kaya dan beragam, yang tercermin dalam tradisi, seni, bahasa, serta nilai-nilai kehidupan masyarakatnya. Sebagai salah satu Kota dengan keragaman etnis yang sangat tinggi, berbagai suku bangsa, seperti Batak, Melayu, Minangkabau, Nias, dan Tionghoa, hidup berdampingan dengan damai, masing-masing mempertahankan identitas budaya mereka yang unik sambil beradaptasi dengan perubahan zaman. Capaian Indikator kebudayaan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 79 Capaian Indikator Kebudayaan Tahun 2020-2024

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Kebudayaan, meliputi:									

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Penyelenggaraan festival seni dan budaya,	0	10	0	10	0	10	4	10	7
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan,	0	2	0	2	0	2	3	2	6
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi, dan	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu.	0	1	0	1	0	1	0	1	6

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga

Dilihat dari tabel diatas, angka realisasi pada IKU Kebudayaan cendereung mengalami kenaikan, seperti Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan dan Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu pada tahun 2024 dan sementara Penyelenggaraan festival seni dan budaya dan Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi masih belum mencapai target. Melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan, Kota Sibolga dapat mempertahankan keunikannya, sembari membangun masa depan yang lebih inklusif dan berbasis pada kekayaan tradisi dan nilai lokal.

p. Perpustakaan

Pada tahun 2020, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI telah melakukan kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang dimaksudkan untuk mengetahui kondisi semua jenis perpustakaan, mulai dari aspek sebaran perpustakaan, koleksi perpustakaan, tenaga perpustakaan, pustaka, dan anggota perpustakaan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Yang menjadi instrument kajian IPLM adalah pemerataan layanan perpustakaan, perpustakaan ber- Standar Nasional Perpustakaan (SNP), ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat/hari, anggota

perpustakaan, dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi. Capaian Indikator perpustakaan Kota Sibolga dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 80 Capaian Indikator Perpustakaan Tahun 2020-2024

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Perpustakaan, meliputi:									
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun,	0	0.31	0.45	0.34	0.45	0.36	0.31	0.39	0.19
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah,	0	0.41	0.38	0.42	0.38	0.44	0.38	0.45	0.38
Rasio perpustakaan persatuan penduduk,	0	1.67	1.64	1.73	1.65	1.73	1.63	1.84	1.58
Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun,	0	54.79	99.38	60.27	101.68	65.75	61.36	71.23	40.72
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan, dan	0	12744	12506	14260	13277	15770	13282	17285	13282
Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat.	0	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%

Sumber: Dinas Perpustakaan Kota Sibolga

q. Kearsipan

Kearsipan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pengelolaan informasi di sebuah daerah. Di Kota Sibolga, kearsipan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyimpan dan mengelola dokumen-dokumen penting, tetapi juga sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pemerintahan. Pengelolaan arsip yang baik juga sangat vital untuk kepentingan sejarah dan perkembangan daerah, serta mempermudah akses informasi bagi masyarakat dan

berbagai pihak yang membutuhkan. Capaian Indikator Kearsipan Kota Sibolga dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 81 Capaian Indikator Kearsipan Tahun 2020-2024

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Kearsipan, meliputi:									
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku, dan	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan SDM pengelola kearsipan.	0	1	1	1	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Perpustakaan Kota Sibolga

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku dan peningkatan SDM Pengelola Kearsipan mencapai target sejak tahun 2023 hingga tahun 2024.

3. Urusan Pilihan
a. Kelautan Dan Perikanan

Kota Sibolga memiliki potensi di sub sektor perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Capaian indikator kelautan dan perikanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 82 Capaian Indikator Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Kelautan dan perikanan, meliputi:									
Produksi perikanan,	0	90	69	90	84	95	91	95	90
Konsumsi ikan,	0	90	98	90	97	95	93	95	90
Cakupan bina kelompok nelayan,	0	90	60	90	85	95	91	95	90

Sumber: Dinas Perikanan

b. Pariwisata

Perkembangan Pariwisata di Kota Sibolga menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kota Sibolga tidak hanya dikenal karena kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, tetapi juga karena potensi besar yang dimilikinya dalam sektor pariwisata. Sebagai salah satu daerah tujuan wisata, Kota Sibolga terus berupaya untuk mengembangkan sektor ini sebagai pilar penting dalam perekonomian daerah. Selain hal tersebut di atas terdapat indikator kinerja yang mendukung sektor pariwisata. Capaian Indikator Pariwisata Kota Sibolga dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 83 Capaian Indikator Pariwisata Tahun 2020-2024

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Pariwisata, meliputi:									
Kunjungan wisata,	0	40,000	54,592	40,400	65,341	40,400	56,147	41,212	68,184
Lama kunjungan Wisata, dan	0	2	2	2.02	2	1.5	1.035	2	1.14
PAD sektor pariwisata.	0	3%	2.67%	3.03	4.08	3.06%	2.70%	3%	2.36%

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sibolga

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa, pada tahun 2024 IKU Kunjungan Wisata mengalami kenaikan menjadi sebesar 68.184 wisata, sedangkan lama kunjungan wisata masih di bawah target adalah sebesar 1.14% dan PAD sector pariwisata juga belum mencapai target adalah sebesar 2.36%.

c. Pertanian

d. Urusan Pertanian tidak ada yang menjadi kewenangan Kota Sibolga.

d. Perkebunan

Urusan Perkebunan tidak ada yang menjadi kewenangan Kota Sibolga.

- e. Kehutanan

Urusan Kehutanan tidak ada yang menjadi kewenangan Kota Sibolga.
- f. Energi Dan Sumber Daya Mineral

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tidak ada yang menjadi kewenangan Kota Sibolga.
- g. Perdagangan

Pembangunan Perdagangan dalam Perekonomian memiliki peran strategis yaitu mendukung kelancaran barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mendorong pembentukan harga kompetitif, penciptaan lapangan usaha, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan serta pemerataan pendapatan. Sektor Perdagangan saling berkaitan dengan kegiatan sektor lainnya seperti sektor produksi (pertanian, industri, dan perdagangan), sektor keuangan, sektor perhubungan, dan sektor telekomunikasi. Capaian Indikator Perdagangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 84 Capaian Indikator Perdagangan Tahun 2020-2024

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Perdagangan, meliputi:									
Ekspor Bersih Perdagangan, dan	0	Tidak dapat dilaksanakan	Tidak dapat dilaksanakan	Tidak dapat dilaksanakan	Tidak dapat dilaksanakan	Tidak dapat dilaksanakan	Tidak dapat dilaksanakan	Tidak dapat dilaksanakan	Tidak dapat dilaksanakan
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal.	37.5	14.1	14.1	15.51	29.62	17.07	27.27	18.77	0

Sumber: Disperindag

- h. Perindustrian

Pertumbuhan industri di Kota Sibolga menunjukkan prospek yang cerah, didorong oleh kebijakan pemerintah

yang mendukung iklim investasi, pengembangan sektor unggulan, serta peningkatan infrastruktur yang semakin mendukung kelancaran operasional industri. Ke depan, sektor industri di Kota Sibolga ini diharapkan akan terus berkembang, berkontribusi pada peningkatan daya saing ekonomi regional, serta menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pertumbuhan Perindustrian di Kota Sibolga dapat dilihat dari capaian Indikator Perindustrian sebagai berikut:

Tabel 2. 85 Capaian Indikator Perindustrian Tahun 2020-2024

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Perindustrian, meliputi:									
Perindustrian, meliputi Cakupan bina kelompok pengrajin,	0	53	53	64.29	64.29	60	42.85	65	1.97

Sumber: Disperindag

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat Pada Tahun 2023 Perindustrian, meliputi Cakupan bina kelompok pengrajin adalah sebesar 42.85%, Kondisi ini menurun pada tahun 2024 dengan realisasi 1.97%.

4. Urusan Penunjang

Urusan penunjang berfokus pada berbagai sektor yang secara langsung tidak terkait dengan pelayanan dasar atau sektor-sektor utama pembangunan, namun tetap memiliki peran vital dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pembangunan. Selain itu, urusan penunjang juga mencakup pengembangan Pembangunan yang tidak langsung terkait dengan sektor-sektor prioritas, namun tetap esensial, seperti peningkatan sistem transportasi pendukung, penyediaan energi yang memadai, serta pembangunan system komunikasi yang efektif. Semua upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan di sektor-sektor

utama, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan hidup. Upaya penguatan di bidang administrasi, kelembagaan, dan infrastruktur penunjang akan memastikan bahwa pencapaian target pembangunan dapat berlangsung secara optimal dan efisien.

a. Administrasi Pemerintahan

1) Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah (Setda) adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda). Sekretaris daerah bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, sekretaris daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Capaian Indikator Sekretariat Daerah Kota Sibolga dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 86 Capaian Indikator Sekretariat Daerah
Tahun 2020-2024

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Jumlah OPD yang mengelola Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektrinok	0	28	28	29	30	30	30	30	11
Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Administrasi dan Koordinasi di Bidang Perekonomian	0	100	100	100	100	100	100	100	35%
Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahtraan Sosial	0	100	100	100	100	100	100	100	21%
Tersedianya Fasilitas Penyusunan product Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan Pengelolaan	0	100	100	100	100	100	100	100	34%

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Informasi Hukum									
Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan, Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	0	16	16	16	16	16	16	16	8
Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi dibidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol dan tata usaha pimpinan dan staf ahli	0	12	12	12	12	12	12	12	6
Terlaksananya Pelayanan Publik, Penetaan dan Evaluasi tentang Kelembagaan serta Reformasi Birokrasi	0	100	100	100	100	100	100	100	26%

Sumber: Sekdakot

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 capaian Indikator Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Administrasi dan Koordinasi di Bidang Perekonomian, Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Tersedianya Fasilitas Penyusunan product Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum, Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan, Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah, Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi dibidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol dan tata usaha pimpinan dan staf ahli dan Terlaksananya Pelayanan Publik, Penetaan dan Evaluasi tentang Kelembagaan serta Reformasi Birokrasi belum mencapai

target dikarenakan pengukuran indikator belum tepat sasaran.

2) Sekretariat Dewan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat Dewan berperan sebagai lembaga yang menyokong secara administratif dan teknis agar DPRD dapat menjalankan tugasnya dengan lancar, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan Sekretariat Dewan dalam menjalankan tupoksinya berkontribusi langsung terhadap kualitas kinerja Dewan dan efektivitas pemerintahan daerah secara keseluruhan. Capaian Indikator Sekretariat Dewan Kota Sibolga dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 87 Capaian Indikator Sekretariat Dewan Tahun 2020-2024

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Sekretariat dewan, meliputi:									
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota,	0	72 Kali	72 Kali	63 Kali	63 Kali	55 Kali	55 Kali	59 Kali	56 Kali
Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan — Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD), dan	0	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.	0	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan

Sumber : Sekwan Kota Sibolga

3) Perencanaan

Perencanaan Pembangunan merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh pemerintah untuk merencanakan, merancang, dan mengelola program- program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan suatu daerah atau negara. Perencanaan pembangunan yang baik dan efektif sangat penting untuk memastikan penggunaan sumber daya secara efisien, mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 2. 88 Capaian Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga 2020-2024

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Tersedianya dokumen perencanaan : RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	0	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	Ada	Proses
Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	0	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	Ada	Ada
Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	0	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	Ada	Proses
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	0	85%	85%	85%	85%	85%	85%	86%	86%

Sumber: Bappeda Kota Sibolga

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda dari tahun 2024 masih dalam proses, RPJMD yang telah ditetapkan dengan

PERDA/PERKADA sudah tersedia, RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA sudah tersedia, Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dan Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD mencapai target.

4) Keuangan

Kota Sibolga memantapkan komitmennya untuk mencapai good goverment dalam pengelolaan pemerintahan. Kerja keras ini membuahkan hasil dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Berdasarkan hasil opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Sibolga hingga 2021, kinerja laporan keuangan pemerintah Kota Sibolga telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Capaian Indikator Keuangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 89 Capaian Indikator Pengelolaan Keuangan
Kota Sibolga Tahun 2020-2024

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Opini BPK terhadap laporan keuangan	0	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	Proses
Persentase SILPA terhadap APBD	0	8%	12%	8%	8,96%	7%	0,008%	5%	0,63%
Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	0	0,5%	1,81%	0,4%	0	0,3%	8,9%	5%	0,63%
Persentase belanja pendidikan (20%)	0	20%	19,21	20%	20,05%	20%	20%	0,2%	1,71%
Persentase belanja kesehatan (10%)	0	10%	8,45	10%	10%	10%	77%	20%	
Perbandingan antara belanja langsung dengan	0	75%	Tidak dapat dihitung	75%	tidak dapat dihitung	75%	tidak dapat dihitung	10%	

belanja tidak langsung									
Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	0	0		0	129,37%	0	0	75%	Tidak dapat dihitung
Penetapan APBD	0	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	0	
Persentase PAD Terhadap Pendapatan	0	95%	39,46	95%	13,26%	95%	92%	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Persentase luas lahan bersertifikat	0	10%		10%	65,38%	10%	104%	95	76,68

Sumber: BPKPAD Kota Sibolga

5) Kepegawaian

Pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) merupakan salah satu upaya dalam membentuk ASN yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja serta loyalitas kerja. Capaian Indikator Pengembangan SDM dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 90 Capaian Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020-2024

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	0	7,5 Jam	2,80 Jam	7,5 Jam	2,80 Jam	7,5 Jam	10 Jam	7,5 Jam	10 Jam
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0	2,94 %	6,68 %	2,94 %	6,68 %	3,15	3,39	3,15	3,39
Jumlah Jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	0	30 Unit	14 Unit	30 Unit	14 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit
Jumlah Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah	0	524 Unit	317 Unit	524 Unit	317 Unit	317 Unit	317 Unit	317 Unit	317 Unit
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	0	1185 Unit	1056 Unit	1185 Unit	1056 Unit	1185 Unit	1188 Unit	1185 Unit	1188 Unit
Persentase pejabat ASN yang telah		14,08 %	17,51 %	14,08 %	17,51 %	14,08 %	37,79 %	14,08 %	37,79 %

mengikuti pendidikan dan pelatihan	0								
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	0	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Nilai B	Nilai B	Nilai B	Nilai B

Sumber: BKD Kota Sibolga

Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Sibolga mengukur tingkat keberhasilan kinerja melalui Indikator Nilai Sistem Merit. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Penilaian Mandiri Sistem Merit adalah penilaian yang dilakukan secara mandiri guna mengetahui capaian penerapan Sistem Merit pada instansi pemerintah. Capaian Indikator Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Sibolga dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 91 Capaian Indikator Kepegawaian Daerah 2020-2024

Indikator	Kondisi Awal				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Sistem Merit (Poin)	0				

Sumber: BKD Kota Sibolga

Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indeks ini memiliki tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 Nilai Indeks Sistem Merit mengalami kenaikan 10 poin yakni 343.5 dibandingkan tahun 2023 yakni sebesar 333.5 poin.

6) Penelitian Dan Pengembangan

Penelitian pengembangan (Research & Development) didefinisikan sebagai jenis penelitian yang memfokuskan diri pada tujuan mengembangkan, memperluas, dan menggali lebih jauh atas sebuah teori dalam disiplin ilmu tertentu. Perkembangan capaian Indikator Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 92 Capaian Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga Tahun 2020-2024

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Penerapan SIDA:									
Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	5 OPD	Semua OPD yang mengusulkan		Semua OPD yang mengusulkan		Semua OPD yang mengusulkan		Semua OPD yang mengusulkan	
Persentase Kebijakan Inovasi yang di terapkan di Daerah	n/a	20%		20%		20%		20%	

Sumber: Bappeda Kota Sibolga

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah pada tahun 2023 memiliki angka realisasi sebesar 53.76 poin, lalu meningkat pada tahun 2024 sebesar 6.17 poin dengan realisasi 59.93 poin dan Persentase Kebijakan Inovasi yang di terapkan di Daerah . Hal ini menunjukkan bahwa Kota Sibolga terus mendorong Inovasi sebagai salah satu akses dalam membantu proses perencanaan pembangunan di Kota Sibolga.

7) Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan dalam arti pengawasan adalah

proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Perkembangan capaian Indikator Pengawasan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 93 Capaian Indikator Pengawasan Tahun 2020-2024

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Pengawasan, meliputi:									
Persentase tindak lanjut temuan,	0	94	80.36	95	80.42	96	95	97	
Persentase pelanggaran pegawai: dan	0	2	0.13	1.5	0.17	1	1,5%	0.5	
Jumlah temuan BPK.	0	10	10	8	18	6	8	4	

Sumber: Inspektorat

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indikator Pengawasan ini memiliki tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 Nilai Indikator Pengawasan secara keseluruhan telah tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa Indikator ini sangat penting dan terus menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Kota Sibolga.

8) Kewilayahan

Kecamatan di Kota Sibolga ada 4, yaitu: Kecamatan Sibolga Utara, Kecamatan Sibolga Kota, Kecamatan Sibolga Selatan dan Kecamatan Sibolga Sambas.

9) Kecamatan Sibolga Utara

Kecamatan Sibolga Utara adalah salah satu kecamatan di Kota Sibolga, Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan ini memiliki luas lahan efektif sekitar 40,48% yang dapat digunakan untuk pembangunan. Batas wilayahnya meliputi Kabupaten Tapanuli Tengah di timur dan utara, Kecamatan Sibolga Kota di selatan, dan Teluk Tapan Nauli di barat.

Berikut ini adalah pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Sibolga Utara kepada masyarakat.

Tabel 2. 94 Capaian Indikator Kecamatan Sibolga Utara Tahun 2020-2024

Indikator	Kondisi Awal	Targ et	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisa si
	2020	2021		2022		2023		2024	
Rata-rata penyelesaian pelayanan administrasi sampai tingkat kecamatan tepat waktu melalui PATEN	0	80%	80%	81%	80%	82%	80%	83%	80%
Persentase Kepuasan Terlaksananya kegiatan peningkatan mutu penyelenggara an realisasi hasil perencanaan pembangunan	0	80%	80%	81%	80%	82%	80%	83%	81%
Persentase Penyampaian Pertanggung jawaban keuangan tepat waktu	0	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Kepuasan masyarakat terhadap kegiatan pelaksanaan MTQ di tingkat Kecamatan	0	80%	0%	81%	0%	82%	0%	83%	0%
Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap kegiatan pelaksanaan festival seni Qasidah/Nasyi d di Tingkat Kecamatan	0	80%	0%	81%	0%	82%	0%	83%	0%
Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap kegiatan dalam pelaksanaan pesperawi di Tingkat Kecamatan	0	80%	0%	81%	0%	82%	0%	83%	0%

Sumber: Kecamatan Sibolga Utara

Capaian Indikator Kecamatan Sibolga Utara untuk tahun 2024 ada 3 (Tiga) Indikator yang belum mencapai target yaitu: Persentase Kepuasan masyarakat terhadap kegiatan

10) Kecamatan Sibolga Kota

Tabel 2. 95 Capaian Indikator Kecamatan Sibolga Kota Tahun 2020-2024

RPJMD Kota Sibolga Tahun 2025-2029

Lansia yang menerima makanan tambahan	0	Posyandu	Posyandu	Posyandu	Posyandu	Posyandu	0	Posyandu	0
Frekuensi pelaksanaan	0	0-1 kali	2-3 kali	4-6 kali	7-9 kali	10-12 kali	0	0-1 kali	0

Capaian Indikator pada Kecamatan Sibolga Kota pada tahun 2024 ada 11 (sebelas) indikator yang tidak tercapai yaitu sebagai berikut:

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Festival Seni Qasidah/Nasyid di Tingkat Kecamatan, Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pesparawi di Tingkat Kecamatan, Frekuensi Pelaksanaan Gotong Royong, Frekuensi Pelaksanaan Senam Sehat bersama masyarakat, Frekuensi Pameran Pembangunan dalam Rangka Hari Jadi Sibolga, Frekuensi Pameran dalam rangka perayaan HUT RI, Jumlah peserta pada pelaksanaan PORKOT, Jumlah balita kemas /Posyandu dan Lansia yang menerima makanan tambahan, Jumlah balita kemas /Posyandu dan Lansia yang menerima makanan tambahan, Frekuensi pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Sibolga Kota, Monitoring Tim delegasi Kecamatan pada penilaian kelurahan terbaik dan Kelurahan Percontohan, Koordinasi ketentraman dan Ketertiban dengan instansi vertikal di Wilayah Kecamatan. Hal ini dikarenakan kegiatan di Kecamatan Sibolga Kota tidak mempunyai anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

11) Kecamatan Sibolga Sambas

Luas wilayah Kecamatan Sibolga Sambas adalah 1,57 km². Kecamatan ini merupakan kecamatan terkecil di Kota Sibolga. Kecamatan Sibolga Sambas memiliki batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara: Kecamatan Sibolga Kota, Sebelah Timur: Kabupaten Tapanuli Tengah, Sebelah Selatan: Teluk Tapan Nauli, Sebelah Barat: Kecamatan Sibolga Selatan. Berikut ini adalah pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Sibolga Sambas kepada masyarakat.

Tabel 2. 96 Capaian Indikator Kecamatan Sibolga Sambas Tahun 2020-2024

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Rata-rata penyelesaian pelayanan administrasi sampai tingkat kecamatan tepat waktu melalui PATEN	0	70	70	75	80	80	81	90	90
Persentase kepuasan terlaksananya kegiatan peningkatan mutu penyelenggaraan realisasi hasil perencanaanpembangunan	0	75	75	80	81	85	86	90	90
Persentase penyampaian pertanggungjawaban keuangan tepat waktu	0	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase kepuasan masyarakat terhadap kegiatan pelaksanaan MTQ di Tingkat Kecamatan	0	75	75	80	80	85	85	90	90
Persentase kepuasan masyarakat terhadap kegiatan pelaksanaan Festival Seni Qasidah/Nasyid di Tingkat Kecamatan	0	75	75	80	80	85	85	90	90
Persentase kepuasan masyarakat terhadap kegiatan dalam Pelaksanaan Pesparawi di Tingkat Kecamatan	0	75	75	80	80	85	85	90	90

Sumber : Kecamatan Sibolga Sambas

Capaian untuk Indikator tahun 2024 pada Kecamatan Sibolga Sambas semuanya tercapai.

12) Kecamatan Sibolga Selatan

Kecamatan Sibolga Selatan, seperti kecamatan lain di Kota Sibolga, berbatasan dengan wilayah yang sama di sekitarnya. Secara umum, batas wilayah Kota Sibolga, termasuk Kecamatan Sibolga Selatan, adalah sebagai berikut: utara, timur, dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Teluk Tapis Nauli. Luas wilayah

Kecamatan Sibolga Selatan di Kota Sibolga adalah 3,14 km². Berikut ini adalah pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Sibolga Selatan kepada masyarakat.

Tabel 2. 97 Capaian Indikator Kecamatan Sibolga Selatan Tahun 2020-2024

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	0	75%	70%	77%	45%	79%	79	81	81
Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Penyampaian Pertanggung jawaban Keuangan Tepat Waktu	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	0	120 Orang	120 Orang	120 Orang	126 Orang	120 Orang	33 Orang	120 Orang	0
Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Festival Seni qasidah/Nasyid di Tingkat Kecamatan	0	200 Orang	200 Orang	200 Orang	0	200 Orang	0	200 Orang	0
Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pesparawi di Tingkat Kecamatan	0	330 Orang	0	330 Orang	0	330 Orang	0	330 Orang	0
Frekuensi Pelaksanaan Gotongroyong	0	48 Kali	0	48 Kali	0	48 Kali	48 Kali	48 Kali	0
Frekuensi Pelaksanaan Senam Sehat bersama masyarakat	0	6 Kali	0	6 Kali	0	6 Kali	8 Kali	6 Kali	0
Pameran Pembangunan dalam rangka Hari jadi Kota Sibolga	0	1 Kali	0	1 Kali	0	1 Kali	0	1 Kali	0
Frekuensi Pameran dalam rangka perayaan HUT RI	0	1 Kali	0	1 Kali	0	1 Kali	0	1 Kali	0
Jumlah peserta pada pelaksanaan PORKOT	0	450 Orang	0	450 Orang	0	450 Orang	0	450 Orang	0
Jumlah balita kemas/posyandu dan lansia yang	0	46 Posyandu	0	46 Posyandu	46 Posyandu	46 Posyandu	0	46 Posyandu	0

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
menerima makanan tambahan									
Frekuensi pelaksanaan Musrembang di Kec. Sibolga Selatan	0	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali
Monitoring tim delegasi kecamatan pada penilaian kelurahan terbaik dan kelurahan terbaik dan kelurahan percontohan.	0	3 Kali	0	3 Kali	0	3 Kali	0	3 Kali	3 Kali
Koordinasi ketentraman dan ketertiban dengan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	0	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	1 Kali	4 Kali	4 Kali

Sumber: Kecamatan Sibolga Selatan

Capaian Indikator Kecamatan Sibolga Selatan untuk tahun 2024 ada 9 (Sembilan) Indikator yang belum mencapai target yaitu partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Festival Seni qasidah/Nasyid di Tingkat Kecamatan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pesparawi di Tingkat Kecamatan, frekuensi Pelaksanaan Gotongroyong, frekuensi Pelaksanaan Senam Sehat bersama masyarakat, pameran Pembangunan dalam rangka Hari jadi Kota Sibolga, frekuensi Pameran dalam rangka perayaan HUT RI, jumlah peserta pada pelaksanaan PORKOT, jumlah balita kemas/posyandu dan lansia yang menerima makanan tambahan. Hal ini dikarenakan kegiatan di Kecamatan Sibolga Selatan tidak mempunyai anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

- 13) Pemerintah Umum
- a. Kesatuan Bangsa Dan Politik
- Capaian Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 98 Capaian Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga Tahun 2020-2024

Indikator	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2020	2021		2022		2023		2024	
persentase pertumbuhan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan	0	70	-	72	78	74	88	76	93
persentase jumlah konflik yang telah ditangani dan keseluruhan konflik sosial yang terjadi	0	72	-	74	100	76	-	78	100
persentase pertumbuhan pembinaan politik	0	74	67	76	67	80	67	80	100

Sumber: Kesbang Kota Sibolga

Dari data di atas dapat dilihat bahwa persentase pertumbuhan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, persentase jumlah konflik yang telah ditangani dan keseluruhan konflik sosial yang terjadi serta persentase pertumbuhan pembinaan politik tahun 2024 sudah melebihi target.

5. Capaian Indikator Kinerja Makro

Pencapaian indikator makro pembangunan mencerminkan kemajuan suatu negara atau daerah dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Indikator indikator ini mengukur berbagai aspek pembangunan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat dan kemajuan daerah secara keseluruhan. Pencapaian indikator makro pembangunan daerah diantaranya adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Gini. Berikut capaian indiaktor kinerja makro pembangunan Kota Sibolga Periode RPJMD 2021-2026 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 99 Capaian Indikator Kinerja Makro RPJMD 2021-2026

No	Indikator Pembangunan	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
			2020		2021		2022		2023		2024	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1.36		2.74	2.1	3	4.15	4	4.2	5.2*	3.92**
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	11.95		11.90	12.33	11	11.47	10	11.42	9.80	11.39
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen		8.00	7.75	8.72	7.50	7.05	7.25	6.79	7	6.52
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73.63	77.56	73.80	75.87	73.85	76.69	73.9	77.07	74.94	77.52
5	Rasio Gini	Rasio	0.29		0.28	0.28	0.27	0.35	0.27	0.25	0.27	0.377 ***

a. Pertumbuhan Ekonomi

Target Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sibolga periode tahun 2020- 2024 sebagaimana dikutip dari Dokumen RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 100 Target Pertumbuhan Ekonomi Kota Sibolga periode tahun 2020-2024 (satuan dalam persen)

No	Indikator Pembangunan	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
			2020		2021		2022		2023		2024	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1.36		2.74	2.1	3	4.15	4	4.2	5.2*	3.92**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sibolga dari Tahun 2020 adalah sebesar - 1.36% pada tahun 2021 meningkat sebesar 3.46 poin, tahun 2022 semakin meningkat sebesar 2.05 poin dan pada tahun 2023-2024 kembali menurun sebesar 0.28 poin. Jika pertumbuhan ekonomi lambat, maka pendapatan masyarakat juga akan cenderung lambat meningkat, maka masyarakat akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena pendapatan mereka tidak meningkat sesuai dengan kenaikan harga barang dan jasa.

b. Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM (Indeks Pembangunan Manusia): adalah indikator yang mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah, berdasarkan tiga dimensi utama: umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Target indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sibolga periode tahun 2020-2024 sebagaimana dikutip dari Dokumen RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 101 Target Indikator IPM Kota Sibolga Tahun 2020-2024

No	Indikator Pembangunan	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
			2020		2021		2022		2023		2024	
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73.63	77.56	73.80	75.87	73.85	76.69	73.9	77.07	74.94	77.52

Sumber : BPS

Dari table diatas dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sibolga dari Tahun 2020 ke Tahun 2024 semakin membaik. Peningkatan IPM terjadi pada seluruh dimensi. Pada tahun 2024 IPM Kota Sibolga adalah tinggi dengan capaian sebesar 77,52.

c. Capaian Kinerja Persentase Kemiskinan

Target indikator Persentase Kemiskinan Sumatera Utara periode tahun 2020 2024 sebagaimana dikutip dari Dokumen RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 102 Target Indikator Persentase Kemiskinan Kota Sibolga Tahun 2020-2024

No	Indikator Pembangunan	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
			2020		2021		2022		2023		2024	
1	Tingkat Kemiskinan	Persen	11.95	11.95	11.90	12.33	11.00	11.47	10.00	11.42	9.80	11.39

Sumber : BPS

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Kemiskinan Kota Sibolga dari Tahun 2021 meningkat sebesar 0.38 poin bila dibandingkan dengan tahun 2020, untuk tahun 2024

semakin menurun sebesar 0.03 poin. persentase penduduk yang dianggap miskin berkurang, Ini menunjukkan bahwa lebih banyak orang yang memiliki pendapatan atau pengeluaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.

d. Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka
Target indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sibolga periode tahun 2020-2024 sebagaimana dikutip dari Dokumen RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 103 Target Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sibolga Tahun 2020-2024 (dalam satuan persen)

No	Indikator Pembangunan	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
			2020		2021		2022		2023		2024	
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5.53	8.00	7.75	8.72	7.50	7.05	7.25	6.79	7	6.52

Sumber : BPS

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sibolga dari tahun 2020-2021 meningkat sebesar 0.72 poin, tetapi pada tahun 2022-2024 semakin menurun yang artinya bahwa jumlah orang yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan semakin berkurang.

e. Capaian Kinerja Indikator Rasio Gini
Target Rasio Gini Kota Sibolga periode tahun 2020-2024 sebagaimana dikutip dari Dokumen RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 104 Target Indikator Rasio Gini Kota Sibolga Tahun

No	Indikator Pembangunan	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
			2020		2021		2022		2023		2024	
1	Rasio Gini	Rasio	0.29		0.28	0.28	0.27	0.35	0.27	0.25	0.27	0.377

Sumber : BPS

2.5 Gambaran Keuangan Daerah

Salah satu faktor utama yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pembangunan daerah adalah kondisi serta kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Berbagai program dan kegiatan pembangunan hanya dapat terlaksana apabila tersedia sumber daya keuangan yang mencukupi

untuk membiayainya. Sumber pembiayaan pembangunan dapat berasal dari penerimaan daerah, yang mencakup pendapatan asli daerah (PAD), dana transfer, serta pendapatan daerah lainnya, maupun dari penerimaan pembiayaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerimaan daerah kemudian dimanfaatkan secara optimal untuk belanja daerah serta pengeluaran pembiayaan lainnya yang diperbolehkan oleh regulasi. Pengeluaran daerah dialokasikan untuk membiayai operasional pemerintahan serta berbagai program pembangunan guna mencapai target yang telah ditetapkan. Kebijakan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah yang tepat—baik melalui optimalisasi penerimaan daerah yang dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah, seperti pendapatan asli daerah, maupun melalui alokasi belanja yang efektif dan efisien diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan. Semakin tinggi kapasitas fiskal daerah, semakin besar pula potensi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas program pembangunan yang diimplementasikan, sehingga dapat lebih optimal dalam mencapai target indikator kinerja pembangunan yang telah ditetapkan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus dilengkapi dengan proyeksi kapasitas fiskal daerah, yaitu perkiraan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan selama periode perencanaan. Proyeksi ini dapat dilakukan dengan menganalisis kinerja keuangan daerah di masa lalu sebagai dasar perhitungan. Untuk itu, diperlukan analisis terhadap kinerja pendapatan dan belanja daerah dalam lima tahun terakhir. Melalui analisis ini, dapat diperoleh gambaran mengenai: (1) tren pendapatan daerah dari berbagai sumber serta proporsi kontribusi masing-masing sumber terhadap total pendapatan daerah; (2) perkembangan belanja daerah dan distribusi pengeluarannya pada setiap komponen

belanja; (3) dinamika pembiayaan daerah, termasuk penerimaan, pengeluaran, dan saldo bersih (netto); serta (4) tingkat kapasitas fiskal daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan.

Hasil analisis ini menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah yang lebih efektif, guna memastikan keberlanjutan pembangunan yang terarah dan berkesinambungan. Keuangan daerah merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum dalam pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang memberikan landasan bagi pemerintah daerah dalam menyusun, melaksanakan, serta mempertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara optimal.

1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan daerah di masa lalu mencakup pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Neraca Daerah. Kinerja pelaksanaan APBD memberikan gambaran mengenai sumber dan besaran pendapatan daerah, yang kemudian dialokasikan untuk membiayai operasional pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan.

Dalam beberapa kondisi, belanja daerah dapat melebihi pendapatan yang diperoleh, sehingga pemerintah daerah perlu mengandalkan sumber pembiayaan lain di luar pendapatan daerah, seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

(SiLPA) tahun sebelumnya, pinjaman daerah, atau sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, analisis terhadap pelaksanaan APBD juga mencakup aspek pembiayaan daerah untuk memahami keseimbangan fiskal secara lebih komprehensif.

Selain itu, kinerja keuangan daerah juga dievaluasi melalui analisis neraca daerah, yang mencerminkan perkembangan pengelolaan aset dan kekayaan daerah oleh pemerintah daerah. Analisis ini penting untuk menilai efektivitas pengelolaan keuangan dan aset dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

2. Kinerja Pelaksanaan APBD

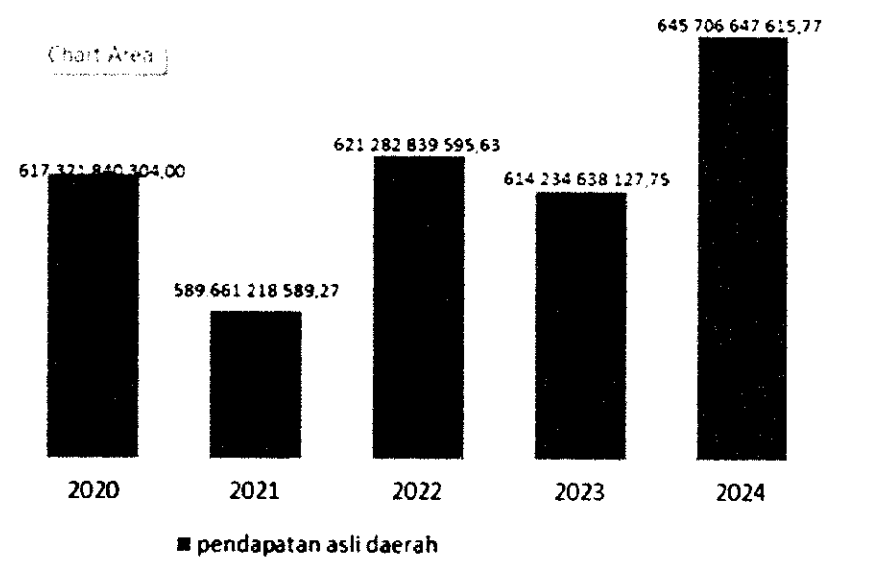
a. Pendapatan Daerah

Kinerja pelaksanaan APBD dievaluasi berdasarkan tiga aspek utama, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah mencakup seluruh hak yang diperoleh Pemerintah Daerah yang diakui sebagai peningkatan nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran. Pendapatan ini terdiri dari semua penerimaan yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah tanpa kewajiban pengembalian dan tercatat sebagai tambahan ekuitas daerah dalam periode anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah terbagi menjadi tiga kategori utama: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan. Pendapatan transfer meliputi dana yang berasal dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), transfer antar pemerintah daerah, serta bentuk bantuan keuangan lainnya yang digunakan untuk mendukung

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sementara itu, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mencakup pendapatan di luar PAD dan pendapatan transfer, seperti hibah, dana darurat, dan sumber pendapatan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Analisis terhadap struktur pendapatan daerah ini penting untuk memahami kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Pendapatan daerah Kota Sibolga pada periode 2020-2024 mengalami kenaikan dan penurunan fluktuasi dengan kecenderungan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pendapatan daerah Kota tahun 2020 sebesar 617,32 Milyar meningkat menjadi 645,70 Milyar pada tahun 2024.

Gambar 2. 41 Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Sibolga Tahun 2020-2024



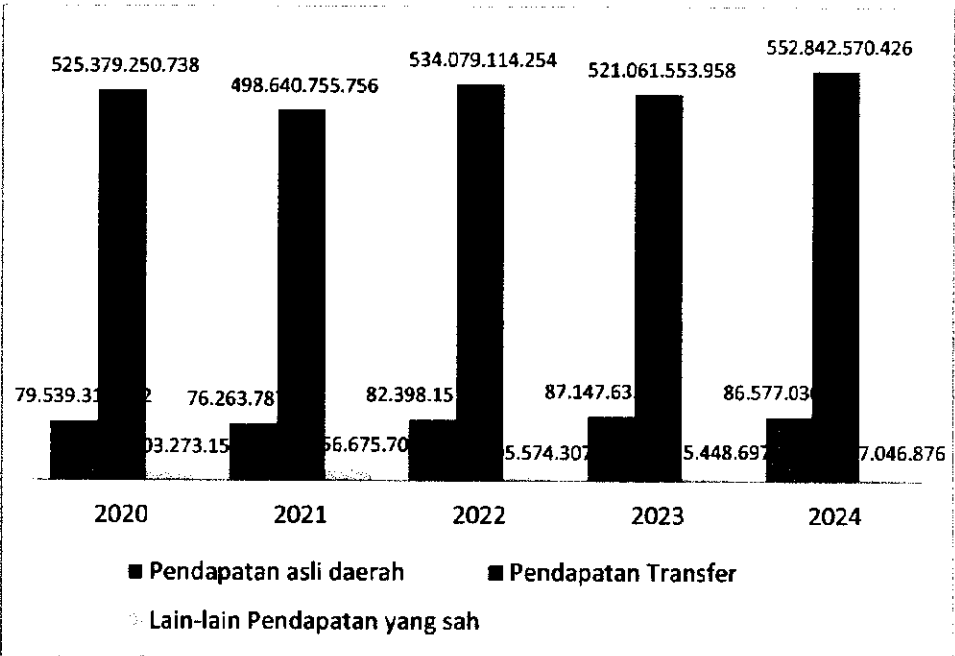
Sumber : BPKAD Kota Sibolga, Tahun 2025

Untuk memahami penyebab fluktuasi pendapatan daerah, dilakukan analisis terhadap komponen penerimaan daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pendapatan Transfer merupakan kontributor utama pendapatan daerah Kota Sibolga, dengan rata-

rata kontribusi sebesar 85,21% dalam lima tahun terakhir. Selain itu, terdapat pola fluktuatif dalam pendapatan transfer, dengan lonjakan signifikan pada tahun 2024. Dalam lima tahun terakhir, PAD menyumbang rata-rata 13,47% dari total pendapatan daerah.

Struktur kontribusi setiap sumber penerimaan terhadap total pendapatan daerah mencerminkan tingkat ketergantungan atau kemandirian keuangan daerah. Dominasi pendapatan transfer dalam penerimaan daerah menunjukkan bahwa Kota Sibolga masih bergantung pada dana dari pemerintah pusat dan/atau sumber eksternal lainnya. Sebaliknya, semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pembangunan dan operasional pemerintahan.

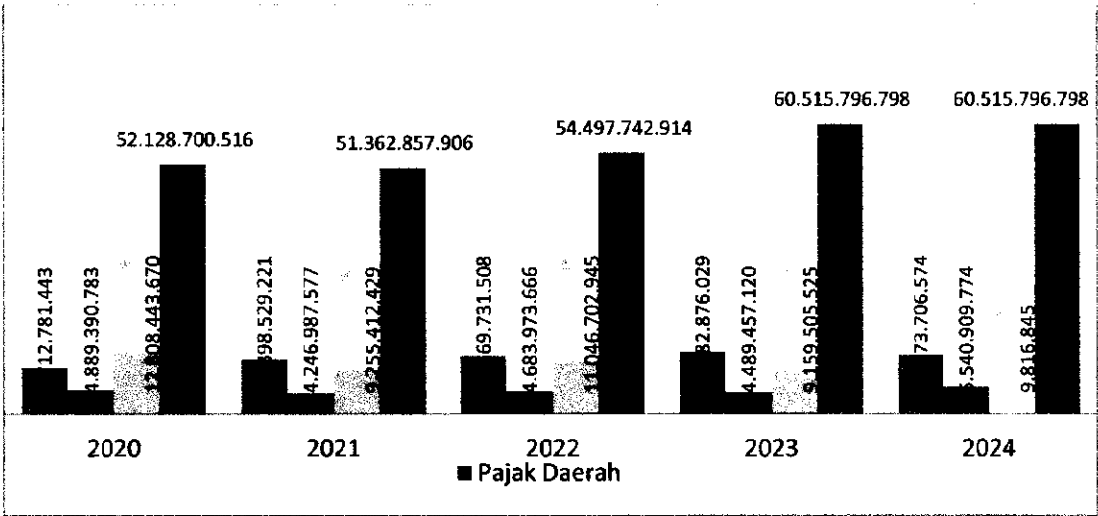
Gambar 4.2 Perkembangan Komponen Pendapatan Daerah Kota Sibolga Tahun 2020-2024



Sumber : BPKAD Kota Sibolga, Tahun 2025

Gambar 2.42 menunjukkan bahwa pendapatan daerah Kota Sibolga dalam lima tahun terakhir didominasi oleh pendapatan transfer. Pertumbuhan pendapatan transfer angkanya cenderung mengalami peningkatan dan pendapatan asli daerah juga terus meningkat lambat. Hal ini perlu menjadi perhatian di masa mendatang untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, upaya percepatan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu terus dilakukan.

Gambar 2. 43 Perkembangan Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Sibolga Tahun 2020-2024

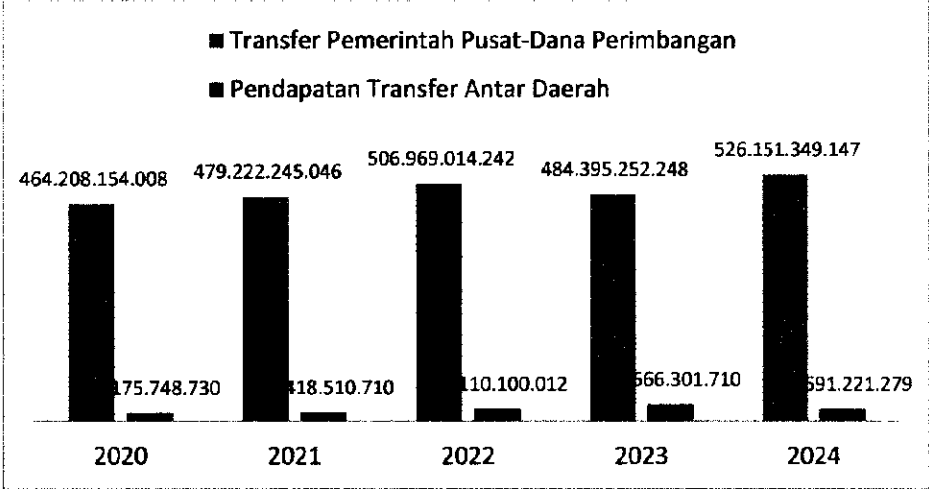


Sumber : BPKAD Kota Sibolga, Tahun 2025

Analisis lebih lanjut terhadap komponen sumber pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa Pajak Daerah merupakan penyumbang terbesar PAD, diikuti oleh Lain-lain PAD yang Sah. Rata-rata kontribusi Pajak Daerah terhadap total PAD mencapai 11,34 %, sedangkan Lain-lain PAD yang Sah berkontribusi 67,26%. Jika dibandingkan dengan total pendapatan daerah, proporsi kedua sumber ini masing-masing sebesar 1,83% dan 9,03%.Perkembangan penerimaan Pajak Daerah cenderung mengikuti pola pertumbuhan PAD secara

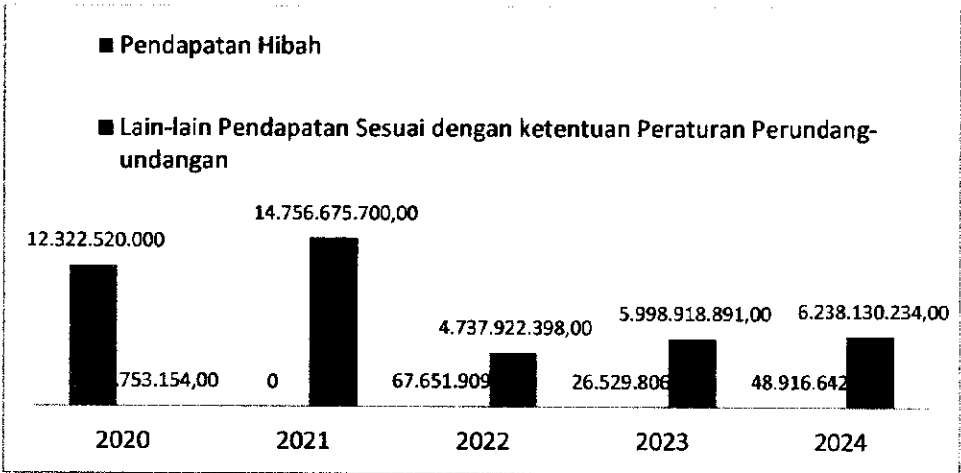
keseluruhan. Seiring dengan pernyataan pemerintah bahwa pandemi telah berakhir meskipun kewaspadaan tetap diperlukan dan pemulihan ekonomi yang semakin stabil, penerimaan Pajak Daerah mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2023 dan stabil hingga tahun 2024.

Gambar 2. 44 Perkembangan Realisasi Komponen Pendapatan Transfer Kota Sibolga Tahun 2020-2024



Komponen penerimaan daerah dari dana transfer didominasi oleh transfer dari pemerintah pusat, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam lima tahun terakhir, rata-rata kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat mencapai 87,97 % dari total pendapatan transfer. Secara umum, jumlah dana transfer dari pemerintah pusat menunjukkan tren peningkatan, kecuali pada periode 2020-2021, ketika pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Namun, setelah pandemi mereda pada tahun 2022, transfer dari pemerintah pusat kembali mengalami kenaikan dan pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali pada tahun 2024 mengalami peningkatan.

Gambar 2. 45 Perkembangan Realisasi Komponen Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kota Sibolga Tahun 2020-2024



Komponen penerimaan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari dana hibah serta pendapatan lain yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum, pendapatan hibah menjadi sumber utama dalam kategori ini. Namun, terdapat pengecualian pada tahun 2021, di mana terjadi peningkatan signifikan dalam penerimaan dari pendapatan lain yang sah berdasarkan peraturan perundangan, seperti pinjaman dan obligasi daerah.

Secara keseluruhan, pendapatan daerah Kota Sibolga selama periode 2020-2021 mengalami per tahun. Meskipun terjadi penurunan ekonomi akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2022 sampai 2025, kondisi pendapatan daerah tetap menunjukkan tren positif. Namun, terdapat beberapa sumber pendapatan yang memerlukan perhatian lebih, terutama sumber yang dapat dikendalikan langsung oleh pemerintah daerah, seperti retribusi daerah yang dalam beberapa tahun mengalami pertumbuhan negative menunjukkan bahwa retribusi daerah menjadi salah satu komponen pendapatan yang perlu dioptimalkan dan ditingkatkan di masa mendatang.

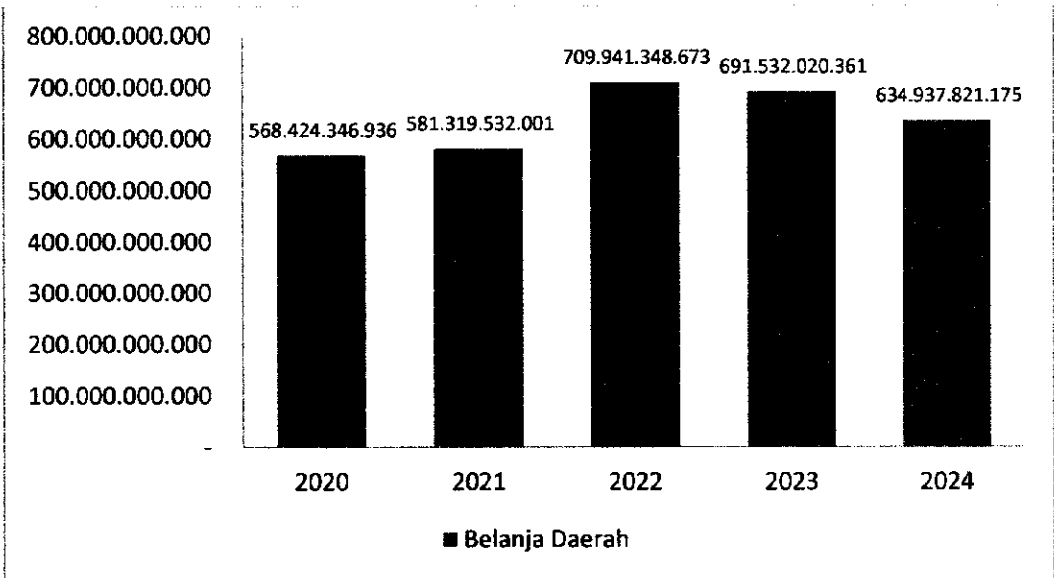
Tabel 2. 105 Pertumbuhan setiap Komponen Pendapatan Daerah Kota Sibolga Tahun 2020 – 2024

Rekening	Uraian	Realisasi 2020 (Audited)	Realisasi 2021 (Audited)	Realisasi 2022 (Audited)	Realisasi 2023 (Audited)	Realisasi 2024 (Audited)	Rata-Rata Pertumbuhan
4	PENDAPATAN DAERAH	617,321,840,304.00	589,661,218,589.27	621,282,839,595.63	614,234,638,127.75	645.706.647.615,77	1,22
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	79,539,316,412.00	76,263,787,133.27	82,398,151,034.31	87,147,635,472.40	86.577.030.313,34	2,26
4 . 1 . 1	Pajak Daerah	9,712,781,443.00	11,398,529,221.00	12,169,731,508.00	12,982,876,029.00	12.373.706.574,00	6,53
4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	4,889,390,783.00	4,246,987,577.00	4,683,973,666.80	4,489,457,120.00	5.540.909.774,00	4,10
4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12,808,443,670.00	9,255,412,429.00	11,046,702,945.44	9,159,505,525.00	9.816.845.722	-4,57
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD yang Sah	52,128,700,516.00	51,362,857,906.27	54,497,742,914.07	60,515,796,798.40	58.845.568.243,34	3,23
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	525,379,250,738.00	498,640,755,756.00	534,079,114,254.00	521,061,553,958.00	552.842.570.426	1,42
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	464,208,154,008.00	479,222,245,046.00	506.969.014.242,00	484,395,252,248.00	526.151.349.147	3,06
4 . 2 . 1 . 1	Dana Perimbangan		470,049,232,046.00	488.538.490.242,00	474,764,063,248.00	519.277.822.147	2.62
4 . 2 . 1 . 2	Insentif fiskal		9,173,013,000.00	18.430.524.000	9,631,189,000.00	6.873.527.000	-6,14
4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	18,175,748,730.00	19,418,510,710.00	27.110.100.012,00	36,666,301,710.00	26.691.221.279	13,62
4 . 2 . 2 . 1	Pendapatan Bagi Hasil	18,175,748,730.00	19,418,510,710.00	24.1260.121.0170,00	33,078,510,710.00	26.691.221.279	12,20

4.2.2.2	Bantuan Keuangan	-	0.00	2.849.978.842,00	3,587,791,000.00	0,00	-18,53
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12,403,273,154.00	14,756,675,700.00	4.805.574.307,32	6,025,448,697.35	6.287.046.876,43	-4,68
	Pendapatan Hibah	12,322,520,000.00	0.00	67.651.909,32	26,529,806.35	48.916.642,43	-19,10
4.3.1							
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	80,753,154.00	14,756,675,700.00	4.737.922.398,00	5,998,918,891.00	6.238.130.234,00	4534,13

Sumber : BPKPAD Kota Sibolga, Tahun 2025

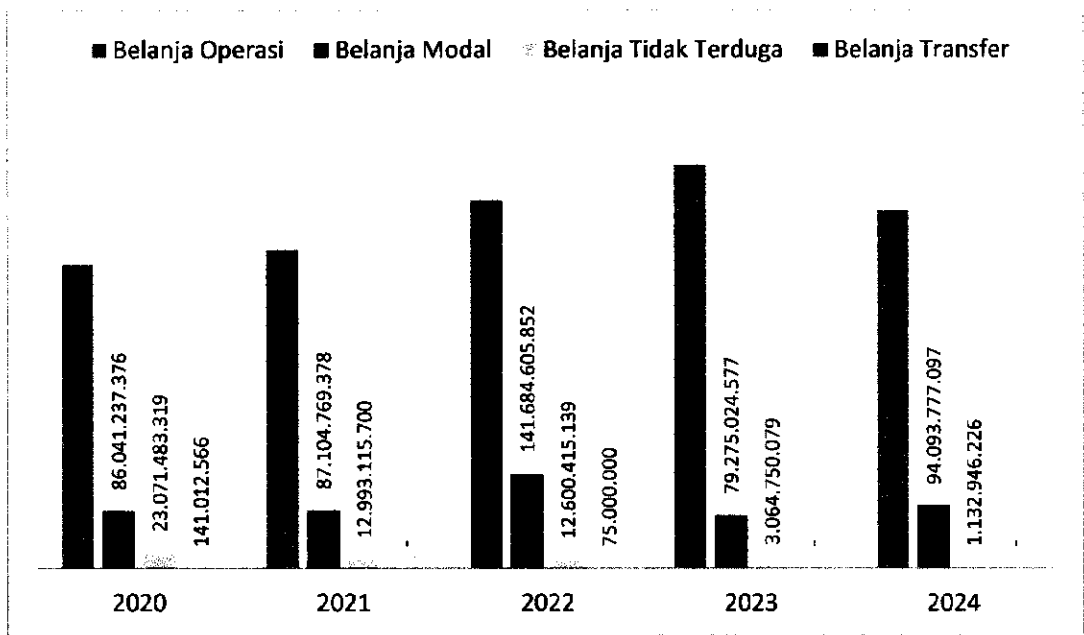
Gambar 2. 46 Perkembangan Belanja Daerah Kota Sibolga Tahun 2020 – 2024



Sumber : BPKPAD Kota Sibolga, Tahun 2020 2024

Tren belanja daerah Kota Sibolga cenderung mengikuti pola pendapatan daerah. Hal ini wajar karena sumber utama belanja daerah berasal dari pendapatan atau penerimaan daerah. Ketika penerimaan menurun, belanja juga harus dikurangi agar kondisi keuangan daerah tetap seimbang dan tidak mengalami defisit. Jika terdapat sumber pembiayaan lain untuk menutup kekurangan, belanja yang lebih besar dari penerimaan masih dapat dilakukan, tetapi dalam jangka panjang, hal ini tidak sehat bagi keuangan daerah. Sebaliknya, ketika pendapatan meningkat, pemerintah memiliki ruang untuk meningkatkan belanja, terutama belanja non-rutin yang digunakan untuk program pembangunan. Oleh karena itu, secara umum, besaran belanja daerah akan mengikuti tren penerimaan daerah.

Gambar 2. 47 Perkembangan Komponen Belanja Daerah Kota Sibolga Tahun 2020-2024

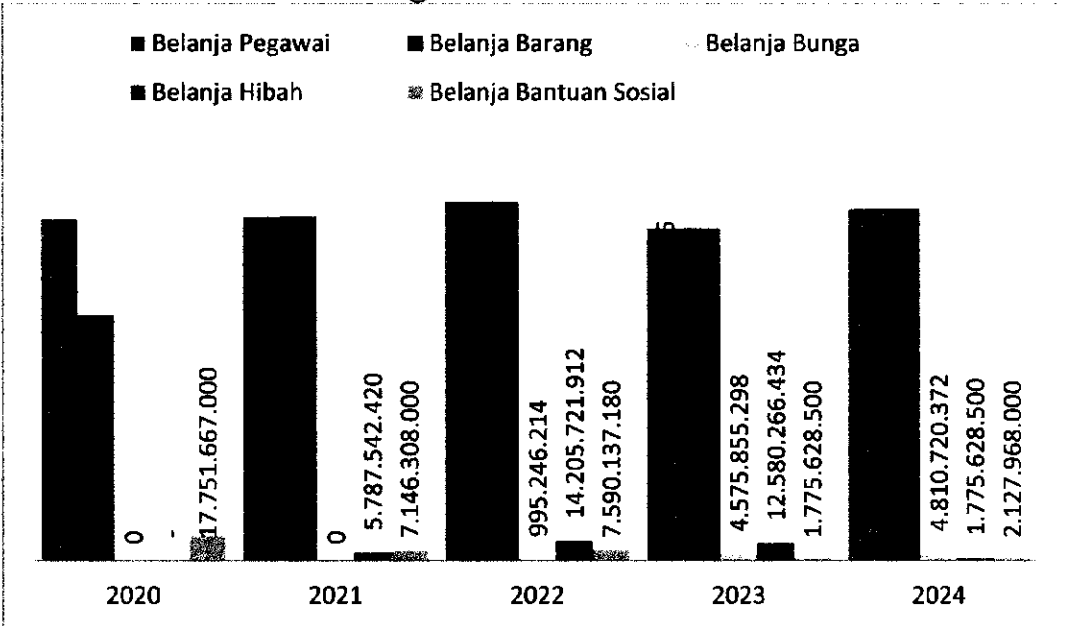


Sumber : BPKPAD Kota Sibolga, Tahun 2025

Belanja daerah Kota Sibolga didominasi oleh belanja operasi untuk penyelenggaraan pemerintahan, diikuti oleh belanja modal, belanja transfer, dan belanja tak terduga. Belanja operasi dialokasikan untuk pengeluaran rutin dalam mendukung program pembangunan dan pelayanan publik. Idealnya, belanja operasi terus meningkat, terutama untuk pembiayaan program pembangunan di berbagai sektor. Demikian pula, belanja modal diharapkan meningkat setiap tahun guna menambah aset daerah yang dapat dimanfaatkan secara optimal baik dalam jangka pendek maupun panjang. Belanja transfer, yang disalurkan ke sub-daerah dalam Kota, juga perlu ditingkatkan sebagai bentuk dukungan pendanaan bagi pembangunan di wilayah-wilayah tersebut. Sementara itu, belanja tak terduga sebaiknya tetap rendah. Jika realisasinya tinggi, hal ini menandakan adanya kejadian luar biasa atau kondisi darurat yang memerlukan anggaran tambahan untuk penanganannya. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa belanja operasi daerah Kota Sibolga terutama dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa (untuk pelaksanaan program pembangunan), serta

belanja hibah. Peningkatan belanja operasi, khususnya di luar belanja pegawai, diharapkan terjadi karena mencerminkan peningkatan kapasitas program pembangunan.

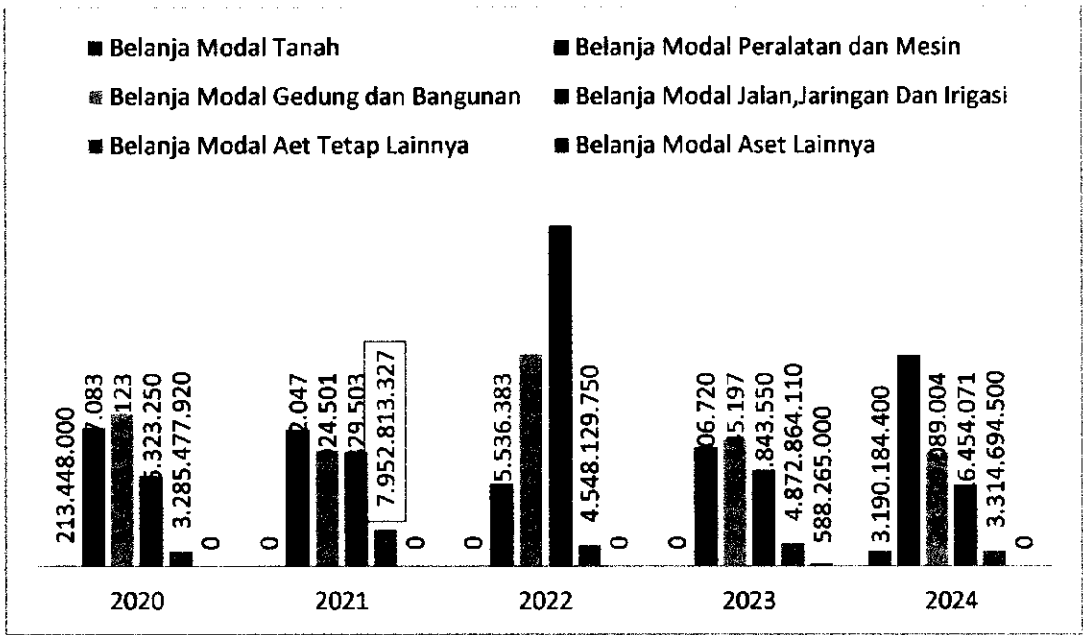
Gambar 2. 48 Perkembangan Komponen Belanja Operasional Kota Sibolga Tahun 2020-2024



Sumber : BPKPAD Kota Sibolga, Tahun 2025

Sementara itu, belanja pegawai sebaiknya tetap stabil atau mengalami peningkatan yang wajar agar tetap mencerminkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya manusia dalam pemerintahan daerah. Gambar 2.49 menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, komposisi belanja di Kota Sibolga mengalami perbaikan, dengan alokasi untuk program pembangunan (belanja barang dan jasa) yang cenderung meningkat.

Gambar 2. 49 Perkembangan Komponen Belanja Modal Kota Sibolga Tahun 2020-2024



Sumber : BPKPAD Kota Sibolga, Tahun 2025

Belanja modal merupakan komponen terbesar kedua dalam anggaran belanja daerah Kota Sibolga. Sebagian besar alokasi belanja modal difokuskan pada pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan infrastruktur wilayah. Tren alokasi anggaran untuk belanja modal menunjukkan peningkatan, terutama pada tahun 2022. Peningkatan ini diharapkan dapat mendorong pembangunan wilayah secara lebih luas, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan Kota Sibolga secara keseluruhan. Tabel 2.80 menyajikan gambaran lebih rinci mengenai rata-rata pertumbuhan tahunan dari setiap komponen belanja di Kota Sibolga. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, alokasi belanja daerah menunjukkan tren yang cukup baik. Rata-rata pertumbuhan positif pada belanja barang dan jasa mencerminkan peningkatan kapasitas program pembangunan. Demikian pula, kenaikan belanja modal dan belanja transfer mengindikasikan pertumbuhan kapasitas pembangunan daerah yang semakin baik. Sementara itu, lonjakan signifikan pada belanja tak terduga dapat dimaklumi, mengingat adanya pandemi COVID-19 pada

tahun 2020 dan 2021, yang menyebabkan kebutuhan anggaran khusus untuk penanganan dan pengendalian situasi darurat tersebut.

Tabel 2. 106 Realisasi Belanja Daerah Kota Sibolga Tahun 2020-2024 dan Rata-Rata Pertumbuhannya

Rekening	Uraian	Realisasi 2020 (Audited)	Realisasi 2021 (Audited)	Realisasi 2022 (Audited)	Realisasi 2023 (Audited)	Realisasi 2024 (Audited)	Rata-Rata Pertumbuhan
5	BELANJA DAERAH	568,424,346,936.00	581,319,532,001.39	709,941,348,672.84	691,532,020,360.52	634.937.821.175,44	3,40
5 . 1	BELANJA OPERASI	459,170,613,675.00	481,221,646,923.13	555,581,327,681.84	609,192,245,704.52	539.711.097.852,44	4,62
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	245,172,603,408.00	246,602,398,284.00	257,445,444,071.00	238,198,448,986.00	252.686.424.106,25	0,90
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	176,235,683,263.00	221,685,398,219.13	275,344,778,304.84	352,062,046,486.52	249.741.824.398,19	12,20
5 . 1 . 3	Belanja Bunga		0.00	995,246,214.00	4,575,855,298.00	4.810.720.372,00	18,25
	Belanja Subsidi						0,00
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	20,010,660,004.00	5,787,542,420.00	14,205,721,912.00	12,580,266,434.00	30.344.160.976,00	51,03
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	17,751,667,000.00	7,146,308,000.00	7,590,137,180.00	1,775,628,500.00	2.127.968.000,00	-27,57
5 . 2	BELANJA MODAL	86,041,237,376.00	87,104,769,378.26	141,684,605,852.00	79,275,024,577.00	94.093.777.097.,00	9,64
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	213,448,000.00	0.00	0	0.00	3.190.184.400,00	-5
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29,926,767,083.00	29,476,702,047.00	17,755,536,383.00	25,687,606,720.00	45.563.355..122	20,20

5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33,060,221,123.00	25,014,924,501.26	45,911,783,872.00	27,393,445,197.00	24.509.089.004	2,08
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19,555,323,250.00	24,660,329,503.00	73,469,155,847.00	20,732,843,550.00	17.516.454.071,00	30,46
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,285,477,920.00	7,952,813,327.00	4,548,129,750.00	4,872,864,110.00	3.314.694.500	18,60
5 . 2 . 6	Belanja Modal Aset Lainnya	0	0	0	588,265,000.00	0	-25,00
5 . 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	23,071,483,319.00	12,993,115,700.00	12,600,415,139.00	3,064,750,079.00	1.132.946.226,00	-46,35
5 . 3 . 1	Belanja Tidak Terduga	23,071,483,319.00	12,993,115,700.00	12,600,415,139.00	3,064,750,079.00	1.132.946.226,00	-46,35
5 . 4	BELANJA TRANSFER	141,012,566.00	0.00	75,000,000.00	0.00	0,00	
5.4.1	Belanja Bagi Hasil		0.00		0.00	0,00	
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	141,012,566.00	0.00		0.00	0,00	
Rekening	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Rata-Rata Pertumbuhan

Tabel 2.91 menunjukkan berbagai sumber penerimaan pembiayaan daerah serta pengeluaran pembiayaan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Kota Sibolga masih mengandalkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SLPA) sebagai sumber utama penerimaan pembiayaan, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 37,57% (turun). Penerimaan pembiayaan juga mencakup pinjaman daerah, pengembalian pinjaman daerah, serta hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, meskipun pertumbuhan komponen ini bersifat negatif karena hanya terjadi pada tahun-tahun tertentu. Secara keseluruhan, penerimaan pembiayaan Kota Sibolga mengalami rata-rata pertumbuhan turun sebesar 35,37 Pada tahun 2024. Di sisi lain, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban membayar pokok utang sebagai dampak dari pinjaman yang dilakukan maka pada tahun 2024 pembiayaan netto mengalami defisit dikarenakan lebih besar pembiayaan neto dari pada penerimaan daerah. Namun, secara keseluruhan, penerimaan pembiayaan lebih besar dibandingkan pengeluarannya, sehingga pembiayaan netto tetap positif dan mampu menutupi defisit anggaran, terutama pada tahun 2022 dan 2023. Pembiayaan netoo lebih besar dibandingkan pembiayaan daerah, yang mencerminkan bahwa pengelolaan pembiayaan daerah di Kota Sibolga relatif tidak sehat.

Tabel 2. 107 Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Sibolga Tahun 2020-2024 dan Rata-Rata Pertumbuhannya

Rekening	Uraian	Realisasi 2020 (audited)	Realisasi 2021 (audited)	Realisasi 2022 (audited)	Realisasi 2023 (audited)	Realisasi 2024 (audited)	Rata-rata Pertumbuhan
6	PEMBIAYAAN						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	43,842,361,235.00	87,367,317,513.51	175,814,578,217.39	87,156,069,140.18	6,659,235,660.41	14,43
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	43,842,361,235.00	87,367,317,513.51	92,628,827,506.39	87,156,069,140.18	6,659,235,660.41	14,43
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah		0.00	83,185,750,711.00	0.00	0	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5,372,537,090.00	3,080,176,595.00		3,199,451,247.00	12.797.804.988,00	39,33
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	5,372,537,090.00	3,080,176,595.00	0	0.00	0	-35,67
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo			0	3,199,451,247.00	12.797.804.988,00	
	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan						
	PEMBIAYAAN NETTO	38,469,824,145.00	84,287,140,918.51	175,814,578,217.39	83,956,617,893.18	(6.138.569.327,59)	17,03
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	87,367,317,513.00	92,628,827,506.39	87,156,069,140.18	6,659,235,660.41	4.630.257.112,74	-30,68

Sumber : BPKPAD Kota Sibolga, Tahun 2025

3) Neraca Daerah

Evaluasi pengelolaan keuangan daerah di masa lalu dapat dilakukan dengan menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan asetnya, yang tercermin dalam perkembangan neraca daerah. Data dari neraca daerah dianalisis berdasarkan perkembangannya serta rasio likuiditas dan rasio solvabilitas keuangan daerah untuk menilai kondisi kesehatan keuangan daerah. Tabel 2.82 menunjukkan bahwa Kota Sibolga memiliki aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Sejak tahun 2022, pertumbuhan aset lancar mengalami penurunan. Namun, jika dilihat dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan aset lancar tetap positif. Hal yang sama berlaku untuk aset tetap dan aset lainnya, yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di sisi lain, kewajiban Kota Sibolga dalam lima tahun terakhir terutama berasal dari kewajiban jangka pendek, seperti utang jangka pendek yang tergolong cukup besar. Namun, selama utang tersebut digunakan untuk kegiatan produktif yang mendukung pembangunan dan jumlahnya masih seimbang dengan total aset yang dimiliki, maka kondisi ini tidak akan menjadi kendala bagi stabilitas keuangan daerah.

Tabel 2. 108 Pertumbuhan Neraca Kota Sibolga Tahun 2020 – 2024

		Persediaan	8.300.128.591,02	8.990.158.809,28	12.064.468.525,64	14.537.062.906,20	15.279.683.671,16
		Jumlah Aset Lancar	115.595.079.377,68	127.641.768.818,27	122.655.453.849,98	58.171.822.882,52	66.038.005.212,17
		INVESTASI JANGKA PANJANG					
		Investasi Jangka Panjang Non Permanen					
		Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dana Bergulir dan Dana Kemitraan	1.477.929.038,57	1.477.929.038,57	1.477.929.038,57	1.477.929.038,57	1.477.929.038,57
		Penyisihan Investasi Non Permanen - Dana Bergulir	-1.477.929.038,57	-1.477.929.038,57	-1.477.929.038,57	(1.477.929.038,57)	(1.477.929.038,57)
		Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah Investasi Nonpermanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investasi Jangka Panjang Permanen					
		Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	50.282.541.952,95	53.494.902.881,90	52.570.727.947,95	52.911.350.521,45	52.799.835.640,45
		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	50.282.541.952,95	53.494.902.881,90	52.570.727.947,95	52.911.350.521,45	52.799.835.640,45
		Jumlah Investasi Jangka Panjang	50.282.541.952,95	53.494.902.881,90	52.570.727.947,95	52.911.350.521,45	52.799.835.640,45
		ASET TETAP					
		Tanah	542.553.062.872,00	542.565.473.552,00	542.565.473.552,00	561.058.397.828,00	561.930.424.428,00
		Peralatan dan Mesin	329.311.804.225,79	351.230.000.788,79	362.761.833.975,89	362.587.308.304,47	391.596.666.931,08
		Gedung dan Bangunan	546.274.744.012,00	514.298.824.599,26	540.219.470.363,36	535.313.861.705,85	634.870.222.052,17
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	535.238.607.338,00	562.884.444.038,00	630.509.731.093,09	652.040.664.142,44	693.508.074.997,65
		Aset Tetap Lainnya	17.445.436.198,32	19.062.603.098,82	19.850.697.129,82	20.841.703.015,82	21.590.183.815,82

		Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.067.020.519,00	5.698.880.169,00	15.612.846.477,22	33.501.652.914,02	1.628.821.965,00
		Akumulasi Penyusutan	-607.946.606.741,96	-668.281.407.340,10	-746.241.551.364,99	(788.286.275.147,63)	-870.446.090.900,70
		Jumlah Aset Tetap	1.368.944.068.423,15	1.327.458.818.905,77	1.365.278.501.226,39	1.377.057.312.762,97	1.434.678.303.289,02
		DANA CADANGAN					
		Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ASET LAINNYA					
		Tagihan Jangka Panjang	13.076.959.748,80	13.093.337.501,94	12.867.918.486,66	12.584.534.984,66	12.754.857.524,95
		Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	107.804.829.210,21
		Aset Tak Berwujud	2.494.177.636,00	2.908.175.463,00	4.395.484.463,00	4.938.735.963,00	5.008.735.963,00
		Aset Lain-lain	98.987.043.128,38	100.462.897.866,38	119.312.877.071,03	143.412.978.775,33	58.653.233.929,13
		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-407.630.000,00	-407.630.000,00	-407.630.000,00	(407.630.000,00)	-461.588.334,00
		Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00	0,00	2.516.413.000,00	1.522.910.000,00
		Jumlah Aset Lainnya	114.150.550.513,18	116.056.780.831,32	136.168.650.020,69	163.045.032.722,99	185.282.978.293,29
		JUMLAH ASET	1.648.972.240.266,96	1.624.652.271.437,26	1.676.673.333.045,01	1.651.185.518.889,93	1.738.799.122.434,93
		KEWAJIBAN					
		KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
		Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	16.621.566,00	33.986.027,00	59.155.237,00	38.803.084,00	0,00
		Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pendapatan Diterima Dimuka	168.954.063,00	139.515.791,00	101.023.059,00	88.155.762,00	102.763.569,00
		Utang Belanja	5.637.977.084,00	8.332.260.545,40	14.650.950.453,49	34.052.276.338,43	35.867.391.658,00

			Utang Jangka Pendek Lainnya				0,00	5.357.060.000,00
			Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	5.823.552.713,00	8.505.762.363,40	14.811.128.749,49	34.179.235.184,43	41.327.215.227,00
			KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
			Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	83.185.750.711,00	79.986.299.464,00	67.188.494.476,00
			Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	83.185.750.711,00	79.986.299.464,00	67.188.494.476,00
			JUMLAH KEWAJIBAN	5.823.552.713,00	8.505.762.363,40	97.996.879.460,49	114.165.534.648,43	108.515.709.703,00
			EKUITAS					
			EKUITAS	1.643.148.687.553,96	1.616.146.509.073,86	1.578.676.453.584,52	1.537.019.984.241,50	1.630.283.412.731,93
			JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.648.972.240.266,96	1.624.652.271.437,26	1.676.673.333.045,01	1.651.185.518.889,93	1.738.799.122.434,93

Sumber : BPKPAD Kota Sibolga, Tahun 2025

Untuk menilai apakah kondisi keuangan Kota Sibolga tergolong sehat, khususnya dalam hal kemampuan daerah menutupi kewajibannya dalam kondisi normal, dilakukan analisis terhadap rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas (liquidity ratio) mengukur kemampuan daerah dalam melunasi utang saat jatuh tempo. Semakin tinggi rasio likuiditas, semakin baik kemampuan daerah dalam membayar utang jangka pendek dan kewajiban lancar. Biasanya, rasio ini menjadi acuan bagi pemberi pinjaman untuk menilai stabilitas keuangan suatu daerah. Terdapat tiga jenis rasio likuiditas:

1. Rasio Lancar (Current Ratio) mengukur kemampuan aset lancar dalam menutupi utang jangka pendek.
2. Rasio Cepat (Quick Ratio) membandingkan aset lancar yang paling mudah diuangkan (kecuali persediaan) dengan kewajiban jangka pendek, sehingga menunjukkan kapasitas daerah dalam membayar utang tanpa mengandalkan persediaan.
3. Rasio Kas (Cash Ratio) menilai kemampuan kas dan setara kas dalam melunasi kewajiban jangka pendek. Selain itu, analisis rasio solvabilitas (solvency ratio) digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Dua indikator utama dalam analisis ini adalah:

1. Debt Ratio, yang menunjukkan sejauh mana aset daerah dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit baru. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik jaminan bagi kreditur, tetapi nilai utang yang terlalu besar juga bisa menjadi risiko.
2. Debt-to-Equity Ratio (DER), yang membandingkan jumlah utang dengan ekuitas daerah. Jika DER di bawah atau sama dengan 100%, kondisi keuangan dianggap sehat. Jika berada di atas 100%, daerah perlu waspada, sementara nilai di atas 200% menunjukkan risiko tinggi.

Berdasarkan Tabel 2.83, aset lancar Kota Sibolga, termasuk aset yang paling mudah dicairkan, cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Selain itu, rasio solvabilitas menunjukkan bahwa kondisi keuangan daerah relatif sehat. Persentase rasio yang rendah mengindikasikan bahwa aset yang dimiliki Kota Sibolga mampu menjamin pembayaran kewajibannya dengan baik.

Tabel 2. 109 Rasio Likuiditas dan Solvabilitas Keuangan Daerah Kota Sibolga 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Rasio Lancar (Current Ratio)	19,85	15,01	8,28	1,70	1,60	
Rasio Cepat (Quick ratio)	18,42	13,95	7,47	1,28	1,23	
Rasio Kas	15,02	10,90	5,89	0,20	0,08	
Debt Ratio	0,004	0,005	0,058	0,069	0,062	
Debt to Equity Ratio	0,004	0,005	0,062	0,074	0,067	

b. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu (Tahun 2020-2024)

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara umum tercermin dalam kebijakan pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang efektif bertujuan untuk menyeimbangkan optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi serta efektivitas belanja, dan pemanfaatan pembiayaan yang tepat. Selama lima tahun terakhir (2020-2024), kebijakan keuangan daerah dirangkum dari berbagai kebijakan terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah dituangkan dalam RKPD maupun RKPD Perubahan. Secara garis besar, kebijakan pendapatan diarahkan untuk meningkatkan penerimaan daerah dari berbagai sumber. Kebijakan belanja

menyesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD, serta mengikuti kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan APBD. Setiap tahun, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan pedoman penyusunan RKPD dan APBD yang mengatur alokasi anggaran serta prioritas pembangunan tahunan. Pemerintah daerah harus menyelaraskan kebijakan pembangunan dengan kebutuhan daerah dan arahan nasional. Sementara itu, kebijakan pembiayaan daerah difokuskan pada perencanaan pengeluaran yang dapat dibiayai dari berbagai sumber pendapatan, baik dari pendapatan daerah dalam tahun berjalan, sisa lebih anggaran tahun sebelumnya, pinjaman daerah, maupun sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang undangan. Dalam upaya memastikan ketersediaan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kota Sibolga menerapkan berbagai strategi peningkatan pendapatan daerah. Upaya tersebut meliputi optimalisasi pemungutan pendapatan asli daerah (PAD), identifikasi potensi sumber pendapatan baru, peninjauan peraturan daerah yang sudah tidak relevan, serta koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk meningkatkan penerimaan Dana Perimbangan seperti DAU, DAK, dan DBH. Selain itu, pemerintah daerah juga menegakkan aturan dalam penagihan pajak, mengoptimalkan pengelolaan aset daerah untuk meningkatkan PAD, serta memperketat pengawasan guna meminimalisir kebocoran anggaran. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada 2019 dan terutama tahun 2021 berdampak signifikan terhadap pendapatan daerah, khususnya akibat penurunan dana transfer dari pemerintah pusat yang mempengaruhi kekuatan APBD. Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.17/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke

Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang mengatur alokasi dan penggunaan anggaran untuk penanganan pandemi. Selain itu, terjadi penyesuaian terhadap pendapatan transfer antar daerah, termasuk dana bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi. Dari sisi belanja daerah, kebijakan yang diterapkan setiap tahunnya memiliki karakteristik khusus. Pada tahun 2018 dan 2019, kebijakan belanja diarahkan untuk memenuhi kewajiban belanja tidak langsung seperti gaji pegawai, tunjangan, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan kepada desa, serta alokasi untuk belanja tidak terduga dalam rangka penanggulangan bencana. Selain itu, belanja langsung juga menjadi prioritas untuk mendukung program dan kegiatan perangkat daerah.

Tahun 2020 terjadi banyak perubahan anggaran akibat pandemi COVID-19 yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pemerintahan. Pemerintah melakukan penyesuaian anggaran dengan mengurangi kegiatan yang berpotensi mengumpulkan massa, perjalanan dinas, serta lebih memfokuskan pada program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Dampak pandemi masih berlanjut hingga tahun 2021, sehingga diperlukan langkah-langkah penyesuaian lebih lanjut dalam APBD untuk menangani pandemi dan pemulihan ekonomi daerah. APBD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2021 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2020. Namun, pada awal 2021, pemerintah pusat kembali menerbitkan kebijakan percepatan penanganan COVID-19 melalui Surat Edaran Menteri Keuangan yang menginstruksikan refocusing anggaran transfer ke daerah. Beberapa kebijakan refocusing meliputi alokasi minimal 8% dari DAU untuk belanja kesehatan, minimal 30% dari Dana Insentif Daerah (DID) untuk sektor kesehatan, serta pengalokasian sebagian Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan kegiatan penanganan COVID-19 di tingkat Kelurahan. Kebijakan ini kemudian dipertegas dengan diterbitkannya Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang pengelolaan dana alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022, khusus fisik yang mengatur pengurangan alokasi DAU dan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022. Dampaknya, alokasi DAU Kota Sibolga berkurang menjadi Rp381,09 miliar, atau turun sekitar Rp3,44 miliar dari yang telah dianggarkan sebelumnya. Selain itu, pada Juli 2021 Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat di wilayah Sumatera. Sebagai respons terhadap berbagai perubahan ini, Pemerintah Kota Sibolga melakukan penyesuaian APBD 2021 melalui revisi Peraturan Walikota, termasuk perubahan dalam alokasi Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan petunjuk teknis terbaru. Perubahan ini ditetapkan dalam Peraturan Kota Sibolga Nomor 41 Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2020, seluruh pergeseran anggaran dilaporkan kepada DPRD dan diakomodasi dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2021.

1) Proporsi Penggunaan Anggaran

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah membawa dampak terhadap perubahan struktur APBD, khususnya dalam alokasi Belanja Daerah. Jika sebelumnya belanja daerah dikategorikan ke dalam belanja rutin, belanja pembangunan, dan belanja tak terduga, maka dengan regulasi terbaru ini, klasifikasi belanja daerah terbagi menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Pada aturan sebelumnya, besaran belanja pembangunan mencerminkan kapasitas anggaran yang tersedia untuk membiayai program pembangunan. Makin besar proporsi belanja pembangunan, makin besar pula investasi yang dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur

dan fasilitas ekonomi bagi masyarakat, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja pembangunan daerah. Sementara itu, belanja rutin dikaitkan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan yang tidak langsung terkait dengan program pembangunan, termasuk belanja pegawai. Peningkatan belanja rutin umumnya berdampak pada berkurangnya proporsi anggaran yang dialokasikan untuk belanja pembangunan.

Tabel 2. 110 Proporsi Setiap Komponen terhadap Total Belanja Daerah Kota Sibolga Tahun 2020 – 2024

Rekening	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Rata- Rata
5	BELANJA DAERAH	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
5 . 1	BELANJA OPERASI	80,78	82,78	78,26	88,09	85,00	85,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	43,13	42,42	36,26	34,45	39,80	39,80
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31,00	38,13	38,78	50,91	39,33	39,33
5 . 1 . 3	Belanja Bunga	0,0					
	Belanja Subsidi	0,00					
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	3,52	1,00	2,00	1,82	4,78	4,78
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	3,12	1,23	1,07	0,26	0,34	0,34
5 . 2	BELANJA MODAL	0,15	0,15	0,20	0,11	0,15	0,15
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	0,04	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,26	5,07	2,50	3,71	7,18	7,18

5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5,82	4,30	6,47	3,96	3,86	3,86
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3,44	4,24	1,04	3,00	2,76	2,76
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,58	1,37	0,64	0,70	0,52	0,52
5 . 2 . 6	Belanja Modal Aset Lainnya						
5 . 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4,06	2,24	1,77	0,44	0,18	0,18
5 . 3 . 1	Belanja Tidak Terduga	4,06	2,24	1,77	0,44	0,18	0,18
5 . 4	BELANJA TRANSFER	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil						
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Menurut peraturan terbaru, belanja pembangunan dapat mencakup belanja operasi maupun belanja modal. Tabel 2.84 menunjukkan bahwa mayoritas belanja di Kota Sibolga dialokasikan untuk belanja operasi, dengan rata-rata mencapai 85,00% dalam lima tahun terakhir. Sebagian besar belanja ini digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja hibah. Ketika belanja hibah dan belanja barang-jasa dimanfaatkan secara optimal untuk mendanai program pembangunan di tingkat kabupaten, daerah otonom, serta pihak pihak lain di Kota Sibolga yang berkontribusi pada peningkatan kinerja pembangunan, hal ini dapat menjadi indikator positif. Sementara itu, proporsi belanja pegawai menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun, mengindikasikan upaya efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia atau aparatur dalam pembangunan. Di sisi lain, proporsi belanja modal dan belanja transfer cenderung sangat rendah dengan rata-rata masing-masing sebesar 0,15 % dan 0,00%. Alokasi yang cukup signifikan untuk belanja modal dan transfer diharapkan dapat ditingkatkan, pada pemerintah di Kota Sibolga, sehingga dapat membantu pada kinerja pembangunan Kota Sibolga secara menyeluruh. Sementara itu, biaya tak terduga menunjukkan tren penurunan. Hal ini dapat dipahami mengingat kondisi pada tahun 2021 dan 2022 yang terus membaik setelah pandemi COVID-19 pada tahun 2019, yang sebelumnya menyerap biaya tak terduga yang cukup besar untuk penanganannya.

2) Analisis Pembiayaan

Pemerintah daerah, tidak terkecuali Kota Sibolga memiliki pendapatan yang diterima di setiap tahun anggaran dan belanja atau pengeluaran yang harus dikeluarkan sebagai kewajiban yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah pun harus memastikan bahwa kondisi keuangan daerah baik dan stabil di mana

seluruh belanja dan pengeluarannya dapat dibiayai dengan pendapatan yang diterimanya, tidak lebih besar pasak daripada tiang. Walau pun demikian, pada kondisi tertentu, pemerintah dapat membuat kebijakan dimana belanja dan pengeluaran daerah lebih besar daripada pendapatan (defisit), selama tetap yakin bahwa ada sumber pembiayaan lain yang mampu menutupi defisit tersebut dan tidak mengganggu stabilitas keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tabel 2.85 memperlihatkan bahwa pada tahun 2022 dan 2023, kondisi keuangan daerah Kota Sibolga adalah defisit.

Tabel 2. 111 Defisit/Surplus Riil Anggaran Kota Sibolga Tahun 2020 – 2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Daerah	617.312.840.304	589.661.218.589,27	621.282.839.596	614.234.638.127,75	645.706.647.615,77
Belanja Daerah	568.424.346.936,00	581.319.532.001,39	709.941.3486.72,84	691.532.020.360,52	539.711.097.582,44
Surplus/Defisit	48.897.493.368,00	8.341.686.587,88	(88.658.509.077,21)	(77.297.382.222,77)	10.768.826.440,33
Pembiayaan Netto	38.469.824.145,00	84.287.140.918,51	175.814.578.217,39	83.956.617.893,18	(6.138.569.327,59
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	105.118.984.513,00	92.628.827.506,39	87.156.069.140,186.	6.659.235.660,41	4.630.257.112,74

Meskipun mengalami deficit pada tahun 2022 dan 2023, keuangan Kota Sibolga dapat ditutupi oleh penerimaan pembiayaan yang dimilikinya, sehingga stabilitas kondisi keuangan daerah tetap terjaga. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Tabel 2.81, sumber penerimaan pembiayaan terbesar berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat pula penerimaan dari pinjaman daerah lain serta sumber-sumber lainnya. Pemerintah daerah Kota Sibolga juga memiliki pengeluaran pembiayaan, terutama untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok utang. Namun, secara keseluruhan, penerimaan pembiayaan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran pembiayaan, sehingga menghasilkan surplus pada pembiayaan neto. Di satu sisi, SILPA diperlukan sebagai sumber penerimaan pembiayaan

untuk pembangunan di tahun berikutnya, tetapi di sisi lain, keberadaannya dapat mengindikasikan pengelolaan keuangan yang kurang optimal. SILPA dapat terjadi setidaknya karena dua alasan. Pertama, karena adanya penghematan dalam penggunaan anggaran, di mana program atau kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan mencapai targetnya, namun realisasi belanja berada di bawah target atau alokasi yang ditetapkan. Implikasinya, terdapat anggaran yang tidak terpakai atau berhasil dihemat. Kedua, karena adanya program atau kegiatan yang tidak dapat direalisasikan secara penuh atau sebagian, sehingga realisasi belanja juga lebih rendah dari alokasinya. Jika SILPA muncul karena alasan pertama, hal ini menunjukkan kondisi yang positif, yaitu adanya upaya penghematan. Namun, jika SILPA terjadi karena alasan kedua, hal ini mengindikasikan setidaknya dua kondisi, yaitu (1) perencanaan program/kegiatan atau penganggaran yang kurang baik; atau (2) pelaksanaan program/kegiatan yang tidak optimal. Oleh karena itu, di masa depan, diharapkan SILPA lebih banyak dihasilkan dari penghematan anggaran setelah program atau kegiatan terlaksana secara optimal.

c. Kerangka Pendanaan

Untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan di Kota Sibolga di tahun-tahun mendatang, dibutuhkan proyeksi pendapatan, belanja hingga pembiayaan daerah selama periode perencanaan. Pada bagian ini diuraikan proyeksi pendapatan dan belanja daerah hingga tahun 2029. 1) Proyeksi Pendapatan dan Belanja Seperti tahun-tahun sebelumnya, pendapatan daerah Kota Sibolga berasal dari berbagai sumber, meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan pendapatan sah lainnya. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah sah lainnya. Pajak

daerah dan retribusi daerah diatur berdasarkan objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sementara itu, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup: a) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) dari Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), b) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) dari Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan c) Bagian laba dari penyertaan modal pada perusahaan swasta atau kelompok usaha masyarakat. Selain itu, pendapatan asli daerah sah lainnya meliputi: a) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), b) Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan, c) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, d) Pendapatan dari Pengelolaan Dana Bergulir, e) Jasa giro, f) Pendapatan bunga, dan g) Hasil Kerja Sama Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang akan berlaku penuh pada 5 Januari 2025, pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak serta penambahan sumber pendapatan pajak daerah baru, seperti Pajak Alat Berat (PAB) dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB). Undang-Undang ini mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Saat ini, pemerintah sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan pengaturan di tingkat daerah, yang akan berlaku mulai 5 Januari 2024. Undang-Undang tersebut juga mengatur kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak MLB, termasuk Opsen atas PKB dan BBNKB. Pendapatan transfer diperoleh dari transfer pemerintah pusat maupun sumber lain yang

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pendapatan sah lainnya dapat berasal dari berbagai sumber yang diizinkan oleh hukum. Berdasarkan tren pertumbuhan dan proporsi penerimaan selama lima tahun terakhir, telah dibuat asumsi tertentu untuk memproyeksikan pendapatan daerah Kota Sibolga dari tahun 2023 hingga 2029. Proyeksi belanja dan pembiayaan juga menggunakan asumsi yang dirumuskan dari perkembangan historis belanja dan pembiayaan. Hasil proyeksi belanja dan pembiayaan dapat dilihat pada Tabel 2.86.

Tabel 2. 112 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Sibolga Tahun 2024 – 2030

Rekening	Uraian	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	PENDAPATAN DAERAH	651.993.694.492,20	717.739.715.607,00	661.413.390.092,26	669.332.493.256,60	676.087.488.454,61	684.682.578.049,63	693.505.450.695,81
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	86.577.030.313,34	196.791.603.388,00	136.319.583.232,00	142.351.636.371,60	147.422.439.422,29	154.451.916.883,70	160.605.896.789,59
4 . 1 . 1	Pajak Daerah	12.373.706.574,00	22.867.067.781,00	17.834.753.693,00	18.726.491.377,65	19.662.815.946,53	20.645.956.743,86	21.678.254.581,05
4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	5.540.909.774,00	65.104.181.080,00	64.543.982.336,00	67.037.255.430,80	69.382.339.434,45	71.759.811.896,47	73.779.186.553,00
4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.816.845.722,00	10.138.781.094,00	10.227.264.682,00	10.738.627.916,10	11.275.559.311,91	11.539.337.277,50	12.116.304.141,38
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD yang Sah	58.845.568.243,34	98.681.573.433,00	43.713.582.521,00	45.849.261.647,05	47.101.724.729,40	50.506.810.965,87	53.032.151.514,16
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	559.129.617.302,43	520.826.327.219,00	518.936.500.250,00	520.823.550.275,00	522.507.742.422,32	524.073.354.555,93	526.742.247.296,22
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	526.151.349.147,00	494.371.610.000,00	497.389.500.250,00	499.276.550.275,00	500.960.742.422,32	502.526.354.555,93	505.195.247.296,22
4 . 2 . 1 . 1	Dana Perimbangan	519.277.822.147,00	494.371.610.000,00	478.519.000.000,00	479.462.525.012,50	480.156.015.896,69	481.181.391.704,02	482.258.036.301,72
4 . 2 . 1 . 2	Insentif fiskal	6.873.527.000,00	-	18.870.500.250,00	19.814.025.262,50	20.804.726.525,63	21.344.962.851,91	22.937.210.994,50
4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	26.691.221.279,00	26.332.932.219,00	21.547.000.000,00	21.547.000.000,00	21.547.000.000,00	21.547.000.000,00	21.547.000.000,00
4 . 2 . 2 . 1	Pendapatan Bagi Hasil	26.691.221.279,00	26.332.932.219,00	21.547.000.000,00	21.547.000.000,00	21.547.000.000,00	21.547.000.000,00	21.547.000.000,00
4 . 2 . 2 . 2	Bantuan Keuangan	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.287.046.876,43	121.785.000,00	6.157.306.610,26	6.157.306.610,00	6.157.306.610,00	6.157.306.610,00	6.157.306.610,00
4 . 3 . 1		48.916.642,43	-	-	-	-	-	-

Rekening	Uraian	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.238.130.234,00	121.785.000,00	6.157.306.610,26	6.157.306.610,00	6.157.306.610,00	6.157.306.610,00	6.157.306.610,00
5	BELANJA DAERAH	634.937.821.175,44	704.692.656.769,00	649.615.585.104,26	657.534.688.268,68	664.289.683.466,60	672.884.773.061,63	681.707.645.707,98
5.1	BELANJA OPERASI	539.711.097.852,44	629.660.030.152,00	558.884.624.449,88	569.124.189.715,41	577.360.416.000,83	587.177.297.850,06	594.542.088.773,38
5.1.1	Belanja Pegawai	252.686.424.106,25	338.035.751.109,00	269.820.763.646,00	273.650.789.000,00	276.590.455.307,00	280.627.368.139,00	284.788.360.900,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	249.741.824.398,19	277.899.156.812,00	266.556.459.161,52	274.024.864.123,15	277.654.998.064,11	283.192.782.132,09	285.788.360.900,00
5.1.3	Belanja Bunga	4.810.720.372,00	3.972.444.293,00	4.810.720.372,00	4.810.720.372,00	4.810.720.372,00	4.810.720.372,00	4.810.720.372,00
Code	Belanja Subsidi		270.000.000,00	138.792.187,12	150.666.348,02	155.716.301,71	65.327.518,80	75.474.997,33
5.1.5	Belanja Hibah	30.344.160.976,00	7.664.427.938,00	15.557.889.083,24	14.487.149.872,23	16.148.525.956,00	16.481.099.688,17	17.079.171.604,05
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.127.968.000,00	1.818.250.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	94.093.777.097,00	45.306.072.690,00	76.930.081.161,71	77.178.221.792,66	76.823.797.195,06	76.696.995.752,24	77.664.122.578,55
5.2.1	Belanja Modal Tanah	3.190.184.400,00	902.279.800,00	730.252.265,07	805.519.858,51	918.242.749,77	1.069.467.739,44	1.234.967.398,61
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.563.355.122,00	20.828.493.046,00	28.410.164.598,42	28.730.994.464,55	29.047.465.115,34	29.509.147.013,79	30.742.850.537
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.509.089.004,00	13.645.653.103,00	27.378.177.786,77	27.629.518.963,34	27.914.598.753,20	26.949.736.661,04	27.509.328.378
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.516.454.071,00	6.201.680.041,00	15.481.233.930,72	14.847.362.465,25	14.194.498.720,21	14.386.663.102,54	13.503.851.197,83
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.314.694.500,00	3.727.966.700,00	4.783.895.816,60	4.997.038.489,14	4.557.724.439,12	4.559.214.072,19	4.507.323.375,02
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	146.356.764,14	167.787.551,88	191.267.417,42	222.767.163,25	165.801.692,35
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.132.946.226,00	29.726.553.927,00	13.764.877.398,33	11.213.776.411,56	10.083.886.530,15	8.997.798.428,67	9.486.639.820,28
5.4	BELANJA TRANSFER	-	-	36.002.094,33	18.500.349,06	21.583.740,56	12.681.030,66	14.794.535,77

Rekening	Uraian	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	SURPLUS / (DEFISIT)	17.055.873.316,76	13.047.058.838,00	11.797.804.988,00	11.797.804.987,92	11.797.804.988,01	11.797.804.988,00	11.797.804.987,84
6	PEMBIAYAAN							
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	6.659.235.660,41	25.844.863.826	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6.659.235.660,41	25.844.863.826	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah			-	-	-	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.797.804.988,00	12.797.804.988,00	12.797.804.988,00	12.797.804.988,00	12.797.804.988,00	12.797.804.988,00	12.797.804.988,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	12.797.804.988,00	12.797.804.988,00	12.797.804.988,00	12.797.804.988,00	12.797.804.988,00	12.797.804.988,00	12.797.804.988,00
	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-					
	PEMBIAYAAN NETTO	(6.138.569.327,59)	25.844.863.826	(11.797.804.988,00)	(11.797.804.988,00)	(11.797.804.988,00)	(11.797.804.988,00)	(11.797.804.988,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	10.917.303.989,17	-	-	-	-	-	-

2.6 Permasalahan Dan Isu Strategis

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk menyesuaikan dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis pembangunan Kota Sibolga merupakan kritalisasi dari permasalahan pembangunan daerah, yang bersumber dari analisis data existing condition dan telah terhadap isu strategis global, nasional dan regional.

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang selalu berkembang, terdapat permasalahan dan tantangan pembangunan yang selalu mengiringi. Dari beberapa hasil capaian pembangunan yang masih belum maksimal menunjukkan adanya kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan pembangunan. Dengan itu, perlu adanya perumusan analisis permasalahan yang dilakukan untuk mengidentifikasi beragam permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara capaian kinerja pembangunan saat ini dengan yang direncanakan, dapat dikatakan perbedaan kondisi yang ingin dicapai dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, seperti kelemahan yang belum teratasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan karena urgensinya terhadap pembangunan daerah masa kini dan mendatang. Isu strategis dirumuskan melalui berbagai informasi kebijakan pembangunan yang berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal, yakni kondisi yang

menciptakan peluang dan ancaman bagi implementasi rencana pembangunan ke depan.

Selanjutnya, permasalahan dan isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya dapat meningkatkan peluang tercapainya berbagai target pembangunan daerah sehingga memberi nilai lebih pada setiap pelaksanaan tahapan pembangunan daerah. Namun sebaliknya, jika permasalahan dan isu strategis tidak diidentifikasi dapat memicu beberapa kegagalan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan.

Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah merupakan dasar pemikiran untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah di masa datang. Oleh karena itu, analisis terhadap permasalahan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan RPJMD Kota Sibolga periode pembangunan 2025-2029 untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut berbagai permasalahan dan isu strategis yang telah dikembangkan dan dijabarkan dalam peruntukannya sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

2.6.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Tujuan otonomi daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu, melalui otonomi secara luas, terlebih pada konteks global, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah.

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Dalam perumusan perencanaan kebijakan pembangunan periode 2025-2029, permasalahan pembangunan Kota Sibolga memiliki urgensi vital dalam menyusun setiap tahapan kebijakan agar relevan dan mampu secara optimal mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Permasalahan ini harus mampu menggambarkan setiap detil kondisi Kota Sibolga sehingga setiap kebijakan yang dirumuskan dapat relevan dengan penyelesaian permasalahan pembangunan. Permasalahan pembangunan di Kota Sibolga dilakukan dengan cara mengidentifikasi kinerja seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diawali dengan

analisis data capaian pembangunan sampai dengan tahun 2023 dan permasalahan yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan RPJMD Kota Sibolga Tahun 2021-2026 serta arah kebijakan RPJPD Kota Sibolga Tahun 2005-2025. Selanjutnya dilakukan analisis kedalaman masalah dengan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) terkait. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berikut ini merupakan identifikasi permasalahan Kota Sibolga.

- a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
 1. Pendidikan , menghadapi permasalahan:
 - a. Masih rendahnya APK PAUD;
 - b. Masih rendahnya satuan pendidikan PAUD yang terakreditasi ;
 - c. Makin menurunnya APM SD dan Masih rendahnya APM SMP;
 - d. Rapor Mutu Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Jenjang SD dan SMP di Kota Sibolga masih rendah karena belum sesuai Standar Nasional ;
 - e. Rapor Mutu Standar Sarana dan Prasarana pada Jenjang SD dan SMP di Kota Sibolga masih rendah karena belum sesuai Standar Nasional;
 - f. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam bidangnya, yaitu di Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pembinaan Ketenagaan serta pada Bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - g. Belum Optimalnya Pengembangan pada Kurikulum
 2. Kesehatan , menghadapi permasalahan:

- a. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak meliputi kesehatan ibu, bayi dan balita.
 - b. Peningkatan upaya perbaikan gizi masyarakat meliputi prevalensi wasting pada balita, penurunan angka stunting pada balita, persentase makanan dan minuman yang memenuhi syarat.
 - c. Peningkatan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat meliputi persentase kepesertaan jaminan kesehatan.
 - d. Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, meliputi persentase penanganan penyakit tidak menular yaitu hipertensi dan diabetes mellitus.
 - e. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan meliputi kelurahan stop BABS, peningkatan penyakit berbasis lingkungan (Demam Berdarah Dengue (DBD), diare, Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), Kelurahan ber Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
 - f. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular yang disebabkan sebagian masyarakat tidak menyadari jika memiliki faktor resiko penyakit tidak menular sehingga tidak perlu melakukan pemeriksaan *screening* faktor resiko PTM dan masih kurangnya upaya pencegahan pengendalian dan pemberantasan melalui kegiatan promotif.
3. Rumah Sakit Umum , menghadapi permasalahan:
 - a. Prosedur tetap tentang mutu dan standar pelayanan belum dilaksanakan secara maksimal di unit pelayanan tertentu.
 - b. Belum terpenuhinya Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sarana dan Prasarana Kesehatan yang belum maksimal berdampak pada tingkat kepuasan masyarakat;
 4. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , menghadapi permasalahan:
 - a. Pemutahiran Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Sibolga, mengingat SSK sangat diperlukan untuk

mempercepat implementasi terkait dengan pencapaian target Universal Access, dan juga sebagai nilai strategis bagi kota Sibolga dalam membenahi kondisi sarana sanitasi kota.

- b. belum adanya Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) serta grand design Air Minum Kota Sibolga yang terbaru berdasarkan Permen PUPR 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, sehingga masih sulit untuk Merumuskan arahan rencana perbaikan modifikasi/penggantian/penambahan instalasi produksi, jaringan perpipaan, dan pengembangan untuk perencanaan strategis di bidang air minum yang terintegrasi dan berkesinambungan .
 - c. Dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang pemberian dan Pemuktahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau dan Peeraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2022 Tentang Batas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara dengan adanya regulasi ini maka PU akan merevisi RTRW Kota Sibolga 2017-2037.
5. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, menghadapi permasalahan:
- a. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kota Sibolga masih banyak;
 - b. Pemenuhan Prasarana Sarana Uilitytas (PSU) Perkotaan.
 - c. Penanganan/Pengurangan Kawasan Kumuh.
 - d. Penataan Drainase Kota Terintegrasi untuk pencegahan dan penanganan banjir.
 - e. Terbatasnya lahan untuk pembangunan prasarana dan sarana perumahan dan kawasan permukiman.

- f. Belum Optimalnya Ruang Terbuka Hijau dan pemanfaatannya
- 6. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, menghadapi permasalahan:
 Urusan ini ditangani oleh Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesbang . Adapun permasalahan adalah:
 - a. Belum Optimalnya kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
 - b. Pengaktifan kembali poskamling untuk menjaga keamanan lingkungan.
 - c. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan non kebakaran di daerah padat penduduk untuk mengurangi resiko kebakaran.
 - d. Masih perlu dibangun 2Pos Pemadam Kebakaran di Kecamatan Sibolga Utara dan Kecamatan Sibolga Selatan untuk mempercepat akses penanganan kejadian kebakaran.
 - e. Kurangnya Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja
 - f. Wilayah Manajemen bencana Kebakaran (WMK) disertai dengan kemampuan teknis petugas Damkar, Lahan untuk Tandon Air dan peningkatan sarana prasarana Pemadam Kebakaran sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran;
 - g. Masih terdapat masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan rawan bencana;
 - h. Mitigasi bencana belum optimal.
 - i. Bencana sering terjadi di daerah yang sama karena warga yang sering terkena dampak bencana masih menempati daerah yang rawan bencana sementara

daerah tersebut tidak layak dijadikan daerah permukiman (berada di lereng perbukitan).

7. Sosial, menghadapi permasalahan:

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bidang sosial ada beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial baik secara eksternal maupun internal. Permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Tingkat kemiskinan masih rentan akibat belum optimalnya pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sesuai dengan hasil pemutahiran data terbaru kesejahteraan social;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan SPM bidang sosial sesuai dengan PP Nomor 2 tahun 2018 dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 serta Permensos Nomor 9 Tahun 2018.
- c. Disabilitas terlantar, anak terlantar , lansia terlantar , gelandangan dan pengemis di luar panti belum tertangani karena keterbatasan anggaran;
- d. Belum optimalnya kesiapagaan penanganan bencana.

b. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga kerja, menghadapi permasalahan:

- a. belum optimalnya peningkatan produktivitas tenaga kerja
- b. Kurangnya lowongan kerja serta kurangnya kemampuan menciptakan kesempatan kerja ;
- c. Tidak adanya kewenangan pemerintah kota tentang wajib lapor perusahaan ;
- d. Belum adanya Balai Latihan Kerja (BLK) serta instruktur yang bersertifikat di Kota Sibolga ;
- e. Belum optimalnya penyampaian informasi tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada masyarakat Kota Sibolga.

- f. Standar Pengupahan tidak sesuai dengan UMK di Kota Sibolga.
 - g. Belum optimalnya promosi informasi pasar kerja
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, menghadapi permasalahan:
- a. Masih lemahnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Masih terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. Belum optimalnya perlindungan terhadap anak
 - d. Belum optimalnya pemenuhan hak anak
3. Pangan , menghadapi permasalahan:
- a. Ketergantungan terhadap pasokan bahan pangan dari luar daerah sangat berpotensi menimbulkan kerawanan pangan khususnya jika terjadi permasalahan atau kendala di dalam pemasokan komoditas pangan tersebut;
 - b. Harga yang fluktuatif khususnya terhadap bahan pangan tertentu yang mempengaruhi inflasi daerah antara lain cabe merah, bawang merah dan ikan;
 - c. Pola konsumsi masyarakat yang belum menerapkan pola makan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) yang ditandai oleh nilai Pola Pangan Harapan (PPH) yang masih di bawah nilai ideal;
 - d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA);
 - e. Masih adanya potensi rawan pangan kronis yang disebabkan oleh ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan. Hal ini ditandai dengan masih adanya kasus gizi buruk dan kurang gizi balita di Kota Sibolga;

- f. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana untuk menjamin cadangan pangan berupa gudang penyimpanan (Coldstorage).
4. Lingkungan hidup , menghadapi permasalahan:
 - a. Nilai indeks pencemaran air sungai di 3 sungai yang ada di Kota Sibolga menunjukkan tercemar ringan;
 - b. Lahan Tempat Pembuangan Akhir Kota Sibolga akan melebihi kapasitas beberapa tahun kedepan sehingga diperlukan kerjasama penanganan sampah skala regional dengan daerah Hinterland;
 - c. Belum Optimalnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
 - d. Belum optimalnya pengolahan B3 (Bahan, Berbahaya, Beracun) dan limbah B3;
 6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, menghadapi permasalahan:
 - a. Peningkatan Kebutuhan Penerbitan Administrasi Kependudukan akibat Pertambahan jumlah penduduk yang disebabkan perluasan wilayah Kota Sibolga berdasarkan Permendagri No. 135 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara.
 - b. Masyarakat Kota Sibolga, khususnya anak usia 0-17 tahun telah memudahkan untuk memiliki akte kelahiran dengan adanya penerbitan Kartu Identitas Anak yang telah dilaksanakan.
 5. Pemberdayaan masyarakat dan desa/Kelurahan, menghadapi permasalahan:
 - a. masih lemahnya peran serta masyarakat dalam perlindungan perempuan, baik dari segi kekerasan dalam rumah tangga maupun dari ekonominya, serta keterlibatan perempuan dalam bidang politik masih rendah.

- b. Belum semua OPD dan Non Pemerintah menganggap Pengarusutamaan Gender sebagai Strategis Prioritas dalam Pembangunan karena selama ini dianggap PUG merupakan Program Perempuan semata.
 - c. Tingginya Kekerasan terhadap Perempuan dan anak
6. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, menghadapi permasalahan:
- a. Pandangan masyarakat secara adat yang menyatakan banyak anak banyak rezeki hal ini mengakibatkan petugas keluarga berencana akan kesulitan untuk mengajak masyarakat untuk ber-KB.
 - b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Advokasi Keluarga Berencana Kurang Optimal disebabkan tidak adanya anggaran untuk melakukan kegiatan seperti: Sosialisasi, Orientasi, Pembinaan, Fasilitasi, Promosi, Evaluasi dan Pelatihan Teknis.
 - c. Tingkat Kesertaan ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) belum Optimal, hal ini ditandai dengan tingginya angka unmet need.
 - d. Penyediaan Alat Kontrasepsi yang belum memadai.
 - e. Partisipasi Pria dalam Ber-KB masih rendah.
7. Perhubungan , menghadapi permasalahan:
- Secara umum permasalahan terkait transportasi di Kota Sibolga adalah Belum optimalnya keselamatan, ketertiban dan kelancaran transportasi di Kota Sibolga masalah tersebut disebabkan:
- a. Rendahnya kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Jaringan jalan yang tersedia saat ini tidak sesuai dengan pola distribusi yang dipengaruhi faktor belum adanya terminal khusus angkutan barang yang menjadi sentral distribusi barang ataupun kawasan pergudangan sehingga angkutan ekspedisi melakukan kegiatan

- bongkar muat barang di pusat perkotaan yang menyebabkan kesemrawutan dan kemacetan lalu lintas.
- b. Pertumbuhan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan jaringan jalan yang tersedia. Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi dengan penambahan jaringan jalan/ruas jalan di Kota Sibolga. Adapun faktor yang mempengaruhinya adalah kemudahan konsumen dalam memiliki kendaraan (fasilitas kredit).
 - c. Kekurangan ketersediaan alokasi dana yang menyebabkan terkendalanya rencana pembangunan pergudangan, gedung pengujian dan terminal truk beserta fasilitasnya yang direncanakan sebagai tempat pangkalan mobil truk untuk bongkar muat barang dalam mengantisipasi timbulnya kecelakaan serta menghindari kerusakan jalan dan kemacetan yang terjadi di inti kota.
 - d. Masih adanya beberapa pemilik usaha yang memakai ruas jalan yang bukan untuk peruntukannya misalnya ruas jalan tersebut dijadikan lahan parkir.
 - e. Kemacetan lalu lintas di pagi hari pada saat hari kerja adapun faktor yang mendorong adalah kecenderungan pergerakan kendaraan dari daerah perbatasan Kota Sibolga menuju daerah perkantoran, sekolah dan usaha lainnya.
 - f. Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki kompetensi di bidang perhubungan atau masih kurangnya Sumber Daya Manusia di Dinas Perhubungan Kota Sibolga yang memiliki latar belakang pengetahuan tentang transportasi.
8. Komunikasi dan informatika, menghadapi permasalahan:
- a. Peningkatan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat
 - b. Rendahnya Proporsi Rumah Tangga yang memiliki komputer pribadi.

9. Koperasi, usaha kecil, dan menengah , menghadapi permasalahan:
 - a. Kurangnya kemampuan pelaku UMKM dalam melakukan Diversifikasi produk (memperbanyak jenis produk) dan kurangnya kemampuan pelaku UMKM dalam menjaga Higiene dan sanitasi produk;
 - b. Pelaku UMKM belum menyadari pentingnya legalitas produknya seperti: Pengurusan PIRT, HALAL, HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), NIB (Nomor Induk Berusaha);
 - c. Kurangnya kemampuan pelaku UMKM untuk memperluas akses pemasaran produk UMKM sehingga diperlukan pelaksanaan kegiatan branding produk dan gitalisasi produk;
10. Penanaman modal , menghadapi permasalahan:
 - a. Banyaknya Investor Atau Pengusaha Yang Membuka Usahanya Tidak Sesuai Dengan RTRW Daerah;
 - b. Kurangnya Aktivitas Hubungan Perdagangan/Investasi Produk Unggulan Antar Daerah, Regional, Nasional, Dan Internasional Melalui Pelabuhan Sibolga;
 - c. Kecilnya Wilayah Sibolga sehingga Wilayah (Tanah) Untuk Tempat Berinvestasi Terbatas;
 - d. Belum Adanya Produk Unggulan Yang Benar -Benar Menarik Untuk Dijual Keluar Daerah;
 - e. Kurangnya Kesadaran Para Investor Untuk Melaporkan Kegiatan Usahanya Melalui LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal);
 - f. Kurangnya Pengetahuan Tentang Potensi Investasi Yang Ada di Kota Sibolga.
11. Kepemudaan dan olah raga, menghadapi permasalahan:
 - a. Belum ditindak lanjutnya Peraturan Daerah tentang Kepemudaan yang merupakan syarat ditetapkan nya Sibolga menjadi Kota Layak Pemuda

- b. Belum memadainya fasilitas olahraga, khususnya olahraga yang telah mengukir prestasi di tingkat provinsi maupun nasional seperti Karate, Silat, Atletik dan lain-lain
12. Statistik, menghadapi permasalahan:
- Data sektoral yang harus dihimpun dan diolah hingga dapat disajikan dengan baik sehingga dapat menjadi sumber data bagi pihak yang membutuhkan.
13. Persandian , menghadapi permasalahan:
- a. Belum ada perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah;
 - b. Belum ada Sumber Daya Manusia yang mampu menerjemahkan setiap kawat sandi;
 - c. Pendidikan bagi aparatur persandian (Sandi man)
14. Kebudayaan , menghadapi permasalahan:
- Belum optimalnya pemajuan kebudayaan dan karakter budaya.
15. Perpustakaan , menghadapi permasalahan:
- Pada Tahun 2020, Dinas Perpustakaan sudah mendapatkan tambahan Gedung layanan namun sarana dan prasarana pendukung masih kurang seperti sarana komputer untuk internet gratis, sarana pendukung untuk mengakses bahan buku digital, rak buku dan koleksi bahan bacaan serta meubeleur untuk pemustaka.
16. Kearsipan, menghadapi permasalahan:
- Masih terbatasnya SDM yang ahli dan terampil (bersertifikasi Pengelolaan dan Pengawasan kearsipan) untuk urusan Kearsipan sehingga penyelenggaraan

urusan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

c. **Urusan Pemerintahan Pilihan**

Dalam penyelenggaraan urusan pilihan Pemerintah Daerah di Kota Sibolga, berbagai permasalahan yang dihadapi adalah:

1. **Kelautan dan Perikanan** , menghadapi permasalahan:

- a. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap;
- b. Setelah diberlakukannya peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine net) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, Kota Sibolga konsisten mematuhi peraturan tersebut yang berdampak pada hasil tangkapan nelayan yang semakin menurun, harga ikan melambung tinggi dan memicu inflasi di Kota Sibolga. Kompensasi dari larangan tersebut adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia berjanji akan memberi bantuan kepada eks ABK yang bekerja di kapal pukat tarik berupa bantuan kapal dan alat tangkap yang ramah lingkungan kepada 87 kelompok dan koperasi, namun hingga saat ini bantuan tersebut belum terealisasi;
- c. Sulitnya mendapatkan data dari tangkahan – tangkahan di Kota Sibolga;
- d. Berkurangnya kewenangan kabupaten/kota sejak diberlakukannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan yang mengakibatkan disefisiensi peran serta pemerintah daerah dalam melayani masyarakat;

- e. Kurangnya sarana dan prasarana juga kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan TPI/PPI milik pemerintah;
- f. Kurangnya kemandirian pelaku usaha perikanan dalam pengembangan usaha;
- g. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan TP/PPI milik pemerintah;
- h. Komoditas pangan masih sering menjadi penyumbang inflasi di Kota Sibolga;
- i. Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap suplai komoditas pangan dari luar daerah/hinterland;
- j. Masih adanya ditemukan kasus stunting dan kurang gizi di Kota Sibolga;
- k. Masih rendahnya diversifikasi pangan masyarakat Kota Sibolga;
- l. Tingginya tingkat inflasi komoditas strategis nasional di Kota Sibolga berupa cabai, bawang putih dan bawang merah disebabkan antara lain : optimalisasi lahan dan ruang oleh masyarakat yang belum maksimal di Kota Sibolga, penyediaan bibit berkualitas untuk diserahkan kepada masyarakat masih terkendala, minimnya tenaga penyuluh pertanian;
- m. Belum optimalnya layanan rumah potong hewan ruminansia (RPH – R) Aek Parombunan disebabkan oleh akses jalan yang rusak, lampu penerangan jalan yang tidak tersedia, kurangnya ketersediaan air dan tidak adanya keahlian ASN dalam hal pemeriksaan kebuntingan di RPH;
- n. Belum optimalnya pelayanan kesehatan hewan di masyarakat karena belum adanya kendaraan roda 4 sebagai kendaraan puskesmas keliling dan minimnya tenaga dokter hewan di Kota Sibolga (1 orang)

- o. Mutu ikan olahan yang belum baik, hal ini disebabkan oleh proses pengolahan belum menerapkan cara pengolahan yang baik dan benar serta sarana dan prasarana dalam pengolahan ikan tidak sesuai dengan standar higienis dan kesehatan;
- p. Pelaku usaha pengolahan ikan di Kota Sibolga belum bankable;
- q. Diversifikasi produk olahan ikan yang masih sangat terbatas disebabkan terbatasnya modal dalam pengembangan usaha, tingginya harga bahan baku dalam melakukan kegiatan pengolahan, kurangnya antusias masyarakat dalam mengembangkan usaha secara mandiri.

2. Pariwisata, menghadapi permasalahan:

- a. Belum Optimalnya Budaya Sadar Wisata Masyarakat dalam hal menjaga fasilitas wisata yang sudah dibangun seperti Perusakan lampu hias Pantai Ujung Sibolga dan Lokasi Tanggo Seratus, Kebersihan pantai dan objek wisata lain nya.
- b. Masih Belum terjalinnya konektivitas dengan stakeholder pembangunan KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) Danau Toba sebagai daerah hinterland Kota Sibolga yang memperoleh multiplier effect dari pembangunan tersebut
- c. Belum dimaksimalkannya peran Dinas Parpora dalam memberikan rekomendasi izin terkait urusan kepariwisataan (Hotel, Restoran, Cafe, Konser, dan lain -lain).

3. Pertanian , menghadapi permasalahan:

- a. Belum optimalnya produksi pertanian baik pada tanaman pangan utama, hortikultura, dan perkebunan dan Peternakan .

- b. Masih kurangnya populasi beberapa komoditas peternakan (kambing, ayam buras), dan produksi daging.
 - c. Berkurangnya lahan pertanian, perkebunan dan peternakan menjadi tantangan bagi Kota Sibolga untuk meningkatkan produksinya. Peningkatan produktifitas pertanian, perkebunan dan peternakan melalui peningkatan kualitas benihakan menjadi prioritas, selain itu peningkatan dalam pemanfaatan teknologi dan penciptaan inovasi bidang pertanian dan peternakan khususnya pertanian perkotaan.
4. Kehutanan , menghadapi permasalahan:
Sesuai dengan kewenangan, Kota Sibolga tidak memiliki Taman Hutan Rakyat.
5. Energi dan Sumber Daya Mineral , menghadapi permasalahan:
Sesuai dengan kewenangan, Kota Sibolga tidak memiliki Energi Panas Bumi.
6. Perdagangan , menghadapi permasalahan:
- a. Penataan berkelanjutan dalam pelayanan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), karena di Kota Sibolga banyak pedagang kaki lima/asongan musiman.
 - b. Masih kurangnya pasar yang memenuhi syarat kesehatan, kebersihan dan kenyamanan sehingga perlu revitalisasi pasar rakyat
 - c. Terbatasnya bantuan modal dan sarana usaha bagi pedagang.
 - d. Kurangnya fasilitas umum untuk dijadikan ikon di Kota Sibolga guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Sibolga.

7. Perindustrian, menghadapi permasalahan:

- a. Masih rendahnya pertumbuhan industri di Kota Sibolga.
- b. kontribusi sektor industri terhadap PDRB masih labil (capaian turun naik)
- c. Masih rendahnya pembinaan bagi kelompok pengrajin sehingga perlu adanya pembinaan dan pengembangan berkelanjutan bagi kelompok pengrajin di Kota Sibolga

8. Transmigrasi , menghadapi permasalahan:

Sesuai dengan kewenangan, Kota Sibolga tidak memiliki Lahan Transmigrasi.

d. Urusan Penunjang Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah , menghadapi permasalahan:

Adapun yang menjadi permasalahan pada Sekretariat Daerah Kota Sibolga adalah sebagai berikut:

- a. Server yang dipakai saat ini sudah rusak dan server masih menumpang pada Dinas Kominfo Kota Sibolga yang mana pada Tahun 2021 Sekretariat Kota Sibolga bagian Administrasi Pembangunan telah merencanakan untuk pengadaan server HPE Proliant DL380g 10 .
- b. Belum adanya personil/SDM bagian teknis dari Sekretariat Daerah Kota Sibolga. Adapun Personil LPSE saat ini masih dibantu dari Dinas Kominfo Kota Sibolga.
- c. SDM Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa kurang memahami/kurang update mengenai peraturan -peraturan tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang mana bisa dilihat pada website LKPP dan website PUPR (Konstruksi).
- d. Belum Terlaksananya Pengisian LKE (Lembaran

Kinerja Elektronik) dikarenakan tahun 2016 - 2019 vakumnya bagian organisasi sehingga tidak menjadi prioritas dan saat ini sulitnya berkoordinasi ke Provinsi terkendala Covid 19.

2. Sekretariat DPRD, menghadapi permasalahan:
 - a. Peningkatan Fasilitas Pelayanan terhadap fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga.
3. Perencanaan , menghadapi permasalahan:
 - a. Pembangunan Kota Sibolga memerlukan dukungan penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek agar dapat meningkatkan daya saing dan kemandirian menghadapi persaingan global.
 - b. Belum seluruh aspirasi masyarakat terakomodir dalam perencanaan dan penganggaran.
4. Keuangan, menghadapi permasalahan:

Pendapatan asli daerah yang belum optimal untuk menunjang kemandirian fiskal daerah, disebabkan oleh: kurang akuratnya data objek pajak dan retribusi, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan objek pajak dan retribusi, dan penerapan sanksi terhadap wajib pajak yang belum optimal.
5. Kepegawaian (serta pendidikan dan pelatihan), menghadapi permasalahan:
 - a. Adanya kesenjangan kompetensi antara yang dibutuhkan dengan yang tersedia;
 - b. Belum terpusatnya pelaksanaan pengembangan kompetensi;
 - c. Masih rendahnya kemampuan Pemerintah Kota Sibolga dalam memenuhi kebutuhan diklat pegawai ;

- d. Masih ditemukan PNS yang melakukan pelanggaran disiplin ;
 - e. Masih belum optimalnya distribusi penempatan pegawai.
6. Penelitian dan Pengembangan , menghadapi
Belum permasalahan:
- a. optimalnya penelitian dan kajian;
 - b. Fungsi penelitian masih mengerjakan fungsi perencanaan daerah sehingga ke depannya perlu dikaji peran Penelitian dan Pengembangan baik secara Tugas dan Fungsi, Organisasi atau kelembagaan yang dapat berdiri sendiri, tidak dirumpun dengan Urusan Perencanaan atau digabung dengan Urusan Perencanaan dengan Tugas dan Fungsi yang jelas dan Nomenklatur OPD yang jelas ;
 - c. Inovasi daerah masih kurang dalam mendukung daya saing daerah sesuai Visi RPJ MN 2020 -2021 dan RPJPD Kota Sibolga Tahun 2005 -2025.
7. Pengawasan , menghadapi permasalahan:
- a.** Belum optimalnya kapasitas APIP.
 - b.** Perencanaan Program Pengawasan Tahunan (PKPT) yang belum berdasarkan prioritas;.
 - c.** Belum semua temuan BPK ditindaklanjuti sampai tuntas.
8. Kecamatan , menghadapi permasalahan:
- 8.1 Kecamatan Sibolga Utara
- a. Pelaksanaan PATEN dalam pemberian layanan kepada masyarakat dilaksanakan oleh Tenaga Harian Lepas (THL) tanpa adanya pendampingan dari Aparatur Sipil Negara (ASN), hal ini berdampak kepada tidak adanya kontrol dan dan pengawasan melekat sehingga sulit mengukur

kinerjanya. Para THL juga tidak mendapat pelatihan khusus maupun bimbingan dalam pelaksanaan tugasnya sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat hanya mengandalkan pengetahuan dan etika pribadi yang melekat pada masing-masing petugas pelayanan;

- b. Pemberian pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan instansi lain tidak memiliki kekuatan hukum dan standar operasional yang baku sehingga berdampak kepada ketidakpastian dalam penetapan persyaratan yang diberikan kepada masyarakat dalam mengurus administrasi yang dibutuhkan. Salah satu ketidakpastian tersebut bisa dilihat pada pemberian surat rekomendasi ijin usaha mikro dan kecil dimana tidak ada standar baku yang memiliki kekuatan hukum tentang persyaratan- persyaratan yang dibutuhkan se hingga PATEN hanya memberikan persyaratan -persyaratan berdasarkan kebiasaan. Masyarakat menjadi pihak yang dirugikan karena sering kembali ke kantor kecamatan untuk mendapatkan persyaratan lain yang dibutuhkan.

8.2 Kecamatan Sibolga Kota, menghadapi permasalahan:

- a. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia/Aparatur (PNS) di Kecamatan Sibolga Kota, dimana pada saat ini yang dihunjak sebagai petugas PATEN hanya THL yang berjumlah 6 (enam) orang. Kendala yang dihadapi saat ini tidak adanya PNS

yang bisa ditugaskan sebagai Pendamping Petugas PATEN untuk mengkoordinir pelayanan kepada masyarakat ketika salah satu dari THL Petugas PATEN sedang berhalangan sehingga dapat memperlambat pengurusan pelayanan yang ada di Loker PATEN.

- b. Masih kurangnya kesadaran pekerja pemasang tenda di Sibolga Square, dimana tenda seharusnya dipasang Pukul 17.00 Wib (jam 5 sore) namun pukul 14.00 Wib tenda telah dipasang dan beberapa gerobak jualan sudah diletakkan di badan jalan sebelum waktu yang telah disepakati bersama sehingga mengganggu aktivitas pedagang permanen (Toko) yang ada di Jalan Ahmad Yani Sibolga (sekitar Sibolga Square).

8.3 Kecamatan Sibolga Sambas , menghadapi permasalahan:

- a. Kurangnya Jumlah SDM Pegawai Kecamatan Sibolga Sambas pada saat ini dimana 6 orang dari THL ditunjuk sebagai Petugas Paten. Kendala saat ini tidak adanya ASN yang bisa ditugaskan sebagai Pendamping Petugas Paten untuk mengkoordinir pelayanan kepada masyarakat ketika salah satu dari Petugas Paten sedang berhalangan sehingga dapat memperlambat tugas-tugas yang di Pelayanan Paten;
- b. Belum adanya Standar Persyaratan terkait persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan rekomendasi izinyang dilimpahkan kewenangannya kepada

Kecamatan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebahagian wewenang walikota kepada camat untuk menangani sebahagian urusan otda sehingga tidak adanya kekuatan hukumnya kepada usaha mikro kecil dan menengah apa bila tidak mengurus surat rekomendasi izin Usaha;

- c. Belum adanya gedung aula pertemuan Kelurahan Pancuran Kerambil, sehingga membuat kendala terhambatnya pelayanan yang dilakukan oleh Kelurahan Pancuran Kerambil kepada masyarakat, dimana saat ada kegiatan yang dilakukan oleh Kelurahan dan kecamatan sering terjadi jadwal bentrok. Jadi terpaksa kegiatan yang dilakukan kelurahan pancuran kerambil di dalam Ruangan Kantor;
- d. Tidak adanya lahan parkir yang memadai untuk bisa dijadikan sebagai lahan parker karena luas tanah sebahagian tempat berdirinya Gedung Kantor Kelurahan Pancuran Kerambil, sehingga masyarakat dan para pegawai yang datang ke Kantor Kecamatan dan kelurahan Pancuran Kerambil terpaksa mempergunakan badan jalan/trotoar jalan Utama yang intens dan padat arus lalu lintasnya.

8.4 Kecamatan Sibolga Selatan , menghadapi permasalahan:

- a. Kurangnya Tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Sibolga Selatan, yang mengakibatkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) hanya

ditangani satu orang ASN yaitu Kasi Pelayanan dibantu 6 orang dari THL yang ditunjuk sebagai Petugas Paten. Hal ini disebabkan tidak adanya ASN yang bisa ditugaskan sebagai Pendamping Petugas Paten untuk mengkoordinir, sehingga dapat memperlambat tugas - tugas Pelayanan kepada masyarakat;

- b. Pengelolaan hasil validasi data penduduk yang dilaksanakan di seluruh lingkungan dan kelurahan se - Kecamatan Sibolga Selatan, khususnya yang berada di setiap kelurahan belum tertata dengan baik akibat terbatasnya fasilitas (lemari data, Map, File Box) yang tersedia.

9. Kesbangpol, menghadapi permasalahan:

Unit organisasi kemasyarakatan harus mengantongi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai bentuk pengakuan keberadaan ormas tersebut. Sehubungan dengan telah diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas diterbitkan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebuah organisasi masyarakat tidak lagi dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, namun pengajuan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) tetap dari Kesbangpol, ini yang menjadi permasalahan di Kantor Kesbangpol disamping keterbatasan anggaran.

Setelah menelaah kajian data dan informasi serta hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang

urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah, diperoleh gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Kota Sibolga adalah “Belum optimalnya kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Kota Sibolga”. Beberapa permasalahan pokok pembangunan daerah Kota Sibolga sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas SDM yang merata dan berdaya saing;
2. Belum optimalnya daya saing ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan;
3. Belum optimalnya pengentasan kemiskinan dan penurunan ketimpangan pendapatan;
4. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
5. Belum optimalnya peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan daerah;
6. Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

Rangkaian pokok permasalahan tersebut nantinya akan menjadi sebuah kerangka dasar dalam penentuan perencanaan kebijakan kedepan dengan disempurnakan oleh evaluasi pembangunan periode-periode sebelumnya beserta kajian-kajian pembangunan nasional maupun regional. Berikut penjabaran permasalahan pembangunan Kota Sibolga tahun 2025 2029.

1. Belum optimalnya kualitas SDM yang merata dan berdaya saing

Sumber daya manusia merupakan aset pokok pembangunan. Sebagai salah satu penentu keberhasilan pembangunan daerah, sumber daya manusia harus memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi di bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan setiap capaian kinerja pembangunan daerah. Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan,

baik dari sektor ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat, hingga infrastruktur dasar kehidupan masyarakat. Sumber daya manusia merupakan inti dari pelaksanaan pembangunan daerah dimana manusia sebagai subyek pembangunan harus memiliki kualifikasi pada bidang tertentu untuk meningkatkan segala bentuk pencapaian pembangunan pada berbagai aspek kehidupan. Semakin meningkatnya teknologi informasi menyebabkan persaingan akan kualitas, dan kompetensi sangat di butuhkan bagi SDM Indonesia. Terkait dengan hal itu, daya saing sumber daya manusia memiliki hubungan dengan bagaimana kualitas masyarakat Kota Sibolga berperan di berbagai sektor penting dalam perekonomian daerah. Berdasarkan dari data BPS Kota Sibolga, capaian Indeks Pembangunan Manusia di Kota Sibolga pada tahun 2023 mencapai 78,61 yang masuk dalam kategori “tinggi”. Capaian IPM jika dilihat pada rentang waktu 2019-2023 menunjukkan tren yang meningkat. Akan tetapi untuk mengetahui posisi capaian IPM Kota Sibolga, maka perlu adanya perbandingan IPM antar kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sibolga masih berada di bawah Kota Medan yang mencapai 77,0,7; Kota Pematang Siantar 81,17; Kota Tebing Tinggi dengan IPM mencapai 78,68 dan Kota Binjai yang mencapai 78,67. Memahami situasi ini, maka perhatian terhadap peningkatan kualitas pendidikan menjadi suatu keharusan bagi Pemerintah Daerah Kota Sibolga. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia, memungkinkan masyarakat dapat bersaing efektif dengan kota kota sekitar. Menyadari adanya persaingan dalam dunia kerja yang dapat membuka peluang bagi SDM dari luar daerah untuk masuk ke Kota Sibolga, perlu adanya peningkatan kualitas daya saing SDM Kota Sibolga melalui langkah-langkah perbaikan dalam sektor pendidikan, sektor kesehatan dan pendapatan. Rendahnya kualitas dan daya saing SDM Kota Sibolga merupakan imbas dari permasalahan yang terus mengiringi sepanjang pelaksanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan yang memberikan kendala dalam pembangunan seperti belum optimalnya layanan

pendidikan; belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat; angka pengangguran yang masih tinggi dan belum optimalnya peran serta perempuan dan pemuda dalam pelaksanaan pembangunan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin baik kualitas sumber daya manusianya dan akan semakin majulah daerah tersebut. Pendidikan merupakan sarana untuk membentuk manusia-manusia yang terampil dan produktif, sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam institusi terkecil seperti rumah tangga, pendidikan seyogyanya telah menjadi kebutuhan utama. Kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi hal tersebut, karena bagaimanapun juga SDM yang bermutu merupakan syarat utama bagi terwujudnya kemajuan daerah.

Pendidikan merupakan kunci utama untuk meningkatkan kualitas SDM agar tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pendidikan masyarakat di Kota Sibolga memiliki capaian rata-rata lama sekolah hingga selama 10,45 tahun pada tahun 2024. Angka ini mengindikasikan masyarakat yang berumur 25 tahun ke atas memiliki rata-rata sekolah hingga 10,45 tahun atau hampir setara dengan menyelesaikan pendidikan menengah atas (SMA). Capaian rata-rata lama sekolah penduduk Kota Sibolga masih berada di bawah beberapa wilayah perkotaan di Provinsi Sumatera Utara seperti Kota Pematang Siantar (11,82 tahun), Kota Medan (11,79 tahun), dan Kota Binjai (11,20 tahun). Sementara itu Harapan Lama Sekolah di Kota Sibolga memiliki capaian sebesar 13,43 tahun artinya seorang anak diharapkan bisa merasakan lamanya sekolah hampir 14 tahun atau mereka memiliki peluang untuk menyelesaikan pendidikan hingga tingkat yang lebih tinggi, seperti Diploma III atau bahkan lebih, tergantung pada sistem pendidikan yang ada dan kebijakan pemerintah. Jika dibandingkan dengan beberapa Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara kondisi harapan lama sekolah Kota sibolga masih berada di bawah Medan (14,79 tahun).

Selain pendidikan, kesehatan merupakan salah satu faktor yang utama dalam kehidupan manusia, dengan tubuh yang sehat

maka manusia dapat melakukan segala aktivitasnya dengan baik. Pelayanan kesehatan merupakan bagian dari tugas pemerintah untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat yang sakit. Melihat kondisi saat ini pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat masih belum optimal. Hal ini disebabkan pelayanan yang diberikan belum sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Salah satu indikator yang mampu mengukur kondisi kesehatan masyarakat secara keseluruhan adalah Angka Harapan Hidup. Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Sebagai indikator yang dapat melihat derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan, UHH menjadi salah satu impact yang harus diperhatikan dalam upaya perumusan kebijakan bidang kesehatan daerah. Umur Harapan Hidup Kota Sibolga pada tahun 2024 tercatat sebesar 74,19 tahun pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata bayi yang lahir pada tahun 2024 dapat bertahan hidup hingga usia 74 tahun. Dengan capaian tersebut, bila dibandingkan dengan keadaan beberapa kota di Provinsi Sumatera Utara UHH Kota Sibolga berada di posisi bawah. Dimana UHH Medan (75,09 tahun), Kota Pematang Siantar (75,03 tahun), Kota Binjai (74,45 tahun), Kota Tebing Tinggi (74,29 tahun), Kota Gunung Sitoli (74,23 tahun), Kota Sibolga (74,19 tahun), dan Kota Tanjung Balai (74,18 tahun). Indeks Ketimpangan Gender adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga aspek utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan partisipasi ekonomi. Indeks Ketimpangan Gender memberikan gambaran tentang sejauh mana kesenjangan gender terjadi di suatu negara atau wilayah. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin besar ketimpangan gender yang terjadi. Kesetaraan dalam pembangunan Sumber Daya Manusia dan masyarakat di Kota Sibolga juga masih membutuhkan optimalisasi kesetaraan pembangunan gender,

dimana kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan masih relatif tinggi. Indeks Ketimpangan Gender tahun 2023 sebesar 0,259. Berdasarkan capaian pada tahun 2023 IKG Kota Sibolga masih dibawah beberapa Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara seperti Kota Sibolga (0,259), Tanjung Balai (0,244), Tebing Tinggi (0,256), Medan (0,232) dan Binjai (0,142).

2. Belum optimalnya daya saing ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi adalah elemen krusial dalam mencapai kemandirian daerah. Kemandirian merujuk pada kemampuan Kota Sibolga melalui entitas ekonomi bergerak mandiri secara finansial dan tidak bergantung pada sumber daya luar dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Dalam rangka melihat perkembangan perekonomian daerah dapat dilihat dari capaian kinerja PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) berdasarkan lapangan usaha ataupun pengeluaran dan Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Sibolga pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kota Sibolga mencapai 3,92 persen. Dengan melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Sibolga dari tahun 2019 hingga 2024 menunjukkan trend penurunan. Hal ini disebabkan adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang mengakibatkan kontraksi hingga mencapai -0,73 persen. Kemudian untuk melihat posisi capaian LPE Kota Sibolga maka perlu adanya perbandingan LPE Kota Sibolga dengan kota sekitar di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kendatipun demikian untuk keadaan tahun 2024, capaian LPE Kota Sibolga sebesar 3,92 persen masih di dibawah kota-kota yang ada di Sumatera Utara selain Kota Medan dengan LPE sebesar 5,07 persen. Perkembangan LPE Kota Sibolga yang cenderung semakin menurun ini disebabkan oleh pengelolaan sektor-sektor unggulan daerah yang belum optimal.

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan salah satu dampak dari pembangunan dan perputaran perekonomian

masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan ekonomi daerah adalah produktivitas masyarakat. Produktivitas masyarakat dapat diartikan aktivitas masyarakat yang mampu menghasilkan pendapatan. Dengan ini diharapkan pengelolaan sektor ekonomi Kota Sibolga mampu meningkatkan pembangunan ekonomi yang berimplikasi pada perekonomian masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian diharapkan peningkatan ekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Sibolga. Dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, unggul dan berkarakter terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, seperti evaluasi terhadap sektor pendidikan termasuk untuk pelatihan dan pengembangan keterampilan, evaluasi dalam bidang kesehatan juga perlu diperhatikan agar dapat menghasilkan kualitas generasi penerus yang berkompeten. Selain itu, pentingnya kerja sama antara pemerintah, institusi pendidikan dan industri terlihat sebagai kunci keberhasilan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai dengan tuntutan pasar tenaga kerja. Pemahaman mendalam terhadap pemanfaatan teknologi dalam pengembangan sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa masyarakat Sibolga memiliki keterampilan yang relevan dalam era teknologi saat ini. Kondisi ini jika tidak optimalkan berisiko menghadapi peningkatan pengangguran dan rendahnya kompetensi SDM dalam menghadapi tantangan masa depan. Tanpa pendidikan, keterampilan dan kesehatan yang memadai, tenaga kerja akan sulit bersaing, menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Daya saing ekonomi juga berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), pada tahun 2024 TPT Kota Sibolga tercatat sebesar 6,52 persen dan sudah lebih baik jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2023 yang mencapai 6,79 persen. Memahami hal ini, angka pengangguran Kota Sibolga mengalami penurunan walaupun hanya sedikit, kondisi ini mengindikasikan masih belum optimalnya penanganan dalam penurunan angka pengangguran di Kota Sibolga. Hal ini disebabkan oleh dampak jangka panjang dari pandemi COVID-19 yang mana

ditahun 2020 terjadi pemutusan hubungan kerja secara massal dan penurunan faktor produksi yang menyebabkan tingkat pengangguran menjadi meningkat. Peningkatan tingkat pengangguran terbuka juga disebabkan oleh ketidaksesuaian ketersediaan pekerjaan dengan tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Kemudian perubahan dalam struktur ekonomi lokal, seperti penutupan industri tertentu atau pergeseran ke sektor lain dapat mempengaruhi tingkat pengangguran. Dalam rangka melihat posisi capaian TPT Kota Sibolga dengan kota sekitar, maka perlu adanya perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka antar kota Se-Provinsi Sumatera Utara. TPT Kota Sibolga dengan capaian TPT kota lain di Provinsi Sumatera Utara, Selain itu angka pengangguran Kota Sibolga juga lebih tinggi daripada angka pengangguran kota-kota lainnya (Kota Gunungsitoli, Kota Tanjungbalai, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, dan Kota Sidempuan). Menelaah permasalahan terkait angka pengangguran dari beberapa pernyataan di atas, maka diharapkan Pemerintah Kota Sibolga kedepannya mampu mengatasi pengangguran lebih optimal. Dengan melibatkan serangkaian tindakan dan kebijakan yang terkoordinasi untuk meningkatkan peluang pekerjaan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Salah satu indikator yang mampu menggambarkan tingkat pendapatan masyarakat adalah PDRB Perkapita. Berdasarkan data BPS Kota Sibolga pada tahun 2024, PDRB Perkapita Kota Sibolga mencapai sebesar Rp78,77 juta.

3. Belum optimalnya pengentasan kemiskinan dan penurunan ketimpangan

Dalam dimensi ekonomi, kesenjangan sosial dapat terlihat dalam distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak merata di antara individu dan kelompok masyarakat. Kesenjangan pendidikan mencerminkan perbedaan dalam akses dan kualitas pendidikan antara berbagai kelompok, yang dapat menghasilkan ketidaksetaraan peluang dan hasil akhir. Kesenjangan sosial dapat memicu ketidakadilan, ketegangan sosial dan konflik dalam suatu masyarakat. Kualitas hidup yang layak bagi masyarakat salah

satunya ditunjukkan dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam memenuhi kebutuhannya, masyarakat dituntut harus mempunyai pendapatan yang cukup. Tinggi rendahnya pendapatan masyarakat juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Kota Sibolga. Kemiskinan merupakan kondisi masyarakat atas ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga menyebabkan kualitas hidup masyarakat buruk. Kemiskinan disuatu daerah dapat diukur dengan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan mengacu pada ukuran atau indikator yang digunakan untuk menentukan sejauh mana suatu populasi atau individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar atau hidup di bawah garis kemiskinan. Pengukuran tingkat kemiskinan memberikan gambaran tentang proporsi penduduk yang berada di bawah ambang batas tertentu yang ditetapkan sebagai tanda kemiskinan. Berdasarkan data kondisi kemiskinan Kota Sibolga pada tahun 2024 berada di angka 11,39 persen, angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 yang berada di angka 11,42 persen. Dalam melihat posisi capaian Kota Sibolga maka perlu adanya perbandingan tingkat kemiskinan Kota Sibolga dengan capaian tingkat kemiskinan kota se-Provinsi Sumatera Utara. Tingkat kemiskinan di Kota Sibolga masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Binjai yang tercatat sebesar 4,75 persen pada tahun 2024, mencerminkan perbedaan dalam kondisi sosial ekonomi. Dengan ini menunjukkan Pemerintah Kota Sibolga perlu meningkatkan produktivitas masyarakat melalui pemberdayaan sehingga berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat. Terkait dengan pendapatan masyarakat, salah satu indikator yang mampu menggambarkan tingkat pendapatan masyarakat yaitu pengeluaran per kapita. Dengan mengetahui kondisi pengeluaran perkapita masyarakat maka akan tergambarkan tingkat kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhannya. Berdasarkan data BPS Kota Sibolga pengeluaran perkapita yang disesuaikan ditahun 2024 mencapai sebesar Rp12.713 ribu. Untuk melihat posisi capaian Kota Sibolga maka

perlu adanya perbandingan di level antar kota wilayah Sumatera Utara. Pengeluaran perkapita yang disesuaikan Kota Sibolga masih berada di posisi terendah dari 8 (delapan) kota yang ada di Sumatera Utara. Pengeluaran Kota Sibolga masih lebih besar dibandingkan dengan Kota Gunung Sitoli yang tercatat sebesar Rp9.056 ribu. Hal ini disebabkan belum maksimalnya pemberian pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada masyarakat agar memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Ini dapat mencakup pelatihan vokasional, kewirausahaan, dan peningkatan keterampilan teknis, sehingga diharapkan dengan kemampuan tersebut mampu meningkatkan peluang kerja maupun usaha dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat. Kualitas hidup masyarakat yang baik dan layak merujuk pada kesetaraan terhadap pemenuhan hak, akses, dan peluang antara berbagai kelompok dalam suatu masyarakat. Hal ini berkaitan dengan gambaran kesenjangan sosial di Kota Sibolga. Kesenjangan sosial tampak dari berbagai aspek termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan dan partisipasi politik. Salah satu faktor yang berdampak pada pendapatan masyarakat adalah pemerataan pembangunan daerah. Dengan pemerataan pembangunan masyarakat akan mudah mengakses kebutuhan dan meningkatkan aktivitas serta mobilisasi untuk melakukan kegiatan yang produktif. Memahami hal tersebut, maka untuk melihat pemerataan pembangunan di Kota Sibolga dapat diukur dari nilai Gini Rasio (Indeks Gini). Nilai indeks gini rasio berada pada kisaran 0 sampai 1. Bila indeks gini sama dengan 0 (nol) menandakan adanya pemerataan yang sempurna. Bila indeks gini sama dengan 1 (satu) menunjukkan adanya ketidakmerataan sempurna dalam distribusi pendapatan. Dengan ketentuan kategori sebagai berikut $G < 0,35$ kategori ketimpangan Rendah, $0,35 \leq G \leq 0,5$ kategori ketimpangan Sedang, $G > 0,5$ kategori ketimpangan tinggi. Semakin tinggi nilai Gini Rasio suatu daerah, semakin besar kesenjangan pendapatan atau kekayaan di masyarakat tersebut.

Berdasarkan data BPS Kota Sibolga, Gini Rasio Kota Sibolga pada tahun 2024 sebesar **0,313** yang masuk pada kategori

“ketimpangan rendah”. Meskipun memiliki ketimpangan yang rendah namun masih perlu peningkatan pemerataan pembangunan, agar pembangunan tidak pada daerah atau kawasan tertentu saja. Menindaklanjuti hal ini perlu adanya perhatian Pemerintah Kota Sibolga untuk meningkatkan pemerataan pembangunan yang berdampak pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat Kota Sibolga yang baik dan layak.

4. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel

Tata Kelola Pemerintahan berkaitan erat dengan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Urusan ini diselenggarakan dalam cakupan yang cukup luas dan kompleks yang meliputi upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, pengelolaan keuangan dan organisasi pemerintah daerah, pembinaan dan pengembangan aparatur, peningkatan pelayanan kehidupan beragama, peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan penataan peraturan Perundang-Undangan. Tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih sebagai bentuk dari Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya dapat dielaborasi dalam perencanaan dan program yang nyata. Pemerintah sendiri nampaknya sulit menentukan bentuk dari keberhasilan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, sehingga sulit juga menentukan target-target kinerja. Komponen yang terdapat dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi perlu diterjemahkan menjadi bentuk konkrit yang dapat diimplementasikan dan dicapai. Pencapaian reformasi birokrasi di Sibolga juga masih belum optimal dimana capaian indeks reformasi birokrasi masih rendah dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 56,91 (CC).

Kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah merupakan modal dasar dalam menggerakkan roda pemerintahan daerah. Kapasitas aparatur yang kompeten dan profesional menjadi akselerator pencapaian tujuan pembangunan jika ditempatkan pada tugas dan fungsi yang sesuai, begitu pula akuntabilitas kinerja juga memiliki kepentingan yang sama dalam meningkatkan capaian

target pembangunan daerah. Poin penting pada permasalahan optimalisasi kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Sibolga adalah koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kualitas sumber daya manusia (ASN) pemerintah daerah. Salah satu faktor penyebab kinerja pemerintah daerah terhambat adalah koordinasi antar OPD di Kota Sibolga belum optimal disebabkan adanya ego sektoral. Sebagai contoh, belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral dikarenakan kinerja berfokus pada teknis. Padahal data statistik sektoral merupakan tools untuk menyusun perencanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan di setiap urusan pembangunan daerah, termasuk koordinasi antara perangkat daerah dalam sinkronisasi data pencapaian kinerja juga masih kurang. Basis data yang masih belum reliabel, sehingga berimplikasi pada kesulitan mengukur capaian pembangunan, merumuskan dokumen perencanaan pembangunan dan memproyeksikan target pembangunan berbasis baseline data yang akurat. Salah satu penyebabnya adalah belum memiliki sistem database yang handal sehingga segala informasi dan data belum dapat dikolektifkan dalam satu sistem. Permasalahan yang lebih khusus adalah terkait pengelolaan SAKIP. SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran dan pengklasifikasian kinerja instansi pemerintah. Masih kurangnya pemahaman tanggung jawab termasuk evaluasi kinerja dan capaian kinerja untuk mencapai sistem manajemen kinerja menjadikan lemahnya komitmen pimpinan dan kapasitas bagi kepala Perangkat Daerah dalam perbaikan manajemen di instansi pemerintahan. Pengaplikasian SAKIP dalam kinerja pemerintahan diharapkan akan mengubah pola kebiasaan ASN agar memiliki kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Sibolga pada tahun 2023 memperoleh nilai SAKIP sebesar 54,60 atau memiliki predikat CC dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan dengan nilai sebesar 56,77 atau predikat CC. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan

anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Sibolga masih belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan lebih lanjut. Meskipun nilai SAKIP pada tahun 2024 naik dibandingkan capaian tahun sebelumnya, namun masih perlu perbaikan ke depannya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Selain dari beberapa permasalahan di atas, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik masih ada beberapa yang harus dijaga dan diawasi pelaksanaannya untuk mencapai efektifitas jalannya pemerintahan seperti peningkatan pelaksanaan dan pengawasan pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Berbagai penertiban administrasi maupun pengawasan penggunaan keuangan daerah akan menjadi basis utama dalam meminimalisir kasus tindak pidana penyimpangan penggunaan anggaran baik secara teknis maupun administrasi. Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapatkan Kota Sibolga menjadi bukti semakin optimalnya pengelolaan keuangan daerah baik dari segi penggunaannya maupun administrasinya. Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting bagi organisasi publik. Oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik. Pemenuhan kepentingan tersebut harus memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan tanggapan positif terhadap hasil pelayanan yang telah diberikan pemerintah. Secara umum, faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan publik adalah SDM aparatur, organisasi birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, sistem dan strategi pelayanan, kepemimpinan yang transaksional, struktur organisasi yang adaptif serta lemahnya implementasi kebijakan dan belum diterapkannya prinsip good governance. Indeks Pelayanan Publik Sibolga pada tahun 2024 sebesar 3,75 capaian ini merupakan hasil positif dalam upaya peningkatan pelayanan publik di Kota Sibolga. Namun capaian tersebut, masih

perlu diperbaiki dengan mewujudkan pelayanan publik yang prima, efektif, efisien dan berkualitas khususnya dalam pelayanan dasar masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, transformasi pelayanan publik sudah menjadi suatu keniscayaan untuk diterapkan melalui berbagai inovasi dan juga improvisasi dalam memudahkan masyarakat mengakses pelayanan publik berkualitas. Teknologi informasi hadir dalam mewujudkan transformasi pelayanan publik yang berkompeten dan mudah. Hal ini menjadi suatu adaptasi bagi unit pelaksana pelayanan publik guna menjawab kebutuhan masyarakat yang kian meningkat. Transformasi digital ini nantinya diharapkan memudahkan masyarakat mengakses pelayanan dengan cepat dan efisien. Selain itu, layanan ini juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat dan menciptakan transparansi pelayanan sehingga terhindar dari kondisi yang tidak diharapkan seperti pungutan liar dan sebagainya.

5. Belum optimalnya peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan daerah.

Pelayanan terhadap masyarakat merupakan bagian utama dari tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, salah satu tugas pokok aparaturnya pemerintah daerah adalah pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur penunjang kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan yang prima, pemerintah daerah harus merumuskan program-program kegiatan yang mengoptimalkan berbagai sarana prasarana penunjang pembangunan daerah. Hal tersebut dilaksanakan karena peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga saat ini masih belum maksimal direalisasikan. Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan ketersediaan infrastruktur. Perannya sebagai penggerak di sektor perekonomian akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor lain yang terkait. Selain itu, ketersediaan infrastruktur juga sebagai penunjang kesejahteraan

masyarakat. Peningkatan kualitas jaringan jalan yang baik, tentunya ditujukan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat Kota Sibolga untuk melakukan aktivitas, baik ekonomi, sosial, maupun layanan pemerintahan, dan sekaligus memperkuat daya saing daerah. Namun pada realitanya, kondisi jalan di Kota Sibolga masih tergolong memperhatikan mengingat sebagian panjang jalan berada pada kondisi rusak/rusak berat yang mencapai 31,61 KM pada tahun 2024. Selain itu, masih terdapat panjang jalan yang memiliki jenis permukaan kerikil dan tanah yakni sepanjang 8,45 KM. Infrastruktur merupakan faktor utama daya saing antar daerah. Belum meratanya infrastruktur, menjadikan rendahnya kemakmuran masyarakat. Pembangunan infrastruktur diupayakan cenderung lebih ke daerah yang pendapatan perkapitanya lebih rendah agar pembiayaan yang dikeluarkan menjadi minim dan perbaikan infrastruktur juga diharapkan agar mengurangi kesenjangan karena untuk mewujudkan ekonomi tidak sekedar tumbuh tinggi namun juga tumbuh secara inklusif dan adil. Daerah perkotaan dan pedesaan merupakan satu kesatuan wilayah yang seharusnya menjadi perhatian khusus pihak yang berkepentingan dalam hal pembangunan ini, khususnya pembangunan perumahan dan permukiman. Seharusnya hal ini menjadi panduan untuk melaksanakan pemerataan dalam pembangunan antar keduanya. Tetapi yang kita temui dilapangan sekarang adalah semakin pesatnya pembangunan yang dilakukan pada kota, sehingga daerah pedesaan semakin tertinggal. Pesatnya pembangunan perumahan diperkotaan banyak yang tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang kota, inilah yang menyebabkan keadaan perkotaan semakin hari semakin tidak jelas arah pengembangannya. Ketika melihat kondisi infrastruktur, tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota di Kota Sibolga tahun 2024 hanya mencapai 58,62 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam memastikan jaringan transportasi yang memadai untuk mendukung konektivitas dan mobilitas di seluruh wilayah. Sementara itu, persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan

perpipaan atau non-perpipaan terlindungi mencapai 100 persen. Angka ini menyoroti tidak perlunya peningkatan dalam penyediaan layanan air bersih yang aman dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Dalam bidang sanitasi, tingkat sanitasi layak di Kota Sibolga juga masih rendah, pada tahun 2024 tercatat masih 37,25 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang memadai dan layak. Peningkatan dalam infrastruktur sanitasi akan menjadi kunci untuk meningkatkan kesehatan masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan di wilayah ini. Selain bidang sanitasi, capaian rumah tangga layak huni di Kota Sibolga pada tahun 2024 sebesar 97,11 persen, hal ini juga menjadi sebuah permasalahan yang harus ditangani oleh pemerintah daerah.

6. Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana

Sejatinya segala potensi sumber daya alam di Kota Sibolga dapat dimanfaatkan sebagai modal dasar maupun penunjang pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pendayagunaan potensi sumber daya alam sering kali kurang memperhatikan batas kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga menimbulkan ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup dan kesinambungan pembangunan itu sendiri. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kota Sibolga, aktivitas ekonomi daerah yang berlangsung memiliki potensi untuk berdampak pada kerusakan lingkungan. Masalah lingkungan yang seringkali terjadi akibat aktivitas pembangunan seperti deforestasi, pengelolaan sampah yang belum maksimal, perubahan tata guna lahan, dan praktik pertanian yang tidak berkelanjutan. Aktivitas tersebut yang akan menimbulkan permasalahan lingkungan terkait dengan polusi air dan udara. Dengan adanya potensi kerusakan lingkungan sebagai dampak aktivitas ekonomi daerah maka setiap kegiatan usaha yang dilakukan di Kota Sibolga baik dalam upaya peningkatan ekonomi

maupun peningkatan infrastruktur harus memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mencegah terjadinya pencemaran dan menjaga kesehatan lingkungan. Kondisi kerusakan lingkungan hidup di Kota Sibolga dapat dilihat dari indikator kualitas lingkungan hidup yang mencakup kualitas air dan kualitas udara dan tutupan lahan untuk melihat kualitas lingkungan hidup. Indikator lingkungan hidup sejak 2020 sampai 2024 bergerak secara fluktuatif. Terjadi penurunan dan peningkatan beberapa komponen indeks kualitas lingkungan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2024, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang semula 64,90 poin di tahun 2023 naik menjadi 47,42 poin di tahun 2024 ini turun dikarenakan indeks kualitas air tidak dihitung. Sesuai penilaian PermenLHK nomor 27 Tahun 2021, capaian IKLH tahun 2023 Kota Sibolga berada pada kategori, “sedang”. Dengan melihat capaian ini terlihat belum optimalnya pengelolaan, pengawasan dan penanganan dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Dengan ini perlu adanya peningkatan dalam menjaga kualitas air, udara dan lahan, pengelolaan persampahan dan limbah, serta pengawasan terhadap AMDAL dari aktivitas ekonomi masyarakat. Sehingga nantinya Pemerintah Kota Sibolga mampu meningkatkan status kategori kualitas lingkungan hidup Kota Sibolga menjadi kategori baik dan sangat baik. Salah satu permasalahan yang ada di Kota Sibolga adalah belum optimalnya pengelolaan sampah. Tempat pembuangan akhir sampah merupakan tempat dimana sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitar, karenanya diperlukan penyediaan fasilitas dan perlakuan yang benar agar keamanan tersebut dapat dicapai lebih baik. Penyediaan tempat pembuangan akhir sampah lebih sering dianggap hanya merupakan tempat pembuangan sampah, hal ini menyebabkan pengalokasian pendanaan bagi penyediaan fasilitas di TPA yang dirasa kurang prioritas dibanding dengan pembangunan sektor lain. Sampah yang berada di TPA masih mengalami penguraian secara alamiah dengan jangka waktu panjang. Hal tersebut juga memberikan gambaran bahwa TPA

setelah selesai digunakanpun masih ada proses yang berlangsung dan menghasilkan beberapa zat yang mengganggu lingkungan. Karenanya masih diperlukan pengawasan terhadap TPA yang telah ditutup. Disisi lain, Kota Sibolga merupakan daerah rawan bencana banjir, baik karena alam maupun ulah manusia. Untuk itu diperlukan usaha pengembalian ekosistem lingkungan agar potensi terjadinya ancaman bencana banjir seperti badan sungai rusak, kerusakan daerah tangkapan air, pelanggaran tata ruang wilayah dapat teratasi sedini mungkin. Ditambah dengan peningkatan masyarakat tangguh bencana sebagai salah satu upaya pengurangan risiko bencana agar terwujud keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan. Pelestarian dan pengelolaan kualitas lingkungan hidup tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah saja, namun kolaborasi bersama stakeholders dan masyarakat juga sangat diperlukan untuk menjaga bersama dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 2. 113 Keterkaitan Permasalahan Utama, Permasalahan Pokok dan Permasalahan Kota Sibolga Tahun 2025-2029

PERMASALAHAN UTAMA	PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN
Belum optimalnya kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Kota Sibolga	Belum Optimalnya Kualitas SDM yang merata dan berdaya saing	Belum optimalnya akses dan layanan pendidikan
		Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
		Belum optimalnya kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan
		Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak
		Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan perpustakaan
		Belum optimalnya kualitas keluarga
		Masih Kurangnya Pemuda yang Inovatif, Kompetitif dan berkarakter
		Belum Optimalnya Prestasi Olahraga
	Belum Optimalnya pengentasan kemiskinan dan penurunan ketimpangan pendapatan	Belum Optimalnya Penanganan PPKS
		Masih rendahnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial
		Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan

	Belum Optimalnya daya saing ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Masih tingginya angka pengangguran terbuka
		Belum Optimalnya peningkatan kualitas ketahanan pangan
		Belum Optimalnya Pengelolaan, Pelestarian dan Pembinaan Kebudayaan
		Masih Rendahnya Nilai Investasi Daerah
		Masih Rendahnya Daya Saing Sektor Perdagangan
		Masih Rendahnya Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara
		Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah
	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Belum optimalnya penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan pencegahan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
		Belum Optimalnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Belum optimalnya pelayanan pemerintahan berbasis elektronik
		Masih lemahnya persandian dan keamanan informasi
		Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah
		perencanaan pembangunan daerah Belum optimalnya peningkatan inovasi dan kualitas hasil penelitian untuk dimanfaatkan
		Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah
		Belum optimalnya Sistem Manajemen Kepegawaian
		Belum optimalnya peningkatan Kompetensi Aparatur
		Belum optimalnya sistim pengendalian intern perangkat daerah
		Belum optimalnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan kearsipan
		Belum optimalnya penetapan Perda
		Belum optimalnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
		Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
		Masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam menjaga kesatuan bangsa dan politik
		Belum optimalnya pelayanan pemadaman kebakaran dan non kebakaran serta peran masyarakat
	Belum optimalnya peningkatan kualitas dan pemerataan	Belum memadainya infrastruktur kota yang memadai

	infrastruktur pembangunan daerah	Belum optimalnya pengelolaan tata ruang
		Belum optimalnya lahan yang bersertifikat
		Belum optimalnya perumahan dan kawasan permukiman yang nyaman
	Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
		Belum optimalnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana

2.6.2 Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan berbagai persoalan yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional karena krusialnya kondisi atau perihal dalam pembangunan daerah masa kini maupun mendatang. Terkait dengan hal tersebut, perlu kiranya isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun program kegiatan prioritas pembangunan jangka panjang agar pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat lebih terstruktur, tepat, dan cepat. Isu-isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya akan menjadi kelebihan tersendiri dalam meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, namun sebaliknya jika isu strategis tidak diindahkan maka bukan hal yang mustahil terjadi beberapa kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah. Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan jangka panjang. Rumusan dari isu strategis mencakup isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang memiliki keterkaitan dan integrasi.

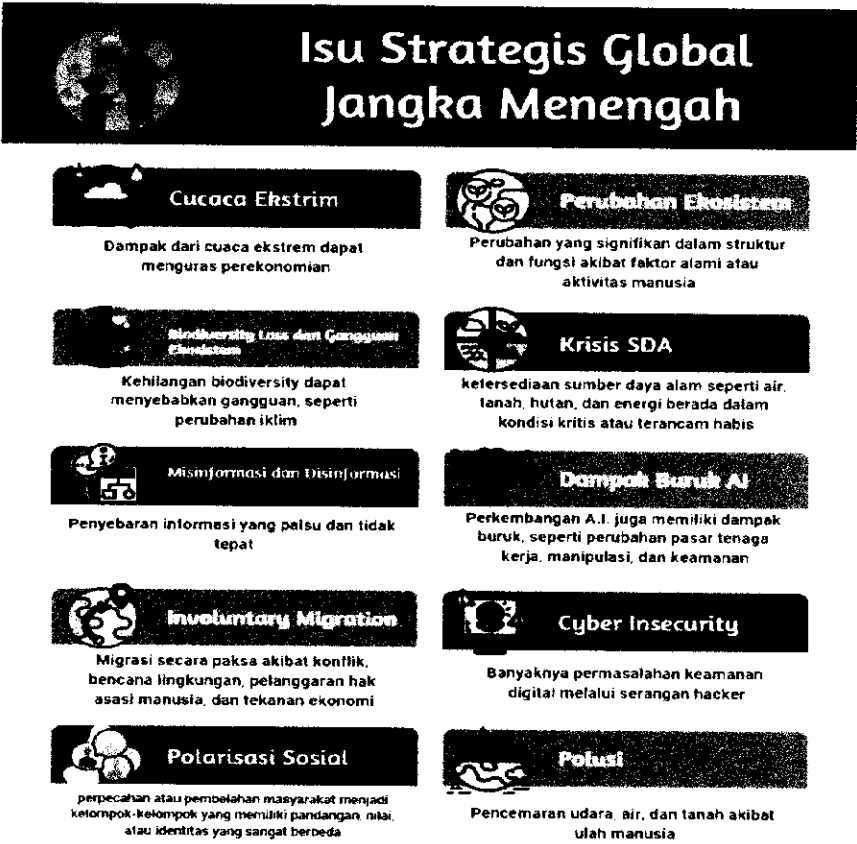
1. Isu Strategis Global

Pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2025-2029 berperan penting sebagai pondasi awal untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Isu dan tantangan

pembangunan perlu dimitigasi dan dioptimalisasi menjadi peluang untuk mencapai sasaran jangka menengah serta trajektori pembangunan jangka panjang. Adapun mitigasi terhadap resiko untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

- a. Cuaca Ekstrem;
- b. Perubahan kritikal terhadap ekosistem;
- c. *Biodiversity loss* dan gangguan ekosistem;
- d. Krisis sumber daya alam;
- e. Misinformasi dan disinformasi;
- f. Dampak buruk teknologi AI;
- g. *Involuntary migration*;
- h. *Cyber insecurity*;
- i. Polarisasi sosial;
- j. Polusi.

Gambar 2. 7 Isu Strategis Global Jangka Menengah



Sumber: World Economic Forum, Risk Global Report 2024

Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029, ada beberapa isu global menjadi peluang dalam pembangunan jangka menengah ke depan, sebagai berikut:

- a. Dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian Indonesia, yaitu hilirisasi perlu dilanjutkan untuk nilai tambah yang lebih besar.
- b. Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral, yaitu sinkronisasi kebijakan perlu didorong dengan memperhatikan kepentingan nasional.
- c. Penerapan standar *Sustainability* yang tinggi di *Level* Global, yaitu produk Indonesia harus berorientasi ramah lingkungan agar tetap bersaing di pasar global.
- d. Transisi energi untuk mendorong pemerataan, yaitu perlu *national grid* yang mampu mendistribusikan pasokan listrik ke luar pulau dan perlunya pembangunan PLT EBT di luar Pulau Jawa untuk mendorong pemerataan.
- e. *Aging population* negara maju, yaitu usia produktif negara maju menurun dan potensi Indonesia untuk mendorong penyediaan pariwisata kesehatan untuk lansia.

2. Isu Strategis Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dua dokumen perencanaan pembangunan yang saling terkait dan berfungsi sebagai panduan strategis dalam pembangunan nasional dan Daerah. RPJMN berfungsi sebagai peta jalan yang menetapkan arah, prioritas, dan kebijakan pembangunan nasional selama lima tahun, sementara RPJMD Daerah merupakan implementasi dari RPJMN di tingkat Daerah, disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan spesifik setiap Daerah.

RPJMN 2025-2029 akan menjadi periode pertama dalam rangkaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang difokuskan pada tema penguatan fondasi transformasi. Tema penguatan fondasi

transformasi dalam RPJMN 2025 2029 merupakan langkah awal yang krusial menuju transformasi yang lebih luas dan mendalam di berbagai aspek pembangunan nasional. Langkah ini bertujuan untuk meletakkan dasar yang kokoh bagi perubahan struktural yang diperlukan untuk mencapai visi jangka panjang Indonesia Emas 2045.

Dalam mencapai visi jangka panjang Indonesia Emas 2045, diperlukan berbagai upaya transformasi yang dituangkan ke dalam lima pilar utama, yaitu Transformasi Sosial; Transformasi Ekonomi; Transformasi Tata Kelola; Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; serta Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi. Pada periode RPJMN 2025-2029 ini juga telah ditentukan arah kebijakan di setiap transformasi untuk memastikan fondasi pembangunan yang kuat dan terukur pada awal periode pembangunan jangka panjang, yang secara lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 114 Transformasi dan Arah Kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029

No	Transformasi	Arah Kebijakan
1	Transformasi Sosial	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2	Transformasi Ekonomi	Hilirissi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3	Transformasi Tata Kelola	Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif,

		peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integrasi partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan budaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5	Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Sumber: RPJMN 2025–2029, diolah tahun 2025.

Arah kebijakan yang disusun dalam RPJMN 2025-2029 bertujuan untuk mengatasi berbagai isu strategis yang dihadapi Indonesia melalui lima pilar transformasi utama. Dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi, reformasi tata kelola pemerintahan, penegakan supremasi hukum, serta

ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, kebijakan ini dirancang untuk membangun fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Adapun isu-isu strategis yang menjadi pokok pembahasan pada setiap pilar transformasi pada RPJMN 2025-2029 secara lebih lanjut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 115 Arah Pembangunan dan Isu Strategis RPJMN Tahun 2025-2029

No	Transformasi	Arah Pembangunan	Isu Strategis
1	Transformasi Sosial	Kesehatan Untuk Semua	1. Masalah gizi dan kesehatan anak 2. Tingginya kasus penyakit menular (TBC dan kusta) 3. Belum terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan yang sesuai standar 4. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan
		Pendidikan yang Merata Berkualitas	1. Akses dan kualitas pendidikan yang belum memadai 2. Tenaga pendidik terbatas dan tidak merata 3. Masih rendahnya kualifikasi pendidikan dan produktivitas angkatan kerja
		Perlindungan Sosial yang Adaptif	1. Akurasi program bantuan sosial yang rendah 2. Ancaman bencana dan dampak perubahan iklim 3. Kesempatan yang belum merata bagi kelompok rentan 4. Masih rendahnya Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 5. Belum optimalnya integrasi layanan dan sistem administrasi kependudukan 6. Belum optimalnya Program Jaminan Sosial
2	Tranformasi Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonom	1. Deindustrialisasi dini 2. Rendahnya produktivitas tenaga kerja 3. Kurangnya daya saing produk 4. Keterbatasan tenaga kerja terlatih dan berpendidikan tinggi 5. Ketidaksesuaian produksi dengan permintaan global 6. Kurangnya kemampuan inovasi 7. Tantangan menuju energi hijau

			8. Degradeasi lingkungan dan hilangnya budaya lokal 9. Keterbatasan amenitas, aksesibilitas, dan atraksi pada sektor pariwisata 10. Pengelolaan destinasi dan kualitas layanan pariwisata seringkali tidak memprioritaskan kepuasan pengalaman wisatawan 11. Rendahnya pengeluaran wisatawan dan investasi pariwisata 12. Kurangnya keterampilan SDM pariwisata dan pemanfaatan ekonomi lokal 13. Belum optimalnya ekosistem kekayaan intelektual 14. Terbatasnya ketersediaan data ekonomi kreatif 15. Belum optimalnya kelembagaan ekonomi kreatif 16. Rendahnya daya saing SDM ekonomi kreatif 17. Belum optimalnya rantai pasok ekonomi kreatif, terutama di Daerah 18. Rendahnya keterkaitan UMKM pada rantai nilai produksi serta minimnya penggunaan teknologi dan inovasi usaha 19. Rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia dibanding negara-negara di kawasan ASEAN 20. Rendahnya kinerja dan daya saing BUMN 21. Belum optimalnya peran BUMN sebagai agen pembangunan
		Penerapan Ekonomi Hijau	1. Rendahnya produktivitas ekonomi di sektor perairan 2. Biaya lingkungan perairan yang belum terkuantifikasi dan kemiskinan di masyarakat pesisir 3. Tuntutan pembangunan berkelanjutan 4. Ketergantungan terhadap energi fosil 5. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang tinggi 6. Potensi energi terbarukan yang besar 7. Kualitas infrastruktur ketenagalistrikan yang belum memadai 8. Belum optimalnya tata kelola ketenagalistrikan, termasuk kebijakan tarif dan harga

			9. Keterbatasan dukungan pendanaan dan rantai nilai domestik untuk transisi energi 10. Ketergantungan pada produksi impor energi 11. Keterbatasan untuk adopsi dan adaptasi teknologi 12. Pemanfaatan limbah yang belum optimal 13. Keterbatasan pengolahan limbah elektronik 14. Ketergantungan pada bahan baku kritis 15. Keterbatasan pemanfaatan limbah untuk bahan bakar dan industri 16. Kurangnya kesadaran industri pariwisata akan penerapan ekonomi sirkular dan prinsip berkelanjutan dalam operasional usahanya 17. Keterbatasan pemahaman dan informasi mengenai pekerjaan hijau 18. Belum memadainya sistem pendidikan dan pelatihan vokasi dalam mempersiapkan tenaga kerja hijau 19. Kurangnya integritas kebijakan dan keterlibatan berbagai pihak terkait pekerjaan hijau 20. Kontribusi sektor kehutanan yang rendah terhadap pdb nasional 21. Rendahnya produktivitas dan perkembangan bioekonomi 22. Belum optimalnya tata batas kawasan hutan dan perhutanan sosial 23. Proses transaksi izin dan persetujuan bisnis yang belum efektif 24. Keterlibatan para pihak/multisektor yang belum optimal
		Transformasi Digital	1. Belum optimalnya kontribusi ekonomi perkotaan terhadap nasional 2. Digitalisasi sektor strategis 3. Peningkatan aspek pendukung dan akselerator transformasi digital
		Integrasi Ekonomi Domestik dan Konektivitas Global	1. Keterkaitan perekonomian secara domestik masih terbatas 2. Belum optimalnya perdagangan antar wilayah dan ekspor serta partisipasi dalam rantai nilai global

			3. Belum optimalnya penguatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global 4. Daya dukung tercapainya integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global perlu ditingkatkan
		Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	1. Masih terbatasnya keterkaitan perekonomian secara domestik 2. Pemenuhan Layanan Perkotaan yang belum memadai dan inklusif 3. Tata kelola yang belum terpadu, inovatif, dan kolaboratif 4. Masalah sosial-ekonomi masyarakat perkotaan 5. Pola pembangunan perkotaan yang menyerak 6. Degradasi lingkungan perkotaan dan rendahnya ketangguhan bencana
3	Transformasi Tata Kelola	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif	1. Belum tercapainya integrasi partai politik 2. Belum terwujudnya kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan kompetitif 3. Belum optimalnya reformasi regulasi dan peningkatan partisipasi publik 4. Belum adanya sistem penilaian K/L/D terintegrasi yang berbasis pada penilaian kinerja, anggaran, dan integritas
4	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesian	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	1. Praktik penegakan hukum yang belum terpadu, efisien, dan berlandaskan HAM 2. Rendahnya kepatutan hukum masyarakat sebagai akibat dari minimnya literasi dan pemberdayaan 3. Keterbatasan akses terhadap keadilan 4. Kelembagaan penegak hukum yang belum profesional 5. Belum optimalnya keamanan dan stabilitas negara 6. Pelanggaran batas wilayah dan kejahatan transnasional 7. Disrupsi teknologi dan keamanan siber 8. Demokrasi yang masih prosedural
		Stabilitas Ekonomi Makro	1. Krisis ekonomi dan keuangan global 2. Tensi geopolitik dan geoekonomi 3. Perubahan lingkungan dan social 4. Tingkat penerimaan dan pengeluaran fiskal yang tidak seimbang 5. Imbal hasil obligasi yang tinggi

		Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	1. Ketidakpastian dalam kebijakan luar negeri 2. Disrupsi rantai pasok global dan tren decoupling ekonomi 3. Belum terselesaikannya permasalahan perbatasan dan diplomasi wilayah 4. Belum idealnya postur dan sinergi pelaksanaan diplomasi Indonesia 5. Peningkatan kompleksitas dan ancaman dalam konflik global
5	Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	1. Nilai agama belum optimal diejawantahkan menjadi kerja-kerja pembangunan yang membawa kebaikan bersama 2. Wawasan dan identitas nasional sebagai bangsa majemuk tidak serta merta melahirkan kehidupan beragama dan berbudaya yang inklusif 3. Beragama belum disertai dengan kemampuan literasi keagamaan yang inklusif, moderat, dan berorientasi kemaslahatan 4. Karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global 5. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 6. Kearifan lokal belum dipertimbangkan sebagai modal dasar pembangunan dan penggerak transformasi masyarakat
		Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	1. Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga menyebabkan ancaman krisis moral dan karakter di kalangan generasi muda 2. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia belum optimal 3. Ketimpangan gender yang masih tinggi 4. Kesulitan mewujudkan pembangunan yang inklusif dan kesetaraan gender
		Lingkungan Hidup Berkualitas	1. Penurunan kualitas lingkungan hidup 2. Peningkatan luasan lahan terkontaminasi limbah B3 3. Terbatasnya daya tampung sampah

			4. Krisis keanekaragaman hayati dan ancaman kepunahan spesies
		Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Akses dan kualitas energi yang tidak merata 2. Rendahnya pangsa energi terbarukan dalam bauran energi nasional 3. Kurangnya efisiensi perusahaan dan pemanfaatan energi 4. Belum optimalnya eksplorasi energi 5. Kurangnya efisiensi dalam institusi pengelolaan energi 6. Ketersediaan air bersih yang terbatas 7. Penurunan kualitas air 8. Pengelolaan sumber daya air yang tidak efisien 9. Kekurangan infrastruktur penyimpanan air 10. Ketersediaan pangan yang tidak memadai 11. Rendahnya kualitas dan keamanan pangan 12. Rendahnya keterjangkauan dan kualitas konsumsi pangan 13. Tingginya fluktuasi harga pangan 14. Rendahnya kesejahteraan petani dan nelayan sebagai penyedia utama komoditas pangan
		Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	1. Belum optimalnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini terpadu 2. Belum optimalnya tata kelola penanganan darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana 3. Kurangnya infrastruktur berketahanan bencana dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana 4. Belum terintegrasinya sistem penataan ruang dan pengembangan informasi geospasial berbasis risiko bencana 5. Tantangan dalam adaptasi terhadap perubahan iklim 6. Kurangnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan 7. Ketergantungan pada bahan bakar fosil

Sumber: Data Diolah

3. Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara

a. Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Merata dan Berkeadilan

Pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara masih menghadapi banyak tantangan. Persoalan yang perlu diatasi meliputi luasnya permukiman kumuh, rendahnya akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi layak, serta kondisi infrastruktur SDA yang masih buruk. Penanganan banjir juga menjadi isu penting. Urban sprawl atau perkembangan kota yang tidak terstruktur serta tingginya risiko bencana di provinsi ini memerlukan perhatian khusus. Layanan ketenagalistrikan masih kekurangan pasokan daya dan tidak efisien, terutama di Daerah perbatasan dan pulau terluar. Jangkauan jaringan seluler belum dimanfaatkan optimal untuk kegiatan produktif.

b. Pembangunan Antar Daerah serta Desa-Kota

Keterkaitan antara Daerah dan desa-kota di Sumatera Utara masih belum optimal, sehingga tidak dapat mendukung rantai pasok yang efektif. Pembangunan wilayah Metropolitan Medan masih menghadapi masalah permukiman kumuh, kualitas lingkungan hidup yang menurun, dan infrastruktur transportasi massal yang belum memadai. Urbanisasi yang tidak terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang terpusat menyebabkan migrasi manusia ke wilayah dengan ekonomi yang lebih baik.

c. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan

Pengelolaan SDA berkelanjutan belum sepenuhnya mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat jangka panjang. Tantangan lain meliputi adaptasi perubahan iklim, pengawasan deforestasi, kebakaran hutan, dan harmonisasi antara

manusia dengan satwa liar. Akses dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA, termasuk kelompok marginal, masih perlu ditingkatkan.

d. Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Transisi demografi menimbulkan tantangan dalam pembangunan kesehatan, seperti meningkatnya penyakit menular dan tidak menular, serta masalah kesehatan penduduk lanjut usia dan kesehatan jiwa. Kualitas pendidikan yang rendah akibat kurangnya sarana-prasarana, distribusi guru yang tidak merata, dan rendahnya kualifikasi pendidikan mempengaruhi keterserapan tenaga kerja. Pemahaman dan kepesertaan dalam jaminan sosial juga masih rendah.

e. Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur

Konektivitas dan sistem logistik yang kurang memadai menyebabkan mahalnya biaya logistik dari wilayah penghasil komoditas ke lokasi pengolahan dan pemasaran. Peningkatan fasilitas perhubungan darat, laut, dan udara perlu diupayakan untuk mengurangi biaya logistik dan mendukung kelancaran arus barang, jasa, dan informasi.

f. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel

Pelayanan publik di Sumatera Utara masih perlu ditingkatkan melalui reformasi birokrasi dan peningkatan SDM profesional dengan memanfaatkan teknologi informasi. Optimalisasi infrastruktur TIK, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, serta manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien sangat diperlukan untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme.

4. Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Sibolga

Berdasarkan hasil analisa terhadap dokumen KLHS RPJMD, terdapat Isu strategis dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis - RPJMD Kota Sibolga Tahun 2025-2029, yang menjadi isu strategis pembangunan berkelanjutan wilayah Kota Sibolga adalah:

- a. Kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup manusia (kemiskinan, pangan, kesehatan, pendidikan, peran gender bagi kesejahteraan keluarga serta layanan kesehatan dan layanan pendidikan.
- b. Pertumbuhan ekonomi wilayah yang terus berkembang dengan dukungan ekonomi masyarakat.
- c. Permukiman kota yang sehat, aman dan atraktif, dengan dukungan, infrastruktur berkualitas dan menjangkau seluruh kota.
- d. Perlindungan dan Pemanfaatan Lestari Ekosistem Darat, Pantai, Pulau Kecil dan Perairan Laut
- e. Tata kelola dan kapasitas pemerintahan (governance) yang menyangkut masyarakat damai, partisipasi masyarakat, kepatuhan terhadap hukum, kualitas birokrasi, kapasitas pemerintahan, kerjasama daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis utama Kota Sibolga adalah sebagai berikut:

1. Percepatan Penurunan Kemiskinan

Data persentase dan jumlah penduduk miskin di Kota Sibolga menunjukkan tren penurunan yang positif pasca lonjakan signifikan pada tahun 2021 akibat dampak pandemi. Sejak tahun 2022 hingga 2024, Kota Sibolga berhasil menekan angka kemiskinan dari 11,47 % menjadi 11,39, merefleksikan efektivitas program pemulihan ekonomi dan bantuan sosial. Meskipun demikian, angka ini masih mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat Kota Sibolga masih hidup di bawah garis

kemiskinan, serta tantangan untuk mencapai target nasional percepatan penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen masih menjadi prioritas. Oleh karena itu, percepatan penurunan kemiskinan tetap menjadi isu strategis yang membutuhkan intervensi terarah dan komprehensif dari pemerintah daerah. Ke depan, strategi percepatan penurunan kemiskinan di Kota Sibolga harus berfokus pada pendekatan multidimensional yang menysasar akar permasalahan kemiskinan. Hal ini mencakup penguatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja, peningkatan inklusi keuangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penyediaan infrastruktur dasar yang memadai seperti air bersih, sanitasi, dan listrik yang terjangkau. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat juga krusial untuk memastikan program-program ini berjalan efektif dan berkelanjutan, sehingga mampu mendorong lebih banyak keluarga keluar dari garis kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah Kota Sibolga.

2. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM

Terdapat berapa isu mengenai sumber daya manusia yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius. Salah satu permasalahan utama adalah kualitas pembangunan manusia, khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan gender. Hal ini berakibat pada kualitas SDM sebagai modal sosial utama Daerah yang belum optimal. Permasalahan kualitas SDM ini dapat menghambat proses pembangunan Daerah yang baik. Oleh karena itu, perlu diprioritaskan sebagai isu strategis untuk dicegah dan ditangani guna mewujudkan kualitas SDM yang lebih baik.

Pemerintah Kota Sibolga belum optimal dalam pembangunan pariwisata sehingga menjadi isu strategis daerah. Masih rendahnya Pendapat Asli Daerah (PAD) Kota Sibolga dan kunjungan tamu wisatawan yang hanya berkunjung ke kota

sibolga pada event-event tertentu saja, padahal Kota Sibolga mempunyai laut yang sangat indah untuk dikunjungi, mempunyai peluang untuk peningkatan pariwisata dikarenakan kota sibolga dekat dengan laut sehingga dari faktor wisatawan kuliner kota sibolga masih memadai dimana pemerintah sibolga akan lebih focus lagi pembangunan infrastruktur khusus dibidang pariwisata.

Di sisi lain, terdapat pemenuhan gizi yang masih belum optimal pada masyarakat sehingga menjadikan akar masalah pada isu strategis ini. Masih adanya kasus stunting yang disebabkan karena masih rendahnya masyarakat terhadap keragaman pangan dan masih kurangnya terhadap keamanan pangan di Kota Sibolga. Kondisi tersebut tentu menjadi perhatian khusus bagi kelangsungan hidup masyarakat di Kota Sibolga .

3. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur

Infrastruktur Daerah yang memadai merupakan elemen penting untuk pembangunan Daerah yang berkelanjutan. Di Kota, terdapat beberapa masalah utama yang menjadi fokus pembangunan, seperti komunikasi dan telekomunikasi yang belum merata untuk meningkatkan literasi digital, penyediaan website yang memberikan informasi terkini dan aman dapat membantu meningkatkan minat baca masyarakat. Infrastruktur jalan di sibolga juga perlu ditingkatkan, terutama jalan lokal di Lingkungan yang mengalami kerusakan berat. Ketidakmerataan pembangunan disebabkan oleh kurangnya konektivitas antar wilayah. Kekurangan sumber air bersih dimana pada musim kemarau, air bersih sulit didapatkan oleh masyarakat Kota sibolga kedepannya pemerintah akan mengoptimalkan sistem penyediaan air bersih di setiap kelurahan kota sibolga.

4. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tidak signifikan disebabkan oleh berbagai kendala mulai dari pariwisata, investasi, perdagangan, perikanan, dan kelautan. Faktor-faktor seperti kurangnya daya saing ekonomi yang rendah merupakan penghambat utama dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Sibolga. Selain itu, Kota Sibolga merupakan Daerah yang memiliki pesisir, namun dalam pemanfaatannya Kota Sibolga dinilai masih kurang maksimal dalam memanfaatkan hasil laut sehingga hal tersebut tentu menjadi salah satu isu yang perlu ditangani. Ketidakmerataan pembangunan ekonomi di Kota Sibolga juga menimbulkan kesenjangan yang cukup besar di antara masyarakat. Meskipun Sibolga menunjukkan capaian yang relatif baik dalam mengurangi kesenjangan dibandingkan yang tercermin dalam penurunan rasio gini, tantangan untuk mempertahankan dan terus meningkatkan pemerataan pendapatan tetap krusial. Kesenjangan ekonomi dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi inklusif, memicu potensi konflik sosial, serta melemahkan daya beli masyarakat yang lebih rentan, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan kualitas hidup dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan yang berfokus pada peningkatan akses kesempatan kerja, pemberdayaan UMKM, pendidikan berkualitas, dan layanan dasar yang merata, akan sangat vital untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat Sibolga.

5. Pelestarian Lingkungan Hidup

Pelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu isu strategis yang penting karena memberikan dampak keberlanjutan terhadap pembangunan. Terdapat beberapa isu serius mengenai lingkungan di Kota Sibolga seperti deforestasi, pencemaran lingkungan, penambangan liar, pengelolaan sampah yang tidak memadai dan pencemaran lingkungan. Hal tersebut tentu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah

dalam melakukan perencanaan tata ruang dan dan penegakan hukum yang tegas untuk melindungi dan melakukan pelestarian lingkungan hidup.

Menjaga dan memulihkan ekosistem laut dan pesisir yang berkelanjutan

- o Jasa ekosistem seperti terumbu karang dan padang lamun dapat membantu menjaga keanekaragaman hayati laut dan pesisir serta menyediakan sumber daya perikanan bagi masyarakat setempat.

- o Ekosistem laut dan pesisir yang sehat juga dapat berkontribusi dalam mengurangi bencana alam seperti banjir dan badai, serta memberikan tempat perlindungan bagi hewan dan tumbuhan.

6. Peningkatan Tata Kelola Birokrasi

Bidang tata kelola pemerintahan Daerah adalah salah satu aspek penting untuk mendukung pembangunan yang efisien dan berkelanjutan. Berdasarkan analisis masalah yang telah diuraikan, ada beberapa isu utama yang perlu diprioritaskan penanganannya. Beberapa di antaranya adalah belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang disebabkan oleh keterbatasan sarana infrastruktur pengelolaan pemerintahan. Keterbatasan ini menghambat integrasi sistem informasi sehingga akses masyarakat terhadap informasi terbaru dan faktual belum terpenuhi. Masalah ini memengaruhi kinerja pemerintah Daerah dan hubungannya dengan masyarakat, sehingga perlu menjadi prioritas penanganan untuk meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, serta inovasi dan pengembangan berkelanjutan. Selain masalah akuntabilitas kinerja pemerintah dan infrastruktur manajemen sistem informasi yang belum optimal, perwujudan kemandirian kelurahan yang belum signifikan juga menjadi isu strategis. Masalah ini mencakup mekanisme perencanaan pembangunan yang belum kolaboratif dan kurangnya kapasitas sumber daya pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik.

Kekhawatiran ini dapat memengaruhi kualitas keputusan yang kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perencanaan yang holistik diharapkan dapat menjadikan perangkat Daerah Kota Sibolga sebagai penyelenggara pemerintahan yang didukung publik, sehingga meningkatkan keberhasilan implementasi program dan kegiatan. Selain itu, kapasitas dan keahlian sumber daya manusia perlu diselaraskan antara pemerintah dan Instansi vertikal untuk mewujudkan tata kelola yang inovatif dan adaptif.

7. Stabilitas Ketahanan Pangan Pangan

Merupakan sumber utama bagi keberlangsungan hidup manusia. Pemerintah Kota Sibolga tentu sangat memperhatikan ketersediaan pangan untuk memastikan keberlangsungan hidup masyarakat sehingga dapat mencapai kondisi yang sejahtera. Hingga saat ini ketersediaan pangan di Kota Sibolga masih tercukup, namun dengan bertambahnya jumlah penduduk tentu saja ketahanan pangan menjadi prioritas dan akan menjadi tantangan bagi pemerintah. Ketahanan pangan juga tidak hanya mencakup ketersediaan saja, tetapi juga dengan keterjangkauan dan pemanfaatan pangannya. Terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung ketahanan pangan di Kota Sibolga, seperti produksi perikanan yang berkelanjutan, ketersediaan infrastruktur Perikanan, kesesuaian program pemerintah, manajemen risiko, keterjangkauan pangan, dan diversifikasi pangan. Dalam mencapai ketahanan pangan yang stabil tentu memiliki tantangan yang besar seperti cuaca yang ekstrem, perubahan pola konsumsi, dan pertambahan jumlah penduduk yang pesat.

8. Mitigasi Bencana dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Saat ini perubahan iklim merupakan salah satu isu yang dihadapi dunia. Adanya perubahan iklim yang memprihatinkan tentu akan memberikan dampak berupa bencana. Kota Sibolga

memiliki potensi terhadap beberapa bencana alam seperti banjir dan kebakaran. Hal tersebut tentu menjadikan pemerintah Daerah Kota Sibolga untuk memberikan pendampingan terhadap masyarakat mengenai mitigasi bencana yang kemungkinan akan terjadi di Kota Sibolga. Ketenteraman dan ketertiban umum dipengaruhi oleh tingkat kriminalitas. Semakin tinggi tingkat kriminalitas, semakin tidak kondusif suatu Daerah. Tindak kriminalitas dapat dipicu oleh berbagai faktor seperti ekonomi, kemiskinan, krisis moneter, kurangnya lapangan kerja, dan penyalahgunaan narkoba.

Tabel 2. 116 Permasalahan dan Isu Strategis Global-Nasional-Provinsi-Kota Sibolga

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Global	Isu Eksternal (Internasional, Nasional dan Provinsi)	Isu Strategis Daerah
Sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebagai sektor yang berpotensi menyerap lapangan kerja berkontribusi terhadap PDRB Kota Sibolga tahun 2024 yang kemudian diikuti dengan dengan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terutama pada sektor Perikanan dan sektor transportasi dan pergudangan. komposisi sektoral ini kedepannya dapat diintegrasikan agar sektor primer khususnya perikanan dapat dikembangkan dan menjadi sumber bahan baku bagi sektor penyediaan Akomodasi dan Makan minuman menjadi lebih Optimal.	Belum Optimalnya Kualitas SDM yang merata dan berdaya saing	Kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup manusia (kemiskinan, pangan, kesehatan, pendidikan, peran gender bagi kesejahteraan keluarga serta layanan kesehatan dan layanan pendidikan.	Cuaca Ekstrem	Isu Globalisasi Ekonomi: transformasi Ekonomi	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM
Penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas pembangunan Kota Sibolga melalui berbagai Program Strategis bidang kewirausahaan, koperasi, serta intervensi yang					Percepatan Penurunan Kemiskinan

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Global	Isu Eksternal (Internasional, Nasional dan Provinsi)	Isu Strategis Daerah
terstruktur untuk nelayan dan sektor informal lainnya.					
Indeks Pembangunan Manusia Kota Sibolga tercatat sebesar 77,52 poin lebih besar dibandingkan dengan	Belum Optimalnya pengentasan kemiskinan dan	Pertumbuhan ekonomi wilayah yang terus	Perubahan kritikal terhadap ekosistem	Isu Sustainable Development Goals; Pembangunan	Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Global	Isu Eksternal (Internasional, Nasional dan Provinsi)	Isu Strategis Daerah
Provinsi Sumatera Utara dan Nasional yang masing-masing berada di angka 75,76 dan 75,02. kalau diliha t dari tahun-tahun sebelumnya Indeks Pembangunan Manusia mengalami Peningkatan secara fluktuatif	penurunan ketimpangan pendapatan.	berkembang dengan dukungan ekonomi masyarakat		Kewilayahan yang Merata & Berkeadilan	
TPT Kota Sibolga memiliki tren yang cenderung menurun. Pada tahun 2020 mencapai angka 8 % dan Pada tahun 2021 masih mengalami kenaikan menjadi 8,72 sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 7,05 % dan pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali menjadi 6,79 % penurunan ini kembali terjadi pada tahun 2024 menjadi 6,52 % ini disebabkan oleh adanya perkembangan pada sektor skunder yang cukup baik.	Belum Optimalnya daya saing ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Permukiman kota yang sehat, aman dan atraktif, dengan dukungan, infrastruktur berkualitas dan menjangkau seluruh kota.	Biodiversity loss dan gangguan ekosistem	Isu Sustainable Development Goals; Transformasi Sosial; Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; Pemenuhan Standard Pelayanan Minimal (SPM), khususnya pada penyelenggaraan urusan wajib terkait pelayanan dasar	
SAKIP Kota Sibolga terus menunjukkan perbaikan yang signifikan, meningkat dari 2020	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Tata kelola dan kapasitas pemerintahan	Krisis sumber daya alam	Perubahan Iklim Dunia dan Kebutuhan Mengatasinya; Isu Sustainable Development	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Global	Isu Eksternal (Internasional, Nasional dan Provinsi)	Isu Strategis Daerah
sampai dengan pada tahun 2024 pada Tahun 2020 SAKIP kota Sibolga 50,15 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 53,29 begitu juga pada tahun 2022 menjadi 53,51 dan pada tahun 2023 meningkat kembali menjadi 54,60 dan pada tahun 2024 kembali meningkat 56,77. Peningkatan ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui komitmen yang kuat dari pimpinan instansi pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta pemerintahan yang bersih (clean government). Peningkatan kualitas tatakelola yang diindikasikan dengan nilai SAKIP Berbagai penertiban administrasi maupun pengawasan penggunaan keuangan daerah akan menjadi basis utama dalam meminimalisir kasus tindak pidana penyimpangan		(governance) yang menyangkut masyarakat damai, partisipasi masyarakat, kepatuhan terhadap hukum, kualitas birokrasi, kapasitas pemerintahan, kerjasama daerah		Goals; Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Global	Isu Eksternal (Internasional, Nasional dan Provinsi)	Isu Strategis Daerah
penggunaan anggaran baik secara teknis maupun administrasi.					
Sebagian besar alokasi belanja modal difokuskan pada pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan infrastruktur wilayah. Tren alokasi anggaran untuk belanja modal menunjukkan peningkatan, terutama pada tahun 2024. Peningkatan ini diharapkan dapat mendorong pembangunan wilayah secara lebih luas, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan Kota Sibolga secara keseluruhan.	Belum optimalnya peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan daerah	Permukiman kota yang sehat, aman dan atraktif, dengan dukungan, infrastruktur berkualitas dan menjangkau seluruh kota.	Misinformasi dan disinformasi	Isu Geopolitik dan Geoekonomi; Disrupsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK); Transformasi Tata Kelola; Kebijakan dan Peraturan Perundangan Pemerintah Pusat yang sangat cepat mengalami pergantian/perubahan; Kebijakan Fiskal atau Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah	Peningkatan Pelayanan Infrastruktur
		Perlindungan dan Pemanfaatan Lestari Ekosistem Darat, Pantai, Pulau Kecil dan Perairan Laut	Dampak buruk teknologi AI		Pelestarian Lingkungan Hidup

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi dan Misi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Sibolga Tahun 2025-2029 adalah:

MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA

Makna dari visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Sibolga tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- Peduli** : Merupakan keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintah yang demokratis, proaktif mengatasi dan menggali berbagai permasalahan serta memberikan solusi atas permasalahan yang ada ditengah-tengah masyarakat serta komitmen yang baik dalam peningkatan standar pelayanan minimum bidang kesehatan, pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dalam bidang permukiman dan peningkatan SDM yang berkualitas.
- Amanah** : Memiliki makna dasar dipercaya dan konsisten melaksanakan apa yang direncanakan dan merencanakan apa yang akan dilaksanakan dengan mengoptimalkan segala sumberdaya yang dimiliki secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
- Setia** : Memiliki makna sikap pemimpin yang taat berpegang teguh pada prinsip dan memiliki komitmen, rasa kekeluargaan, mampu bekerjasama serta berpegang teguh kepada janji pembangunan yang disampaikan kepada masyarakat sebagai

pemilik kedaulatan dengan memberikan kesempatan yang sama untuk meningkatkan partisipasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara merata.

Sejahtera : Memiliki makna kondisi masyarakat Kota Sibolga yang hidup dalam kemakmuran ini diartikan sebagai keadaan masyarakat yang dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Kata “sejahtera” merujuk pada kondisi dimana Seluruh masyarakat Kota Sibolga dapat hidup dengan kualitas hidup yang baik dan merata, mencakup kesejahteraan ekonomi, sosial dan lingkungan. Sejahtera berarti masyarakat memiliki akses yang cukup terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan yang layak serta lingkungan yang bersih dan aman. Pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan di Kota Sibolga juga berarti menciptakan peluang yang adil bagi semua warga, termasuk kelompok rentan untuk berpartisipasi dan menikmati hasil dari kemajuan kota. Ini mencerminkan visi pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga meningkatkan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Sibolga tahun 2025-2029 didukung dengan 7 (tujuh) misi pembangunan daerah dengan penjabaran sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan dan efisien berorientasi pelayanan yang profesional dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan yang berbasis teknologi informasi.**

Misi ini memiliki pengertian, Pemerintah Kota Sibolga akan

melaksanakan pembangunan secara transparan, akuntabel dalam konsep Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan profesionalisme pegawai serta kualitas pengawasan. Untuk mewujudkan penyelenggaraan Kepemerintahan yang baik dan bersih perlu dilakukan langkah-langkah penataan, pembinaan dan pemberdayaan baik kelembagaan, sistem ketatalaksanaan maupun kapasitas pegawai. Selain itu Kota Sibolga akan melaksanakan konsep perencanaan, penganggaran dan pelayanan publik yang prima dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

2. Mengembangkan sistem pendidikan dan pengembangan SDM yang berorientasi pada keahlian dan keterampilan dengan dilandasi nilai-nilai agama, budaya dan berakhlak mulia yang mampu berdaya saing.

Misi ini dimaksud untuk mewujudkan pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat serta mampu menciptakan generasi penerus yang memiliki keunggulan, cerdas, terampil, mandiri dan berwawasan global sehingga memiliki daya asing dan didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

3. Meningkatkan kualitas kesehatan dan pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, terutama untuk masyarakat tidak mampu.

Misi ini dimaksud untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ditandai dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH), meningkatnya kualitas kesehatan ibu dan bayi yang diukur dengan berkurangnya Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita. Standar lain yang juga harus dicapai seperti meningkatnya status gizi masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan keluarga berencana. Berbagai kondisi ini harus dicapai dengan akses masyarakat yang baik terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau dan merata di Kota Sibolga.

4. Menciptakan peluang ekonomi berbasis wirawasta dan ekonomi kreatif bagi masyarakat, melalui pemanfaatan sumberdaya alam Kota Sibolga khususnya perikanan dan pariwisata serta potensi perbukitan.

Misi ini dimaksud untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi kreatif dan membangun jiwa kewirausahaan sebagai solusi menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mampu menunjang upaya pengentasan pengangguran dan kemiskinan daerah. Pemanfaatan potensi daya saing daerah seperti potensi kelautan/perikanan tangkap dan budidaya, sumberdaya alam wisata bukit dan sejarah, pengelolaan kawasan wisata laut di pulau poncan dan sarudik, potensi perdagangan dan jasa, potensi industri rumah tangga. Misi ini ditempuh melalui penciptaan iklim investasi ekonomi kreatif, penguatan sektor pariwisata, serta dukungan terhadap kemudahan berusaha/investasi dan penguatan UMKM untuk meningkatkan daya saing untuk mensejahterakan masyarakat.

5. Mewujudkan Sibolga yang nyaman melalui perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan unsur-unsur sejarah dan kebudayaan dengan melibatkan berbagai pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan.

Misi ini memiliki pengertian, pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan pencapaian infrastruktur untuk mencegah terjadinya kawasan kumuh, penanganan kumuh, peningkatan akses air minum dan sanitasi lingkungan dengan pertimbangan unsur sejarah dan kebudayaan Peningkatan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana, peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan mencegah terjadinya pencemaran air (sungai, laut, maupun sumber air lainnya), pencemaran udara, dan meningkatkan tutupan lahan dengan melibatkan masyarakat. Penanganan bencana untuk mengurangi perluasan banjir dan penanganan banjir termasuk penanganan bencana kebakaran merupakan hal yang juga menjadi prioritas misi ini.

6. Mewujudkan kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang berbasis kearifan lokal dan karakter budaya serta adat istiadat daerah.

Misi ini memiliki pengertian, untuk mewujudkan Sibolga yang peduli melalui upaya meningkatkan kerukunan ummat beragama dan menangani penurunan nilai-nilai moral, sosial dan budaya yang terus terjadi dimasyarakat. Melakukan berbagai upaya untuk peningkatan kesadaran masyarakat terhadap budaya tradisional. Meningkatkan pembinaan generasi muda di berbagai bidang, melalui peningkatan pembinaan organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan partisipatif, pelestarian seni budaya, berbasis kearifan lokal.

7. Melaksanakan berbagai upaya dalam menyelamatkan masyarakat dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, serta penyakit masyarakat lainnya.

Misi ini memiliki pengertian, untuk meningkatkan pembinaan generasi muda dan mempersiapkan sumber daya manusia terhindar dari penyalahgunaan narkoba dengan meningkatkan peran serta pemuka agama, tokoh masyarakat dan pemuda dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan penyakit masyarakat lainnya. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga Negara dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Lem Kambing, dan penyakit masyarakat (pekat) lainnya.

3.1.1. Penyelarasan Visi, Misi RPJMN 2025-2029, RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029 dan RPJMD Kota Sibolga Tahun 2025-2029

Visi Kepala daerah Terpilih Kota Sibolga sudah selaras dengan Visi

RPJMN 2025-2029 dan selaras terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029 dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Penyelarasan Visi RPJMN, Visi RPJMD Provinsi Sumatera Utara, dan Visi RPJMD Kota Sibolga

RPJMN 2025-2029	RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029	RPJMD Kota Sibolga 2025-2029
Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045	Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan	Mewujudkan Sibolga Peduli, Amanah dan Setia Untuk Masyarakat yang Sejahtera

Selanjutnya, Rancangan Awal RPJMD Kota Sibolga Tahun 2025–2029 disusun tidak hanya sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih, tetapi juga sebagai bentuk konkret dukungan terhadap arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Dalam hal ini, RPJMD menjadi bagian integral dari pelaksanaan agenda Asta Cita, yaitu 8 (delapan) prioritas pembangunan nasional yang meliputi:

Asta Cita 1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia
Asta Cita 2	Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
Asta Cita 3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
Asta Cita 4	Memperkuat pembangunan Sumber Daya

	Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
Asta Cita 5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Asta Cita 6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
Asta Cita 7	Memperkuat reformasi politik, hukum. dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
Asta Cita 8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

Misi RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029

Misi 1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Misi 2	Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah
Misi 3	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan tujuan pembangunan
Misi 4	Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan
Misi 5	Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh

Keterkaitan antara RPJMD Kota Sibolga, RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan Asta Cita dijabarkan secara nyata dalam misi pembangunan daerah sebagai berikut :,

Misi Pertama, Mewujudkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis, Transparan dan Efisien Berorientasi Pelayanan yang Profesional dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan yang Berbasis Teknologi Informasi mendukung Astacita 4 dan 7, Provinsi Sumatera Utara mendukung Misi 3.

Misi Kedua, Mengembangkan Sistem Pendidikan dan Pengembangan SDM yang Berorientasi pada Keahlian dan Ketrampilan dengan Dilandasi Nilai-Nilai Agama, Budaya dan Berahlak Mulia yang Mampu Berdaya Saing mendukung Astacita 1, 4 dan 6 dan Misi Provinsi Sumatera Utara 1

Misi Ketiga, Meningkatkan Kualitas Kesehatan dan Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang Terjangkau, Terutama Untuk Masyarakat Tidak Mampu mendukung Astacita 1 dan 4 dan Misi Provinsi Sumatera Utara 1

Misi Keempat, Menciptakan Peluang Ekonomi Berbasis Wiraswasta dan Ekonomi Kreatif bagi Masyarakat, melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kota Sibolga Khususnya Perikanan dan Pariwisata serta Potensi Perbukitan mendukung Astacita 2,3 dan 6 dan Prioritas Provinsi Sumatera Utara 2.

Misi Kelima, Mewujudkan Sibolga yang Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yang Berwawasan Lingkungan dengan Mempertimbangkan Unsur-Unsur Sejarah dan Kebudayaan dengan Melibatkan Berbagai Pihak untuk Berkontribusi Dalam Pembangunan mendukung Astacita 1,2,3,5 dan 6 dan Prioritas Provinsi Sumatera Utara 4.

Misi Keenam, Mewujudkan Kerukunan Kehidupan Beragama dan Budaya yang Berbasis Kearifan Lokal dan Karakter Budaya Serta Adat Istiadat Daerah mendukung Astacita 8 dan Misi Propinsi

Misi Ketujuh, Melaksanakan Berbagai Upaya Dalam Menyelamatkan Masyarakat dari Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika, serta Penyakit Masyarakat lainnya mendukung Astacita 4,7 dan 8 dan Misi Provinsi Sumatera Utara 5

3.1.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Implementasi pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Sibolga tahun 2025-2029, dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran yang disertai dengan indikator kinerjanya sebagai ukuran kinerja bersifat operasional disertai dengan indikator kinerja. Rumusan Misi kepala daerah diterjemahkan kedalam Tujuan dan Sasaran pembangunan Jangka Menengah. Secara lebih rinci, perumusan tujuan dan sasaran pada setiap misi dapat dilihat sebagai berikut.

1. Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 1

Pada Misi 1 dijabarkan kedalam satu tujuan dan empat sasaran. Tujuan pada misi ini adalah mewujudkan birokrasi profesional dan melayani. Tujuan ini dikembangkan menjadi 4 sasaran antara lain Meningkatnya Kinerja dan Keuangan Daerah yang Bersih dan Akuntabel, Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi, Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Inovatif, dan Meningkatnya Pengelolaan Manajemen ASN. Dengan fokus keempat sasaran ini, diharapkan mampu mewujudkan tata kelola yang demokrasi, transparan dan efisien, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam misi ini pemanfaatan teknologi digital menjadi aspek penting untuk meningkatkan efisiensi pelayanan serta proses perencanaan yang berbasis teknologi informasi.

Dalam mewujudkan Birokrasi yang ideal terdapat sasaran yang harus dicapai yaitu Meningkatnya Kinerja dan Keuangan Daerah

yang Bersih dan Akuntabel yang maksudnya tata kelola pemerintahan harus transparan, bebas dari korupsi serta bertanggungjawab dalam pengelolaan Sumber daya publik agar layanan publik menjadi lebih cepat, mudah diakses, efisien dan inovatif yang tentunya semua ini harus didukung oleh aparatur yang kapabel sehingga dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur negara agar mampu memberikan layanan yang profesional dan berkualitas.

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Misi 1

MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1. Mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan dan efisien berorientasi pelayanan yang professional dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan yang berbasis teknologi informasi	Terwujudnya Birokrasi yang Profesional dan Melayani	Meningkatnya Kinerja dan Keuangan Daerah yang Bersih dan Akuntabel
		Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Inovatif
		Meningkatnya Pengelolaan Manajemen ASN
		Meningkatnya Pengawasan Internal Pemerintah

2. Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 2

Penjabaran dan tujuan pada misi 2 dijabarkan kedalam satu tujuan dan dua sasaran. Tujuan pada misi ini Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkualitas secara detail digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Misi 2

MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 2. Mengembangkan sistem pendidikan dan pengembangan SDM yang	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pendidikan

MISI	TUJUAN	SASARAN
berorientasi pada keahlian dan keterampilan dengan dilandasi nilai-nilai agama, budaya dan berakhlak mulia yang mampu berdaya saing		Meningkatnya Literasi Masyarakat

Misi dua berfokus pada Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkualitas. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berorientasi pada keahlian dan ketrampilan dengan dilandasi nilai-nilai agama, budaya dan berakhlak mulia sehingga mampu berdaya saing.

Dengan kata lain SDM ini harus dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat Kota Sibolga dengan memberikan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan memperkenalkan program pendidikan yang mendukung perkembangan karakter dan soft skills dengan tujuan besarnya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Kota Sibolga. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan untuk pencapaian tujuan tersebut. Sasaran pada misi 2 meliputi Meningkatnya Kualitas Pendidikan, dan Meningkatnya Literasi Masyarakat.

Pada sasaran satu diharapkan pendidikan dan beasiswa dapat dirasakan bagi masyarakat yang kurang mampu dan berprestasi. Pada sasaran dua diharapkan masyarakat Kota Sibolga meningkatkan melek huruf. Tujuan yang konkrit dan sasaran yang terukur untuk meningkatkan Sumber daya yang unggul dan berkualitas.

3. Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 3

Pada misi ketiga yang terkait dengan kualitas dan pelayanan kesehatan dijabarkan menjadi satu tujuan dan satu sasaran secara konseptual dapat disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4 Tujuan dan Sasaran Misi 3

MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 3. Meningkatkan kualitas kesehatan dan pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, terutama untuk masyarakat tidak mampu	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Tabel diatas menunjukkan strategi kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau bagi masyarakat tidak mampu penjabaran misi ini dilihat melalui keterikatan antara misi tiga, tujuan dan sasaran. Tujuan misi tiga yaitu meningkatnya kesehatan masyarakat. Fokusnya adalah mewujudkan kualitas dan pelayanan kesehatan dapat menjamin Penguatan kapasitas dan kualitas SDM yang berfokus pada peningkatan akses pelayanan kesehatan serta penguatan peran keluarga sehingga setiap indivdu dapat menerima pelayanan kesehatan yang merata. Secara keseluruhan strategi yang digambarkan menunjukkan bahwa pembangunan kualitas dan pelayanan kesehatan tidak hanya berorientasi pada masyarakat menengah keatas tetapi juga harus memastikan kualitas dan pelayanan kesehatan mudah terjangkau bagi masyarakat yang tidak mampu.

4. Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 4

Penjabaran tujuan dan sasaran pada misi empat difokuskan pada aspek pertumbuhan ekonomi berbasis wiraswasta dan ekonomi kreatif khususnya perikanan dan pariwisata serta potensi perbukitan, sehingga pada misi empat terdiri atas satu tujuan dan empat sasaran.

Tabel 3.5 Tujuan dan Sasaran Misi 4

MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 4. Menciptakan peluang ekonomi berbasis wiraswasta dan ekonomi kreatif bagi	Terwujudnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi guna meningkatkan	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah

MISI	TUJUAN	SASARAN
masyarakat, melalui pemanfaatan sumberdaya alam Kota Sibolga khususnya perikanan dan pariwisata serta potensi perbukitan	pendapatan dan mempercepat pengurangan kemiskinan	Menurunnya Tingkat Pengangguran
		Menurunnya Angka Kemiskinan
		Menguatnya sistem pangan berbasis sumber daya alam dan kearifan local

Misi empat bertujuan Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi untuk mencapai misi empat tersebut terdapat empat sasaran yang harus dicapai yaitu Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah, Menurunnya Tingkat Pengangguran, Menurunnya angka Kemiskinan dan Menguatnya sistem pangan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal. Misi empat berfokus pada peningkatan pengelolaan dan nilai tambah diberbagai sektor termasuk perikanan, pangan, pariwisata, perindustrian, perdagangan dan UMKM. Misi ini bertujuan untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi kerakyatan, menciptakan usaha seluas-luasnya, serta meningkatkan daya saing usaha, ekonomi lokal dan ekonomi kreatif.

Dengan kata lain, pembangunan ekonomi harus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat lokal, memperkuat daya saing daerah, dan mendorong keberlanjutan usaha berbasis sumber daya setempat dengan mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Kota Sibolga.

5. Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 5

Pada misi kelima yang terkait dengan perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan unsur-unsur sejarah dan kebudayaan dengan melibatkan berbagai pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan dijabarkan menjadi satu tujuan dan dua sasaran secara konseptual dapat disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6 Tujuan dan Sasaran Misi 5

MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 5: Mewujudkan Sibolga yang nyaman melalui perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan unsur-unsur sejarah dan kebudayaan dengan melibatkan berbagai pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas, Resilensi Terhadap Bencana dan Kelestarian Lingkungan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya ketahanan dan mitigasi bencana daerah
		Meningkatnya Konektivitas Transportasi

Tujuan pada misi ini adalah Mewujudkan Sibolga yang nyaman melalui perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan unsur-unsur sejarah dan kebudayaan dengan melibatkan berbagai pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan. Tujuan ini dikembangkan menjadi tiga sasaran antara lain Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Meningkatnya ketahanan dan mitigasi bencana daerah dan Meningkatnya Konektivitas Transportasi dengan fokus ketiga sasaran ini pembangunan dilakukan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan menciptakan lingkungan yang nyaman dan sehat bagi seluruh warga Kota Sibolga dan juga melibatkan peran serta masyarakat dalam mengatasi bencana daerah serta terciptanya konektivitas transportasi yang aman dan lancar.

6. Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 6

Penjabaran dan tujuan pada misi enam dijabarkan kedalam satu tujuan dan dua sasaran. Tujuan pada misi ini Mewujudkan kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang berbasis kearifan lokal dan karakter budaya serta adat istiadat daerah secara detail digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.7 Tujuan dan Sasaran Misi 6

MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 6. Mewujudkan kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang berbasis kearifan lokal dan karekter budaya serta adat istiadat daerah	Meningkatnya toleransi dan pemahaman antar umat beragama dan budaya	Meningkatnya keamanan kerukunan umat beragama
		Meningkatnya Pelestarian Budaya

Tujuan pada pencapaian misi ini yaitu Meningkatkan toleransi dan pemahaman antar umat beragama dan budaya. Fokus terhadap pencapaian ini terdapat pada dua sasaran yaitu Meningkatkan keamanan kerukunan umat beragama dan Meningkatkan pelestarian budaya. Pencapaian pada sasaran satu diharapkan terlaksananya forum umat beragama di Kota Sibolga. Pada sasaran kedua diharapkan seluruh kegiatan ditengah masyarakat Kota Sibolga sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal.

7. Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 7

Penjabaran pada misi ketujuh yaitu Melaksanakan berbagai upaya dalam menyelamatkan masyarakat dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, serta penyakit masyarakat lainnya dapat dicapai melalui satu tujuan dan dua sasaran terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8 Tujuan dan Sasaran Misi 7

MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 7. Melaksanakan berbagai upaya dalam menyelamatkan masyarakat dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, serta penyakit masyarakat lainnya.	Terwujudnya Manusia yang berprestasi dan setara sehingga terciptanya wilayah yang aman dan tertib	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
		Meningkatnya Kesetaraan Gender serta perlindungan perempuan dan anak
		Meningkatnya Pemuda Berprestasi

MISI	TUJUAN	SASARAN
		Menurunnya aktivitas masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba

Dalam pencapaian misi ini dilaksanakan dengan tujuan yaitu Meningkatkan Kondusifitas Wilayah yang aman dan tertib, fokus pencapaian tujuan ini adalah rasa aman bagi masyarakat Kota Sibolga. Dalam pencapaian tujuan terdapat tiga sasaran yaitu Meningkatkan Kesetaraan Gender serta perlindungan perempuan dan anak, Meningkatkan Pemuda Berprestasi dan Menurunnya aktivitas masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba.

Fokus dalam pencapaian sasaran ini yaitu pembangunan karakter masyarakat Kota Sibolga yang jauh dari penyakit masyarakat lainnya dan pemerintah Kota Sibolga akan berperan aktif untuk memberikan kesempatan yang sama untuk meningkatkan partisipasi pembangunan dan berfokus pada Pemuda yang berprestasi.

Tabel 3.9 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kota Sibolga Tahun 2025-2029

VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA													
MISI		TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Misi 1. Mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan dan efisien berorientasi pelayanan yang professional dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan yang berbasis teknologi informasi	1.1	Terwujudnya Birokrasi yang Profesional dan Melayani	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	56,91 (CC)	60,15 (B)	62,35 (B)	65,45 (B)	67,30 (B)	69,50 (B)	70,15 (BB)
		1.1.1	Meningkatnya Kinerja dan Keuangan Daerah yang Bersih dan Akuntabel	2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP)	Angka	56,77 (CC)	58,78 (CC)	60,20 (B)	62,30 (B)	64,40 (B)	66,50 (B)	68,60 (B)
				3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Nilai	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		1.1.2	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi	4	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2.41	2.5	2.6	2.75	2.8	2.85	3
		1.1.3	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Inovatif	5	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,75 (B)	3,85 (B)	3,95 (B)	4,05 (A-)	4,1 (A-)	4,15 (A-)	4,2 (A-)
				6	Indeks Inovasi Daerah	Angka	B (38,64)	B (40,2)	B (42,50)	B (44,30)	B (45)	B (48)	B (50,20)
		1.1.4	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen ASN	7	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	63,20	65	66.8	68.6	70.4	72.2	74

VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA													
MISI		TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		1.1.5	Meningkatnya Pengawasan Internal Pemerintah	8	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	Rintisan (level 2)	Berkembang (Level 3)	Berkembang (Level 3)	Berkembang (Level 3)	Berkembang (Level 3)	Berkembang (Level 3)	Berkembang (Level 3)
2	Misi 2. Mengembangkan sistem pendidikan dan pengembangan SDM yang berorientasi pada keahlian dan keterampilan dengan dilandasi nilai-nilai agama, budaya dan berahlak mulia yang mampu berdaya saing	2.1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul, dan Berkualitas	9	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	77.52	78.50	79.98	81.18	82.48	83.50	84.70
		2.1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	10	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.16	13.18	13.2	13.22	13.24	13.26	13.28
				11	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10.4	10.54	10.68	10.82	10.96	11.1	11.24
		2.1.2	Meningkatnya Literasi Masyarakat	12	Indeks Pembangunan Literasi	Angka	72.96	80-89.9	80-89.9	80-89.9	80-89.9	80-89.9	80-89.9
3	Misi 3. Meningkatkan kualitas kesehatan dan pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, terutama untuk masyarakat tidak mampu	3.1	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	13	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	77.52	78.50	79.98	81.18	82.48	83.50	84.70
				14	Usia Harapan Hidup	Tahun	74.19	74.56	75.02	75.29	75.56	76.02	76.29

VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA													
MISI		TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		3.1.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	15	Indeks Keluarga Sehat	Angka	N/A	0.21	0.31	0.41	0.61	0.81	0.82
4	Misi 4. Menciptakan peluang ekonomi berbasis wiraswasta dan ekonomi kreatif bagi masyarakat, melalui pemanfaatan sumberdaya alam Kota Sibolga khususnya perikanan dan pariwisata serta potensi perbukitan	4.1	Terwujudnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi guna meningkatkan pendapatan dan mempercepat pengurangan kemiskinan	16	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,92	4.75	5.28	5.82	6.36	6.50	7
				17	Indeks Gini	Angka	0.313	0,310	0,308	0,307	0,305	0,304	0,302
		4.1.1	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah	18	Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK)	Persen	28,25	28,45	28,65	28,86	29,08	29,31	29,55
				19	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (ADHK)	Persen	5,41	5,50	5,59	5,68	5,77	5,86	5,95
		4.1.2	Menurunnya Tingkat Pengangguran	20	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,52	6.48	6,06	5,80	5,72	5,66	5,02
		4.1.3	Menurunnya Angka Kemiskinan	21	Tingkat Kemiskinan	Persen	11.32	10.50	9.85	9.20	8.55	7.90	7.25

VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA													
MISI		TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SABARAN		SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		4.1.4	Menguatnya sistem pangan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal	22	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	81.03	82.21	83.39	84.57	85.75	86.93	88.11
5	Misi 5: Mewujudkan Sibolga yang nyaman melalui perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan unsur-unsur sejarah dan kebudayaan dengan melibatkan berbagai pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan	5.1	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas, Risilensi Terhadap Bencana dan Kelestarian Lingkungan yang Berkelanjutan	23	Indeks Infrastruktur	Angka	77,75	77.9	78.2	78.7	79.2	79.7	80.2
		5.1.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	24	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	47,42	73.48	73.63	73.84	73.99	74.16	74.30
		5.1.2	Meningkatnya ketahanan dan mitigasi bencana daerah	25	Indeks Risiko Bencana	Angka	165.9	165	164	163	162	161	160
		5.1.3	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	26	Rasio Konektivitas	Persen	0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.65
6	Misi 6. Mewujudkan kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang berbasis kearifan	6.1	Meningkatnya toleransi dan pemahaman antar umat beragama dan budaya	27	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	N/A	78	80	82	84	86	87

VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA													
MISI		TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	lokal dan karekter budaya serta adat istiadat daerah	6.1.1	Meningkatnya keamanan kerukunan umat beragama	28	Persentase Fasilitasi Kasus kerukunan umat beragama	Persen	100	100	100	100	100	100	100
		6.1.2	Meningkatnya Pelestarian Budaya	29	Terlestarikannya cagar budaya	Persen	N/A	28.57	42.86	57.14	71.43	85.71	100
7	Misi 7. Melaksanakan berbagai upaya dalam menyelamatkan masyarakat dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, serta penyakit masyarakat lainnya.	7.1	Terwujudnya Manusia yang berprestasi dan setara sehingga terciptanya wilayah yang aman dan tertib	30	Indeks Rasa Aman	Angka	N/A	62	65	67	69	71	73
		7.1.1	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	31	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub urusan trantibum	Persen	N/A	82	83.70	85.40	87.10	88.80	90.30
		7.1.2	Meningkatnya Kesenjangan Gender serta perlindungan perempuan dan anak	32	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0.146	0.144	0.142	0.14	0.138	0.136	0.134
				33	Indeks Perlindungan Anak	Angka	60.16	61.31	62.46	63.61	64.76	65.91	67.06
		7.1.3	Meningkatnya Pemuda Berprestasi	34	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	N/A	62	66	69	72	76	81

VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA													
MISI		TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		7.1.4	Menurunnya aktivitas masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba	35	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100

Sumber: Data diolah

3.2. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Kota Sibolga Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 3.2.1.1 Misi 1. Mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan dan efisien berorientasi pelayanan yang professional dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan yang berbasis teknologi informasi

Strategi yang dijanjikan selama kampanye untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pertama adalah:

1. Mengembangkan sistem pemerintahan yang responsif, dinamis dan kolaboratif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan penguatan inovasi pelayanan publik;
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dalam pelayanan, penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), penerapan sistem egovernment yang terintegrasi dan inovasi layanan publik berbasis digital;
3. Optimalisasi Teknologi Informasi Dalam Mewujudkan Efisiensi Dan Efektifitas Yang Berorientasi Hasil Dan Layanan Pada Segala Aspek Layanan Publik Serta Tata Kelola Pemerintahan;
4. Penataan karir ASN sesuai dengan keahlian dan profesionalisme;
5. Peningkatan Pengawasan Internal Pemerintah.

- 5.2.1.2 Misi 2. Mengembangkan sistem pendidikan dan pengembangan SDM yang berorientasi pada keahlian dan keterampilan dengan dilandasi nilai-nilai agama, budaya dan berahlak mulia yang mampu berdaya saing

Strategi yang dijanjikan selama kampanye untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi kedua adalah:

1. Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan memperkenalkan program pendidikan yang mendukung perkembangan karakter dan soft skills;
2. Menyiapkan anggaran untuk beasiswa bagi anak yang kurang mampu dan berprestasi;
3. Peningkatan pemerataan jumlah, kualitas guru dan pengajaran pada setiap satuan Pendidikan;
4. Meningkatkan akses pendidikan dan mutu Pendidikan;
5. Peningkatan peran masyarakat yang lebih luas melalui pemberdayaan literasi.

5.2.1.3 Misi 3. Meningkatkan kualitas kesehatan dan pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, terutama untuk masyarakat tidak mampu

Strategi yang dijanjikan selama kampanye untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi ketiga adalah:

1. Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas puskesmas, rumah sakit daerah, dan klinik kesehatan daerah yang berkualitas dan modern didukung dengan sistem layanan terintegrasi;
2. Penguatan pendidikan kesehatan masyarakat untuk mendukung promotif dan preventif terutama dalam edukasi gaya hidup sehat, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, kesehatan mental serta melakukan pemeriksaan kesehatan masyarakat secara berkala;
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD dan Puskesmas dengan menyediakan peralatan dan petugas yang lebih baik;
4. Penguatan kapasitas dan kualitas SDM yang berfokus pada peningkatan akses pelayanan kesehatan serta penguatan peran keluarga;
5. Menyederhanakan sistem rujukan dan administrasi;

5.2.1.4 Misi 4. Menciptakan peluang ekonomi berbasis wiraswasta dan ekonomi kreatif bagi masyarakat, melalui pemanfaatan sumberdaya alam Kota Sibolga khususnya perikanan dan pariwisata serta potensi perbukitan

Strategi yang dijanjikan selama kampanye untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi keempat adalah:

1. Penguatan perekonomian berbasis potensi unggulan daerah disertai dengan upaya untuk mendorong ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja lokal, penciptaan tenaga kerja yang terampil, unggul dan kompetitif dengan dukungan infrastruktur ekonomi yang memadai serta pemanfaatan IPTEK namun tetap memperhatikan aspek lingkungan;
2. Pengembangan dan diversifikasi sektor ekonomi daerah melalui pengembangan sektor unggulan, diversifikasi industri dan produk lokal, pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya dan pemberdayaan UMKM dan industri kreatif;
3. Peningkatan sektor penyediaan akomodasi dan makan di Sibolga dapat dilakukan dengan mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur pariwisata, seperti memperluas dan meningkatkan kualitas fasilitas penginapan, restoran, serta tempat wisata yang mendukung kenyamanan wisatawan. Pengembangan inovasi dalam memberikan menawarkan layanan yang lebih menarik, baik dari segi fasilitas, kenyamanan, maupun keunikan produk kuliner lokal;
4. Perluasan jaringan informasi lapangan kerja melalui pemanfaatan dan pengembangan platform digital;
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan penciptaan kesempatan kerja;
6. Pengembangan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan kebun rumah tangga (urban farming) yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, terutama bagi keluarga dengan ekonomi terbatas.

5.2.1.5 Misi 5: Mewujudkan sibolga yang nyaman melalui perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan unsur-unsur sejarah dan kebudayaan dengan melibatkan berbagai pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan

Strategi yang dijanjikan selama kampanye untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi kelima adalah:

1. Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan baik air, udara maupun tanah melalui Implementasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Hidup (RPPLH) secara konsisten; dan Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, serta Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup;
2. Peningkatan kesiapsiagaan bencana melalui Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana;
3. Kelembagaan Bencana Kota; dan Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pasca bencana;
4. Pemberdayaan masyarakat dalam tanggap dan tangguh bencana;
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana transportasi.

5.2.1.6 Misi 6. Mewujudkan kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang berbasis kearifan lokal dan karekter budaya serta adat istiadat daerah

Strategi yang dijanjikan selama kampanye untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi keenam adalah:

1. Meningkatnya nilai-nilai budaya;
2. Meningkatnya nilai-nilai agama

5.2.1.7 Misi 7. Melaksanakan berbagai upaya dalam menyelamatkan masyarakat dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, serta penyakit masyarakat lainnya.

Strategi yang dijanjikan selama kampanye untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi ketujuh adalah:

1. Meningkatnya penanganan gangguan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
2. Penguatan Keluarga yang sejahtera berbasis gender;

- 3. Meningkatnya generasi muda diberbagai bidang,
- 4. Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga dan sekolah

Tabel 3.10 Strategi Pembangunan Kota Sibolga tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 1. Mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan dan efisien berorientasi pelayanan yang professional dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan yang berbasis teknologi informasi		
Terwujudnya Birokrasi yang Profesional dan Melayani	Meningkatnya Kinerja dan Keuangan Daerah yang Bersih dan Akuntabel	Mengembangkan sistem pemerintahan yang responsif, dinamis dan kolaboratif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan penguatan inovasi pelayanan publik serta peningkatan kapasitas fiskal daerah
	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dalam pelayanan, penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), penerapan sistem e-government yang terintegrasi dan inovasi layanan publik berbasis digital
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Inovatif	Optimalisasi Teknologi Informasi Dalam Mewujudkan Efisiensi Dan Efektifitas Yang Berorientasi Hasil Dan Layanan Pada Segala Aspek Layanan Publik Serta Tata Kelola Pemerintahan
	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen ASN	Penataan karir ASN sesuai dengan keahlian dan profesionalisme
	Meningkatnya Pengawasan Internal Pemerintah	Peningkatan Pengawasan Internal Pemerintah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 2. Mengembangkan sistem pendidikan dan pengembangan SDM yang berorientasi pada keahlian dan keterampilan dengan dilandasi nilai-nilai agama, budaya dan berahlak mulia yang mampu berdaya saing		
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan memperkenalkan program pendidikan yang mendukung perkembangan karakter dan soft skills
		Menyiapkan anggaran untuk beasiswa bagi anak yang kurang mampu dan berprestasi
		Peningkatan pemerataan jumlah, kualitas guru dan pengajaran pada setiap satuan Pendidikan
		Meningkatkan akses pendidikan dan mutu Pendidikan
	Meningkatnya Literasi Masyarakat	Peningkatan peran masyarakat yang lebih luas melalui pemberdayaan literasi
Misi 3. Meningkatkan kualitas kesehatan dan pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, terutama untuk masyarakat tidak mampu		
Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas puskesmas, rumah sakit daerah, dan klinik kesehatan daerah yang berkualitas dan modern didukung dengan sistem layanan terintegrasi
		Penguatan pendidikan kesehatan masyarakat untuk mendukung promotif dan preventif terutama dalam edukasi gaya hidup sehat, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, kesehatan mental serta melakukan pemeriksaan kesehatan masyarakat secara berkala

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		Meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD dan Puskesmas dengan menyediakan peralatan dan petugas yang lebih baik
		Penguatan kapasitas dan kualitas SDM yang berfokus pada peningkatan akses pelayanan kesehatan kesehatan serta penguatan peran keluarga
		Menyederhanakan sistem rujukan dan administrasi
Misi 4. Menciptakan peluang ekonomi berbasis wiraswasta dan ekonomi kreatif bagi masyarakat, melalui pemanfaatan sumberdaya alam Kota Sibolga khususnya perikanan dan pariwisata serta potensi perbukitan		
Terwujudnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi guna meningkatkan pendapatan dan mempercepat pengurangan kemiskinan	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah	Penguatan perekonomian berbasis potensi unggulan daerah disertai dengan upaya untuk mendorong ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja lokal, penciptaan tenaga kerja yang terampil, unggul dan kompetitif dengan dukungan infrastruktur ekonomi yang memadai serta pemanfaatan IPTEK namun tetap memperhatikan aspek lingkungan
		Pengembangan dan diversifikasi sektor ekonomi daerah melalui pengembangan sektor unggulan, diversifikasi industri dan produk lokal, pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya dan pemberdayaan UMKM dan industri kreatif
	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Perluasan jaringan informasi lapangan kerja melalui pemanfaatan dan pengembangan platform digital
	Menurunnya Angka Kemiskinan	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan penciptaan kesempatan kerja

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	Menguatnya sistem pangan berbasis sumber daya alam dan kearifan local	Pengembangan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan kebun rumah tangga (urban farming) yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, terutama bagi keluarga dengan ekonomi terbatas.
Misi 5: Mewujudkan Sibolga yang nyaman melalui perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan unsur-unsur sejarah dan kebudayaan dengan melibatkan berbagai pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan		
Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas, Resilensi Terhadap Bencana dan Kelestarian Lingkungan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan baik air, udara maupun tanah melalui Implementasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Hidup (RPPLH) secara konsisten; dan Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, serta Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup.
	Meningkatnya ketahanan dan mitigasi bencana daerah dan	Peningkatan kesiapsiagaan bencana melalui Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
		Kelembagaan Bencana Kota; dan Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pasca bencana.
		Pemberdayaan masyarakat dalam tanggap dan tangguh bencana
	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Peningkatan sarana dan Prasarana Transportasi
Misi 6. Mewujudkan kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang berbasis kearifan lokal dan karakter budaya serta adat istiadat daerah		
Meningkatnya toleransi dan pemahaman antar umat beragama dan budaya	Meningkatnya toleransi umat beragama	Meningkatnya nilai-nilai agama
	Meningkatnya Pelestarian Budaya	Meningkatnya nilai-nilai budaya

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 7. Melaksanakan berbagai upaya dalam menyelamatkan masyarakat dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, serta penyakit masyarakat lainnya.		
Terwujudnya Manusia yang berprestasi dan setara sehingga terciptanya wilayah yang aman dan tertib	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Meningkatnya penanganan gangguan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
	Meningkatnya Pemuda Berprestasi	Meningkatnya generasi muda diberbagai bidang
	Meningkatnya Kesetaraan Gender serta perlindungan perempuan dan anak	Penguatan Keluarga yang sejahtera berbasis gender
		Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga dan sekolah

Sumber : Data diolah

Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah memiliki nilai yang sangat strategis karena menjadi prioritas pembangunan tahunan yang dijabarkan dalam pentahapan pembangunan tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Adapun, pentahapan pembangunan tahunan Kota Sibolga Tahun 2025-2029, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penguatan perekonomian berbasis potensi unggulan daerah;
2. Penguatan kapasitas SDM, infrastruktur ekonomi dan infrastruktur layanan dasar;
3. Penguatan kebijakan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik
4. Penguatan pembangunan yang berkelanjutan dan penguatan ketahanan daerah
5. Penyediaan infrastruktur dan sarana pendukung yang andal untuk meningkatkan daya saing daerah

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan di atas, maka dirumuskan tema atau fokus

pembangunan sebagai arah yang jelas dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPJMD Tahun 2025-2029 mengacu dari Misi RPJPD Kota Sibolga Tahun 2025-2045 yaitu:

- Misi 1 : Mewujudkan transformasi Sosial untuk membangun Sumber Daya Manusia Unggul yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi
- Misi 2 : Mewujudkan transformasi ekonomi untuk Perekonomian yang Kokoh melalui Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Misi 3 : Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien
- Misi 4 : Mewujudkan masyarakat demokratis dengan penciptaan lingkungan aman dan stabilitas ekonomi makro
- Misi 5 : Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan tangguh individu, keluarga, masyarakat, pembangunan karakter dan lingkungan hidup berkelanjutan
- Misi 6 : Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan adil berbasis karakteristik wilayah
- Misi 7 : Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
- Misi 8 : Mewujudkan kesinambungan pembangunan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan, peningkatan akuntabilitas pemerataan dan pengembangan pembiayaan inovatif.

Berdasarkan penelaahan terhadap isu dan dinamika pembangunan yang akan dihadapi, maka dirumuskan tema pembangunan Kota Sibolga Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.11 Arah Kebijakan /Tahapan Pembangunan Kota Sibolga Tahun 2025-2029

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Konsolidasi dan penguatan infrastruktur dasar	Peningkatan Daya Saing dan inovatif	Peningkatan Produktifitas dan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Perlindungan Sosial Yang Inklusif dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Maju dan Berkelanjutan
Tahapan ini merupakan tahap awal pembangunan periode pertama yang bertujuan untuk memastikan pemerataan akses infrastruktur dan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Kota Sibolga. Dalam tahap ini langkah – langkah yang akan diambil meliputi : 1. Peningkatan akses Infrastruktur Dasar 2. Peningkatan Kesehatan pelayanan primer 3. Digitalisasi layanan publik 4. Penanganan Penyakit	Tahapan ini dikhususkan perwujudan aspek pendukung daya saing daerah. Peningkatan daya saing adalah modal dasar daya tarik investasi daerah yang memiliki kontribusi besar dalam percepatan pembangunan. Tahapan ini meliputi: 1. Infrastruktur, regulasi dan kestabilan daerah 2. Kualitas SDM yang kompeten dan tangguh 3. Meningkatnya kinerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih 4. Meningkatnya sistem	Tahapan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Pendekatan ini mengutamakan penguatan sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi dan daya saing tinggi seperti perikanan, industri kreatif, pariwisata dan usaha Mikro melalui berbagai langkah : 1. Penguatan sektor perikanan dan ketahanan pangan	Tahapan ini bertujuan untuk memantapkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan Pendekatan ini mengutamakan penguatan sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi dan daya saing tinggi seperti perikanan, industri kreatif, pariwisata dan usaha Mikro melalui berbagai langkah : 1. Penguatan sektor perikanan dan ketahanan pangan 2. Pengembangan Industri kreatif dan pariwisata 3. Penguatan kapasitas	Tahapan ini merupakan tanggung jawab pemimpin daerah yang difokuskan pada capaian pembangunan yang maju dan stabil hal ini ditandai dengan Kualitas SDM, Tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran, Kesenjangan Gender dan kualitas Lingkungan Hidup yang akan setara dengan capaian rata-rata Provinsi Sumatera Utara

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
masyarakat	pelayanan publik yang inovatif 5. Digitalisasi pelayanan publik kualitas SDM yang kompeten dan tangguh	2. Pengembangan Industri kreatif dan pariwisata 3. Penguatan kapasitas usaha mikro dan sektor informal 4. Implementasi ekonomi berkelanjutan 5. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 6. Koperasi Merah Putih	usaha mikro dan sektor informal 4. Implementasi ekonomi berkelanjutan 5. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 6. Pemberdayaan Koperasi Merah Putih	

Sumber: Data diolah

Tabel 3.12 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Sibolga Tahun 2025-2029

VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA				
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Misi 1. Mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan dan efisien berorientasi pelayanan yang professional dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan yang berbasis teknologi informasi	Terwujudnya Birokrasi yang Profesional dan Melayani	Meningkatnya Kinerja dan Keuangan Daerah yang Bersih dan Akuntabel	Mengembangkan sistem pemerintahan yang responsif, dinamis dan kolaboratif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan penguatan inovasi pelayanan publik serta peningkatan kapasitas fiskal daerah	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
				Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, serta kualitas pengawasan pengguna anggaran
				Peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan penguatan tata kelola kelembagaan serta penerapan merit sistem;
		Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dalam pelayanan, penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), penerapan sistem e-government yang terintegrasi dan inovasi layanan publik berbasis digital	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi dengan penerapan riset dan inovasi
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Inovatif	Optimalisasi Teknologi Informasi Dalam Mewujudkan Efisiensi Dan Efektifitas Yang Berorientasi Hasil Dan Layanan Pada Segala Aspek Layanan Publik Serta Tata Kelola	Percepatan digitalisasi layanan publik yang terintegrasi berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mewujudkan layanan yang mudah, cepat, transparan, dan akuntabel

VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA				
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			Pemerintahan	
			Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dalam pelayanan, penguatan infrastruktur, teknologi dan informasi, penerapan sistem government yang terintegrasi dan inovasi layanan publik berbasis digital	Penguatan kapasitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit, manajemen talenta, dan peningkatan kesejahteraan berbasis kinerja
		Meningkatnya Pengelolaan Manajemen ASN	Penataan karir ASN sesuai dengan keahlian dan profesionalisme	Percepatan reformasi birokrasi menuju birokrasi yang adaptif, berdampak, dan berorientasi pada pelayanan publik prima
		Meningkatnya Pengawasan Internal Pemerintah	Peningkatan Pengawasan Internal Pemerintah	Peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan penguatan tata kelola kelembagaan serta penerapan merit sistem;
Misi 2. Mengembangkan sistem pendidikan dan pengembangan SDM yang berorientasi pada keahlian dan keterampilan dengan dilandasi nilai-nilai agama, budaya dan berahlak mulia yang mampu berdaya saing	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan memperkenalkan program pendidikan yang mendukung perkembangan karakter dan soft skills	Peningkatan peran dan fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah
			Menyiapkan anggaran untuk beasiswa bagi anak yang kurang mampu dan berprestasi	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar pendidikan, pemanfaatan teknologi informasi, pemenuhan dan peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan serta sarana prasarana Pendidikan
				Bantuan beasiswa bagi anak kurang mampu yang berprestasi

VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA				
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			Peningkatan pemerataan jumlah, kualitas guru dan pengajaran pada setiap satuan Pendidikan	Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan, melalui pemerataan dan peningkatan kompetensi serta penyediaan insentif berbasis kinerja
			Meningkatkan akses pendidikan dan mutu Pendidikan	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, literasi digital, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)
				Peningkatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik melalui penguatan sistem pembinaan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang berkelanjutan; dan penguatan ekosistem pembelajaran literasi dan numerasi yang berbasis satuan pendidikan dan komunitas
				Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun dan Pemerataan Akses Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah,
				Peningkatan peran keluarga dan komunitas dalam menciptakan lingkungan pendidikan dan pembelajaran yang baik untuk mendukung peningkatan partisipasi sekolah
		Meningkatnya Literasi Masyarakat	Peningkatan peran masyarakat yang lebih luas melalui pemberdayaan	Pemerintah Kota Sibolga menyusun panduan literasi dalam pembelajaran untuk mengembangkan pengetahuan dan

VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA				
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			literasi	kemampuan berpikir kritis peserta didik.
				Pengembangan Perpustakaan sekolah dengan pemilihan buku bermutu, penjenjangan buku sesuai dengan kemampuan baca anak, serta pelatihan pendampingan bagi guru di sekolah penerima buku.
Misi 3. Meningkatkan kualitas kesehatan dan pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, terutama untuk masyarakat tidak mampu	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas puskesmas, rumah sakit daerah, dan klinik kesehatan daerah yang berkualitas dan modern didukung dengan sistem layanan terintegrasi	Peningkatan Rumah Sakit Umum dan Layanan Kesehatan Tingkat Pertama
			Penguatan pendidikan kesehatan masyarakat untuk mendukung promotif dan preventif terutama dalam edukasi gaya hidup sehat, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, kesehatan mental serta melakukan pemeriksaan kesehatan masyarakat secara berkala	Edukasi mengenai gaya hidup sehat, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, serta kesehatan mental
			Meningkatkan pelayanan kesehatan di	Pengembangan layanan kesehatan rujukan

VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA				
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			RSU dan Puskesmas dengan menyediakan peralatan dan petugas yang lebih baik	Percepatan penurunan stunting dan eliminasi penyakit menular melalui intervensi terintegrasi lintas sektor
			Penguatan kapasitas dan kualitas SDM yang berfokus pada peningkatan akses pelayanan kesehatan kesehatan serta penguatan peran keluarga	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat berbasis komunitas, termasuk percepatan akses air minum, sanitasi layak
			Menyederhanakan sistem rujukan dan administrasi	Penguatan layanan kesehatan primer dan rujukan berbasis teknologi digital menuju sistem pelayanan kesehatan universal dan berkualitas
Misi 4. Menciptakan peluang ekonomi berbasis wiraswasta dan ekonomi kreatif bagi masyarakat, melalui pemanfaatan sumberdaya alam Kota Sibolga khususnya perikanan dan pariwisata serta potensi perbukitan			Terwujudnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi guna meningkatkan pendapatan dan mempercepat pengurangan kemiskinan	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah
			Pengembangan dan diversifikasi sektor ekonomi daerah melalui pengembangan sektor unggulan, diversifikasi industri dan produk lokal, pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya dan pemberdayaan UMKM dan industri kreatif	Identifikasi dan pengembangan sektor ekonomi yang memiliki potensi pertumbuhan
		Menurunnya Tingkat Pengangguran	Peningkatan sektor penyediaan akomodasi dan makan di	Peningkatan Produktivitas Sumber Daya Pariwisata dan Pelaku Sektor Industri Kreatif

VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA				
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			Sibolga dapat dilakukan dengan mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur pariwisata, seperti memperluas dan meningkatkan kualitas fasilitas penginapan, restoran, serta tempat wisata yang mendukung kenyamanan wisatawan. Pengembangan inovasi dalam memberikan menawarkan layanan yang lebih menarik, baik dari segi fasilitas, kenyamanan, maupun keunikan produk kuliner lokal.	Memperkenalkan potensi wisata Sibolga melalui berbagai media promosi, Pengembangan dan perbaikan fasilitas di tempat-tempat wisata
		Menurunnya Tingkat Pengangguran	Perluasan jaringan informasi lapangan kerja melalui pemanfaatan dan pengembangan platform digital	Peningkatan kualitas tenaga kerja yang unggul, terampil dan kompetitif sesuai kebutuhan pasar kerja; Fasilitasi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi penduduk Kota Sibolga Fasilitasi pemenuhan jaminan sosial bagi tenaga kerja
		Menguatnya sistem pangan berbasis sumber daya alam dan kearifan local	Pengembangan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan kebun rumah tangga (urban farming) yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, terutama	Melakukan edukasi dan Peningkatan peran partisipasi masyarakat dalam pengembangan urban farming

VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA				
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			bagi keluarga dengan ekonomi terbatas.	
Misi 5: Mewujudkan sibolga yang nyaman melalui perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan unsur-unsur sejarah dan kebudayaan dengan melibatkan berbagai pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas, Resilensi Terhadap Bencana dan Kelestarian Lingkungan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan baik air, udara maupun tanah melalui Implementasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Hidup (RPPLH) secara konsisten; dan Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, serta Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup.	Menjaga kelestarian lingkungan hidup agar memiliki ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, serta meningkatkan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		Meningkatnya ketahanan dan mitigasi bencana daerah	Peningkatan kesiapsiagaan bencana melalui Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Penguatan perencanaan dan pengendalian tata ruang berbasis pembangunan berkelanjutan;
			Kelembagaan Bencana Kota; dan Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pasca bencana.	Optimalisasi dan integrasi sistem drainase dan peningkatan kapasitas dan kondisi saluran
				Meningkatkan ketertiban dan keselamatan berlalulintas
			Pemberdayaan masyarakat dalam tangguh bencana	Memfasilitasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran
				Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi

VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA				
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
				masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
				Melengkapi sarana prasarana dalam penanganan bencana
				Memberikan edukasi dalam siaga bencana
			Peningkatan sarana dan Prasarana Transportasi	Peningkatan Jalan dan Penyediaan perlengkapan jalan
Misi 6. Mewujudkan kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang berbasis kearifan lokal dan karekter budaya serta adat istiadat daerah	Meningkatnya toleransi dan pemahaman antar umat beragama dan budaya	Meningkatnya toleransi umat beragama	Meningkatnya nilai-nilai agama	Penguatan dukungan dan pemberdayaan forum keagamaan dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga kerukunan dan solidaritas
				Peningkatan silaturahmi antar kelembagaan melalui memperkuat dialog antar kelompok dengan forum-forum terbuka yang mengedepankan saling pengertian dan toleransi.
		Meningkatnya Pelestarian Budaya	Meningkatnya nilai-nilai budaya	Pelestarian cagar budaya dan kesenian tradisional
Misi 7. Melaksanakan berbagai upaya dalam menyelamatkan masyarakat dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, serta penyakit masyarakat lainnya.	Terwujudnya Manusia yang berprestasi dan setara sehingga terciptanya wilayah yang aman dan tertib	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Meningkatnya penanganan gangguan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Peningkatan sinergitas penanganan gangguan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
		Meningkatnya Kesetaraan Gender serta perlindungan perempuan dan anak	Penguatan Keluarga yang sejahtera berbasis gender	Pengurusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Peningkatan perlindungan terhadap anak dan perempuan

VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA				
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga dan sekolah	Penyelenggaraan program pendidikan multikultural untuk menanamkan nilai-nilai saling menghargai perbedaan sejak dini, baik di sekolah maupun di masyarakat.
				Penguatan layanan perlindungan melalui fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Perempuan dan Anak, pengembangan pusat layanan terpadu dan peningkatan layanan konseling dan dukungan psikososial
		Meningkatnya Pemuda Berprestasi	Meningkatnya generasi muda diberbagai bidang	Melaksanakan even kepemudaan
		Menurunnya aktivitas masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotika	Menguatkan kerjasama dengan aparat hukum	Kampanye pencegahan dan penyuluhan Narkoba
				Menyediakan program rehabilitasi bagi pengguna narkoba

Sumber: Data diolah

5.2.2 Prioritas Pembangunan

Program prioritas pembangunan Daerah merupakan sekumpulan program yang bersifat strategik yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan Daerah. Perumusan program prioritas Daerah sangat erat hubungannya dengan janji politik yang telah dirumuskan di dalam Visi dan Misi yang kemudian dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran RPJM Daerah. Di dalam Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga 2025-2029, terdapat Program Prioritas Pembangunan Daerah yang dikelompokkan melalui pendekatan Slogan Pembangunan

berupa 7 (Tujuh) Program Unggulan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Sibolga Cerdas dan Berkarakter

Prioritas pada penguatan fasilitas layanan dan sistem penyelenggaraan pendidikan, akses pendidikan bagi anak kurang mampu yang berprestasi, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, peningkatan seni budaya dan karakter;

2. Sibolga Sehat

Prioritas pada penguatan pada penyelenggara fasilitas dan sistem penyelenggaraan kesehatan yang merata, percepatan penurunan stunting, peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, peningkatan pemberdayaan anak dan perempuan.

3. Sibolga Ekonomi Bangkit

Prioritas pada upaya peningkatan investasi daerah, pengembangan potensi unggulan daerah, pengembangan sarana dan prasarana perdagangan dan UMKM, pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Penurunan angka pengangguran dan angka kemiskinan.

4. Sibolga Infrastruktur Kuat

Prioritas pada optimalisasi kualitas layanan infrastruktur daerah.

5. Sibolga Religius

Prioritas pada mendorong harmonisasi dalam kehidupan, beragama, masyarakat dalam penguatan SDM dan fasilitasi sarana dan prasarana keagamaan.

6. Sibolga Pemerintahan Bersih

Prioritas pada percepatan proses transparansi birokrasi, peningkatan kualitas SDM

7. Sibolga Nyaman dan Seimbang

Penguatan gerakan keberlanjutan lingkungan dan penguatan tangguh bencana serta Meningkatnya rasa aman di wilayah Kota Sibolga

Langkah langkah Program dalam mendorong tercapainya Program Prioritas Daerah termuat dalam Program Hasil Terbaik Cepat (Quick

Wins) yang terdiri dari :

1. Beasiswa bagi pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa yang kurang mampu dan berprestasi
2. Fasilitasi pelayanan kesehatan gratis
3. Fasilitasi pemberian makanan bergizi
4. Pengembangan pasar tradisional
5. Penguatan UMKM
6. Fokus pada penanganan banjir dan rumah layak huni
7. Peningkatan kegiatan keagamaan bagi siswa SD dan SMP
8. Penguatan Birokrasi
9. Fasilitasi Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih
10. Dukungan Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat

Prioritas program pembangunan daerah dalam pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Sibolga tahun 2025-2029 memperhatikan program-program prioritas yang dicanangkan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Jenis program yang menjadi prioritas Walikota dan Wakil Walikota pada RPJMD Kota Sibolga tahun 2025-2029 yang disinkronkan dengan program nomenklatur perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13 Pemetaan Program Prioritas RPJMD Kota Sibolga Tahun 2025-2029

VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA									
VISI/MISI		TUJUAN/SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR		SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN BIDANG
1	Misi 1. Mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan dan efisien berorientasi pelayanan yang professional dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan yang berbasis teknologi informasi	1.1	Terwujudnya Birokrasi yang Profesional dan Melayani	Pemerintahan yang lebih baik	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka		
		1.1.1	Meningkatnya Kinerja dan Keuangan Daerah yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja	2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP)	Angka	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Setiap Perangkat Daerah
					3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Nilai	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan
		1.1.2	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Digitalisasi Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	4	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	Program Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik	Komunikasi dan Informatika
		1.1.3	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Inovatif	Meningkatnya pelayanan publik daerah	5	Indeks Pelayanan Publik	Angka	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah
								Program Pendaftaran Penduduk	Administrasi dan Pencatatn Sipil
								Program Pencatatan Sipil	Administrasi dan Pencatatn Sipil

VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA									
VISI/MISI		TUJUAN/SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR		SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN BIDANG
								Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Administrasi dan Pencatatn Sipil
								Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
								Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal
								Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Ketertiban Umum Sub Kebakaran
				Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah	6	Indeks Inovasi Daerah	Angka	Program Riset dan Inovasi Daerah	Penelitian dan Pengembangan
		1.1.4	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen ASN	Meningkatnya Tata kelola pengembangan Profesionalitas ASN	7	Indeks ASN Profesionalitas	Angka	Program Kepegawaian Daerah	Kepegawaian

VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA									
VISI/MISI		TUJUAN/SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR		SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN BIDANG
		1.1.5	Meningkatnya Pengawasan Internal Pemerintah	Meningkatnya pengawasan	8	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pengawasan
2	Misi 2. Mengembangkan sistem pendidikan dan pengembangan SDM yang berorientasi pada keahlian dan keterampilan dengan dilandasi nilai-nilai agama, budaya dan berahlak mulia yang mampu berdaya saing	2.1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas dan	Meningkatnya kualitas pendidikan	9	Indeks Pembangunan Manusia	Angka		
		2.1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Meningkatnya angka partisipasi masyarakat terhadap Pendidikan	10	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
								Program Pengembangan Kurikulum	Pendidikan
								Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan
					11	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
								Program Pengembangan Kurikulum	Pendidikan
								Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan

VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA									
VISI/MISI		TUJUAN/SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR		SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN BIDANG
3		2.1.2	Meningkatnya Literasi Masyarakat	Meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi	12	Indeks Pembangunan Literasi	Angka	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Perpustakaan
								Program Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan
	Misi 3. Meningkatkan kualitas kesehatan dan pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, terutama untuk masyarakat tidak mampu	3.1	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas Hidup	13	Indeks Pembangunan Manusia	Angka		
					14	Usia Harapan Hidup	Tahun		
		3.1.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Keluarga Sehat	15	Indeks Keluarga Sehat	Angka	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kesehatan
								Program Pembinaan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan KB
								Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pengendalian Penduduk dan KB

VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA									
VISI/MISI		TUJUAN/SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR		SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN BIDANG
4	Misi 4. Menciptakan peluang ekonomi berbasis wiraswasta dan ekonomi kreatif bagi masyarakat, melalui pemanfaatan sumberdaya alam Kota Sibolga khususnya perikanan dan pariwisata serta potensi perbukitan	4.1	Terwujudnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi guna meningkatkan pendapatan dan mempercepat pengurangan kemiskinan	Meningkatnya Nilai Pertumbuhan Ekonomi	16	Pertumbuhan Ekonomi	Persen		
				Menurunnya tingkat kesenjangan	17	Indeks Gini	Angka		
		4.1.1	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah	Meningkatnya Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18	Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK)	Persen	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
				Meningkatnya Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	19	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (ADHK)	Persen	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pariwisata
		4.1.2	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Meningkatnya ketrampilan dan kemampuan kerja	20	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
								Program Penempatan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
								Program Hubungan Industrial	Tenaga Kerja

VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA										
VISI/MISI		TUJUAN/SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR		SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN BIDANG	
								Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
								Program Pengembangan UMKM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
								Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
								Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pariwisata	
								Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pariwisata	
								Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Perdagangan	
		4.1.3	Menurunnya Angka Kemiskinan	Menurunnya tingkat kemiskinan	21	Tingkat Kemiskinan	Persen	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA									
VISI/MISI		TUJUAN/SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR		SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN BIDANG
								Program Pengembangan UMKM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
								Program Pemberdayaan Sosial	Sosial
								Program Rehabilitasi Sosial	Sosial
								Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial
								Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
								Program Penempatan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
								Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pariwisata
								Program Pemasaran Pariwisata	Pariwisata
								Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Perumahan dan Kawasan Permukiman
								Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pekerjaan umum dan Penataan Ruang

VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA									
VISI/MISI		TUJUAN/SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR		SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN BIDANG
								Program Pengelolaan dan Pengembnagan Sistem Penyediaan Air minum	Pekerjaan umum dan Penataan Ruang
								Program Stabilisasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan barang penting	Perdagangan
								Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
								Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		4.1.3	Menguatnya sistem pangan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal	Meningkatnya kemandirian dan keamanan pangan	22	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	Program Peningkatan Diservikasi dan ketahanan Pangan Masyarakat	Pangan
								Program Penanganan Kerawanan Pangan	Pangan

VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA									
VISI/MISI		TUJUAN/SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR		SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN BIDANG
5	Misi 5. Mewujudkan Sibolga yang nyaman melalui perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan unsur-unsur sejarah dan kebudayaan dengan melibatkan berbagai pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan	5.1	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas, Resilensi Terhadap Bencana dan Kelestarian Lingkungan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	23	Indeks Infrastruktur	Angka		
		5.1.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan Hidup	24	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
								Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Lingkungan Hidup
		5.1.2	Meningkatnya ketahanan dan mitigasi bencana daerah	Meningkatnya Penanganan Kedaruratan bencana yang sesuai standar	25	Indeks Risiko Bencana	Angka	Program Penanggulangan Bencana	Ketentraman dan Ketertiban Umum sub Bencana
								Program penanganan Bencana	Sosial
		5.1.3	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Meningkatnya kelancaran transportasi	26	Rasio Konektivitas	Persen	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Perhubungan

VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA									
VISI/MISI		TUJUAN/SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR		SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN BIDANG
								Program Pelayaran	Perhubungan
								Program Penyelenggaraan Jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Misi 6. Mewujudkan kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang berbasis kearifan lokal dan karakter budaya serta adat istiadat daerah	6.1	Meningkatnya toleransi dan pemahaman antar umat beragama dan budaya	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama di Kota Sibolga	27	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka		
		6.1.1	Meningkatnya keamanan kerukunan umat beragama	Meningkatnya forum kerukunan dan toleransi	28	Persentase Fasilitasi Kasus kerukunan umat beragama	Persen	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Kesatuan Bangsa dan Politik
								Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kesatuan Bangsa dan Politik
		6.1.2	Meningkatnya Pelestarian Budaya	Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan daerah	29	Terlestarikannya cagar budaya	Persen	Program Pengembangan Kebudayaan	Kebudayaan
								Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Kebudayaan

VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA									
VISI/MISI		TUJUAN/SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR		SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN BIDANG
7	Misi 7. Melaksanakan berbagai upaya dalam menyelamatkan masyarakat dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, serta penyakit masyarakat lainnya.	7.1	Terwujudnya Manusia yang berprestasi dan setara sehingga terciptanya wilayah yang aman dan tertib	Meningkatnya Rasa aman di Kota Sibolga	30	Indeks Rasa Aman	Angka		
		7.1.1	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Meningkatnya penanganan gangguan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	31	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub urusan trantibum	Angka	Program Peningkatan dan Ketertiban Umum	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
								Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan
		7.1.2	Meningkatnya Kesetaraan Gender serta perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya Kesetaraan Gender serta Pemenuhan hak anak	32	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	Program Pengurustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
								Program Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	33				Indeks Perlindungan Anak	Angka	Program Perlindungan Khusus Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA									
VISI/MISI		TUJUAN/SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR		SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN BIDANG
								Program Pemenuhan hak Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		7.1.3	Meningkatnya Pemuda Berprestasi	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	34	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	Program Kapasitas daya Saing Kepemudaan	Kepemudaan dan Olahraga
		7.1.4	Menurunnya aktivitas masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba	Menurunnya aktivitas terhadap narkoba	35	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persen	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Kesatuan bangsa dan Politik

Sumber: Data diolah

Untuk mewujudkan visi “Mewujudkan Sibolga Peduli, Amanah, Setia untuk masyarakat yang Sejahtera” dan mendukung prioritas nasional Zuntuk pencapaian sasaran utama Pembangunan RPJMD Kota Sibolga tahun 2025-2029 yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi dari 4,75 persen pada tahun 2025 menjadi 6,50 persen pada tahun 2029;
2. Peningkatan PDRB Per Kapita dari 81,16 Juta Rupiah pada tahun 2025 menjadi 116,95 Juta Rupiah pada tahun 2029;
3. Peningkatan kontribusi PDRB Kota Sibolga terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara 0,63 persen dari tahun 2025 sampai dengan 2029;
4. Penurunan tingkat kemiskinan dari 10,50 persen pada tahun 2025 menjadi 7,90 persen pada tahun 2029;
5. Rasio Gini dari 0,310 poin pada tahun 2025 menjadi 0,304 poin pada tahun 2029;
6. Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan sebesar 78,50 persen menjadi 83,50 persen ditahun 2029;
7. Penurunan Emisi GRK yang ditargetkan sebesar 80777,69 TonCo2eq di tahun 2025 menjadi 133701.77 TonCo2eq pada tahun 2029;
8. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah yang ditargetkan 73,48 di tahun 2025 menjadi 74,16 pada tahun 2029;
9. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka dari 6,48 persen menjadi 5,66 persen pada tahun 2029;

Tabel 3.14 Penyeragaman sasaran pembangunan RPJMD Kota Sibolga dengan Sasaran Pembangunan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

No	RPJMN tahun 2025-2029 (Sasaran Per Provinsi)			RPJMD Provinsi tahun 2025-2029			RPJMD Kota Sibolga tahun 2025-2029						
	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Indikator	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5.3	7.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5.3	7.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	4.75	5.28	5.82	6.36	6.50	7
2	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	78.4	115.3	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	78.4	115.3	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	81.16	90.10	95.05	108.03	116.95	120.35
3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	5.2	5.3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	5.2	5.3	Kontribusi PDRB Kab/ Kota (%)	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96 - 7,46	2,82 - 3,82	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96 - 7,46	2,82 - 3,82	Tingkat Kemiskinan (%)	10,50	9.85	9.20	8.55	7.90	7.25
5	Rasio Gini	0,303 - 0,305	0,287 - 0,291	Rasio Gini	0,303 - 0,305	0,287 - 0,291	Rasio Gini	0,310	0.308	0.307	0.305	0,304	0,302
6	Indeks Modal Manusia	0.54	0.57	Indeks Modal Manusia	0.54	0.57	IPM	78.50	79.98	81.18	82.48	83.50	84.70
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1	16.88	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1	16.88	Penurunan Emisi GRK (TonCo2eq)	80777.69	93868.45	107789.67	121507.77	133701.77	136051.77
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77.2	77.87	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77.2	77.87	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	73.48	73.63	73.84	73.99	74.16	74.30
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 - 5,56	4,74 - 5,20	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 - 5,20	4,74 - 5,20	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,48	6.06	5.80	5.72	5,66	5,02

Sumber: Data diolah

3.3 Highlight Intervensi Program Kegiatan Provinsi di Kota Sibolga

Wilayah Pengembangan Barat: termasuk kota-kota dengan aktivitas pelabuhan seperti Sibolga dan mendukung industri perikanan serta pariwisata.

Kota Sibolga berstatus Pusat Kegiatan Wilayah dengan volume lalu lintas sedang dan dominasi lalu lintas pelabuhan, berfungsi sebagai hub logistik regional yang mendukung pengolahan ikan dan seafood. Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Humbang Hasundutan, tersebar PKL di Barus, Pandan, Tarutung, Siborong-borong, dan Dolok Sanggul. Kabupaten-kabupaten ini memiliki volume lalu lintas sedang dan dominasi lalu lintas pertanian, mendukung industri lokal, pengolahan hasil pertanian dan pariwisata.

Untuk memastikan pembangunan yang terarah, Sembilan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) tersebar di Tebingtinggi, Pematangsiantar, Kisaran, Balige, Sidikalang, Sibolga, Padangsidimpuan, Rantauprapat, dan Gunungsitoli, yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi regional.

Peningkatan Infrastruktur

Kota Sibolga Pembangunan menjadi lokasi strategis untuk pusat distribusi dan gudang logistik bersama dengan lokasi lainnya seperti Medan, Deli Serdang, Tebingtinggi, Serdang Bedagai, Tanjungbalai, Batu Bara, Pematangsiantar, Simalungun, Padangsidimpuan, Tapanuli Utara, Nias Selatan, dan Gunungsitoli. Pengembangan pelabuhan dan jalan lintas untuk mendukung pariwisata dan industri; Membangun hub logistik dan fasilitas *cold storage* di sepanjang rute untuk mendukung rantai pasok pertanian.

Posisi Kota Sibolga dalam Pengembangan Kawasan Sumatera Utara

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, pengembangan Kawasan di Sumatera Utara terbagi atas a) Kawasan Pertumbuhan, b) Kawasan Komoditas Unggulan, c) Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi, d) Kawasan Afirmasi dan e) Kawasan Konservasi/ Rawan Bencana.

Kota Sibolga masuk dalam Kawasan Pertumbuhan dengan Lokasi Prioritas dan indikasi intervensi sebagai berikut:

Perkotaan Sibolga-Pandan-Padangsidimpuan

Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Sibolga-Pandan-Padangsidimpuan, antara lain melalui:

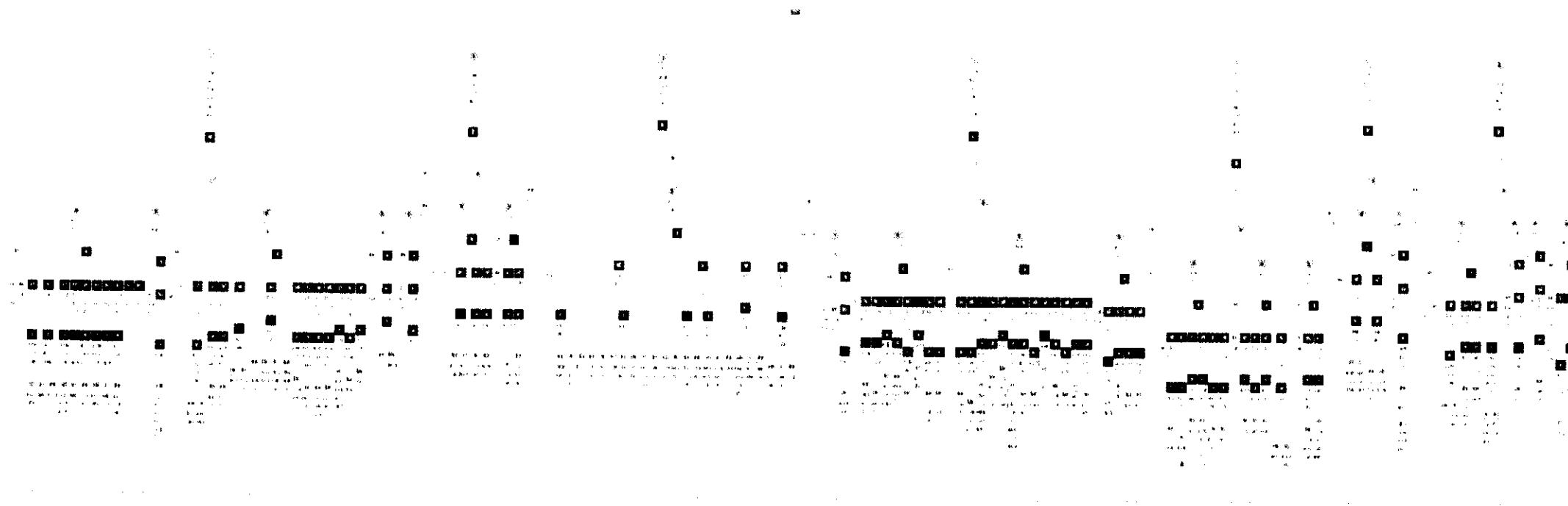
1. Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Sibolga-Pandan-Padangsidimpuan (PHTC)
2. Pengembangan SPAM Regional Sibolga-Pandan
3. Pengembangan pelabuhan perikanan PPN Sibolga
4. Pengembangan Pelabuhan Sibolga
5. Preservasi jalan ruas Sibolga – Pandan- Padangsidimpuan, Sibolga – Tarutung.

Tabel. 3.15 Penyeragaman Arah Pembangunan RPJMD Kota Sibolga 2025-2029 dengan Arah Pembangunan RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

No	RPJMN 2025-2029	RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029	RPJM Kota Sibolga 2025-2029
	Arah Pembangunan Kewilayahan (Arah per Provinsi)	Strategi dan Arah Kebijakan	Strategi dan Arah Kebijakan
	Kawasan Perkotaan Sibolga-Pandan-Padangsampung	Pemerataan Sarana Prasarana Ekonomi	Penguatan perekonomian berbasis potensi unggulan daerah disertai dengan upaya untuk mendorong ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja lokal, penciptaan tenaga kerja yang terampil, unggul dan kompetitif dengan dukungan infrastruktur ekonomi yang memadai serta pemanfaatan IPTEK dengan memperhatikan aspek lingkungan
	- Kota Sibolga - Kabupaten Tapanuli Tengah - Kota Sidempuan	Meningkatnya promosi unggulan daerah dan memperluas kemitraan strategis lintas sector	Penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
		Mendorong pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung pelabuhan perikanan	Meningkatnya Konektivitas Transportasi
		Meningkatnya kapasitas pelaku usaha perikanan	Peningkatan sarana dan Prasarana Transportasi
		Memperluas konektivitas dan aksesibilitas wilayah	

No	RPJMN 2025-2029	RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029	RPJM Kota Sibolga 2025-2029
	Arah Pembangunan Kewilayahan (Arah per Provinsi)	Strategi dan Arah Kebijakan	Strategi dan Arah Kebijakan
		Meningkatnya kualitas dan jangkauan infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah	

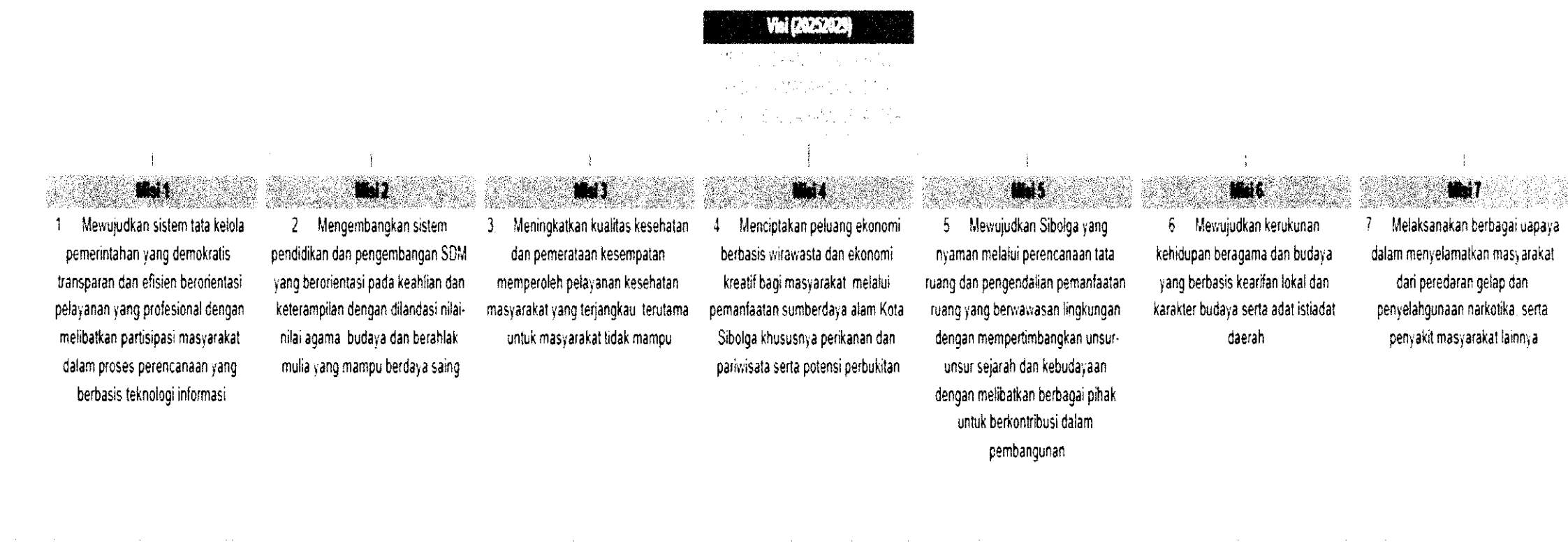
Cascading RPJMD dapat dilihat sebagai berikut ini :

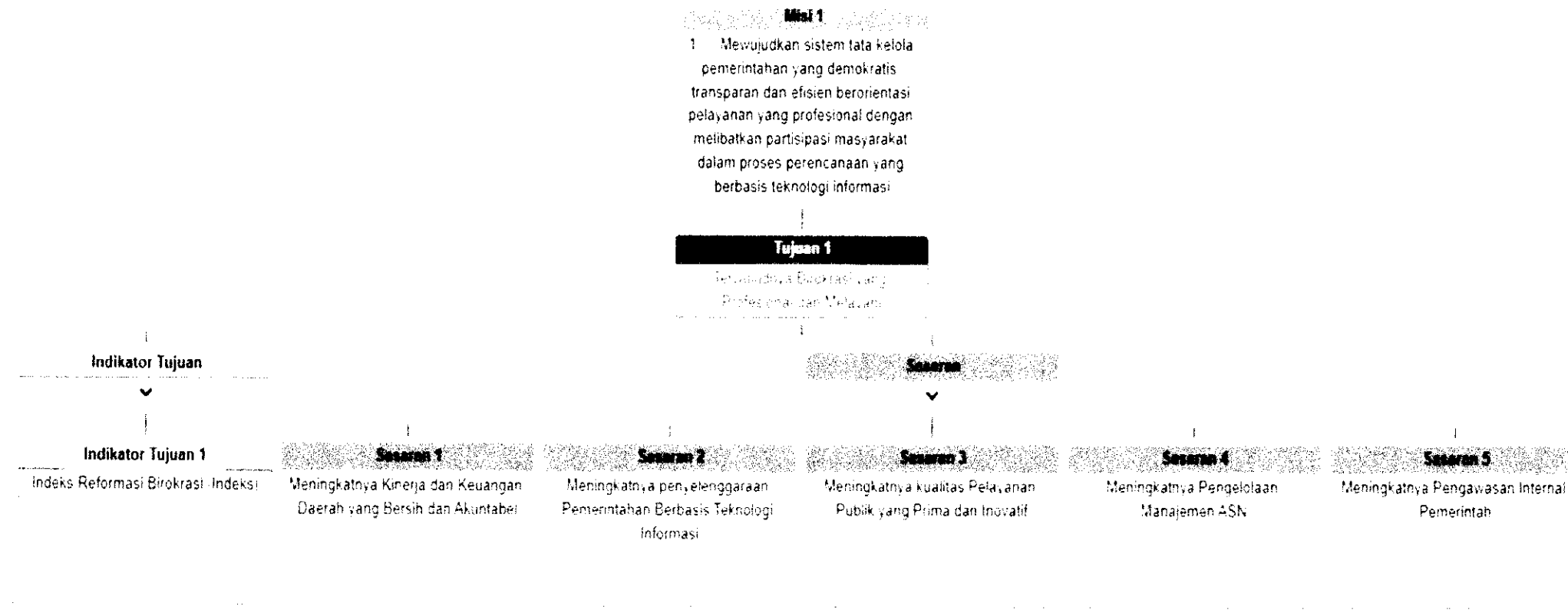


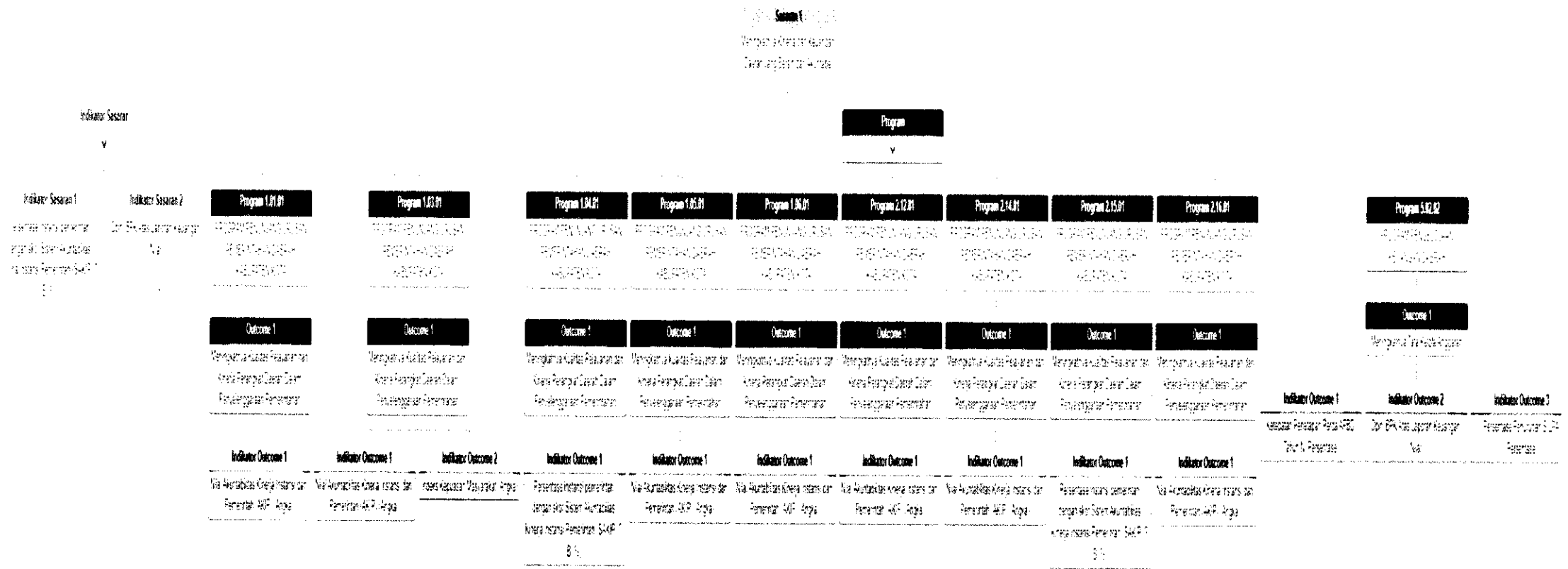
Gambar 3.1 Cascading RPJMD Kota Sibolga

Sumber : SIPD RI

Untuk lebih jelas, Cascading dapat dilihat dapat dilihat sebagai berikut







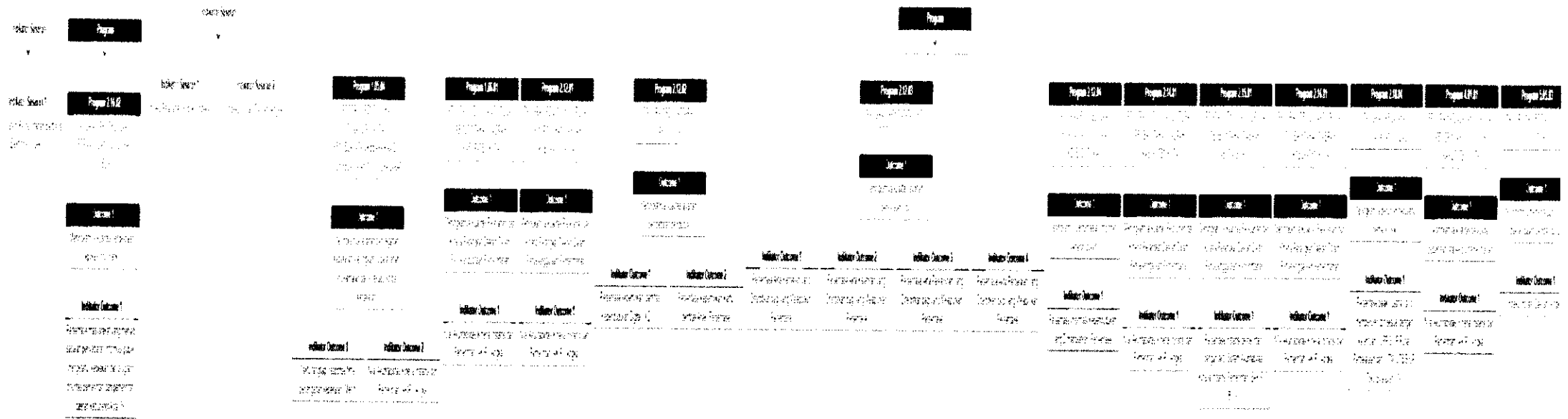
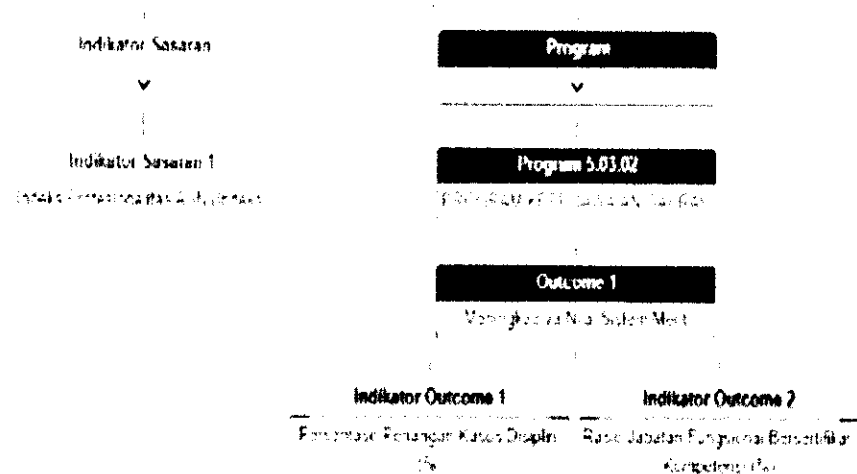
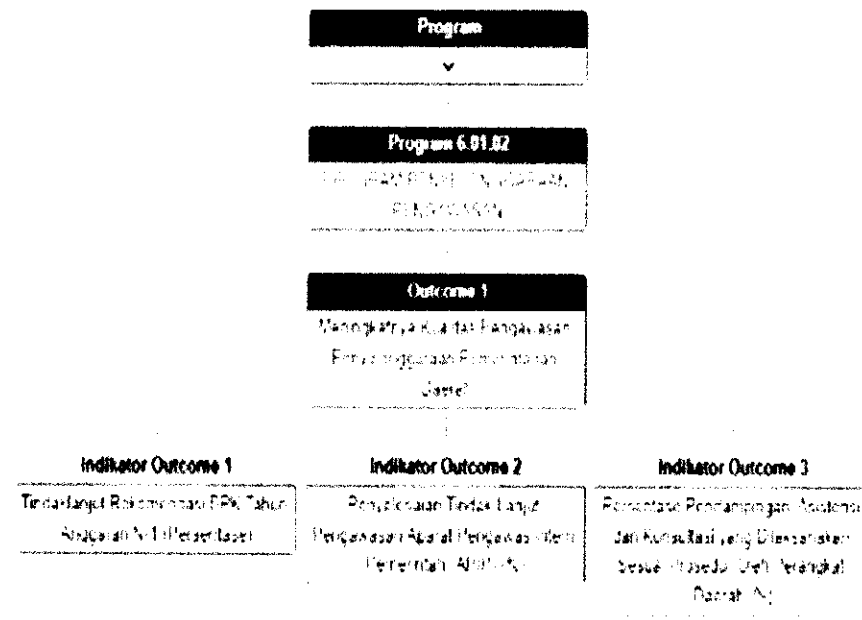
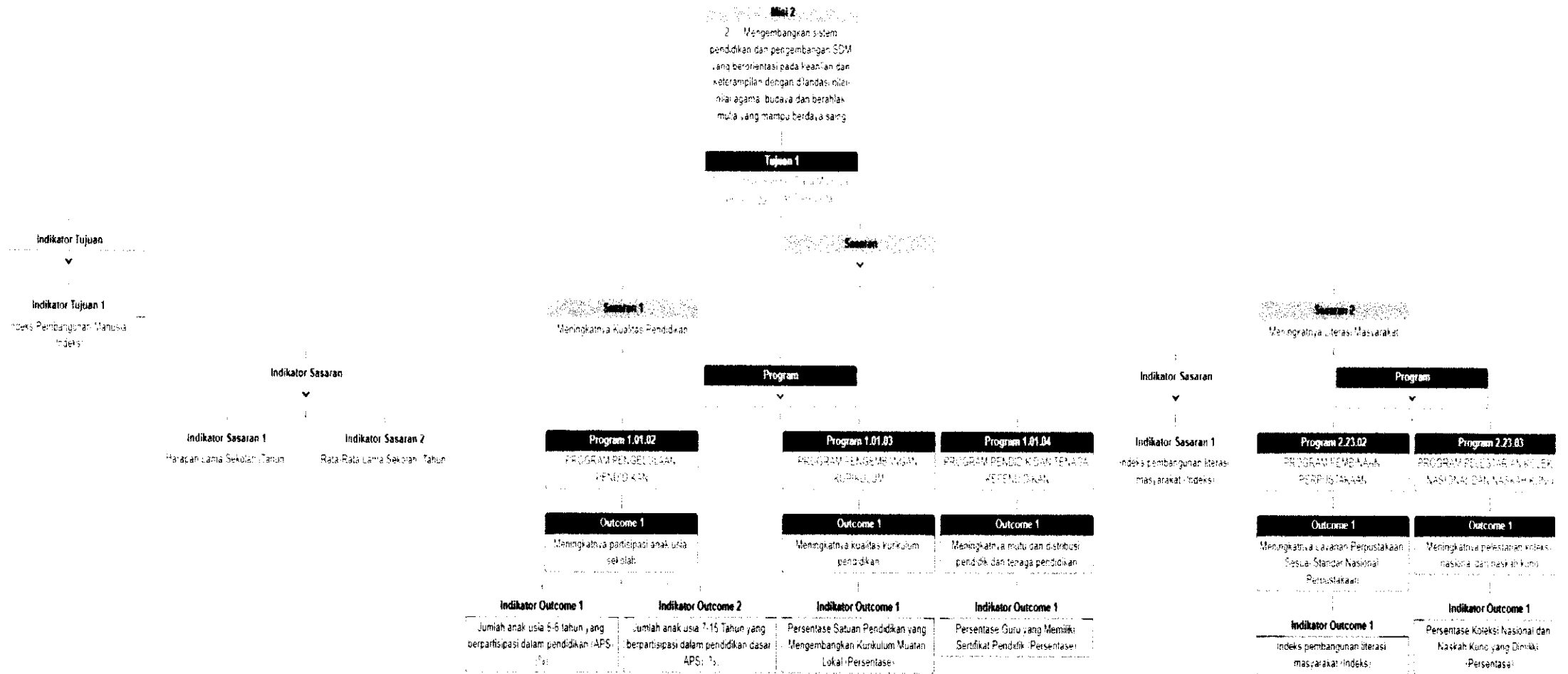


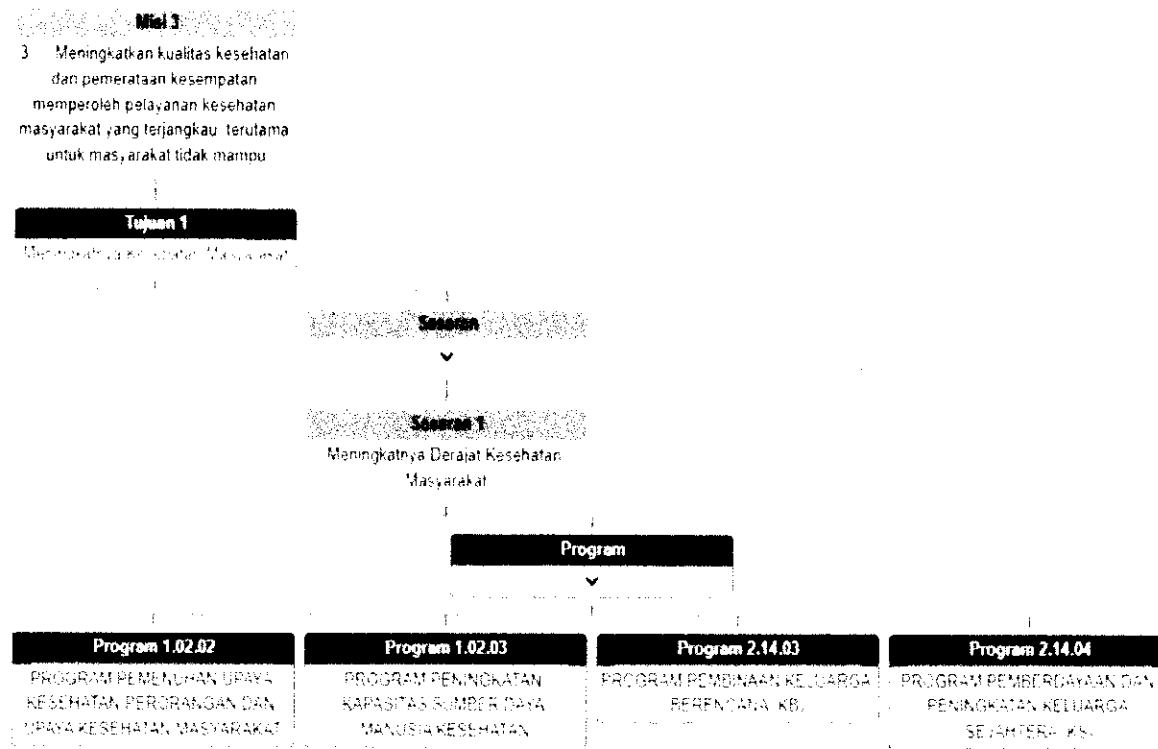
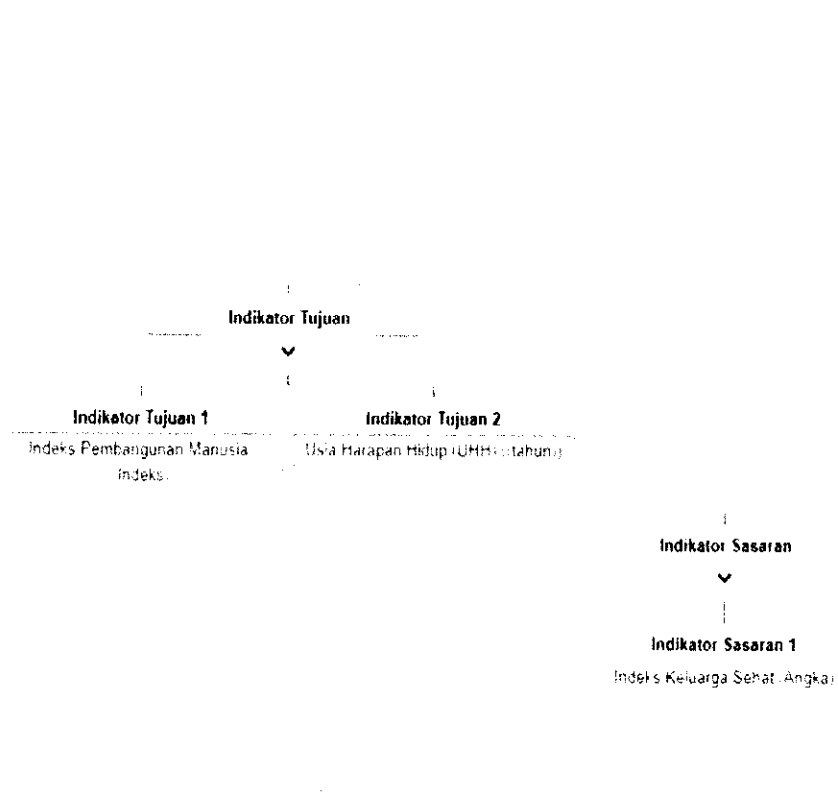
Exhibit A

[illegible]

References

[illegible]





Program 1.02.02

750.000.000,00
KOTAKAWALAN
KOTAKAWALAN

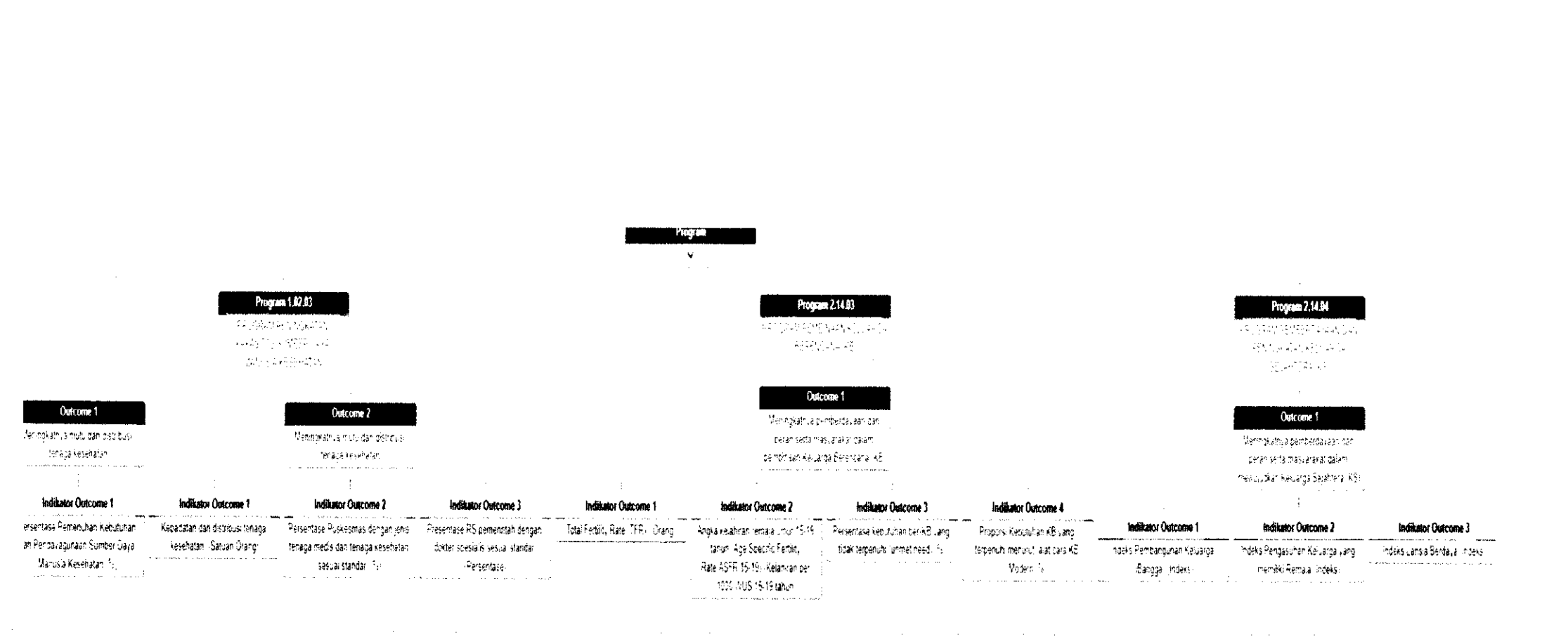
Outcome 1

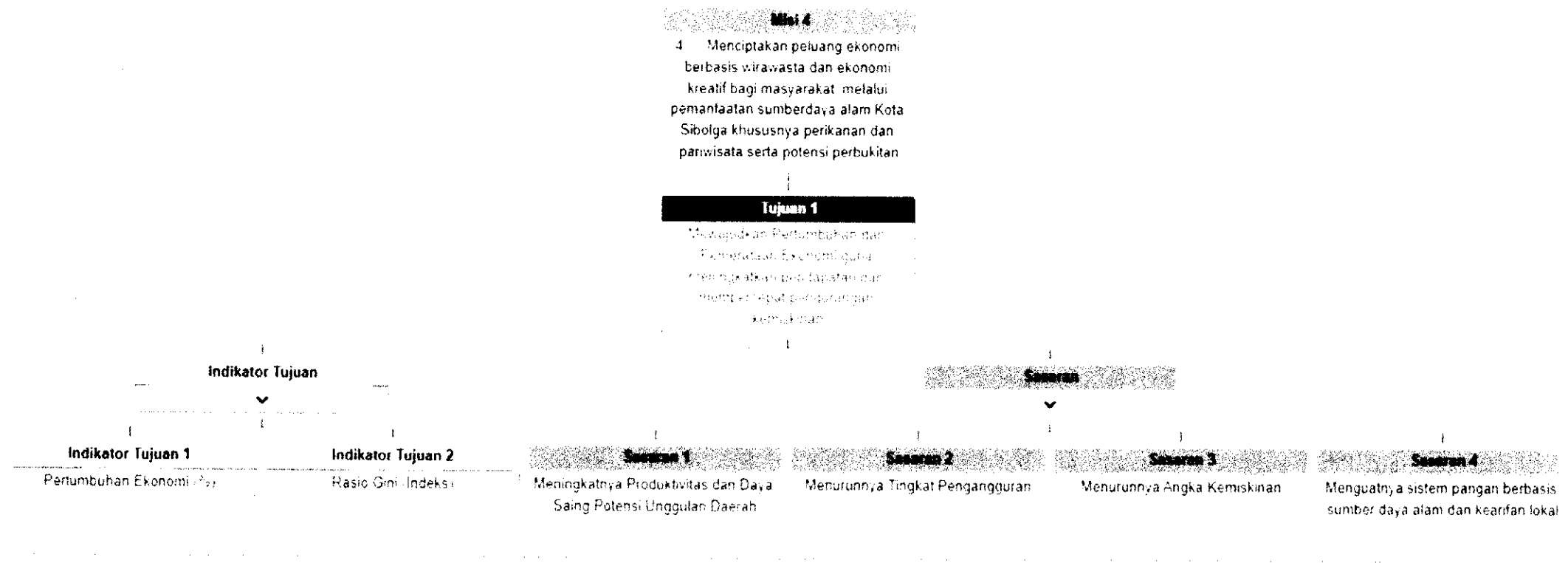
Meningkatkan kualitas kesehatan
dan kesejahteraan masyarakat

Outcome 2

Meningkatkan kualitas kesehatan
masyarakat

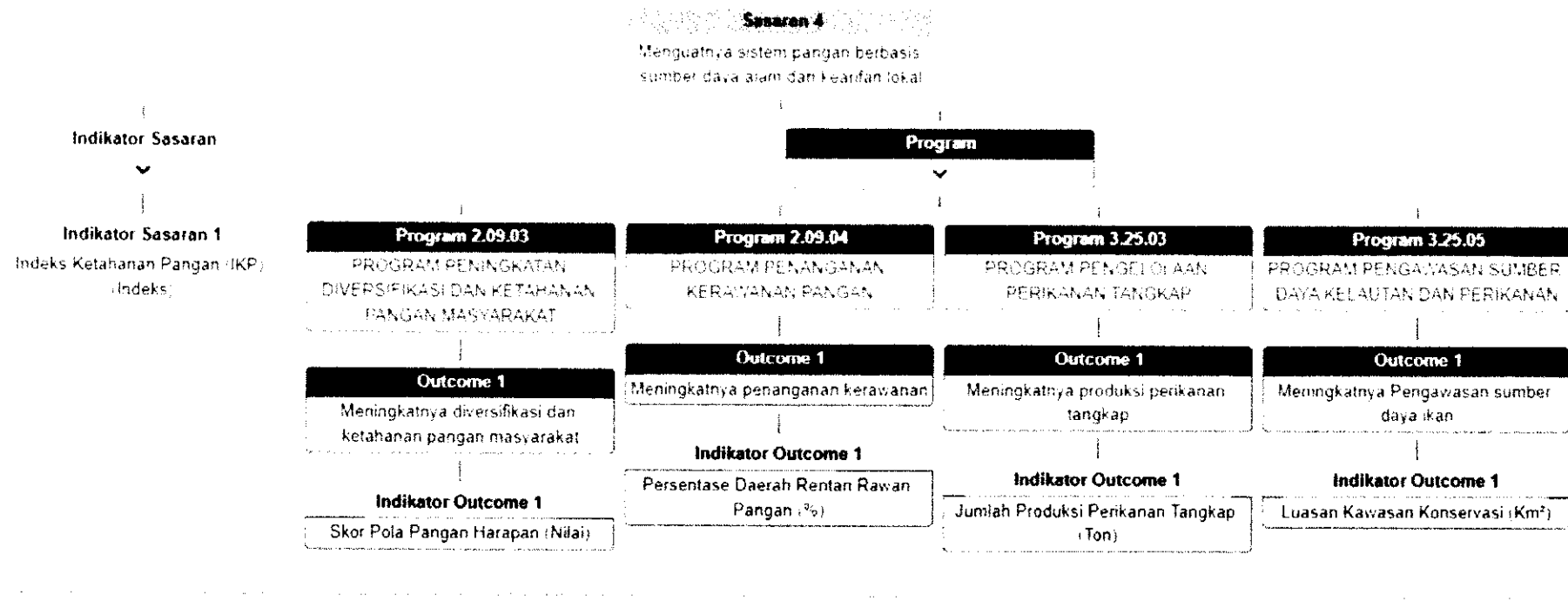
Indikator Outcome 1	Indikator Outcome 1	Indikator Outcome 2	Indikator Outcome 3	Indikator Outcome 4	Indikator Outcome 5	Indikator Outcome 6	Indikator Outcome 7	Indikator Outcome 8	Indikator Outcome 9	Indikator Outcome 10	Indikator Outcome 11
Persentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna. Persentase	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 100	Persentase ibu usia yang mandiri	Prevalensi Diabetes mellitus dan 10 tahun 10	Prevalensi Merokok pada Penduduk 15-24 Tahun. Persentase	Prevalensi depresi di rumah lebih dari 15 Tahun 10	Persentase layanan kesehatan terpadus. Sistem Informasi Kesehatan Masyarakat (SIK)	Persentase Kewajiban Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 100	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbaikan kesehatan sesuai standar 100	Persentase tempat pengolahan sampah dengan memenuhi standar 100	Persentase fasilitas kesehatan yang sesuai standar 100	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna

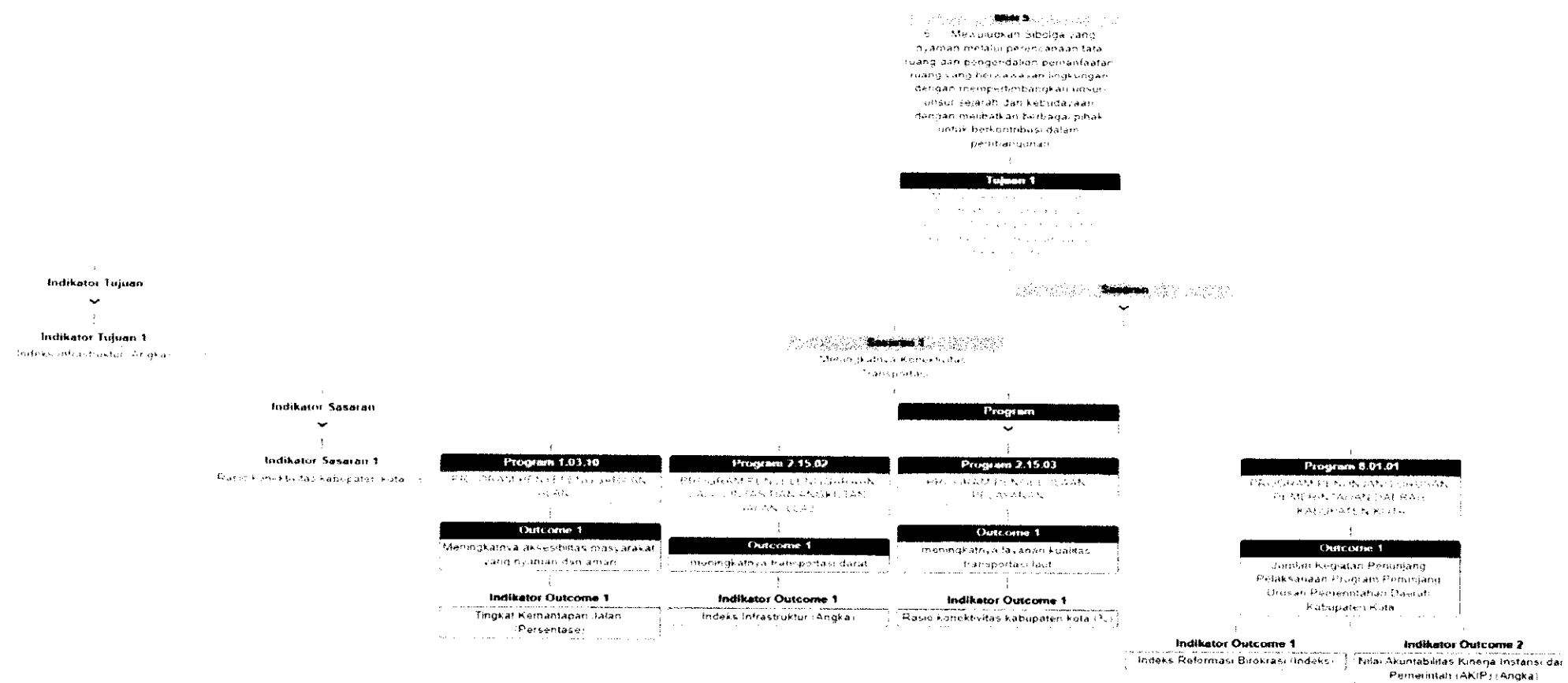


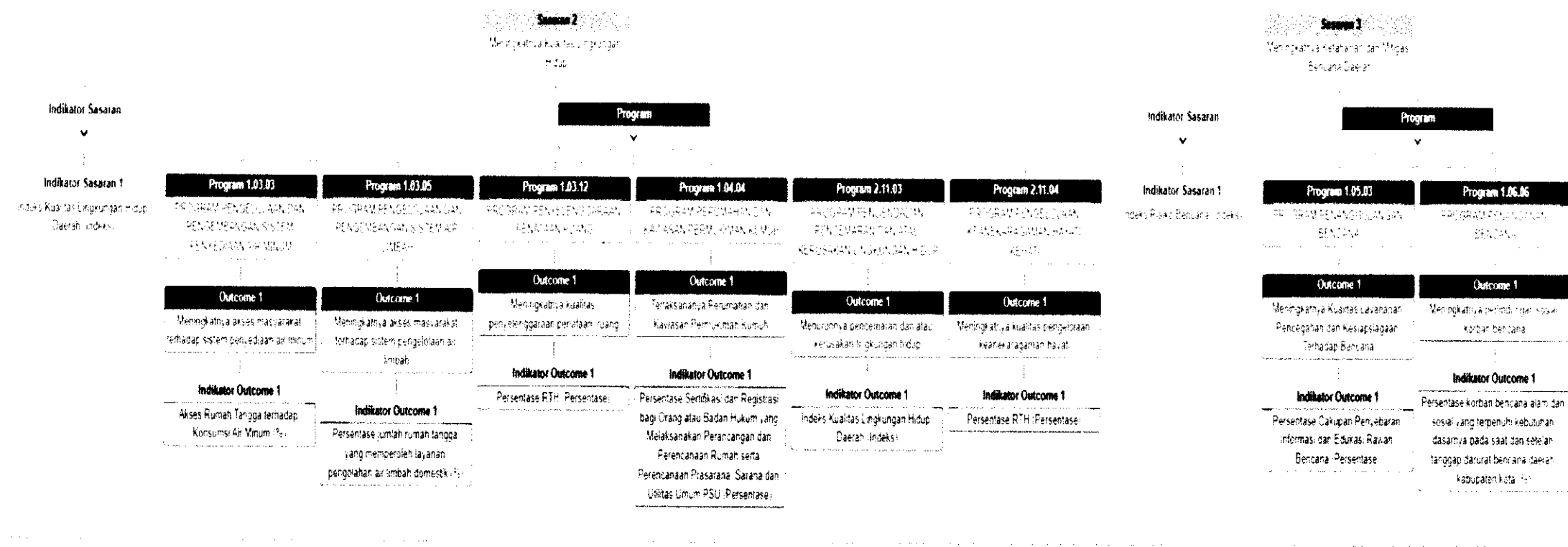


SECRET

[illegible]







Sasaran 3
Meningkatkan Pemuda Berprestasi

Indikator Sasaran	Program
Indikator Sasaran 1	Program 2.19.02
Indikator Sasaran 1	PROSEDUR MELAKUKAKAN KEMASUKAN (PAK) PADA KEMAHARAJARAN
	Outcome 1
	Meningkatnya Daya hidup Kepemudaan
	Indikator Outcome 1
	Rasio Wirausaha Pemuda Persentase

RPJMD Kota Sibolga Tahun 2025-2029

Sasaran 4
Meningkatkan Keterampilan Masyarakat
Tahapan Pemuda Berprestasi

Indikator Sasaran	Program		
Indikator Sasaran 1	Program 8.01.03	Program 8.01.04	Program 8.01.05
Indikator Sasaran 1	PROSEDUR MELAKUKAKAN PERAN AKTIF DALAM KEMASYARAKATAN (PERAN MELAKUKAKAN PERAN AKTIF DALAM KEMASYARAKATAN)	PROSEDUR MELAKUKAKAN PERAN AKTIF DALAM KEMASYARAKATAN	PROSEDUR MELAKUKAKAN PERAN AKTIF DALAM KEMASYARAKATAN
	Outcome 1	Outcome 1	Outcome 1
	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etik untuk Rakyat dan Rakyat	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Pemberdayaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
	Indikator Outcome 1	Indikator Outcome 1	Indikator Outcome 1
	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	Persentase Organisasi Masyarakat yang Aktif (Organisasi Masyarakat)	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan
			Penggunaan Perilaku dan Fasilitas Pencegahan untuk Beragama dan Berhaya Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)

RPJMD Kota Sibolga Tahun 2025-2029

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

4. 1 Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah merupakan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait, beserta program yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah. Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kota Sibolga berisi program-program, untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi kedalam 1 (satu) Urusan Wajib berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, 1 (satu) Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 1 (satu) urusan pilihan dan 4 (empat) Unsur pemerintahan.

4. 1. 1 Daftar Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai Kinerja Pembangunan Daerah

Program Perangkat Daerah merupakan instrumen operasional yang menjabarkan kebijakan dan strategi pembangunan daerah ke dalam serangkaian kegiatan terstruktur yang dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas dan fungsinya. Program ini disusun berdasarkan pendekatan money follows program yang mengaitkan secara erat antara prioritas pembangunan, ketersediaan anggaran, dan kapasitas kelembagaan daerah. Setiap program dirancang untuk memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan aspek efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan.

Penyusunan Program Perangkat Daerah berpedoman pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi (RPJPD dan RPJMD) serta mempertimbangkan isu strategis sektoral, potensi dan tantangan khusus di bidang tugasnya. Program ini menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan menjadi instrumen akuntabilitas kinerja yang terukur. Implementasi Program Perangkat Daerah mensyaratkan adanya sinergi lintas OPD, mengingat sifat pembangunan yang multidimensi dan saling terkait, untuk memastikan pendekatan yang Teknokratik, Partisipatif, Politis, atas-bawah dan bawah-atas, Pendekatan Holistik- Tematik, integratif dan Spasial dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah.

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

I. Urusan Wajib berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Pengelolaan Pendidikan
- 3) Program Pengembangan Kurikulum
- 4) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 5) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
- 6) Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra

2. Kesehatan

Dinas Kesehatan

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan
- 3) Program peningkatan kapasitas sumber Daya Manusia Kesehatan
- 4) Program Sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- 5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- 6) Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan

Puskesmas Aek Habil

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan.
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Puskesmas Pintu Angin

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan.
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Puskesmas Sambas

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan.
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Puskesmas Pelabuhan Sambas

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan.
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Puskesmas Aek Parombunan

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan.
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

RSU F.L Tobing

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan
- 3) Program peningkatan kapasitas sumber Daya Manusia Kesehatan

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

- 4) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
- 5) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- 6) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- 7) Program Penataan Bangunan Gedung
- 8) Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
- 9) Program Penyelenggaraan Jalan
- 10) Program Pengembangan Jasa Kontruksi
- 11) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 2) Program Pengembangan Perumahan
- 3) Program Kawasan Permukiman
- 4) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- 5) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum(PSU)
- 6) Program Peningkatan Pelayanan sertifikasi, Kualifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

5. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Dinas Satpol-PP dan BPBD

- 1) Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah
- 2) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- 3) Program Penanggulangan Bencana
- 4) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

6. Sosial

Dinas Sosial

- 1) Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah
- 2) Program Pemberdayaan Sosial
- 3) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
- 4) Program Rehabilitasi Sosial

- 5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 6) Program Penanganan Bencana
- 7) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

II. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja

- 1) Program Program Perencanaan Tenaga Kerja
- 2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 3) Program Penempatan Tenaga Kerja
- 4) Program Hubungan Industrial

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Program Pengurustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- 2) Program Perlindungan Perempuan
- 3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- 4) Program Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak
- 5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- 6) Program Perlindungan Khusus Anak

3. Pangan

Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
- 2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- 3) Program Penanganan kerawanan Pangan
- 4) Program Pengawasan Keamanan Pangan

4. Pertanian

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

- 1) Program Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum

- 2) Program Penyelesaian sengketa Tanah Garapan
- 3) Program penyelesaian Ganti kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan
- 4) Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee
- 5) Program Pengelolaan Tanah Kosong
- 6) Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
- 7) Program Penatagunaan Tanah
- 8) Program Pengurusan Hak-hak Atas Tanah

5. Lingkungan Hidup

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

- 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- 2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
- 4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Keracunan (Limbah B3)
- 5) Program Pembinaan dan Penawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- 6) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum adat (MHA), kearifan Lokal dan HAK MHA yang terkait dengan PPLH
- 7) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
- 8) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- 9) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- 10) Program Pengelolaan Persampahan

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatat Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 2) Program Pendaftaran Penduduk
- 3) Program Pencatatan Sipil
- 4) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 5) Program Pengelolaan Profil Kependudukan

7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 2) Program Penataan Desa
- 3) Program Peningkatan Kerjasama Desa
- 4) Program Administrasi Pemerintah Desa
- 5) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Program Pengendalian Penduduk
- 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- 3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

9. Bidang Perhubungan

Dinas Perhubungan

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- 3) Program Pengelolaan Pelayaran

10. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Dinas Kominfo

- 1) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- 2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja

- 1) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- 2) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- 3) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- 4) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- 5) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

- 6) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
- 7) Program Pengembangan UMKM
- 8) Program Penguatan Badan Hukum Koperasi

12. Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu

- 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- 2) Program Promosi Penanaman Modal
- 3) Program Pelayanan Penanaman Modal
- 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Program
- 5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

13. Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga

- 1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- 2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- 3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

14. Statistik

Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik

- 1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

15. Persandiaan

Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik

- 1) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

16. Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- 1) Program Pengembangan Kebudayaan
- 2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- 3) Program Pembinaan Sejarah
- 4) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

- 5) Program Pengelolaan Permuseuman

17. Perpustakaan

Dinas Perpustakaan

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Pembinaan Perpustakaan
- 3) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

18. Kearsipan

Dinas Perpustakaan

- 1) Program Pengelolaan Arsip
- 2) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
- 3) Program Perizinan Penggunaan Arsip

III. Urusan Pemerintah Pilihan

1. Kelautan Perikanan

Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- 3) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- 4) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikan
- 5) Program Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan

2. Pariwisata

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Peningkatan daya tarik Destinasi Pariwisata
- 3) Program Pemasaran Pariwisata
- 4) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- 5) Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

3. Pertanian

Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian

- 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- 3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 4) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- 5) Program Perizinan Usaha Pertanian
- 6) Program Penyuluhan Pertanian

4. Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- 1) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- 2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- 3) Program Stabilisasi Harga Pokok dan Barang Penting
- 4) Program Pengembangan Ekspor
- 5) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
- 6) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

5. Perindustrian

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- 3) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
- 4) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

IV. Unsur Pendukung

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 3) Program Perekonomian dan Pembangunan

2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

V. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**1. Perencanaan****Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 3) Program Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Keuangan**Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah**

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 4) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

3. Kepegawaian**Badan Kepegawaian Daerah Kepegawaian**

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Kepegawaian Daerah

4. Pendidikan dan Pelatihan**Badan Kepegawaian Daerah**

- 1) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

5. Penelitian dan Pengembangan**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

- 1) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 2) Program Riset dan Inovasi Daerah

VI. Unsur Pengawasan

Inspektorat

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Penyelenggaraan Pengawasan
- 3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

VII. Unsur Kewilayahan

Kecamatan

1. Kecamatan Sibolga Utara

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum
- 6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2. Kecamatan Sibolga Kota

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan
- 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum
- 6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa

3. Kecamatan Sibolga Sambas

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan
- 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum
- 6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa

4. Kecamatan Sibolga Selatan

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum
- 6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa

VIII. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa
- 3) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui pendidikan politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
- 4) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- 6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

4.1.2. Program Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 disertai Indikator Target dan Pagu Indikatif

Setiap program yang dijalankan oleh perangkat daerah memiliki indikator kinerja yang terukur, target yang jelas, serta pagu anggaran yang telah ditetapkan guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai alokasi belanja, termasuk program yang akan dilaksanakan, indikator kinerja, target capaian, serta besaran anggaran yang dialokasikan, dapat merujuk pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Indikator Program, Target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					128.680.988. 802,00		133.578.916. 340,00		135.712.732. 728,00		144.212.89 6.361,00		150.791.62 5.125,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					109.814.088. 958,00		110.484.636. 528,00		110.897.746. 212,00		111.153.74 6.212,00		111.234.74 6.212,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraa n Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah (AKIP) (Angka)	75	75	75	109.814.088. 958,00	80	110.484.636. 528,00	81	110.897.746. 212,00	82	111.153.74 6.212,00	83	111.234.74 6.212,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					16.156.666.1 52,00		19.387.999.3 82,00		20.444.450.0 00,00		27.910.506 .329,00		33.496.506 .329,00	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (%)	82,24	85,21	88,18	16.156.666.1 52,00	91,15	19.387.999.3 82,00	93,70	20.444.450.0 00,00	96,25	27.910.506 .329,00	98,79	33.496.506 .329,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang	98,86	99,19	99,51		99,84		100		100		100		Dinas Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)													dan Kebudayaan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANG AN KURIKULUM					30.000.000,00		410.000.000,00		455.000.000,00		490.000.000,00		510.000.000,00	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangk an Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	0	0	10	30.000.000,00	15	410.000.000,00	20	455.000.000,00	25	490.000.000,00	30	510.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					2.580.233.692,00		3.096.280.430,00		3.715.536.516,00		4.458.643.820,00		5.350.372.584,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	1	1	1	2.580.233.692,00	1	3.096.280.430,00	1	3.715.536.516,00	1	4.458.643.820,00	1	5.350.372.584,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIA N PERIZINAN PENDIDIKAN					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya kualitas dan distribusi	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan	100	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
institusi pendidikan	yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)													
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANG AN BAHASA DAN SASTRA					0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya pengembangan bahasa dan sastra	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	73,13	74,23	75,33	0,00	76,43	100.000.000,00	77,53	100.000.000,00	78,63	100.000.000,00	79,73	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					313.710.924.317,00		352.823.415.099,00		386.411.417.557,00		371.556.906.693,00		395.133.109.959,00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					152.393.506.338,00		150.617.636.711,00		153.685.754.307,00		160.222.437.433,00		162.312.672.831,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggara n Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggara n Urusan Pemerintahan Daerah Penyelenggara n Kabupaten/Kota (%)	100	95	95	33.038.102.643,00	96	33.698.864.696,00	97	34.372.841.990,00	98	35.060.298.829,00	99	35.761.504.806,00	Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah (AKIP) (Angka)	77,26	77,50	78		78,50		79		79,50		80		Dinas Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraa n Pemerintahan					119.355.403.695,00		116.918.772.015,00		119.312.912.317,00		125.162.138.604,00		126.551.168.025,00	RSU FL.Tobing
	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a (%)	100	100	100		100		100		100		100		RSU FL.Tobing
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					159.448.911.073,00		198.427.094.970,00		228.797.445.963,00		207.256.127.531,00		228.593.002.215,00	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat					58.603.170.600,00		93.957.160.000,00		121.797.376.000,00		96.792.113.600,00		117.919.524.960,00	RSU FL.Tobing

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		RSU FL.Tobing
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0	1,4	1,4	100.845.740.473,00	1,4	104.469.934.970,00	1,4	107.000.069.963,00	1,4	110.464.013.931,00	1,4	110.673.477.255,00	Dinas Kesehatan
	Persentase Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (%)	0	5	10		15		20		25		30		Dinas Kesehatan
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	23,4	23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		Dinas Kesehatan
	Persentase fasilitas kesehatan yang sesuai standar (%)	84	85	87		89		91		92		92		Dinas Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	73	75	76		77		78		79		80		Dinas Kesehatan
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi	46,7	50	60		70		80		90		90		Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kesehatan Nasional (%)													
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	80	81	82		83		84		85		86		Dinas Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	90	90	90		90		91		92		92		Dinas Kesehatan
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	74	75	77		79		81		83		83		Dinas Kesehatan
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	12,4	12,4	11,4		10,4		9,4		8,4		8,4		Dinas Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN					989.693.035,00		2.887.293.269,00		3.023.999.335,00		3.161.039.418,00		3.299.652.937,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN														
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan					177.500.000, 00		2.052.000.00 0,00		2.172.000.00 0,00		2.292.000. 000,00		2.412.000. 000,00	RSU FL.Tobing
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dan Pendayagunaa n Sumber Daya Manusia Kesehatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		RSU FL.Tobing
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. (%)	80	81	82	812.193.035, 00	83	835.293.269, 00	84	851.999.335, 00	85	869.039.41 8,00	86	887.652.93 7,00	Dinas Keschatan
	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. (Satuan Orang)	73,3	70	68		66		64		62		60		Dinas Kesehatan
	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	90	90	92		92		95		95		100		Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					738.813.871, 00		751.390.149, 00		764.217.952, 00		777.302.31 1,00		787.781.97 6,00	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman														Dinas Kesehatan
Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase)	80	81	82	738.813.871, 00	83	751.390.149, 00	84	764.217.952, 00	85	777.302.31 1,00	86	787.781.97 6,00	Dinas Kesehatan
	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	50	50	55		60		65		70		75		Dinas Kesehatan
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor	10	20	30		40		50		60		70		Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)													
	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%)	73,3	75	76		77		78		79		80		Dinas Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					140.000.000, 00		140.000.000, 00		140.000.000, 00		140.000.00 0,00		140.000.00 0,00	
meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	100	140.000.000, 00	100	140.000.000, 00	100	140.000.000, 00	100	140.000.00 0,00	100	140.000.00 0,00	Dinas Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					130.263.857. 478,00		143.029.821. 467,00		157.025.018. 199,00		173.418.00 1.012,00		190.848.50 9.404,00	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA					7.847.322.98 8,00		8.677.716.28 7,00		9.545.486.91 6,00		10.500.036 .707,00		11.550.039 .169,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
N DAERAH KABUPATEN/K OTA														
Meningkatnya Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraa n Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah (AKIP) (Angka)	56,77	58,78	60,20	7.847.322.98 8,00	62,30	8.677.716.28 7,00	64,40	9.545.486.91 6,00	66,50	10.500.036 .707,00	68,60	11.550.039 .169,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	86,33	86,50	86,70		87		87,33		87,50		88		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					50.800.000.0 00,00		55.880.000.0 00,00		61.468.000.0 00,00		67.614.800 .000,00		74.376.280 .000,00	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir	Jumlah Luas Penanganan Erosi dan Sedimentasi (Ha)	4	4,74	5,09	50.800.000.0 00,00	5,45	55.880.000.0 00,00	5,81	61.468.000.0 00,00	6,16	67.614.800 .000,00	6,52	74.376.280 .000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANG AN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					1.063.534.49 0,00		1.084.805.18 0,00		1.106.501.28 3,00		1.128.631. 305,00		1.151.203. 935,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum (%)	100	100	100	1.063.534.49 0,00	100	1.084.805.18 0,00	100	1.106.501.28 3,00	100	1.128.631. 305,00	100	1.151.203. 935,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					100.000.000, 00		100.000.000, 00		100.000.000, 00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00	
meningkatkan pengembangan sistem pengelolaan persampahan regional	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di wilayah Kab/Kota (%)	0	100	100	100.000.000, 00	100	100.000.000, 00	100	100.000.000, 00	100	100.000.00 0,00	100	100.000.00 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					100.000.000, 00		110.000.000, 00		121.000.000, 00		133.100.00 0,00		146.410.00 0,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	60	65	68	100.000.000, 00	75	110.000.000, 00	80	121.000.000, 00	85	133.100.00 0,00	90	146.410.00 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANG AN SISTEM DRAINASE					4.960.000.00 0,00		5.456.000.00 0,00		6.001.600.00 0,00		6.601.760. 000,00		7.261.936. 000,00	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	4	4,74	5,09	4.960.000.00 0,00	5,45	5.456.000.00 0,00	5,81	6.001.600.00 0,00	6,16	6.601.760. 000,00	6,52	7.261.936. 000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANG AN PERMUKIMAN					2.000.000.00 0,00		2.000.000.00 0,00		2.000.000.00 0,00		3.000.000. 000,00		3.500.000. 000,00	
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	50	53,13	54,01	2.000.000.00 0,00	54,88	2.000.000.00 0,00	56,15	2.000.000.00 0,00	57,42	3.000.000. 000,00	58,69	3.500.000. 000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					12.798.000.0 00,00		14.077.800.0 00,00		15.485.580.0 00,00		17.034.138 .000,00		18.737.551 .800,00	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	70	73	75	12.798.000.0 00,00	77	14.077.800.0 00,00	79	15.485.580.0 00,00	80	17.034.138 .000,00	83	18.737.551 .800,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM					100.000.000, 00		100.000.000, 00		100.000.000, 00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANN YA														
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	0	100	100	100.000.000, 00	100	100.000.000, 00	100	100.000.000, 00	100	100.000.00 0,00	100	100.000.00 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN JALAN					49.585.000.0 00,00		54.543.500.0 00,00		59.997.850.0 00,00		65.997.635 .000,00		72.597.398 .500,00	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	58,62	68,13	70	49.585.000.0 00,00	73	54.543.500.0 00,00	75	59.997.850.0 00,00	78	65.997.635 .000,00	80	72.597.398 .500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANG AN JASA KONSTRUKSI					10.000.000,0 0		10.000.000,0 0		10.000.000,0 0		10.000.000 ,00		10.000.000 ,00	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi (Orang)	0	5	5	10.000.000,0 0	5	10.000.000,0 0	5	10.000.000,0 0	5	10.000.000 ,00	5	10.000.000 ,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN					900.000.000, 00		990.000.000, 00		1.089.000.00 0,00		1.197.900. 000,00		1.317.690. 000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENATAAN RUANG														
Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n penataan ruang	Persentase RTH (Persentase)	100	100	100	900.000.000, 00	100	990.000.000, 00	100	1.089.000.00 0,00	100	1.197.900. 000,00	100	1.317.690. 000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					31.196.248.7 94,00		32.703.561.2 33,00		34.286.239.2 94,00		35.948.051 .259,00		37.692.953 .819,00	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA					20.546.248.7 94,00		21.573.561.2 33,00		22.652.239.2 94,00		23.784.851 .259,00		24.974.093 .819,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Dacrah Dalam Penyelenggaraa n Pemerintahan	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	80	100	100	20.546.248.7 94,00	100	21.573.561.2 33,00	100	22.652.239.2 94,00	100	23.784.851 .259,00	100	24.974.093 .819,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANG AN PERUMAHAN					400.000.000, 00		420.000.000, 00		441.000.000, 00		463.050.00 0,00		486.202.50 0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	0	16	40	400.000.000,00	50	420.000.000,00	76	441.000.000,00	88	463.050.000,00	100	486.202.500,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni (Persentase)	80	100	100		100		100		100		100		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					2.950.000.000,00		3.060.000.000,00		3.175.500.000,00		3.296.775.000,00		3.424.113.750,00	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase)	69	100	100	2.950.000.000,00	100	3.060.000.000,00	100	3.175.500.000,00	100	3.296.775.000,00	100	3.424.113.750,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN					300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PERMUKIMAN KUMUH														
Terlaksananya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase)	0	100	100	300.000.000, 00	100	300.000.000, 00	100	300.000.000, 00	100	300.000.00 0,00	100	300.000.00 0,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					7.000.000.00 0,00		7.350.000.00 0,00		7.717.500.00 0,00		8.103.375. 000,00		8.508.543. 750,00	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	98	100	100	7.000.000.00 0,00	100	7.350.000.00 0,00	100	7.717.500.00 0,00	100	8.103.375. 000,00	100	8.508.543. 750,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					15.631.140.751,00		17.543.965.312,00		16.774.719.945,00		20.788.911.608,00		18.415.005.229,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.502.484.751,00		13.144.136.032,00		11.691.891.945,00		15.476.132.108,00		13.127.439.229,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah (AKIP) (Angka)	80	70	72	6.970.034.751,00	75	6.054.636.032,00	75	6.807.391.945,00	76	10.591.632.108,00	78	8.089.439.229,00	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah (AKIP) (Angka)	78,61	80	82	4.532.450.000,00	84	7.089.500.000,00	86	4.884.500.000,00	88	4.884.500.000,00	90	5.038.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMA					1.047.328.000,00		1.147.328.000,00		1.247.328.000,00		1.347.328.000,00		1.447.328.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
N DAN KETERTIBAN UMUM														
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Indeks Penyelenggaraa n Trantibumlinm as (Indeks)	80	80	80	1.047.328.00 0,00	80	1.147.328.00 0,00	80	1.247.328.00 0,00	80	1.347.328. 000,00	80	1.447.328. 000,00	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULAN GAN BENCANA					2.039.000.00 0,00		2.195.000.00 0,00		1.895.000.00 0,00		1.800.000. 000,00		1.800.000. 000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	59,32	60	63	965.000.000, 00	65	1.115.000.00 0,00	68	815.000.000, 00	70	715.000.00 0,00	75	715.000.00 0,00	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	100	100	100	909.000.000, 00	100	915.000.000, 00	100	915.000.000, 00	100	920.000.00 0,00	100	920.000.00 0,00	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Pasca Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	0	0	1	165.000.000, 00	1	165.000.000, 00	1	165.000.000, 00	1	165.000.00 0,00	1	165.000.00 0,00	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULAN GAN, PENYELAMATA N KEBAKARAN					1.042.328.00 0,00		1.057.501.28 0,00		1.940.500.00 0,00		2.165.451. 500,00		2.040.238. 000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAN PENYELAMATA N NON KEBAKARAN														
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah (AKIP) (Angka)	80	70	72	1.042.328.00 0,00	75	1.057.501.28 0,00	75	1.940.500.00 0,00	76	2.165.451. 500,00	78	2.040.238. 000,00	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Menit)	15	15	15		15		15		15		15		Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN N BIDANG SOSIAL					6.770.752.27 2,00		7.046.445.33 0,00		7.313.360.05 5,00		7.580.437. 669,00		7.848.324. 632,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN N DAERAH KABUPATEN/K OTA					4.143.079.42 2,00		4.246.179.42 2,00		4.340.129.42 2,00		4.433.864. 422,00		4.528.022. 922,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah Dalam	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah (AKIP) (Angka)	81,11	73,81	80	4.143.079.42 2,00	80	4.246.179.42 2,00	80	4.340.129.42 2,00	80	4.433.864. 422,00	80	4.528.022. 922,00	Dinas Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyelenggaraa n Pemerintahan														
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAA N SOSIAL					875.266.524, 00		931.571.855, 00		988.033.292, 00		1.044.653. 958,00		1.101.437. 037,00	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan (%)	100	100	100	875.266.524, 00	100	931.571.855, 00	100	988.033.292, 00	100	1.044.653. 958,00	100	1.101.437. 037,00	Dinas Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					692.335.620, 00		739.022.333, 00		785.821.779, 00		832.736.21 5,00		879.767.93 9,00	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi (%)	100	100	100	692.335.620, 00	100	739.022.333, 00	100	785.821.779, 00	100	832.736.21 5,00	100	879.767.93 9,00	Dinas Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGA N DAN JAMINAN SOSIAL					340.000.000, 00		358.000.000, 00		376.000.000, 00		394.000.00 0,00		412.000.00 0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan. (Persentase)	100	100	100	340.000.000,00	100	358.000.000,00	100	376.000.000,00	100	394.000.000,00	100	412.000.000,00	Dinas Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					513.050.706,00		548.111.720,00		583.253.954,00		618.479.034,00		653.788.614,00	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100	100	100	513.050.706,00	100	548.111.720,00	100	583.253.954,00	100	618.479.034,00	100	653.788.614,00	Dinas Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	daerah kabupaten/kot a (%)													
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					207.020.000, 00		223.560.000, 00		240.121.608, 00		256.704.04 0,00		273.308.12 0,00	
Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan (Persentase)	100	100	100	207.020.000, 00	100	223.560.000, 00	100	240.121.608, 00	100	256.704.04 0,00	100	273.308.12 0,00	Dinas Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN N BIDANG TENAGA KERJA					1.548.000.00 0,00		1.576.960.00 0,00		1.606.499.20 0,00		1.636.629. 184,00		1.672.459. 727,00	
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					100.000.000, 00		100.000.000, 00		100.000.000, 00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00	
terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kabupaten/kot a yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	0	0	0	100.000.000, 00	0	100.000.000, 00	30	100.000.000, 00	30	100.000.00 0,00	30	100.000.00 0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITA S TENAGA KERJA					900.000.000, 00		918.000.000, 00		936.360.000, 00		955.087.20 0,00		974.188.94 4,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	0,7	0,7	0,7	900.000.000,00	0,7	918.000.000,00	0,8	936.360.000,00	1	955.087.200,00	1	974.188.944,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					250.000.000,00		255.000.000,00		260.100.000,00		265.302.000,00		275.706.000,00	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ((%))	53	54	55	250.000.000,00	56	255.000.000,00	57	260.100.000,00	59	265.302.000,00	60	275.706.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					298.000.000,00		303.960.000,00		310.039.200,00		316.239.984,00		322.564.783,00	
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	800	800	850	298.000.000,00	852	303.960.000,00	854	310.039.200,00	856	316.239.984,00	858	322.564.783,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					5.301.000.000,00		5.831.100.000,00		6.414.210.000,00		7.055.611.000,00		7.760.730.100,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAN PERLINDUNGA N ANAK														
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTA MAAN GENDER DAN PEMBERDAYAA N PEREMPUAN					1.354.000.00 0,00		1.489.400.00 0,00		1.638.340.00 0,00		1.802.174. 000,00		1.982.391. 400,00	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraa n PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	0,39	0,40	0,42	1.354.000.00 0,00	0,44	1.489.400.00 0,00	0,46	1.638.340.00 0,00	0,48	1.802.174. 000,00	0,50	1.982.391. 400,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	0,58	0,63	0,68		0,73		0,73		0,73		0,73		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGA N PEREMPUAN					950.000.000, 00		1.045.000.00 0,00		1.149.500.00 0,00		1.264.430. 000,00		1.390.895. 000,00	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan	0,085	0,010	0,012	950.000.000, 00	0,015	1.045.000.00 0,00	0,017	1.149.500.00 0,00	0,019	1.264.430. 000,00	0,021	1.390.895. 000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan,

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)													Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					920.000.000,00		1.012.000.000,00		1.113.200.000,00		1.224.520.000,00		1.346.972.000,00	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	0	0	5,88	920.000.000,00	11,76	1.012.000.000,00	11,76	1.113.200.000,00	23,52	1.224.520.000,00	35,29	1.346.972.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		322.102.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	0	0	0	220.000.000,00	0	242.000.000,00	1	266.200.000,00	1	292.820.000,00	1	322.102.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					762.000.000, 00		838.200.000, 00		922.020.000, 00		1.014.222. 000,00		1.115.644. 200,00	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	60,16	61,00	61,00	762.000.000, 00	61,23	838.200.000, 00	61,45	922.020.000, 00	61,76	1.014.222. 000,00	61,92	1.115.644. 200,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGA N KHUSUS ANAK					1.095.000.00 0,00		1.204.500.00 0,00		1.324.950.00 0,00		1.457.445. 000,00		1.602.725. 500,00	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	77,85	78,00	78,00	1.095.000.00 0,00	78,38	1.204.500.00 0,00	78,53	1.324.950.00 0,00	78,76	1.457.445. 000,00	78,95	1.602.725. 500,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	60,16	61,00	61,00		61,23		61,45		61,76		61,92		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN N BIDANG PANGAN					1.615.000.00 0,00		2.036.000.00 0,00		2.327.150.00 0,00		2.316.665. 000,00		2.812.781. 500,00	
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					225.000.000, 00		247.500.000, 00		270.000.000, 00		292.500.00 0,00		315.000.00 0,00	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	0	10	10	225.000.000, 00	10	247.500.000, 00	10	270.000.000, 00	10	292.500.00 0,00	10	315.000.00 0,00	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					1.015.000.00 0,00		1.381.500.00 0,00		1.618.150.00 0,00		1.553.165. 000,00		1.994.781. 500,00	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	79,3	90	90	1.015.000.00 0,00	90	1.381.500.00 0,00	90	1.618.150.00 0,00	90	1.553.165. 000,00	90	1.994.781. 500,00	Dinas Perikanan, Ketahanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pangan masyarakat														Pangan dan Pertanian
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					220.000.000,00		242.000.000,00		264.000.000,00		286.000.000,00		308.000.000,00	
Meningkatnya penanganan kerawanan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	0	10	10	220.000.000,00	10	242.000.000,00	10	264.000.000,00	10	286.000.000,00	10	308.000.000,00	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					155.000.000,00		165.000.000,00		175.000.000,00		185.000.000,00		195.000.000,00	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	0	80	80	155.000.000,00	80	165.000.000,00	80	175.000.000,00	80	185.000.000,00	80	195.000.000,00	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					1.825.000.000,00		1.880.250.000,00		1.962.012.500,00		1.995.363.125,00		2.030.381.280,00	
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					410.000.000,00		413.000.000,00		416.150.000,00		419.457.500,00		422.930.375,00	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	68,3	68,39	68,69	410.000.000,00	68,97	413.000.000,00	69,64	416.150.000,00	70,61	419.457.500,00	71,21	422.930.375,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					400.000.000,00		405.000.000,00		410.250.000,00		415.762.500,00		421.550.625,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	20,15	20,35	20,60	400.000.000,00	21,05	405.000.000,00	21,20	410.250.000,00	21,60	415.762.500,00	22,00	421.550.625,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIA N BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					60.000.000,0 0		60.000.000,0 0		60.000.000,0 0		60.000.000 ,00		60.000.000 ,00	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	80	100	100	60.000.000,0 0	100	60.000.000,0 0	100	60.000.000,0 0	100	60.000.000 ,00	100	60.000.000 ,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGA N DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					120.000.000, 00		121.000.000, 00		122.050.000, 00		123.152.50 0,00		124.310.12 5,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	100	100	100	120.000.000,00	100	121.000.000,00	100	122.050.000,00	100	123.152.500,00	100	124.310.125,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	80	100	100	0,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					350.000.000, 00		367.500.000, 00		385.875.000, 00		405.168.75 0,00		425.427.18 7,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	0	0	25	350.000.000, 00	25	367.500.000, 00	50	385.875.000, 00	75	405.168.75 0,00	100	425.427.18 7,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					25.000.000,0 0		26.250.000,0 0		27.562.500,0 0		28.940.625 ,00		30.387.656 ,00	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	10	15	20	25.000.000,0 0	25	26.250.000,0 0	30	27.562.500,0 0	35	28.940.625 ,00	40	30.387.656 ,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN					10.000.000,0 0		10.000.000,0 0		10.000.000,0 0		10.000.000 ,00		10.000.000 ,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
LINGKUNGAN HIDUP														
Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	80	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					350.000.000,00		352.500.000,00		405.125.000,00		407.881.250,00		410.775.312,00	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	0	36	42	350.000.000,00	48	352.500.000,00	54	405.125.000,00	56	407.881.250,00	60	410.775.312,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					5.977.788.299,00		6.276.677.712,00		6.590.511.598,00		6.920.037.178,00		7.266.039.037,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.500.000.000,00		5.775.000.000,00		6.063.750.000,00		6.366.937.500,00		6.685.284.375,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah (AKIP) (Angka)	79,11	79,50	80	5.500.000.00 0,00	80,50	5.775.000.00 0,00	81	6.063.750.00 0,00	81,50	6.366.937. 500,00	82	6.685.284. 375,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					135.525.498, 00		142.301.772, 00		149.416.861, 00		156.887.70 4,00		164.732.08 9,00	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	6,88	10	20	135.525.498, 00	30	142.301.772, 00	40	149.416.861, 00	50	156.887.70 4,00	55	164.732.08 9,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	91,68	92	92,50		93		93,50		94		94,50		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					173.728.466, 00		182.414.889, 00		191.535.633, 00		201.112.41 5,00		211.168.03 6,00	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100	173.728.466, 00	100	182.414.889, 00	100	191.535.633, 00	100	201.112.41 5,00	100	211.168.03 6,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	99	99	99		99		99		99		99		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	99	99	99		99		99		99		99		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					138.534.335,00		145.461.051,00		152.734.104,00		160.370.809,00		168.389.350,00	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	100	100	100	138.534.335,00	100	145.461.051,00	100	152.734.104,00	100	160.370.809,00	100	168.389.350,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM					30.000.000,00		31.500.000,00		33.075.000,00		34.728.750,00		36.465.187,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENGGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKA N														
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	100	100	100	30.000.000,0 0	100	31.500.000,0 0	100	33.075.000,0 0	100	34.728.750 ,00	100	36.465.187 ,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA					8.572.087.70 6,00		9.429.346.47 7,00		10.414.538.4 94,00		11.176.202 .604,00		11.839.064 .805,00	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA					5.068.587.70 6,00		5.575.496.47 7,00		6.175.303.49 4,00		6.513.354. 904,00		6.709.590. 455,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraa n Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah (AKIP) (Angka)	72,86	72,90	73	5.068.587.70 6,00	73,20	5.575.496.47 7,00	73,25	6.175.303.49 4,00	74	6.513.354. 904,00	82,39	6.709.590. 455,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					228.800.000, 00		251.680.000, 00		276.848.000, 00		304.532.00 0,00		334.986.08 0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa (Persentase)	5,80	23,50	23,50	228.800.000,00	47,05	251.680.000,00	47,05	276.848.000,00	100	304.532.000,00	100	334.986.080,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					84.700.000,00		93.170.000,00		102.487.000,00		112.735.700,00		124.009.270,00	
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa (Persentase)	0	23,50	23,50	84.700.000,00	47,05	93.170.000,00	70,58	102.487.000,00	100	112.735.700,00	100	124.009.270,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					930.000.000,00		1.023.000.000,00		1.125.300.000,00		1.237.520.000,00		1.361.613.000,00	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (Persentase)	0	5,88	11,76	930.000.000,00	23,52	1.023.000.000,00	23,52	1.125.300.000,00	47,05	1.237.520.000,00	47,05	1.361.613.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					2.260.000.00 0,00		2.486.000.00 0,00		2.734.600.00 0,00		3.008.060. 000,00		3.308.866. 000,00	
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakata n, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Desa (LKD) (Persentase)	16,41	24,44	75,55	2.260.000.00 0,00	75,55	2.486.000.00 0,00	100	2.734.600.00 0,00	100	3.008.060. 000,00	100	3.308.866. 000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	0	0	25		25		50		50		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14 - URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					10.248.204.6 44,00		10.419.019.7 36,00		10.595.083.3 11,00		10.776.282 .748,00		10.962.826 .927,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH N DAERAH KABUPATEN/K OTA					3.816.770.13 7,00		3.893.105.53 9,00		3.970.967.65 0,00		4.050.387. 003,00		4.131.394. 743,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraa n Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah (AKIP) (Angka)	77,26	78,5	79,5	3.816.770.13 7,00	80,5	3.893.105.53 9,00	81,5	3.970.967.65 0,00	82,5	4.050.387. 003,00	83,5	4.131.394. 743,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIA N PENDUDUK					430.000.000, 00		460.100.000, 00		492.307.000, 00		526.768.49 0,00		563.642.28 4,00	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (Persentase)	35,29	41,17	47,05	430.000.000, 00	52,98	460.100.000, 00	58,82	492.307.000, 00	64,70	526.768.49 0,00	70,58	563.642.28 4,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	60,44	60,94	61,44		61,94		62,44		62,94		63,44		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					3.544.434.50 7,00		3.615.323.19 7,00		3.687.629.66 1,00		3.761.382. 255,00		3.836.609. 900,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Total Fertility Rate (TFR). (Orang)	2,14	2,14	2,12	3.544.434.50 7,00	2,11	3.615.323.19 7,00	2,10	3.687.629.66 1,00	2,10	3.761.382. 255,00	2,10	3.836.609. 900,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	5,8	5.8- 5.7	5.7-5.6		5.6-5.5		5.5-5.4		5.4-5.3		5.3-5.2		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	21,25	21	19,86		19,45		19,1		18,8		18,3		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	73,5	73,8	74,1		74,4		74,7		75		75,3		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA					2.457.000.00 0,00		2.450.491.00 0,00		2.444.179.00 0,00		2.437.745. 000,00		2.431.180. 000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
SEJAHTERA (KS)														
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera [KS]	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)	60.44 :61.4	61.4: 62.3	62.3:63.1	2.457.000.00 0,00	63.1:63.9	2.450.491.00 0,00	63.9:64.7	2.444.179.00 0,00	64.7:65	2.437.745. 000,00	65:65.2	2.431.180. 000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	66,2	70	70,50		71,00		71,50		72		72,50		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	65	67	68		69		70		71		72		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN N BIDANG PERHUBUNGAN					23.343.096.4 62,00		24.460.251.3 83,00		25.675.763.9 40,00		26.941.920 .887,00		28.211.516 .977,00	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN N DAERAH KABUPATEN/K OTA					8.953.469.32 2,00		9.401.142.88 7,00		9.871.200.02 2,00		10.364.628 .778,00		10.882.860 .270,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggara n Pemerintahan	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	56,77	58,78	60,20	8.953.469.322,00	62,30	9.401.142.887,00	64,40	9.871.200.022,00	66,50	10.364.628.778,00	68,60	10.882.860.270,00	Dinas Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					10.189.627.140,00		10.699.108.496,00		11.234.063.918,00		11.795.767.109,00		12.385.555.457,00	
meningkatkan transportasi darat	Indeks Infrastruktur (Angka)	77,75	77,9	78,2	10.189.627.140,00	78,7	10.699.108.496,00	79,2	11.234.063.918,00	79,7	11.795.767.109,00	80,2	12.385.555.457,00	Dinas Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					4.200.000.000,00		4.360.000.000,00		4.570.500.000,00		4.781.525.000,00		4.943.101.250,00	
meningkatkan layanan kualitas transportasi laut	Rasio konektivitas kabupaten/kot a (%)	77,75	77,9	78,2	4.200.000.000,00	78,7	4.360.000.000,00	79,2	4.570.500.000,00	79,7	4.781.525.000,00	80,2	4.943.101.250,00	Dinas Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					13.414.115.809,00		13.671.896.625,00		13.947.752.778,00		14.226.910.221,00		14.504.610.123,00	
2.16.01 - PROGRAM					6.730.375.809,00		6.854.481.825,00		6.993.989.682,00		7.134.071.863,00		7.269.914.996,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah (AKIP) (Angka)	85,61	73,31	74,32	6.730.375.809,00	75,33	6.854.481.825,00	76,34	6.993.989.682,00	77,35	7.134.071.863,00	78,38	7.269.914.996,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					1.276.980.000,00		1.302.519.600,00		1.328.569.992,00		1.355.141.392,00		1.382.244.219,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	50	50	51	1.276.980.000,00	52	1.302.519.600,00	53	1.328.569.992,00	54	1.355.141.392,00	55	1.382.244.219,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	kabupaten/kot a (%)													
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					5.406.760.00 0,00		5.514.895.20 0,00		5.625.193.10 4,00		5.737.696. 966,00		5.852.450. 908,00	
Meningkatnya pengelolaan aplikasi intomatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	2,41	2,5	2,6	5.406.760.00 0,00	2,75	5.514.895.20 0,00	2,8	5.625.193.10 4,00	2,85	5.737.696. 966,00	3	5.852.450. 908,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN N BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					7.197.658.16 6,00		7.341.611.32 9,00		7.488.443.55 6,00		7.638.212. 426,00		7.790.976. 673,00	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN N DAERAH KABUPATEN/K OTA					4.492.241.49 8,00		4.582.086.32 8,00		4.673.728.05 5,00		4.767.202. 616,00		4.862.546. 668,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah Dalam	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas	79,21	79,22	79,22	4.492.241.49 8,00	79,23	4.582.086.32 8,00	79,23	4.673.728.05 5,00	79,24	4.767.202. 616,00	79,24	4.862.546. 668,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyelenggaraa n Pemerintahan	Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)													
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					61.200.000,0 0		62.424.000,0 0		63.672.480,0 0		64.945.929 ,00		66.244.848 ,00	
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	30	30	30	61.200.000,0 0	30	62.424.000,0 0	30	63.672.480,0 0	30	64.945.929 ,00	30	66.244.848 ,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					63.216.668,0 0		64.481.001,0 0		65.770.621,0 0		67.086.033 ,00		68.427.754 ,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	41	41,5	42	63.216.668,0 0	42,5	64.481.001,0 0	43	65.770.621,0 0	43,5	67.086.033 ,00	44	68.427.754 ,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					30.000.000,0 0		30.600.000,0 0		31.212.000,0 0		31.836.240 ,00		32.472.964 ,00	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan	16	16	16	30.000.000,0 0	16	30.600.000,0 0	16	31.212.000,0 0	16	31.836.240 ,00	16	32.472.964 ,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Koperasi (Persentase)													dan Tenaga Kerja
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIA N					300.000.000, 00		306.000.000, 00		312.120.000, 00		318.362.40 0,00		324.729.64 8,00	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	41	41,5	42	300.000.000, 00	42,5	306.000.000, 00	43	312.120.000, 00	43,5	318.362.40 0,00	44	324.729.64 8,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAA N DAN PERLINDUNGA N KOPERASI					306.000.000, 00		312.120.000, 00		318.362.400, 00		324.729.64 8,00		331.224.24 0,00	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	13	13	13	306.000.000, 00	13	312.120.000, 00	13	318.362.400, 00	13	324.729.64 8,00	13	331.224.24 0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAA N USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					1.845.000.00 0,00		1.881.900.00 0,00		1.919.538.00 0,00		1.957.928. 760,00		1.997.087. 335,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	0,84	0,84	0,84	1.845.000.00 0,00	0,84	1.881.900.00 0,00	0,84	1.919.538.00 0,00	0,84	1.957.928. 760,00	0,84	1.997.087. 335,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					100.000.000, 00		102.000.000, 00		104.040.000, 00		106.120.80 0,00		108.243.21 6,00	
Terlaksananya Pengembangan UMKM	Update dan pengumpulan Data UMKM (Persentase)	0	100	100	100.000.000, 00	100	102.000.000, 00	100	104.040.000, 00	100	106.120.80 0,00	100	108.243.21 6,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					5.768.063.89 2,00		5.875.425.17 0,00		5.984.933.67 3,00		6.096.632. 347,00		6.210.562. 993,00	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.000.000.00 0,00		5.100.000.00 0,00		5.202.000.00 0,00		5.306.040. 000,00		5.412.160. 800,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah (AKIP) (Angka)	79,16	82,16	82,16	5.000.000.00 0,00	82,16	5.100.000.00 0,00	82,16	5.202.000.00 0,00	82,16	5.306.040. 000,00	82,16	5.412.160. 800,00	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANG AN IKLIM PENANAMAN MODAL					100.000.000, 00		100.000.000, 00		100.000.000, 00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00	
Peningkatan Realisasi Investasi	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kot a (%)	100	100	100	100.000.000, 00	100	100.000.000, 00	100	100.000.000, 00	100	100.000.00 0,00	100	100.000.00 0,00	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					135.684.910, 00		138.398.608, 00		141.166.580, 00		143.989.91 2,00		146.867.71 0,00	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	100	100	100	135.684.910, 00	100	138.398.608, 00	100	141.166.580, 00	100	143.989.91 2,00	100	146.867.71 0,00	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					79.378.982,0 0		80.966.562,0 0		82.585.893,0 0		84.237.611 ,00		85.922.363 ,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) (%)	100	100	100	79.378.982,00	100	80.966.562,00	100	82.585.893,00	100	84.237.611,00	100	85.922.363,00	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Kerja Sama Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					153.000.000,00		156.060.000,00		159.181.200,00		162.364.824,00		165.612.120,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal Meningkatnya efektivitas kerja	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	100	153.000.000,00	100	156.060.000,00	100	159.181.200,00	100	162.364.824,00	100	165.612.120,00	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					6.510.000.000,00		7.112.600.000,00		7.600.117.000,00		8.216.739.840,00		8.601.497.646,00	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					2.110.000.000,00		2.401.800.000,00		2.688.501.000,00		3.012.291.520,00		3.378.200.360,00	
Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	2.04%	2.14%	2.24%	2.110.000.000,00	2.36%	2.401.800.000,00	2.47%	2.688.501.000,00	2.60%	3.012.291.520,00	2.73%	3.378.200.360,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAN					4.360.000.000,00		4.670.000.000,00		4.870.000.000,00		5.162.000.000,00		5.180.000.000,00	
Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olah Raga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	0,00	0,1	0,1	4.360.000.000,00	0,2	4.670.000.000,00	0,2	4.870.000.000,00	0,3	5.162.000.000,00	0,3	5.180.000.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANG AN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					40.000.000,0 0		40.800.000,0 0		41.616.000,0 0		42.448.320 ,00		43.297.286 ,00	
Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	0.40%	0.42%	0.44%	40.000.000,0 0	0.46%	40.800.000,0 0	0.48%	41.616.000,0 0	0.51%	42.448.320 ,00	0.53%	43.297.286 ,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG STATISTIK					152.999.000, 00		156.058.980, 00		159.180.160, 00		162.363.76 3,00		165.611.03 8,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN STATISTIK SEKTORAL					152.999.000, 00		156.058.980, 00		159.180.160, 00		162.363.76 3,00		165.611.03 8,00	
Tercapainya Indeks kolaborasi, Pembangunan integrasi, dan Statistik (IPS) standardisasi dalam penyelenggaraa n Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	0	0	1	152.999.000, 00	1	156.058.980, 00	1	159.180.160, 00	1	162.363.76 3,00	1	165.611.03 8,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21 - URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG PERSANDIAN					75.517.000,0 0		77.027.340,0 0		78.567.887,0 0		80.139.245 ,00		81.742.029 ,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					75.517.000,0 0		77.027.340,0 0		78.567.887,0 0		80.139.245 ,00		81.742.029 ,00	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	1	1	1	75.517.000,0 0	1	77.027.340,0 0	1	78.567.887,0 0	1	80.139.245 ,00	1	81.742.029 ,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					2.862.932.62 3,00		2.917.393.48 4,00		2.976.645.93 0,00		2.996.893. 010,00		3.045.878. 363,00	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANG AN KEBUDAYAAN					1.460.575.70 0,00		1.460.575.70 0,00		1.460.575.70 0,00		1.460.575. 700,00		1.460.575. 700,00	
Perlindungan Pemanfaatan Objek Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	100	100	100	1.460.575.70 0,00	100	1.460.575.70 0,00	100	1.460.575.70 0,00	100	1.460.575. 700,00	100	1.460.575. 700,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar	5	10	15		20		26		30		35		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	muatan lokal (bahasa daerah atau budaya lokal) dan/atau ekskul kesenian (%)													
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANG AN KESENIAN TRADISIONAL					973.043.047, 00		992.503.908, 00		1.012.353.98 6,00		1.032.601. 066,00		1.053.253. 087,00	
SDM yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Kesenian Tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	90	90	90	973.043.047, 00	90	992.503.908, 00	95	1.012.353.98 6,00	100	1.032.601. 066,00	100	1.053.253. 087,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal (bahasa daerah atau budaya lokal) dan/atau ekskul kesenian (%)	35	45	50		55		60		65		70		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					210.382.910, 00		210.382.910, 00		210.382.910, 00		210.382.91 0,00		210.382.91 0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peningkatan Kapasitas SDM Terkait Sejarah dan Pelestarian Cagar Budaya serta Lembaga yang Berperan dalam Pengelolaan dan Promosi Sejarah Lokal	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	0	20	25	210.382.910,00	30	210.382.910,00	35	210.382.910,00	40	210.382.910,00	45	210.382.910,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi tempat/peninggalan sejarah/warisan budaya bersifat kebendaan (%)	0	25	30		35		40		45		47		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					178.930.966,00		178.930.966,00		193.333.334,00		193.333.334,00		226.666.666,00	
Jumlah Objek yang diduga Cagar Budaya yg dapat ditetapkan menjadi Objek Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)	100	100	100	178.930.966,00	100	178.930.966,00	100	193.333.334,00	100	193.333.334,00	100	226.666.666,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	0	0	25		25		25		25		0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					40.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		95.000.000,00	
meningkatnya pengelolaan museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	0	0	0	40.000.000,00	0	75.000.000,00	200	100.000.000,00	300	100.000.000,00	500	95.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					11.663.858,536,00		11.890.644,894,00		12.128.457,786,00		12.371.026,945,00		12.618.447,481,00	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.418.121,914,00		6.546.484,353,00		6.677.414,037,00		6.810.962,319,00		6.947.181,567,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah Dalam	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	82,5	82,8	83	6.418.121,914,00	83,5	6.546.484,353,00	84	6.677.414,037,00	84,5	6.810.962,319,00	85	6.947.181,567,00	Dinas Perpustakaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyelenggaraa n Pemerintahan														
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAA N					5.091.191.47 2,00		5.193.015.30 4,00		5.296.875.60 7,00		5.402.813. 121,00		5.510.869. 380,00	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)	70	70	71	5.091.191.47 2,00	72	5.193.015.30 4,00	73	5.296.875.60 7,00	74	5.402.813. 121,00	75	5.510.869. 380,00	Dinas Perpustakaan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					154.545.150, 00		151.145.237, 00		154.168.142, 00		157.251.50 5,00		160.396.53 4,00	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	0	1	1	154.545.150, 00	1	151.145.237, 00	1	154.168.142, 00	1	157.251.50 5,00	1	160.396.53 4,00	Dinas Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG KEARSIPAN					1.597.450.24 2,00		1.629.399.24 7,00		1.661.987.23 2,00		1.695.226. 975,00		1.729.131. 512,00	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					1.334.494.18 0,00		1.361.184.06 4,00		1.388.407.74 5,00		1.416.175. 899,00		1.444.499. 418,00	
Meningkatnya Tata Kelola	Tingkat Ketersediaan	70	70	71	1.334.494.18 0,00	72	1.361.184.06 4,00	73	1.388.407.74 5,00	74	1.416.175. 899,00	75	1.444.499. 418,00	Dinas Perpustakaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Arsip Dinamis dan Statis	Arsip (Persentase)													
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					232.356.062,00		237.003.183,00		241.743.247,00		246.578.112,00		251.509.670,00	
Meningkatnya Perlindungan Dari Penyelamatan Arsip Sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	0	1	1	232.356.062,00	1	237.003.183,00	1	241.743.247,00	1	246.578.112,00	1	251.509.670,00	Dinas Perpustakaan
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					30.600.000,00		31.212.000,00		31.836.240,00		32.472.964,00		33.122.424,00	
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	10	10	10	30.600.000,00	10	31.212.000,00	10	31.836.240,00	10	32.472.964,00	10	33.122.424,00	Dinas Perpustakaan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					10.488.884.277,00		10.828.429.463,00		11.177.158.750,00		11.541.905.713,00		11.899.993.092,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.658.884.27 7,00		7.708.429.46 3,00		7.758.358.75 0,00		7.814.725. 713,00		7.866.995. 092,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah (AKIP) (Angka)	0	89	89	7.658.884.27 7,00	89	7.708.429.46 3,00	89	7.758.358.75 0,00	89	7.814.725. 713,00	89	7.866.995. 092,00	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					1.680.000.00 0,00		1.892.000.00 0,00		2.100.000.00 0,00		2.314.000. 000,00		2.516.000. 000,00	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	90	91	92	1.680.000.00 0,00	92	1.892.000.00 0,00	92	2.100.000.00 0,00	92	2.314.000. 000,00	92	2.516.000. 000,00	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					265.000.000, 00		265.000.000, 00		270.000.000, 00		270.000.00 0,00		270.000.00 0,00	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	9	91	92	265.000.000, 00	92	265.000.000, 00	92	270.000.000, 00	92	270.000.00 0,00	92	270.000.00 0,00	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					105.000.000, 00		105.000.000, 00		105.000.000, 00		105.000.00 0,00		105.000.00 0,00	
Meningkatnya Pengawasan sumber daya ikan	Luasan Kawasan Konservasi (KmÂ²)	0,04	0,04	0,05	105.000.000, 00	0,06	105.000.000, 00	0,07	105.000.000, 00	0,08	105.000.00 0,00	0,09	105.000.00 0,00	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					780.000.000, 00		858.000.000, 00		943.800.000, 00		1.038.180. 000,00		1.141.998. 000,00	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	44,27	46	46	780.000.000, 00	46	858.000.000, 00	46	943.800.000, 00	46	1.038.180. 000,00	46	1.141.998. 000,00	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.26 - URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG PARIWISATA					10.309.282.7 53,00		12.857.515.5 83,00		10.939.189.3 88,00		11.442.779 .015,00		14.318.740 .061,00	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA					5.860.282.75 3,00		5.918.885.58 3,00		5.978.074.43 8,00		6.037.855. 183,00		6.098.233. 735,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraa n Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah (AKIP) (Angka)	74,56	82	82,82	5.860.282.753,00	83,23	5.918.885.583,00	83,65	5.978.074.438,00	84,06	6.037.855.183,00	84,48	6.098.233.735,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					2.000.000.000,00		5.700.000.000,00		3.498.000.000,00		3.847.800.000,00		6.833.380.000,00	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata&	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	21,40	5,00	6,00	2.000.000.000,00	7,00	5.700.000.000,00	8,00	3.498.000.000,00	8,50	3.847.800.000,00	9,00	6.833.380.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					665.000.000,00		672.000.000,00		626.541.850,00		666.092.585,00		672.215.903,00	
&Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata&	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	20,00	20,00	20,00	665.000.000,00	22,00	672.000.000,00	22,00	626.541.850,00	25,00	666.092.585,00	25,00	672.215.903,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANG AN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN					1.475.000.000,00		252.500.000,00		558.025.000,00		607.575.250,00		385.651.002,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PERLINDUNGA N HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL														
Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif														
&Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif&	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	0	0	0	1.475.000.00 0,00	0	252.500.000, 00	5	558.025.000, 00	5	607.575.25 0,00	5	385.651.00 2,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANG AN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					309.000.000, 00		314.130.000, 00		278.548.100, 00		283.455.99 7,00		329.259.42 1,00	
&Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif&	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	0,00	0,00	1,00	309.000.000, 00	1,00	314.130.000, 00	3,00	278.548.100, 00	4,00	283.455.99 7,00	5,00	329.259.42 1,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3.27 - URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG PERTANIAN					1.305.000.00 0,00		1.367.320.00 0,00		1.435.048.00 0,00		1.497.946. 959,00		1.506.107. 938,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANG AN SARANA PERTANIAN					204.000.000, 00		208.000.000, 00		212.241.600, 00		216.484.43 2,00		220.816.16 0,00	
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	0	80	85	204.000.000, 00	85	208.000.000, 00	85	212.241.600, 00	85	216.484.43 2,00	85	220.816.16 0,00	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANG AN PRASARANA PERTANIAN														
Meningkatnya Distribusi dan Kualiatas Pertanian														
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIA N KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					685.000.000, 00		735.000.000, 00		790.000.000, 00		840.000.00 0,00		835.000.00 0,00	
Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis	0	75	80	685.000.000, 00	85	735.000.000, 00	85	790.000.000, 00	85	840.000.00 0,00	85	835.000.00 0,00	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(PHMS) (Dokumen)													
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIA N DAN PENANGGULAN GAN BENCANA PERTANIAN														
Persentase Penanganan Bencana Pertanian														
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					51.000.000,0 0		52.020.000,0 0		53.060.400,0 0		54.121.607 ,00		55.204.040 ,00	
Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian (Angka)	0	2	5	51.000.000,0 0	7	52.020.000,0 0	7	53.060.400,0 0	8	54.121.607 ,00	10	55.204.040 ,00	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					365.000.000, 00		372.300.000, 00		379.746.000, 00		387.340.92 0,00		395.087.73 8,00	
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	0	100	100	365.000.000, 00	100	372.300.000, 00	100	379.746.000, 00	100	387.340.92 0,00	100	395.087.73 8,00	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					13.943.045.5 66,00		14.569.585.5 66,00		15.276.367.8 44,00		15.952.997 .844,00		16.665.597 .844,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					102.000.000, 00		104.040.000, 00		106.020.000, 00		108.000.00 0,00		110.000.00 0,00	
Meningkatnya Pembedahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	30	35	40	102.000.000, 00	45	104.040.000, 00	50	106.020.000, 00	55	108.000.00 0,00	60	110.000.00 0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					10.300.000.0 00,00		10.815.000.0 00,00		11.351.000.0 00,00		11.879.000 .000,00		12.464.000 .000,00	
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	33,33	16,67	16,67	10.300.000.0 00,00	16,67	10.815.000.0 00,00	16,67	11.351.000.0 00,00	16,67	11.879.000 .000,00	16,67	12.464.000 .000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					2.400.000.00 0,00		2.509.500.00 0,00		2.621.750.00 0,00		2.768.400. 000,00		2.894.000. 000,00	
Pemantauan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan	6,12	6	6	2.400.000.00 0,00	6	2.509.500.00 0,00	6	2.621.750.00 0,00	6	2.768.400. 000,00	6	2.894.000. 000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pokok dan Barang Penting	Pokok Dan Barang Penting (Persentase)													
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANG AN EKSPOR					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000, 00		5.000.000, 00	
Meningkatnya Jangkauan Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	20	68	68	5.000.000,00	68	5.000.000,00	68	5.000.000,00	68	5.000.000, 00	68	5.000.000, 00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISAS I DAN PERLINDUNGA N KONSUMEN					1.131.045.56 6,00		1.131.045.56 6,00		1.187.597.84 4,00		1.187.597. 844,00		1.187.597. 844,00	
Presentase Alat- alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapan (UTTP) yang Ditera/Tera Ulang	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapann ya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	100	100	100	1.131.045.56 6,00	100	1.131.045.56 6,00	100	1.187.597.84 4,00	100	1.187.597. 844,00	100	1.187.597. 844,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000, 00		5.000.000, 00	
Jumlah Promosi Penggunaan dan Pemasaran	Persentase Promosi Produk Lokal	20	30	30	5.000.000,00	30	5.000.000,00	30	5.000.000,00	30	5.000.000, 00	30	5.000.000, 00	Dinas Perindustrian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Produk Dalam Negeri	yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)													dan Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					11.567.500.000,00		12.053.670.000,00		12.359.485.500,00		12.649.135.450,00		13.156.177.900,00	
3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.405.500.000,00		10.731.670.000,00		10.849.485.500,00		10.969.135.450,00		11.314.177.900,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	80,53	81,22	81,88	10.405.500.000,00	82,12	10.731.670.000,00	82,67	10.849.485.500,00	83,05	10.969.135.450,00	83,62	11.314.177.900,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah (AKIP) (Angka)	74,56	75	77		79		81		83		85		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					930.000.000,00		1.035.000.000,00		1.185.000.000,00		1.315.000.000,00		1.440.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Cakupan Bina Kelompok IKM/ Pengrajin	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	9,80	100	100	930.000.000, 00	100	1.035.000.00 0,00	100	1.185.000.00 0,00	100	1.315.000. 000,00	100	1.440.000. 000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIA N IZIN USAHA INDUSTRI					50.000.000,0 0		75.000.000,0 0		100.000.000, 00		125.000.00 0,00		150.000.00 0,00	
Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perizinan	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	0	25	30	50.000.000,0 0	35	75.000.000,0 0	40	100.000.000, 00	45	125.000.00 0,00	50	150.000.00 0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					182.000.000, 00		212.000.000, 00		225.000.000, 00		240.000.00 0,00		252.000.00 0,00	
Presentase Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang diterbitkan	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	40	45	46	182.000.000, 00	47	212.000.000, 00	48	225.000.000, 00	49	240.000.00 0,00	50	252.000.00 0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					61.662.834.5 59,00		65.425.211.3 82,00		68.303.412.5 81,00		71.832.059 .777,00		73.225.878 .752,00	
4.01.01 - PROGRAM					48.351.397.6 16,00		51.962.937.4 45,00		54.590.172.5 97,00		57.859.019 .989,00		59.088.129 .985,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah (AKIP) (Angka)	56,73	67	70	48.351.397.6 16,00	70	51.962.937.4 45,00	70	54.590.172.5 97,00	70	57.859.019 .989,00	70	59.088.129 .985,00	Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAN RAKYAT					11.167.879.6 87,00		11.281.179.3 72,00		11.493.907.9 80,00		11.714.680 .033,00		11.833.194 .812,00	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan, Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	100	100	100	11.167.879.6 87,00	100	11.281.179.3 72,00	100	11.493.907.9 80,00	100	11.714.680 .033,00	100	11.833.194 .812,00	Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					2.143.557.25 6,00		2.181.094.56 5,00		2.219.332.00 4,00		2.258.359. 755,00		2.304.553. 955,00	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan	100	100	100	2.143.557.25 6,00	100	2.181.094.56 5,00	100	2.219.332.00 4,00	100	2.258.359. 755,00	100	2.304.553. 955,00	Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pembangunan (Persentase)													
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					48.421.610.0 00,00		53.753.836.0 00,00		58.289.909.0 00,00		62.902.949 .508,00		67.898.346 .110,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA					24.921.610.0 00,00		27.883.836.0 00,00		31.042.509.0 00,00		34.271.401 .508,00		37.873.351 .150,00	
Tercapainya Pelayanan Dan Dukungan Yang Dibutuhkan Oleh Pemerintah Daerah Untuk Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Secara Efektif Dan Sesuai Ketentuan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah (AKIP) (Angka)	79,16	80	81	24.921.610.0 00,00	82	27.883.836.0 00,00	83	31.042.509.0 00,00	84	34.271.401 .508,00	85	37.873.351 .150,00	Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					23.500.000.0 00,00		25.870.000.0 00,00		27.247.400.0 00,00		28.631.548 .000,00		30.024.994 .960,00	
meningkatnya kualitas persidangan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraa	100	100	100	23.500.000.0 00,00	100	25.870.000.0 00,00	100	27.247.400.0 00,00	100	28.631.548 .000,00	100	30.024.994 .960,00	Sekretariat DPRD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dan kajian peraturan perundang-undangan, meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	n Pemerintahan (Persentase)													
5.01 - PERENCANAAN					10.504.874.980,00		10.863.782.480,00		10.878.239.967,00		12.087.020.594,00		13.763.323.683,00	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.039.874.980,00		9.313.782.480,00		9.293.239.967,00		10.467.020.594,00		11.698.323.683,00	
Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah (AKIP) (Angka)	79	80	82	9.039.874.980,00	83	9.313.782.480,00	85	9.293.239.967,00	87	10.467.020.594,00	90	11.698.323.683,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					790.000.000,00		865.000.000,00		890.000.000,00		915.000.000,00		1.340.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Persentase Keselarasan RPJMD dengan	100	100	100	790.000.000,00	100	865.000.000,00	100	890.000.000,00	100	915.000.000,00	100	1.340.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pembangunan Daerah	RKPD (Persentase)													
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	0	100	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					675.000.000,00		685.000.000,00		695.000.000,00		705.000.000,00		725.000.000,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan, Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	0	100	100	675.000.000,00	100	685.000.000,00	100	695.000.000,00	100	705.000.000,00	100	725.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
bidang perekonomian dan SDA														
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	0	100	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	0	100	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah
5.02 - KEUANGAN					42.578.832.8 48,00		43.430.409.5 04,00		44.299.017.6 94,00		45.184.998 .048,00		46.088.698 .010,00	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA					28.009.799.8 66,00		28.569.995.8 63,00		29.141.395.7 80,00		29.724.223 .696,00		30.318.708 .170,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	76,37	76,5	76,75	28.009.799.8 66,00	77	28.569.995.8 63,00	78	29.141.395.7 80,00	79	29.724.223 .696,00	80	30.318.708 .170,00	Badan Pengelolaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
publik dan tata kelola pemerintahan	dan Pemerintah (AKIP) (Angka)													Kuangan Aset Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	75	80	81		82		83		84		85		Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					10.052.653.2 38,00		10.253.706.3 02,00		10.458.780.4 28,00		10.667.956 .037,00		10.881.315 .158,00	
Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100	100	10.052.653.2 38,00	100	10.253.706.3 02,00	100	10.458.780.4 28,00	100	10.667.956 .037,00	100	10.881.315 .158,00	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	5	4,7	4,5		4,3		4,2		4,1		4		Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	Wajar Denga n Penge cualia n	Wajar Tanpa Penge cualia n	Wajar Tanpa Pengecua lian		Wajar Tanpa Pengecua lian		Wajar Tanpa Pengecua lian		Wajar Tanpa Pengecua lian		Wajar Tanpa Pengecuali an		Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.402.041.60 6,00		1.430.082.43 8,00		1.458.684.08 7,00		1.487.857. 768,00		1.517.614. 924,00	
Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	0	6,46	3,29	1.402.041.60 6,00	3,29	1.430.082.43 8,00	3,29	1.458.684.08 7,00	3,29	1.487.857. 768,00	3,29	1.517.614. 924,00	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					3.114.338.13 8,00		3.176.624.90 1,00		3.240.157.39 9,00		3.304.960. 547,00		3.371.059. 758,00	
Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	0,2	0,3	0,4	3.114.338.13 8,00	0,42	3.176.624.90 1,00	0,45	3.240.157.39 9,00	0,47	3.304.960. 547,00	0,48	3.371.059. 758,00	Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
5.03 - KEPEGAWAIAN					15.505.442.8 24,00		18.900.542.8 24,00		19.150.542.8 24,00		19.150.542 .824,00		19.150.542 .824,00	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA					10.414.422.8 24,00		10.414.422.8 24,00		10.414.422.8 24,00		10.414.422 .824,00		10.414.422 .824,00	
Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	81	81	81	10.414.422.8 24,00	81	10.414.422.8 24,00	81	10.414.422.8 24,00	81	10.414.422 .824,00	81	10.414.422 .824,00	Badan Kepegawaian Daerah
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah (AKIP) (Angka)	86	87	87		87		87		87		87		Badan Kepegawaian Daerah
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					5.091.020.00 0,00		8.486.120.00 0,00		8.736.120.00 0,00		8.736.120. 000,00		8.736.120. 000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Nilai Sistem Merit	Persentase Penangan Kasus Disiplin (%)	100	100	100	5.091.020.00 0,00	100	8.486.120.00 0,00	100	8.736.120.00 0,00	100	8.736.120. 000,00	100	8.736.120. 000,00	Badan Kepegawaian Daerah
	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%)	5,72	5,77	5,83		5,88		5,93		6,00		6,50		Badan Kepegawaian Daerah
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					1.655.000.00 0,00		1.655.000.00 0,00		1.655.000.00 0,00		1.655.000. 000,00		1.655.000. 000,00	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANG AN SUMBER DAYA MANUSIA					1.655.000.00 0,00		1.655.000.00 0,00		1.655.000.00 0,00		1.655.000. 000,00		1.655.000. 000,00	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional														
Meningkatnya layanan penjaminan mutu dan sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)	5,72	5,77	5,83	1.655.000.00 0,00	5,88	1.655.000.00 0,00	5,93	1.655.000.00 0,00	6,00	1.655.000. 000,00	6,05	1.655.000. 000,00	Badan Kepegawaian Daerah
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN					1.173.000.00 0,00		808.000.000, 00		833.000.000, 00		708.000.00 0,00		698.000.00 0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH					823.000.000, 00		718.000.000, 00		563.000.000, 00		418.000.00 0,00		428.000.00 0,00	
Terlaksananya Kajian Penelitian dan Pengembangan	Persentase Penelitian / Kajian yang Didiseminasi kan (%)	20	20	20	823.000.000, 00	20	718.000.000, 00	20	563.000.000, 00	20	418.000.00 0,00	20	428.000.00 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					350.000.000, 00		90.000.000,0 0		270.000.000, 00		290.000.00 0,00		270.000.00 0,00	
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Indeks Inovasi Daerah (Angka)	38,64	40,2	42,5	350.000.000, 00	44,3	90.000.000,0 0	45	270.000.000, 00	48	290.000.00 0,00	50,20	270.000.00 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					14.580.900.0 00,00		14.872.518.0 00,00		15.169.967.9 60,00		15.473.367 .727,00		15.782.835 .081,00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH N DAERAH KABUPATEN/K OTA					12.540.900.0 00,00		12.791.718.0 00,00		13.047.552.3 60,00		13.308.503 .407,00		13.574.673 .475,00	
Terlaksananya Kegiatan Penunjang Pelaksanaan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi dan	79,71	82	83	12.540.900.0 00,00	85	12.791.718.0 00,00	87	13.047.552.3 60,00	89	13.308.503 .407,00	91	13.574.673 .475,00	Inspektorat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Pemerintah (AKIP) (Angka)													
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	79,42	81	83		85		87		88,50		89		Inspektorat
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENGAWASAN					1.377.000.00 0,00		1.404.540.00 0,00		1.432.630.40 0,00		1.461.283. 416,00		1.490.509. 084,00	
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah	Persentase Pendampingan, Asistensi dan Konsultasi yang Dilaksanakan Sesuai Prosedur Oleh Perangkat Daerah (%)	0	70,00	73,00	1.377.000.00 0,00	75,00	1.404.540.00 0,00	77,00	1.432.630.40 0,00	78,00	1.461.283. 416,00	80,00	1.490.509. 084,00	Inspektorat
	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	80,42	90,00	92,00		94,00		96,00		96,00		97,00		Inspektorat
	Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan Aparat Pengawas Intern	91,03	95,50	95,50		95,50		96,50		96,50		96,50		Inspektorat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pemerintah (APIP) (%)													
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGA N DAN ASISTENSI					663.000.000, 00		676.260.000, 00		689.785.200, 00		703.580.90 4,00		717.652.52 2,00	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kegiatan Pendampingan /Asistensi Perangkat Daerah yang Dilakuk an (Kegiatan)	-	15	18	663.000.000, 00	20	676.260.000, 00	22	689.785.200, 00	24	703.580.90 4,00	26	717.652.52 2,00	Inspektorat
7.01 - KECAMATAN					45.291.474.9 78,00		46.422.021.1 21,00		47.737.885.2 50,00		49.117.884 .379,00		50.777.396 .232,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH N DAERAH KABUPATEN/K OTA					29.107.006.3 34,00		29.727.098.6 66,00		30.517.801.4 91,00		31.332.360 .222,00		32.417.805 .225,00	
Terlaksananya Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah (AKIP) (Angka)	86,56	87	87,05	8.288.185.29 0,00	87,10	8.453.948.99 6,00	87,15	8.623.027.97 6,00	87,20	8.795.488. 538,00	87,25	8.971.398. 310,00	Kecamatan Sibolga Kota

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Daerah Kabupate/ Kota														
Terlaksananya Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kot a	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah (AKIP) (Angka)	78,36	78,61	78,86	5.998.324.88 9,00	79,11	6.068.671.38 7,00	79,36	6.140.424.81 5,00	79,61	6.213.613. 311,00	79,86	6.288.265. 577,00	Kecamatan Sibolga Sambas
Terlaksananya Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kot a	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah (AKIP) (Angka)	81	81,25	81,50	6.305.303.69 9,00	82	6.424.026.20 4,00	82,50	6.525.374.01 7,00	83	6.622.384. 957,00	83,50	6.781.824. 251,00	Kecamatan Sibolga Selatan
Terlaksananya Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kot a	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah (AKIP) (Angka)	76	80	81	8.515.192.45 6,00	82	8.780.452.07 9,00	83	9.228.974.68 3,00	84	9.700.873. 416,00	85	10.376.317 .087,00	Kecamatan Sibolga Utara

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					4.191.786.10 0,00		4.280.645.38 4,00		4.373.263.19 9,00		4.469.814. 590,00		4.570.480. 121,00	
Terlaksananya Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	80	81	82	1.650.000.00 0,00	83	1.650.000.00 0,00	84	1.650.000.00 0,00	85	1.650.000. 000,00	86	1.650.000. 000,00	Kecamatan Sibolga Sambas
Terlaksananya Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	84	84,2	84,5	1.320.788.10 0,00	84,7	1.386.827.50 4,00	85	1.456.168.87 9,00	85,2	1.528.977. 323,00	85,5	1.605.426. 188,00	Kecamatan Sibolga Utara
Terlaksananya Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	84	85	86	640.999.000, 00	87	653.818.980, 00	88	666.895.360, 00	89	680.233.26 7,00	90	693.837.93 3,00	Kecamatan Sibolga Kota
Terlaksananya Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	83	85	86	579.999.000, 00	87	589.998.900, 00	88	600.198.960, 00	89	610.604.00 0,00	90	621.216.00 0,00	Kecamatan Sibolga Selatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					10.717.654.1 86,00		11.092.917.4 57,00		11.477.011.5 29,00		11.895.231 .021,00		12.315.635 .769,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
a Kegiatan Koordinasi, Pemberdayaa n Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan yang Melakukan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat (%)	85	100	100	1.439.545.186,00	100	1.439.545.186,00	100	1.439.545.186,00	100	1.439.545.186,00	100	1.439.545.186,00	Kecamatan Sibolga Sambas
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kelurahan yang Melakukan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat (%)	85	100	100	1.213.024.000,00	100	1.237.284.021,00	100	1.253.869.700,00	100	1.287.271.300,00	100	1.304.704.500,00	Kecamatan Sibolga Selatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Persentase Kelurahan yang Melakukan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat (%)	85	100	100	1.741.700.000,00	100	1.776.534.000,00	100	1.812.064.680,00	100	1.848.305.974,00	100	1.885.272.094,00	Kecamatan Sibolga Kota
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi, Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan yang Melakukan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat (%)	85	100	100	6.323.385.000,00	100	6.639.554.250,00	100	6.971.531.963,00	100	7.320.108.561,00	100	7.686.113.989,00	Kecamatan Sibolga Utara
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					396.584.212,00		408.395.185,00		420.736.343,00		433.632.986,00		447.111.658,00	
Terlaksananya a Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang	90	91	92	100.000.000,00	93	100.000.000,00	94	100.000.000,00	95	100.000.000,00	96	100.000.000,00	Kecamatan Sibolga Sambas

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Terselesaikan (%)													
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terselesaikan (%)	90	91	92	195.976.300,00	93	205.775.115,00	94	216.063.871,00	95	226.867.064,00	96	238.210.418,00	Kecamatan Sibolga Utara
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terselesaikan (%)	90	91	92	25.303.956,00	93	25.810.035,00	94	26.326.236,00	95	26.852.761,00	96	27.389.816,00	Kecamatan Sibolga Selatan
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terselesaikan (%)	90	91	92	75.303.956,00	93	76.810.035,00	94	78.346.236,00	95	79.913.161,00	96	81.511.424,00	Kecamatan Sibolga Kota
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					828.987.912,00		863.019.070,00		898.628.422,00		935.892.409,00		974.891.245,00	
Terlaksananya a Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelayanan Penyelenggara n Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	0	100	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	Kecamatan Sibolga Sambas

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sesuai Ketentuan (%)													
Terlaksananya Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelayanan Penyelenggaraa n Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan (%)	0	100	100	598.380.000, 00	100	628.299.000, 00	100	659.713.950, 00	100	692.699.64 7,00	100	727.334.62 9,00	Kecamatan Sibolga Utara
Terlaksananya Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelayanan Penyelenggaraa n Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan (%)	0	100	100	140.303.956, 00	100	143.110.035, 00	100	145.972.236, 00	100	148.891.68 1,00	100	151.869.51 4,00	Kecamatan Sibolga Kota
Terlaksananya Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelayanan Penyelenggaraa n Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan (%)	0	100	100	65.303.956,0 0	100	66.610.035,0 0	100	67.942.236,0 0	100	69.301.081 ,00	100	70.687.102 ,00	Kecamatan Sibolga Selatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN					49.456.234,0 0		49.945.359,0 0		50.444.266,0 0		50.953.151 ,00		51.472.214 ,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEMERINTAHAN DESA														
Terlaksananya a Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Kordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan (Laporan)	12	12	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	Kecamatan Sibolga Sambas
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Kordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan (Laporan)	12	12	12	24.456.234,00	12	24.945.359,00	12	25.444.266,00	12	25.953.151,00	12	26.472.214,00	Kecamatan Sibolga Selatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					12.255.883.135,00		13.282.335.042,00		14.267.381.743,00		30.329.940.877,00		29.688.095.769,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.611.000.000,00		2.726.500.000,00		2.816.000.000,00		2.896.500.000,00		2.967.000.000,00	
Jumlah Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	0	60,15	62,35	2.611.000.000,00	65,45	2.726.500.000,00	67,30	2.816.000.000,00	69,50	2.896.500.000,00	70,15	2.967.000.000,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Daerah Kabupaten Kota														
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah (AKIP) (Angka)	80	88	89		90		91		92		93		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					924.883.135, 00		956.980.798, 00		989.320.414, 00		1.021.906. 822,00		1.054.744. 958,00	
Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	76	77,50	79,07	924.883.135, 00	80,65	956.980.798, 00	82,26	989.320.414, 00	83,91	1.021.906. 822,00	85,59	1.054.744. 958,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANG AN ETIKA					5.420.000.00 0,00		6.241.000.00 0,00		7.046.050.00 0,00		22.886.202 .500,00		22.080.512 .625,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
SERTA BUDAYA POLITIK														
Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	80	81	83	5.420.000.00 0,00	84	6.241.000.00 0,00	86	7.046.050.00 0,00	88	22.886.202 .500,00	90	22.080.512 .625,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					2.800.000.00 0,00		2.907.854.24 4,00		2.966.011.32 9,00		3.025.331. 555,00		3.085.838. 186,00	
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Oragnisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Organisasi Masyarakat)	80	80	82	2.800.000.00 0,00	84	2.907.854.24 4,00	86	2.966.011.32 9,00	88	3.025.331. 555,00	90	3.085.838. 186,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,					500.000.000, 00		450.000.000, 00		450.000.000, 00		500.000.00 0,00		500.000.00 0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
SOSIAL, DAN BUDAYA														
Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	0	70	72	500.000.000, 00	74	450.000.000, 00	76	450.000.000, 00	78	500.000.00 0,00	80	500.000.00 0,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					1.035.170.25 0.713.00		1.120.397.96 4.123.00		1.186.906.94 9.324.00		1.237.334. 589.815.00		1.304.308. 519.675.00	

Sumber: Data diolah

Tabel 4. 2 Dukungan Terhadap Program Prioritas/Proyeksi Strategis Daerah (PSD) RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN DAERAH	PROGRAM
			UTAMA	PENDUKUNG		
PP1. PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM SEKOLAH UNGGULAN BERBASIS PENINGKATAN SKILL YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEBUTUHAN INDUSTRI DAN POTENSI WILAYAH DI TINGKAT LOKAL						
3. Rehabilitasi Ruang Kelas SMA/SMK/SLB sebanyak 490 Sekolah	2025	Pendataan valid rehabilitasi ruang kelas Tahun 2026-2029 •Provinsi Sumatera Utara (Dokumen <i>Aprasial</i>)	Dinas Pendidikan	PUPR (<i>Appraisal</i> /Penilaian Kerusakan, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	Pembangunan infrastruktur akses jalan yang baik dari dan menuju sekolah yang akan dilakukan kegiatan rehabilitasi ruangan kelas rusak	
	2026	Pelaksanaan Fisik Tahap I – 150 Ruang Kelas (2026) di 21 Kabupaten/Kota •Medan, Binjai, Langkat, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Asahan, Tanjungbalai, Labuhanbatu, Pematangsiantar, Samosir, Toba, Sibolga , Padangsidempuan, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padangsidempuan, Padang Lawas Utara, Nias, Nias Selatan, Gunungsitoli, Nias Utara, Nias Barat				1. Program Pengelolaan Pendidikan (Dinas Pendidikan) 2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Dinas Kominfo) 3. Program Penataan Bangunan Gedung dan Program Penyelenggaraan Jalan (Dinas PUPR)
	2027	Pelaksanaan Fisik Tahap II – 150 Ruang Kelas (2027) di 22 Kabupaten/Kota •Medan, Binjai, Langkat,				

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN DAERAH	PROGRAM
			UTAMA	PENDUKUNG		
		Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Asahan, Tanjungbalai, Labuhanbatu, Pematangsiantar, Samosir, Toba, Sibolga , Padangsidimpuan, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Padang Lawas Utara, Nias, Nias Selatan, Gunungsitoli, Nias Utara, Nias Barat				
	2028	Pelaksanaan Fisik Tahap III – 190 Ruang Kelas (2028) di 28 Kabupaten/Kota •Medan, Binjai, Langkat, Karo, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Dairi, Tebing Tinggi, Batu Bara, Asahan, Tanjungbalai, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Simalungun, Pematangsiantar, Samosir, Toba, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Sibolga , Padangsidimpuan, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Padang Lawas				
	2029	Monitoring, Evaluasi & Pemutakhiran Data (2029)				
	2030	Tidak ada				
4. Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru	2025	Tidak ada	Dinas Pendidikan	PUPR (Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publikasi	Penyediaan atau hibah Lahan dari Kabupaten/Kota untuk lokasi Pembangunan	
	2026	Tidak ada				
	2027	Tidak ada				

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN DAERAH	PROGRAM
			UTAMA	PENDUKUNG		
				kegiatan)	Ruang Kelas Baru sesuai kebutuhan. Pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan akses jalan yang baik dari dan menuju sekolah	
	2028	Pembangunan Ruang Kelas Baru sebanyak 30 Ruang Kelas Baru di 13 Kabupaten/Kota •Binjai, Langkat, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Asahan, Tanjungbalai, Samosir, Toba, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Sibolga Pembangunan 2 unit Sekolah Baru				1. Program Pengelolaan Pendidikan (Dinas Pendidikan) 2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Dinas Kominfo) 3. Program Penataan Bangunan Gedung dan Program Penyelenggaraan Jalan (Dinas PUPR)
	2029	Tidak ada				
PP 3 KESEHATAN YANG TERINTEGRASI DI BEBERAPA TITIK KAWASAN YANG MENJADI SENTRA LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT TERPADU						
8. Digitalisasi sistem kesehatan terintegrasi (<i>Sumut e-Health Integration system</i>)	2025	Penyusunan Kajian dan Bisnis Proses Platform <i>e-Health Integration System</i> Tahun 2025 Pembangunan Aplikasi Tahun	Dinas Kesehatan	Dinas Kominfo (Penyediaan Web, Server dan Publikasi Kegiatan)	-Penyediaan data kepesertaan JKN Kabupaten/Kota -Sosialisasi dan edukasi	1. Program Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan dan

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN DAERAH	PROGRAM
			UTAMA	PENDUKUNG		
		2025 <i>Launching Aplikasi Sumut e-Health Integration System</i> Tahun 2025 • 33 Kabupaten/Kota			platform kepada faskes tingkat Kabupaten/Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan) 2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Dinas Kominfo)
	2026	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2026 Pengembangan Aplikasi Sumut <i>e-Health Integration System</i> Tahun 2026-2029 33 Kabupaten/Kota				1. Program Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan) 2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Dinas Kominfo)
	2027	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2027 Pengembangan Aplikasi Sumut <i>e-Health Integration System</i> Tahun 2026-2029 33 Kabupaten/Kota				1. Program Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan dan Program Pemenuhan

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN DAERAH	PROGRAM
			UTAMA	PENDUKUNG		
						Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan) 2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Dinas Kominfo)
	2028	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2028 Pengembangan Aplikasi Sumut <i>e-Health Integration System</i> Tahun 2026-2029 33 Kabupaten/Kota				1. Program Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan) 2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Dinas Kominfo)
	2029	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2029 Pengembangan Aplikasi Sumut <i>e-Health Integration System</i> Tahun 2026-2029 33 Kabupaten/Kota				1. Program Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN DAERAH	PROGRAM
			UTAMA	PENDUKUNG		
						Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan) 2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Dinas Kominfo)
	2030	Tidak ada				
9. Beasiswa Ikatan Dinas bagi Dokter Spesialis dan dokter spesialis residen di Wilayah Kurang Terlayani (2025 – 2030)	2025	Tidak ada	Dinas Kesehatan	Badan Kepegawaian (Pelaksanaan assesmen kompetensi dokter spesialis sesuai kebutuhan, Pembinaan Monitoring kepada Badan Kepegawaian Kabupaten/Kota agar Dokter Spesialis yang sudah dididik tidak berpindah tempat kerja) Biro Pemotha (Fasilitasi Penyusunan Dokumen kerja sama dengan USU dan UGM) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	-Menyediakan data dokter umum yang memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh beasiswa dokter spesialis dan Mengidentifikasi jenis dan jumlah spesialis yang dibutuhkan di RSUD atau faskes daerah - Menyiapkan surat komitmen bersama dengan para Bupati/Wali Kota yang menyatakan bahwa peserta dokter spesialis akan kembali ke daerah asal dan RSUD setempat - Menentukan jenis spesialis yang paling dibutuhkan - Kesiapan Sarana dan Prasarana RSUD	
	2026	Tidak ada				

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN DAERAH	PROGRAM
			UTAMA	PENDUKUNG		
					- Surat Penugasan & Dukungan Legal Formal - penyediaan Akomodasi dokter residen	
	2027	Tidak Ada				
	2028	- Pemenuhan dokter spesialis melalui pemberian beasiswa bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yakni USU dan UGM - Distribusi dokter spesialis sebagai upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Primer dan Rujukan melalui dokter residen (Layanan Medis Merata) Tahun 2025-2030 • RSUD Kabupaten Batu Bara, RSUD Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah Kabupaten Serdang Bedagai, RSUD Tuan Rondahaim di Kabupaten Simalungun, RSUD Salak di Kabupaten Pakpak Bharat, RSUD Parapat Kabupaten Simalungun, RSUD Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, RSUD Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, RSUD Tapanuli Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, RSUD Dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar, RSUD Dr. FL Tobing Kota				1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dinas Kesehatan)

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN DAERAH	PROGRAM
			UTAMA	PENDUKUNG		
		Sibolga , RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai Kota Binjai, RSUD Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, Lanjutan 2027: 9 Orang, Lanjutan 2026: 8 Orang, Lanjutan 2022: 21 orang.				
	2029	Tidak ada				
	2030	- Pemuhan dokter spesialis melalui pemberian beasiswa bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yakni USU dan UGM - Distribusi dokter spesialis sebagai upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Primer dan Rujukan melalui dokter residen (Layanan Medis Merata) Tahun 2025-2030 • Kabupaten/Kota yang terintervensi pada Tahun 2026, 2027, 2028 dan 2029				
13. Perlindungan Sosial bagi Tenaga Kerja Rentan (Subsidi BPJS Ketenagakerjaan)	2025	1. Pendataan dan verifikasi 2. Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan (Pekerja rentan yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja dibawah standar) sebanyak 21.000 (APBD dan DBH Sawit) 3. Penguatan peran dan komitmen Kabupaten/Kota dalam pembiayaan dan regulasi (MoU Pemprov dengan Kabupaten dan Kota) - 33 Kabupaten/Kota di	Dinas Koperasi	Catatan Sipil • Penyediaan dan Verifikasi Data Identitas • Menyediakan data kependudukan yang valid (NIK, KK, KTP) sebagai prasyarat utama pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan. • Melakukan verifikasi dan sinkronisasi data dengan sistem BPJS,	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan, sementara Kabupaten/Kota berperan dalam menyiapkan: 1. Mendukung pelaksanaan agar bisa mencapai target <i>Universal Coverage</i>	1. Program Hubungan Industrial (Dinas Koperasi)

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN DAERAH	PROGRAM
			UTAMA	PENDUKUNG		
		Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2)		DTKS (Dinas Sosial), dan lembaga lain untuk memastikan data pekerja rentan terverifikasi secara administratif. • Dukungan Pemutakhiran Data DTKS, Bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk memastikan kesesuaian dan kelengkapan data identitas dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yang digunakan untuk menetapkan penerima bantuan iuran BPJS.	Jamsostek (UCJ) sebesar 60% sesuai RPJMD 2025-2029 2. Memberikan sosialisasi untuk masyarakat, khususnya untuk tenaga kerja rentan dan masyarakat yang berada di garis kemiskinan 3. Pengalokasian DBH sawit dan APBD dengan persentase pembagian 80 persen Kabupaten/Kota dan 20 persen provinsi utk perlindungan pekerja rentan miskin ekstrim desil 1 dan 2	
	2026	Perluasan kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.645 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% Kabupaten/Kota -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2		• Membantu mempercepat proses registrasi atau koreksi data calon penerima manfaat yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap. • BPJS Ketenagakerjaan BPJS		
	2027	Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.646 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% Kabupaten/Kota -33 Kabupaten/Kota di		Ketenagakerjaan berperan menyelenggarakan perlindungan sosial bagi pekerja melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja		

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN DAERAH	PROGRAM
			UTAMA	PENDUKUNG		
		Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2		(JKK): Perlindungan atas risiko kecelakaan selama bekerja.		
	2028	Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.647 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% Kabupaten/Kota -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2		• Jaminan Kematian (JKm): Santunan kepada ahli waris pekerja yang meninggal. • Jaminan Hari Tua (JHT): Tabungan jangka panjang bagi pekerja saat pensiun. • Jaminan Pensiun (JP): Penghasilan berkala untuk pekerja setelah pensiun. • Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Bantuan uang tunai, akses informasi kerja, dan pelatihan bagi pekerja yang terkena PHK. • Kominfo: Publikasi Kegiatan		
	2029	Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.648 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% Kabupaten/Kota -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2				
	2030	1. Pembayaran kepesertaan				

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN DAERAH	PROGRAM
			UTAMA	PENDUKUNG		
		pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.648 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% Kabupaten/Kota 2. Evaluasi menyeluruh dan pencapaian target cakupan 60% UCJ -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara				
PP.6 PENGEMBANGAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU						
20. Pengembangan Kawasan Unggulan Perikanan Tangkap dan Budidaya	2025	Kajian kampung nelayan dan budidaya	Dinas Perikanan	• Dinas Perindustrian dan Perdagangan – Pengolahan, pemasaran, dan ekspor produk perikanan. • Dinas Koperasi dan UKM – Penguatan kelembagaan usaha nelayan/pembudidaya. • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang – Pembangunan infrastruktur pendukung (jalan dan pelabuhan). • Dinas Kominfo: Publikasi, sosialisasi, dan edukasi masyarakat	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, sementara Kabupaten/Kota berperan dalam menyiapkan: - Pendataan kelompok nelayan dan pembudidaya Kabupaten/Kota - Klasterisasi - Sosialisasi dan Edukasi - Replikasi di daerah yang sama	
	2026	1. Pembuatan master plan 2. Pembangunan sarana prasana produksi				1. Program pengelolaan perikanan

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN DAERAH	PROGRAM
			UTAMA	PENDUKUNG		
		a. Perikanan tangkap: sampan, jala dan dermaga b. Perikanan budidaya: revitalisasi kolam, benih, pakan, kincir, saluran air, <i>automatic feeder</i> • Perikanan tangkap: kawasan Tapanuli Tengah- Sibolga , kawasan Asahan-Tanjungbalai, Nias Utara; • Perikanan budidaya: Kabupaten Simalungun, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai.				budidaya (Dinas Perikanan) 2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (Dinas Perikanan) 3. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Dinas Kominfo)
	2027	1. Pengembangan unit pengolahan ikan dalam bentuk coolbox dan gudang ikan 2. Kemitraan usaha dengan: • Dinas Perindustrian dan Perdagangan – Pengolahan, pemasaran, dan ekspor produk perikanan. • Dinas Koperasi dan UKM – Penguatan kelembagaan usaha nelayan/pembudidaya • Perikanan tangkap: Kawasan Tapanuli Tengah- Sibolga , kawasan Asahan-Tanjungbalai, Nias Utara; • Perikanan budidaya: Kabupaten Simalungun, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai.				
	2028	1. Sertifikasi mutu 2. Digitalisasi pemasaran dan sistem logistik hasil perikanan				

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN DAERAH	PROGRAM
			UTAMA	PENDUKUNG		
		3. Pembukaan akses pasar ekspor Kawasan perikanan tangkap: Kawasan Tapanuli Tengah- Sibolga (Ikan Asin), kawasan Asahan-Tanjungbalai (Ikan Teri), Nias Utara (Udang Beku) Kawasan perikanan budidaya: Kabupaten Simalungun (Ikan Dori), Deli Serdang (Ikan Mas), Langkat (Udang), Serdang Bedagai (Ikan Gurami).				
	2029	Tidak ada				
	2030	Tidak ada				
21. Pengawasan Konservasi Laut SEMESTA (Pemberdayaan Nelayan Sebagai Pasukan Penjaga Laut)	2025	Pokja Pengawas Laut, Peta digital kawasan rawan pelanggaran, draf rencana aksi	Dinas Perikanan	• BAPPELITBANG: Integrasi program SEMESTA dalam perencanaan daerah. • Dinas Lingkungan	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan	1. Program Pengelolaan Pelayaran (Dinas Perhubungan)
	2026	Laporan Patroli dan Peralatan + Aplikasi e-Mawas • Kabupaten/Kota dan perairan Pantai Timur dan Barat Sumatera Utara.		Hidup Provsu: Kebijakan dan pemantauan kualitas lingkungan laut. • Dinas Perhubungan Provsu: Dukungan transportasi laut dan keselamatan pelayaran patroli.	Perikanan, sementara Kabupaten/Kota berperan dalam menyiapkan: - Pendataan Nelayan Kabupaten/Kota - Klasterisasi - Sosialisasi dan Edukasi	2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Dinas Kominfo), 3. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Satpol PP)
	2027	Laporan Patroli dan Peralatan +		• Satpol PP Provsu:		4. Program

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN DAERAH	PROGRAM
			UTAMA	PENDUKUNG		
		Aplikasi e-Mawas • Kabupaten/Kota dan perairan Pantai Timur dan Barat Sumatera Utara.		Penegakan perda terkait konservasi laut. • Dinas Pariwisata Provsu: Sinergi dengan wisata bahari berkelanjutan. • Dinas Kominfo Provsu: Publikasi, sosialisasi, dan edukasi masyarakat.		Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi (Inspektorat), 5. Program Penanggulangan Bencana (BPBD)
	2028	Modul Hukum & Klinik Konsultasi. • Kabupaten/Kota dan perairan Pantai Timur dan Barat Sumatera Utara.		• Dinas Koperasi & UKM Provsu: Penguatan kelembagaan nelayan pengawas. • Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provsu: Kesiapsiagaan dan tanggap darurat di laut. • Inspektorat: Pengawasan dan pendampingan jalannya program		
	2029	Laporan Evaluasi dan strategi pengawas baru • Kabupaten/Kota dan perairan Pantai Timur dan Barat Sumatera Utara.				
	2030	Buku capaian dan film dokumenter • Kabupaten/Kota dan perairan Pantai Timur dan				

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN DAERAH	PROGRAM
			UTAMA	PENDUKUNG		
		Barat Sumatera Utara.				
PP 8 PARIWISATA YANG MENGGERAKKAN POTENSI ALAM LOKAL DI PEDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN MELIBATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT SECARA LANGSUNG (KOMUNITAS, PEMERINTAH DAERAH/DESA/KELURAHAN DAN PENGUSAHA LOKAL)						
30. Pembentukan & Pengembangan Kawasan Strategis Budaya, Parawisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi yang Terintegrasi (TATABUSE, SIBANDAN, SIPUAN, KARDAPAK dan BAHLIKE)	2025	Inventarisasi & Identifikasi SDM Kawasan (BUMDES/Pokdarwis/Pengelola Desa Wisata/UMKM); Penyusunan Regulasi Penetapan Kawasan Strategis; Penyusunan Masterplan • Sibolga -Pandan, Sipirok-Padangsidempuan, Bawomatoluo-Hilisimaetano-Sorake, Tanjung Pura-Tangkahan-Bukit Lawang-Sei Bingai, Karo-Dairi-Pakpak	Dinas Pariwisata	1. Dinas Koperasi & UMKM: Pelatihan dan Pembinaan kepada UMKM di Kawasan. 2. Dinas PUPR: Pembangunan Kawasan (jika ada pembangunan fisik); Peningkatan Akses Ruas Jalan Provinsi menuju Kawasan. 3. Dinas PMD: Pelatihan dan Pembinaan pengelola BUMDES Wisata 4. Dinas Kominfo: Penyediaan Fasilitas Digital di Kawasan; Publikasi Kegiatan	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, sementara Kabupaten/Kota berperan dalam: 1. Memastikan ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan Proyek Strategis; 2. Penyediaan Lahan yang <i>Clean & Clear</i> (jika terdapat pembangunan fisik); 3. Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi; 4. Pembentukan Tata	1. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Program Pemasaran Pariwisata (Dinas Pariwisata), 2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika (Dinas Kominfo)
	2026	Penataan Kawasan, Pembinaan, Pelatihan & Pendampingan bagi BUMDes/Pokdarwis/Pengelola Desa Wisata/UMKM dan				

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN DAERAH	PROGRAM
			UTAMA	PENDUKUNG		
		Peningkatan Aksesibilitas • Kawasan Strategis SIBANDAN			Kelola / Kelembagaan untuk Desa Wisata;	
	2027	Tidak ada			5. Pendampingan Desa Wisata; 6. Pendataan Potensi Unggulan Daerah di bidang Kebudayaan, Pariwisata & Ekonomi Kreatif;	
	2028	Tidak ada			7. Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan- Minum, Penyediaan Akomodasi (Homestay/Hotel), Penyedia Jasa Transportasi, Penyedia Jasa <i>Travel Agent</i>); 8. Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata; 9. Pendataan dan inventarisasi pelaku UMKM; 10. Pendampingan kepada pelaku UMKM; 11. Pelaksanaan <i>Event</i> Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berskala Nasional	
	2029	Tidak ada				
	2030	Tidak ada				

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN DAERAH	PROGRAM
			UTAMA	PENDUKUNG		
32. Pelaksanaan <i>Event</i> Internasional, pengembangan paket wisata dan digitalisasi promosi pariwisata global	2025	Penyelenggaraan event Trail of The King (Danau Toba), Aquabike, dan event F1H2O, dan evaluasi penyelenggaraan event Kawasan Pariwisata Prioritas Sumatera Utara (Event Internasional), Luar Negeri (Digitalisasi Promosi)	Dinas Pariwisata	1. Dinas Perhubungan: Memastikan ketersediaan transportasi dan lalu lintas saat event internasional dilaksanakan 2. Dinas Kesehatan: Dukungan Tenaga Kesehatan dan Ambulans 3. Dinas Koperasi &UMKM: Pelatihan dan pendampingan UMKM untuk mendukung pelaksanaan event internasional	1. Pelaksanaan Side Event saat pelaksanaan Event Internasional; 2. Pelaksanaan Promosi melalui media digital dan cetak; 3. Sosialisasi & Edukasi kepada Pelaku Usaha Pariwisata (Penyedia Jasa Akomodasi (Hotel & Homestay), Penyedia Jasa makan-minum, Penyedia Jasa Transportasi, dan <i>Travel Agent</i>);	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)/(Dishub) 2. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif (Dispora) 3. Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum (Satpol PP)
	2026	Uji coba & promosi paket wisata, Pengembangan website & media sosial destinasi, dan Kampanye digital internasional (video, influencer, konten kreatif); Penyusunan <i>Calender of Event</i> dan Penyelenggaraan <i>Event</i> Internasional Kawasan Pariwisata Provinsi Sibolga-Pandan, Sipirok-Padangsidiimpuan, Bawomatoluo-Hilisimaetano-Sorake, Tanjung Pura-Tangkahan-Bukit Lawang-Sei Bingai, Karo-Dairi-Pakpak (<i>Event</i> Internasional), Luar Negeri (Digitalisasi Promosi)		4. Dinas Kominfo: Memastikan ketersediaan jaringan digital saat pra <i>event-event</i> -pasca <i>event</i> internasional; publikasi kegiatan 5. Satpol PP: Keamanan Pelaksanaan <i>Event</i> dan ketertiban penyelenggaraan acara 6. Dinas Pemuda dan Olahraga; Pembinaan Pemuda untuk partisipasi dalam penyelenggaraan <i>event</i>	4. Pendataan & pendampingan terhadap UMKM; 5. Memastikan kelancaran aksesibilitas terutama saat pelaksanaan <i>Event</i> internasional (Pengaturan lalu lintas; Peningkatan kualitas jalan)	4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinkes), 5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)/Dinas Koperasi , 6. Program Pemasaran Pariwisata (Dinas

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN DAERAH	PROGRAM
			UTAMA	PENDUKUNG (<i>sport, e-sport, dsb</i>)		
						Pariwisata), 7. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika (Dinas Kominfo)
	2027	Penyelenggaraan <i>event</i> tematik baru (kuliner, minat khusus, budaya), dan Diversifikasi wisata minat khusus (<i>geo tourism, wellness, heritage, agro, religi</i>); Penyusunan <i>Calender of Event</i> dan Penyelenggaraan <i>Event Internasional</i> • Kawasan Pariwisata Provinsi Sibolga -Pandan, Sipirok-Padangsidimpuan, Bawomatoluo-Hilisimaetano-Sorake, Tanjung Pura-Tangkahan-Bukit Lawang-Sei Bingai, Karo-Dairi-Pakpak (Event Internasional), Luar Negeri (Digitalisasi Promosi)				
	2028	Penyusunan <i>Calender of Event</i> dan Penyelenggaraan <i>Event Internasional</i> . Melaksanakan kerja sama Sponshorship dalam mendukung pelaksanaan <i>event</i> ; Pendataan, Inventarsasi dan penyusunan kajian awal				

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN DAERAH	PROGRAM
			UTAMA	PENDUKUNG		
		terkait <i>event</i> tematik; Bersama dengan ASITA menyusun Paket-paket wisata; Melaksanakan kerja sama dengan influencer untuk mempromosikan pariwisata SUMUT; Melaksanakan kerja sama dengan platform pariwisata (traveloka, booking.com, tiket.com,dll). • Kawasan Pariwisata Provinsi Sibolga -Pandan, Sipirok-Padangsidempuan, Bawomatoluo-Hilisimaetano-Sorake, Tanjung Pura-Tangkahan-Bukit Lawang-Sei Bingai, Karo-Dairi-Pakpak (Event Internasional), Luar Negeri (Digitalisasi Promosi)				
	2029	Penyusunan <i>Calender of Event</i> dan Penyelenggaraan <i>Event</i> Internasional; Kemitraan dengan diaspora & pelaku pariwisata global, Integrasi penuh dengan platform pariwisata nasional dan global • Kawasan Pariwisata Provinsi Sibolga -Pandan, Sipirok-Padangsidempuan, Bawomatoluo-Hilisimaetano-Sorake, Tanjung Pura-Tangkahan-Bukit Lawang-Sei Bingai, Karo-Dairi-Pakpak (Event Internasional), Luar Negeri (Digitalisasi Promosi)				
	2030	Penyusunan <i>Calender of Event</i>				

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN DAERAH	PROGRAM
			UTAMA	PENDUKUNG		
		dan Penyelenggaraan <i>Event</i> Internasional; Kemitraan dengan diaspora & pelaku pariwisata global, Integrasi penuh dengan platform pariwisata nasional dan global • Kawasan Pariwisata Provinsi Sibolga -Pandan, Sipirok-Padangsidempuan, Bawomatoluo-Hilisimaetano-Sorake, Tanjung Pura-Tangkahan-Bukit Lawang-Sei Bingai, Karo-Dairi-Pakpak (<i>Event</i> Internasional), Luar Negeri (Digitalisasi Promosi)				
PP 16. MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL DAN BUDAYA YANG MENDUKUNG SUASANA YANG HARMONIS, TOLERAN DAN RUKUN						
49. Bantuan Hibah Rumah Ibadah di 33 Kabupaten/Kota	2025	-Penyusunan perubahan Pergub Hibah Rumah Ibadah dengan mekanisme penyaluran hibah yang memuat alokasi terhadap biaya operasional	Biro KESRA	Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Inspektorat (pendampingan menyeluruh dan		1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Sekretariat Daerah)
		pengelola dan sarpras rumah ibadah Tahun 2025 -Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 -Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan		tinjauan terhadap tata kelola pemberian bantuan hibah rumah ibadah)		2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Dinas Kominfo) 3. Program Perumusan Kebijakan,

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN DAERAH	PROGRAM
			UTAMA	PENDUKUNG		
		Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara				Pendampingan dan Asistensi (Inspektorat)
	2026	-Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 -Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara				
	2027	-Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 -Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara				
	2028	-Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 -Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan				

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN DAERAH	PROGRAM
			UTAMA	PENDUKUNG		
		Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara				
	2029	-Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 -Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara				
	2030	-Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 -Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara				

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN DAERAH	PROGRAM
			UTAMA	PENDUKUNG		
50. Festival Seni dan Budaya Daerah	2025	Festival Bunga dan Buah, Pemetaan Event Budaya Potensial yang sudah dilaksanakan 3 Tahun untuk ditingkatkan menjadi kalender event nasional (KEMENPAR) dan kalender event budaya (KEMENDIKBUD). Penyusunan Calender of Event 2026 • Kawasan Pariwisata Provinsi Sibolga - Pandan, Sipirok - Padangsidempuan, Bawomatoluo - Hilisimaetano - Sorake, Tanjung Pura-Tangkahan-Bukit Lawang-Sei Bingai, Karo-Dairi-Pakpak	Dinas Pendidikan	1. Dinas Perhubungan: Memastikan ketersediaan transportasi dan lalu lintas saat <i>event</i> internasional dilaksanakan 2. Dinas Kesehatan: Dukungan Tenaga Kesehatan dan Ambulans 3. Dinas Koperasi &UMKM: Pelatihan dan pendampingan UMKM untuk mendukung pelaksanaan <i>event internasional</i>	1. Memastikan ketersediaan anggaran dalam mendukung Proyek Strategis Provinsi; 2. Pelatihan dan pembinaan Sanggar Kesenian Daerah; 3. Pendataan/Inventarisasi potensi Festival Seni Budaya di masing-masing daerah; 4. Memastikan kontinuitas pelaksanaan Festival Seni Budaya di masing-masing daerah 5. Promosi pelaksanaan Festival Seni-Budaya; 6. Penyusunan Kalender Budaya	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)/(Dishub), 2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Satpol PP), 3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional (Dinas Pendidikan), 4. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika (Dinas Kominfo), 5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)/Dinas Koperasi.
	2026	Penyelenggaraan <i>Event</i> Budaya yang telah dilaksanakan 3 Tahun berturut untuk dinaikkan ke <i>KhariSMA Event</i>		4. Dinas Kominfo: Memastikan ketersediaan jaringan		

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN DAERAH	PROGRAM
			UTAMA	PENDUKUNG		
		Nasional (KEN), Sinkronisasi <i>travel pattern</i> dan <i>travel package</i> dengan CoE Provinsi dan Nasional (KEN), Koordinasi dengan Ashita, Travel, penguatan sektor promosi, medsos, online, influencer. Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan event. Rekomendasi Tema 2026 "Festival Bahari Pesisir Barat" → parade perahu hias, lomba layar tradisional, kuliner laut, tari dan musik pesisir. Waktu pelaksanaan pada musim libur anak sekolah, libur musim panas dan libur musim dingin • Kawasan Pariwisata Provinsi Sibolga - Pandan dan Sipirok – Padangsidempuan		digital saat pra <i>event-event</i> -pasca <i>event</i> internasional; publikasi kegiatan 5. Satpol PP: Keamanan Pelaksanaan <i>Event</i> dan ketertiban penyelenggaraan acara		
	2027	Tidak ada				
	2028	Tidak ada				
	2029	Tidak ada				
	2030	Tidak ada				
51. Edukasi dan Pembekalan Solidaritas, Ketahanan Sosial Dan Wawasan Kebangsaan bagi Organisasi Masyarakat Dan Kelompok Masyarakat	2025	Tidak ada	Kesbangpol	Dinas Pendidikan (Koordinasi rekomendasi	Replikasi pelaksanaan kegiatan Edukasi dan	
	2026	Tidak ada				
	2027	-Pendataan Sasaran Ormas dan Kelompok masyarakat pada daerah rawan konflik di Sumatera Utara di Tahun 2027 -Pelaksanaan Kegiatan edukasi		satuan pendidikan yang membutuhkan pembekalan terhadap edukasi wawasan kebangsaan)	Pembekalan Solidaritas, Ketahanan Sosial Dan Wawasan Kebangsaan bagi Organisasi Masyarakat Dan	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN DAERAH	PROGRAM
			UTAMA	PENDUKUNG		
		wawasan kebangsaan dan Solidaritas bagi Ormas Tahun 2027 -Monitoring dan Evaluasi Tahun 2027 •Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Sibolga , Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Samsoir, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kota Padangsidimpuan		Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	Kelompok Masyarakat di Kabupaten/Kota	(Kesbang), 2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Dinas Kominfo)
	2028	Tidak ada				
	2029	Tidak ada				
	2030	Tidak ada				

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMD Kota Sibolga tahun 2025

Tabel 4. 3 Dukungan Program Daerah terhadap Kegiatan Utama dalam RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

No	RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029		RPJMD Kota Sibolga Tahun 2025-2029	
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM: Memperkuat nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia	1	Mengkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	1	Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis, Transparan dan efesiensi Berorientasi Pelayanan yang Profesional Berbasis Teknologi Informasi.
2	Memantapkan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara: Mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi syariah, digital, hijau, dan biru.	2	Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah	2	Mewujudkan Sistem Pendidikan dan Pengembangan SDM yang Berorientasi pada Keahlian dan Keterampilan dengan Dilandasi Nilai-Nilai Agama, Budaya dan Berakhlak Mulia yang Mampu Berdaya Saing.
3	Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur	3	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	3	Meningkatkan Kualitas Kesehatan dan Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang Terjangkau, Terutama untuk Masyarakat yang tidak mampu.
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;	4	Mengmbangkan dan Menata Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan	4	Menciptakan Peluang Ekonomi Berbasis Wiraswasta dan Ekonomi Kreatif bagi Masyarakat, Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kota Sibolga Khususnya Perikanan dan Pariwisata serta Potensi Perbukitan.
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah di dalam Negeri;	5	Memperkuat Ketahanan Sosial dan Budaya Untuk Membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh	5	Mewujudkan Sibolga yang Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berwawasan Lingkungan dengan Mempertimbangkan Unsur-Unsur Sejarah dan Kebudayaan dengan Melibatkan Berbagai Pihak Untuk Berkontribusi Dalam Pembangunan.
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan;			6	Mewujudkan Kerukunan Kehidupan Beragama dan Budaya yang Berbasis Kearifan Lokal dan Karakter Budaya Serta Adat Istiadat Daerah.
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan;			7	Mewujudkan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Serta Penyakit Masyarakat Lainnya.

No	RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	RPJMD Kota Sibolga Tahun 2025-2029
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat yang adil dan Makmur		

Sumber : Dokumen RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kota Sibolga tahun 2025

Dari Tabel diatas dapat dilihat dukungan program daerah yang terdiri dari 7 (tujuh) program kegiatan utama yang mendukung 5 (lima) program kegiatan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 dan 8 (delapan) program kegiatan RPJMN 2025-2029.

Dukungan Program Daerah terhadap 6 (enam) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Dukungan Program Daerah terhadap 6 PHTC RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

No	RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029	RPJMD Kota Sibolga tahun 2025-2029
	Program Hasil Terbaik Cepat	Program Daerah
1	Program Unggulan Bersekolah Gratis	Beasiswa pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa yang kurang mampu dan berprestasi
		Peningkatan kegiatan keagamaan bagi siswa SD dan SMP
2	Program Berobat Gratis	Fasilitasi pelayanan kesehatan gratis
		Fasilitasi pemberian makanan bergizi
3	Jaminan KESTABILAN Harga Komoditi Pangan	Penguatan UMKM
		Pengembangan Pasar Tradisional
4	Digitalisasi Pelayanan Publik "CERDAS"	Penguatan Birokrasi
		Fasilitasi Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih
5	Infrastruktur Strategis Terintegrasi	Fokus pada penanganan banjir dan rumah layak huni
6	Perlindungan Rakyat melalui <i>Restorative Justice</i>	Program Perlindungan Perempuan dan Program Perlindungan Khusus Anak

Sumber: Data diolah

Dapat dijelaskan bahwa Program Daerah yang mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

1. Beasiswa pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa yang kurang mampu dan berprestasi;
2. Peningkatan kegiatan keagamaan bagi siswa SD dan SMP;
3. Fasilitasi pelayanan Kesehatan gratis fasilitasi pemberian makanan bergizi;
4. Penguatan UMKM;
5. Pengembangan Pasar Tradisional;
6. Penguatan Birokrasi;
7. Fasilitasi Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
8. Fokus pada penanganan banjir dan rumah layak huni;
9. Program Perlindungan Perempuan dan Program Perlindungan Khusus Anak.

Dukungan Program Daerah terhadap 17 (tujuh belas) Program Prioritas RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4. 5 Dukungan Program Daerah terhadap 17 (tujuh belas) Program Prioritas RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

No	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	RPJMD Kota Sibolga Tahun 2025-2029
	Program Prioritas	Program Daerah
1.	Pendidikan melalui program unggulan berbasis peningkatan skill yang berhubungan dengan kebutuhan industri dan potensi wilayah ditingkat lokal Bentuk Intervensi: 1. Pembangunan dan penyelenggaraan SMA/SMK unggulan 2. Penguatan Pendidikan vokasi dan pengembangan kurikulum bermuatan local “MARSIPATURE HUTANABE” 3. Pengembangan minat bakat siswa melalui <i>event</i> lomba dan pagelaran seni, budaya dan olahraga unggulan daerah antar SMA/SMK dan	1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Belum menjadi prioritas daerah, mengingat USB eksisting masih mencukupi 2. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 3. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

No	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	RPJMD Kota Sibolga Tahun 2025-2029
	Program Prioritas	Program Daerah
	MA 4. Penguatan pengembangan pusat pelatihan dan keterampilan serta kerjasama rekrutmen tenaga kerja dengan dunia usaha-dunia usaha-dunia industry	
2.	Pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam berkarya dan berprestasi Bentuk Intervensi: 1. Inkubasi usaha untuk perempuan dan pemuda 2. Dukungan terhadap pengembangan prestasi perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas khususnya pada bidang seni, budaya dan olahraga 3. Pengembangan ketrampilan dan penempatan kerja inklusif	1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 3. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.	Kesehatan yang terintegrasi di beberapa titik kawasan yang menjadi sentra layanan kesehatan masyarakat terpadu Bentuk Intervensi : 1. Sistem informasi kepesertaan jaminan kesehatan, ketersediaan dokter dan layanan pengaduan kesehatan 2. Dukungan pemeriksaan Kesehatan gratis 3. Penuntasan kasus TBC 4. Dukungan pembangunan dan pengembangan sentra pelayanan kesehatan dan RSUD Kab/ Kota dengan layanan unggulan 5. Kerjasama penyediaan dokter spesialis dengan perguruan tinggi 6. Bapak asuh dalam penurunan gizi buruk dan prevelensi stunting 7. Dapur sehat atasi stunting (DAHSYAT) 8. Pengembangan RS berstandar internasional	1. Pengembangan Rumah Sakit (RSU FL.Tobing); 2. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan (RSU F.L. Tobing); 3. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (RSU FL. Tobing); 4. Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas (Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana); 5. Sub Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Provinsi untuk mendukung Penuntasan kasus TBC (Dinas Kesehatan);
4.	Pemberantasan kemiskinan melalui perlindungan dan	1. Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang

No	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	RPJMD Kota Sibolga Tahun 2025-2029
	Program Prioritas	Program Daerah
	pemberdayaan masyarakat rentan secara menyeluruh dan tepat sasaran Bentuk Intervensi: 1. MARIPRO (Masyarakat Rentan Produktif)	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
5.	Penguatan stabilitas makro ekonomi dan kesinambungan fiskal daerah Bentuk Intervensi: 1. INDHIRA (Industrialisasi dan Hilirisasi Sumatera Utara) 2. SEMESTA (Sinergi Ekonomi dan Investasi Sumatera Utara) 3. Reformasi, efisiensi dan penyesuaian model bisnis serta tata Kelola BUMD 4. Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah yang stabil	1. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
6.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Bentuk Intervensi: 1. Pengembangan Ekonomi Hijau 2. Pengembangan Ekonomi Biru	Kegiatan yang mendukung Program Prioritas untuk pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Tidak ada
7.	Ketahanan Pangan melalui penguatan nilai budaya dan kearifan lokal agar diversifikasi hasil pertanian menjadi lebih produktif dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat local Bentuk Intervensi: 1. Peningkatan Produktivitas pangan 2. Peningkatan kesejahteraan petani	Sub Kegiatan yang mendukung program prioritas provinsi untuk Petahanan Pangan melalui penguatan nilai budaya dan kearifan lokal agar diversifikasi hasil pertanian menjadi lebih produktif dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat lokal 1. Peningkatan Ketahanan Pangan 2. Peningkatan kesejahteraan petani tidak ada dikarenakan ketiadaan lahan pertanian
8.	Pariwisata yang menggerakkan potensi alam lokal dipedesaan dan perkotaan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung (komunitas, pemerintah daerah/ desa/ kelurahan dan pengusaha lokal) Bentuk intervensi: 1. Pengembangan ekosistem dan destinasi kepariwisataan holistik - 6A (<i>Attraction, Accesibilities, Amenities, Available Package, Activities,</i>	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

No	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	RPJMD Kota Sibolga Tahun 2025-2029
	Program Prioritas	Program Daerah
	<i>Ancillary Service)</i> 2. Pengembnagan Desa Wisata berbasis Budaya, Kearifan Lokal dan Alam	
9.	Ekonomi kreatif dan industry berbasis teknologi Bentuk Intervensi: 1. Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Industri berbasis digital	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi,Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
10.	Reformasi birokrasi dan tata Kelola pemerintahan Bentuk Intervensi: 1. Inovasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Program Daerah yang mendukung program prioritas provinsi untuk Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan 1. Pelayanan Informasi Publik (Dinas komunikasi dan Informatika)
11.	Transformasi digital dan inovasi teknologi pada pelayanan publik dan perekonomian masyarakat Bentuk Intervensi: 1. Digitalisasi layanan publik	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
12.	Infrastruktur dengan prioritas jalan, jembatan, dan irigasi yang langsung berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat local: 1. Program PIJAR (Peningkatan Infrastruktur Jalan Jembatan dan Irigasi) 2. Pengembnagan Kawasan deli Sports city melalui Kerjasama pembnagunan Kawasan ekonomi produktif	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
13.	Pengembangan sistem logistik dan transportasi yang mendukung pengembangan ekonomi dan daya saing Bentuk Intervensi: 1. Peta jalan sentra produksi pertanian Sumatera Utara dalam rangka mendukung sistem logistik dan transportasi untuk memfasilitasi perdagangan dan memperluas akses pasar bagi produsen lokal, termasuk petani dan pengusaha kecil 2. Dukungan pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan melalui pembangunan BRT dan peningkatan kereta Comutter	Program Daerah yang mendukung program prioritas provinsi untuk Penngembangan sistem logistik dan transportasi yang mendukung pengembangan ekonomi dan daya saing Tidak Ada

No	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	RPJMD Kota Sibolga Tahun 2025-2029
	Program Prioritas	Program Daerah
	3. Subsidi transportasi untuk pertanian pakan dan pangan 4. Dukungan pengembangan sistem transportasi daerah terpencil dan pedesaan	
14.	Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berketahanan terhadap bencana Bentuk Intervensi: 1. Konservasi sumber daya alam 2. Pengurangan emisi karbon	Penanaman pohon dan pengerukan sungai, pengurangan penggunaan dari bahan plastik dan penataan TPA
15.	Melanjutkan pembangunan berbasis desa Bentuk Intervensi: 1. Program membangun desa produktif terpadu	Program Daerah yang mendukung program prioritas provinsi untuk melanjutkan pembangunan berbasis desa Tidak Ada
16.	Meningkatkan ketahanan sosial dan budaya yang mendukung suasana yang harmonis, toleran dan rukun Bentuk Intervensi: 1. Program BERHATI (Berbudaya, Rukun, Harmonis, Toleran dan Empati)	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
17.	Terciptanya kehidupan yang lebih aman dan tertib Bentuk intervensi: 1. SUMUT BERSATU (Bersama, Aman, Tertib dan Unggul)	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Indeks Kesetaraan Gender (IKG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sumber: RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMD Kota Sibolga 2025

Dapat dijelaskan bahwa semua program daerah pada table diatas mendukung Program Prioritas RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 kecuali yaitu sebagai berikut:

Program Prioritas Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru di karenakan Kota Sibolga tidak mempunyai lahan pertanian dan hanya pengolahan ikan saja.

4. 2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur melalui penetapan indikator kinerja yang dirancang untuk memberikan gambaran

tentang keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah serta wakil kepala daerah sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator-indikator ini memiliki peran strategis karena menjadi acuan utama dalam penyusunan target kinerja pada perencanaan pembangunan jangka pendek daerah (Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) serta rencana kerja perangkat daerah (Renja PD).

Sesuai dengan ketentuan umum yang tercantum dalam rancangan Instruksi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024, dokumen perencanaan pembangunan daerah mencakup tiga jenis indikator utama, yaitu:

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) – Ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah. IKU diperoleh dari indikator tujuan atau sasaran yang telah diseleksi.
- b. Indikator Kinerja Daerah (IKD) – Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci. Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah Indikator yang merefleksikan keberhasilan pelaksanaan suatu urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan daerah.
- c. Penetapan IKU dan IKK beserta target pencapaiannya dalam RPJMD sangatlah penting karena menjadi cerminan dari tujuan pembangunan jangka menengah yang identik dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penentuan target indikator-indikator ini dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Kota Sibolga periode 2021–2026.

Selain itu, IKU dan IKK juga berfungsi sebagai alat kendali dan evaluasi dalam proses pembangunan ke depan, memastikan bahwa pelaksanaan program tetap berada pada jalur yang sesuai dengan visi dan misi RPJMD.

4. 2. 1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk periode 2025–2029, RPJMD Kota Sibolga menetapkan sebanyak 29 Indikator Kinerja Utama (IKU), yang terdiri dari 9 (sembilan) Indikator Tujuan RPJMD serta 26 (dua puluh enam) Indikator Sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.2. Indikator tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator makro daerah yang mencerminkan keberhasilan pembangunan, Indikator Tujuan RPJMD Kota Sibolga Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Indeks Reformasi Birokrasi
2. Indeks Pembangunan Manusia
3. Usia Harapan Hidup
4. Pertumbuhan Ekonomi
5. Indeks Gini
6. Indeks Infrastruktur
7. Indeks Kerukunan Umat Beragama
8. Indeks Pembangunan Kebudayaan
9. Indeks Rasa Aman

Sedangkan indikator Sasaran RPJMD Kota Sibolga Tahun 2025-2029 meliputi sebagai berikut:

1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP)
2. Opini BPK atas Laporan Keuangan
3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
4. Indeks Pelayanan Publik
5. Indeks Inovasi Daerah
6. Indeks Profesionalitas ASN
7. Nilai Maturitas SPIP
8. Angka Harapan Lama Sekolah
9. Rata-Rata Lama Sekolah
10. Indeks Pembangunan Literasi
11. Indeks Keluarga Sehat

12. Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
13. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
14. Tingkat Pengangguran Terbuka
15. Tingkat Kemiskinan
16. Indeks Ketahanan Pangan
17. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
18. Indeks Risiko Bencana
19. Rasio Konektivitas
20. Persentase Fasilitas Kasus Kerukunan Umat Beragama
21. Terlestarikannya cagar budaya
22. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub urusan Trantibum
23. Indeks Ketimpangan Gender
24. Indeks Perlindungan Anak
25. Indeks Pembangunan Pemuda
26. Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Utama Kota Sibolga Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	56,91 (CC)	60,15 (B)	62,35 (B)	65,45 (B)	67,30 (B)	69,50 (B)	70,15 (BB)
2	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	77.52	78.50	79.98	81.18	82.48	83.50	84.70
3	Usia Harapan Hidup	Tahun	74.19	74.56	75.02	75.29	75.56	76.02	76.29
4	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,92	4,75	5,28	5,82	6,36	6,50	7
5	Indeks Gini	Angka	0.313	0,310	0,308	0,307	0,305	0,304	0,302
6	Indeks Infrastruktur	Angka	77,75	77.9	78.2	78.7	79.2	79.7	80.2
7	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	N/A	78	80	82	84	86	87
8	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	N/A	40	42	44	46	48	50
9	Indeks Rasa Aman	Angka	N/A	62	65	67	69	71	73

Sumber : Data diolah

Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Sasaran Kota Sibolga Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP)	Angka	56,77 (CC)	58,78 (CC)	60,20 (B)	62,30 (B)	64,40 (B)	66,50 (B)	68,60 (B)
2	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Nilai	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2.41	2.5	2.6	2.75	2.8	2.85	3
4	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,75 (B)	3,85 (B)	3,95 (B)	4,05 (A-)	4,1 (A-)	4,15 (A-)	4,2 (A-)
5	Indeks Inovasi Daerah	Angka	B (38,64)	B (40,2)	B (42,50)	B (44,30)	B (45)	B (48)	B (50,20)
6	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	63,20	65	66.8	68.6	70.4	72.2	74
7	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	Rintisan (Level 2)	Berkembang (Level 3)	Berkembang (Level 3)	Berkembang (Level 3)	Berkembang (Level 3)	Berkembang (Level 3)	Berkembang (Level 3)
8	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.16	13.18	13.2	13.22	13.24	13.26	13.28
9	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10.4	10.54	10.68	10.82	10.96	11.1	11.24
10	Indeks Pembangunan Literasi	Angka	72.96	80-89	80-89.9	80-89.9	80-89.9	80-89.9	80-89.9
11	Indeks Keluarga Sehat	Angka	N/A	0.21	0.31	0.41	0.61	0.81	0.82

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12	Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	28.25	28.45	28.65	28.86	29.08	29.31	29.55
13	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum	Persen	5.41	5.50	5.59	5.68	5.77	5.86	5.95
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,52	6.48	6,06	5,80	5,72	5,66	5,02
15	Tingkat Kemiskinan	Persen	11.32	10.50	9.85	9.20	8.55	7.90	7.25
16	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	81.03	82.21	83.39	84.57	85.75	86.93	88.11
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	47,42	73.48	73.63	73.84	73.99	74.16	74.30
18	Indeks Risiko Bencana	Angka	165.9	165	164	163	162	161	160
19	Rasio Konektivitas	Persen	0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.65
20	Persentase Fasilitasi Kasus kerukunan umat beragama	Persen	100	100	100	100	100	100	100
21	Terlestarikannya cagar budaya	Persen	N/A	14	14	14	14	14	14
22	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Angka	N/A	82	83.70	85.40	87.10	88.80	90.30
23	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0.146	0.144	0.142	0.140	0.138	0.136	0.134
24	Indeks Perlindungan Anak	Angka	60.16	61.31	62.46	63.61	64.76	65.91	67.06

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
25	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	N/A	62	66	69	72	76	81
26	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100

Sumber: Data diolah

4. 2. 2 Target Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 – 2030 melalui Indikator Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah

Selanjutnya, dalam Tabel 4.3 disajikan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang diukur melalui aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKK Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah digunakan untuk menilai kinerja keberhasilan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Tabel 4. 8 Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kota Sibolga Tahun 2025 – 2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Risiko Bencana	Indeks	165,92	165	164	163	162	161	160	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,33	0,35	0,38	0,40	0,43	0,45	0,47	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	47,42	73,48	73,63	73,84	73,99	74,16	74,30	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
4	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Ton CO2 eq	0	80.777,69	93.868,45	107.789,67	121.507,77	133.701,77	136.051,77	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
5	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	0	77	79	81	83	85	87	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
6	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	0,43	1,30	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
										dan Lingkungan Hidup
7	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	0	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
8	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	81,03	82,21	83,39	84,57	85,75	86,93	88,11	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
9	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	8,53	7,21	6,55	5,84	5,11	4,41	4,1	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
10	Kontribusi PDRB Kab/Kota	%	0	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	BPS
11	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%)	%	37,25	40	42,25	45	47,25	50	52,25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
13	Tersedianya pembangunan lokasi dalam rangka penanaman modal.	%	70	70	70	70	70	70	70	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
14	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Kabupaten/Kota	Rasio	0.35:0.36	0.37:0.38	0.39:0.40	0.41:0.42	0.43:0.44	0.45:0.46	0.47:0.48	Dinas Perhubungan
II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,92	4,75	5,28	5,82	6,36	6,50	7	BPS
2	Rasio Gini	Indeks	0,313	0,310	0,308	0,307	0,305	0,304	0,302	BPS
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,52	6,48	6,06	5,8	5,72	5,66	5,02	BPS
4	Tingkat Kemiskinan	(%)	11,39	10,50	9,85	9,20	8,55	7,90	7,25	BPS
5	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	(%)	0	34,43	35,33	36,23	37,13	38,03	38,93	BPS
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	(%)	27,71	29,11	30,51	30,91	32,31	33,71	35,11	BPS
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	0	58,03	58,33	58,63	58,93	59,23	59,53	BPS
8	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	74,19	74,56	75,02	75,29	75,56	76,02	76,29	BPS

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
9	PDRB Per Kapita	Rp. Juta Per Tahun	0	81,16	90,10	95,05	108,03	116,95	120,35	BPS
10	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0	0,21	0,31	0,41	0,61	0,81	0,82	Dinas Kesehatan
11	Jumlah Kematian Ibu	Orang	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Kesehatan
12	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
14	Jumlah Kematian Bayi	Orang	2	10	9	9	8	8	8	Dinas Kesehatan
15	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	18,1	16,4	14,7	12,9	11,1	9,3	7,7	Dinas Kesehatan
16	Jumlah Kematian Balita	Orang	2	12	12	12	12	12	12	Dinas Kesehatan
17	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	0	62	66	69	72	76	81	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
18	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2,36	2,37	2,38	2,39	2,40	2,41	2,42	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
19	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,16	13,18	13,20	13,22	13,24	13,26	13,28	Dinas Pendidikan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
20	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,4	10,54	10,68	10,82	10,96	11,10	11,24	Dinas Pendidikan
21	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	72,96	80-89.9	80-89.9	80-89.9	80-89.9	80-89.9	80-89.9	Dinas Perpustakaan
22	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	52,84	53,75	54,97	56,49	58,32	60,46	62,89	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
23	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	(%)	0	59,10	60	60,90	61,80	62,70	63,60	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
24	Persentase Pekerja Informal	%	31,05	31,55	32,25	32,95	33,75	34,65	35,55	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
25	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	(%)	0	3	3	5	5	5	5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
26	Pertumbuhan Wirausaha	Persentase	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
27	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	%	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	1	1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
28	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	(%)	0	78	80	82	84	86	87	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
29	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	60,16	61,31	62,46	63,61	64,76	65,91	67,06	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
30	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	98	98,03	98,04	98,07	98,1	98,15	98,2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
31	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	(%) Indeks	0,146	0,144	0,142	0,14	0,138	0,136	0,134	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
32	Persentase ARG Daerah	%	0,039	0,040	0,042	0,044	0,046	0,048	0,50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
										Perlindungan Anak
33	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
34	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
35	Persentase Desa/Kelurahan Mandiri	%	5,88	17,65	35,29	52,94	70,59	88,24	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
36	Jumlah Desa Mandiri	Desa	1	3	6	9	12	15	17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
37	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Keluarga	36	130	130	130	130	130	130	Dinas Sosial
38	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	17,8	17,8	17,4	17,1	16,9	16,6	16,4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
39	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2,14	2,24	2,23	2,22	2,21	2,2	2,1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
40	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR	%	56	60	67	69	70	71	72	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
41	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	11,7	8.2-11.7	7.5-8.2	7.4-7.5	7.3-7.4	7.2-7.3	7.1-7.2	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
42	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	60.2:60.3	60.3:60.4	60.4:60.5	60.5:60.6	60.6:60.7	60.7:60.8	60.8:60.9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Indeks Infrastruktur	Angka	77,75	77,9	78,2	78,7	79,2	79,7	80,2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Indeks Inovasi Daerah	Angka	38,64	40,2	42,5	44,3	45	48	50,20	Bappeda
3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	5	5,07	5,14	5,21	5,28	5,32	5,39	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	5,06	5,11	5,17	5,26	5,18	5,28	5,33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	(%)	5,06	5,11	5,17	5,26	5,18	5,28	5,33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6	Rasio Kewirausahaan	Persentase	0,25	0,28	0,31	0,34	0,37	0,4	0,43	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,83	71,78	71,88	71,98	72,10	72,22	72,34	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
8	Tingkat Inflasi	(%)	2,94	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	BPS
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	56,91	60,15	62,35	65,45	67,30	69,50	70,15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	0	40	42	44	46	48	50	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B	%	56,77	58,78	60,20	62,30	64,40	66,50	68,60	Seluruh OPD
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,41	2,5	2,6	2,75	2,8	2,85	3	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Dengan Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah
6	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	3,75	3,85	3,95	4,05	4,1	4,15	4,2	Sekretariat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
7	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	0	75,3	76,8	78,3	79,8	80,83	82	Sekretariat Daerah
8	Persentase Capaian Aksi HAM	%	90	91	92	93	94	95	96	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
9	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	6,88	10	20	30	50	50	55	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran	Persentase	99,75	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	0	0,32	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	BPS
12	Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh/Kapita	0	847	1.023	1.048	1.073	1.098	1.123	BPS
13	Total Kredit/PDRB	(%)	0	31,42	38,42	45,42	52,42	59,42	66,42	BI
14	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	0	7,15	7,3	7,45	7,6	7,75	7,9	BPS
15	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	0	18	18,2	18,25	18,28	18,3	18,33	BPS
16	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	(%)	0	0,35	0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	BPS
17	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	4,27	4,31	4,33	4,35	4,37	4,39	4,41	Bappeda
18	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,55	3,85	3,95	4,05	4,15	4,25	4,50	Bappeda
19	Indeks Rasa Aman	Angka	0	62	65	67	69	71	73	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
20	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	0	61	64	67	70	73	76	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
21	Persentase Penegakan Perda	%	54,55	63,64	72,73	81,82	90,91	100	100	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
22	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	0	0	72	74	76	78	80	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
23	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase	15,79	22,58	63,16	81,58	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase	0	5	10	15	25	30	50	Dinas Pendidikan
2	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persentase	82,24	85,21	88,18	91,15	93,70	96,25	98,79	Dinas Pendidikan
3	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Persentase	37	40	41	45	50	52	55	Dinas Pendidikan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
4	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	54,90	57,80	60,70	63,60	66,98	69,38	72,30	Dinas Pendidikan
5	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase	0	30	40	50	60	70	80	Dinas Pendidikan
6	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Persentase	18,31	22,41	26,51	30,60	34,70	38,80	42,90	Dinas Pendidikan
7	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	98,86	99,19	99,51	99,84	100	100	100	Dinas Pendidikan
8	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	%	85,02	91,03	91,53	92,03	92,53	93,03	93,53	Dinas Pendidikan
9	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	Persentase	4	5	5	8	8	8	8	Dinas Pendidikan
10	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase	99	99	99,45	99,55	99,65	99,75	99,99	Dinas Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	86,9	70	72	75	77	78	80	Dinas Kesehatan
2	Persentase Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%	0	11,76	11,76	23,52	35,29	35,29	58,82	Dinas Kesehatan
3	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	0	0	2	7	10	12	15	Dinas Kesehatan
4	Presentase lanjut usia yang mandiri	%	95	96	96	96	96	96	96	Dinas Kesehatan
5	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	%	12,27	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	Dinas Kesehatan
6	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	Persentase	0,85	12,4	11,4	10,4	9,4	8,4	8,4	Dinas Kesehatan
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	87	88	89	90	91	92	93	Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
8	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar.	%	70	75	80	85	85	90	90	Dinas Kesehatan
9	Persentase fasilitas kesehatan yang sesuai standar	%	69,81	71,69	75	80	85	90	90	Dinas Kesehatan
10	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	%	80	81	82	83	84	85	86	Dinas Kesehatan
11	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	%	0,37	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	Dinas Kesehatan
12	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	%	73	75	76	77	78	79	80	Dinas Kesehatan
13	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Persentase	60	65	70	75	80	85	85	Dinas Kesehatan
14	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	%	81	81	81	82	83	85	86	Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
15	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	46,7	60,37	65	70	80	90	90	Kesehatan
16	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Satuan Orang	73	70	67	64	61	58	55	Kesehatan
17	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	%	50	50	52	54	57	60	63	Kesehatan
18	Frekuensi Pemakaian Tempat Tidur Pada Satu Periode; Berapa Kali Tempat Tidur Dipakai Dalam Satu Satuan Waktu Tertentu, Yang Diukur Dengan Bed Turn Over (BTO)	Kali	38	40	40	42	42	43	43	RSU. Dr. F.L Tobing
19	Rata - Rata Hari Dimana Tempat Tidur Tidak Ditempati Dari Telah Diisi Ke Saat Terisi Berikutnya, Yang Diukur Dengan Turn Over Interval (TOI)	Hari	7	4	4	3	3	3	3	RSU. Dr. F.L Tobing

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
20	Angka Kematian Umum Untuk Setiap 1000 Penderita Keluar, yang Diukur Dengan Gross Death Rate (GDR)	Per 1000	35	45	45	45	45	45	45	RSU. Dr. F.L Tobing
21	Jumlah Penggunaan tempat tidur, yang diukur dengan Bed Occupancy Ratio (BOR)	%	39	50	55	60	60	65	65	RSU. Dr. F.L Tobing
22	Rata - rata hari lamanya pasien dirawat, yang diukur dengan Average Lenght of Stay (LOS)	Hari	4	4	4	4	3	3	3	RSU. Dr. F.L Tobing
23	Angka Kematian 48 Jam Setelah Dirawat Untuk Tiap - Tiap 1000 Penderita Keluar, yang Diukur Dengan Net Death Rate (NDR)	Per 1000	15	16	20	20	20	20	15	RSU. Dr. F.L Tobing
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase	4	4,74	5,09	5,45	5,81	6,16	6,52	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	60	65	68	75	80	85	90	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	37,25	40	42,25	45	47,25	50	52,25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Persentase Tingkat Kesesuaian Penataan Ruang	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persentase	97,11	94,76	94,78	94,80	94,82	94,84	95,86	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Nilai	0	82	83,70	85,40	87,10	88,80	90,30	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
2	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah (AKIP)	Angka	78,61	80	82	84	86	88	90	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
5	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	8.132	82	83	84	85	86	87	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
7	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	4	32	32	40	40	40	40	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
8	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	54,55	63,64	72,73	81,82	90,91	100	100	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
9	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	0	75	76,5	78	79,5	81	82,5	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
10	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Nilai	68,43	70	72	75	78	80	83	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
11	Persentase penanganan tanggap bencana darurat	%	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	Persentase	50	75	80	80	80	80	80	Dinas Sosial

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	0	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	8,50	8,50	8,51	8,51	8,52	8,52	8,52	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	%	34,09	34,10	34,11	34,12	34,13	34,14	34,15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta	%	15,86	15,86	15,87	15,88	15,88	15,88	15,88	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	BPJS Ketenagakerjaan)									
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkatpusat dan (b) pemerintah daerah.	%	60	15	15	15	15	15	20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	(%)	20	20	20	20	20	20	20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	95,6	95,7	95,8	95,9	95,9	96	96,5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persentase	0,039	0,040	0,042	0,044	0,046	0,048	0,50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	608	630	640	650	660	670	680	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	%	3.2:3.1	2.7:2.6	2.6:2.5	2.5:2.5	2.5:2.5	2.2:2.2	2:2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
7	rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan)	%	0.0085:0.085	0.010:0.010	0.012:0.012	0.014:0.014	0.016:0.016	0.018:0.018	0.020:0.020	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	%	0,059	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	89	90	92,1	92,3	92,5	92,7	92,9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
1	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	79,3	80	82	84	86	88	90	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Indeks Kualitas Air	Indeks	0	54,4	55	55,5	56	58	59	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2	Persentase Tutupan Lahan	Persentase	49,14	49,2	49,3	49,5	49,8	49,9	50	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
3	Penurunan intensitas emisi GRK	(%)	0,00	80.777,69	93.868,45	107.789,67	121.507,77	133.701,77	136.051,77	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
4	Indeks Kualitas Udara	Indeks	91,14	91,94	91,98	92	93	93,5	94	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
1	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	91,68	92	92,50	93	93,50	94	94,50	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	99	99	99	99	99	99	99	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	99	99	99	99	99	99	99	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Rate Nett Recent Migrasi	Per 1000 Penduduk	2,69	-3,71	-2,69	-1,36	-1,03	3,30	2,30	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Perekaman KTP elektronik	%	99,82	99,83	99,84	99,85	99,86	99,87	99,88	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Persentase penduduk yang memiliki akta cerai	Persentase	75,44	76	77	78	79	79,50	80	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	bagi penduduk yang bercerai									
11	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	%	99,83	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12	Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah	Persentase	84,95	85	87	90	92	93	95	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
1	Kemasyarakatan Desa (LKD)	Indeks	140	90	90	90	90	90	90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	Persentase	52,94	76,47	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
1	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	66,12	70	70,50	71,00	71,50	72	72,5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persentase	14,1	12,0	10,6	9,6	9,0	8,5	8,2	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	73,5	73,8	74,1	74,4	74,7	75	75,3	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	60,44	60,94	61,44	61,94	62,44	62,94	63,44	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persentase	35,29	41,17	47,05	52,94	58,82	64,70	70,58	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
1	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	%	1	0,5	0,7	0,9	0,11	0,12	0,14	Dinas Perhubungan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Kabupaten atau Kota									
2	Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe C	%	1	0,83	0,85	0,87	0,89	0,91	0,93	Dinas Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
1	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	50	50	51	52	53	54	55	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah (AKIP)	Angka	85,61	73,31	74,32	75,33	76,34	77,35	78,38	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
1	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase	2,56	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	0,13	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
1	Persentase Kerja Sama Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti	Persentase	70	70	70	70	70	70	70	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2	Nilai Realisasi Penanaman Modal	triliun rupiah	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
3	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
1	Tingkat pemuda partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0.85%	0.86%	0.87%	0.88%	0.89%	0.90%	0.91%	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	33	20	21	22	23	24	25	Dinas Pariwisata

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
										Pemuda dan Olahraga
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	% Nilai	3.51%	3.52%	3.53%	3.54%	3.55%	3.56%	3.57%	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
1	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	90	91	92	93	94	95	96	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
1	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
3	Terlestarikannya cagar budaya	%	14	14	14	14	14	14	14	Dinas Pendidikan
4	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Persentase	0	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Tak Benda yang Ditetapkan									
5	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
6	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	2	2	3	4	5	6	7	Dinas Pendidikan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	68,89	72,5	73	73,5	74	74,5	75	Dinas Perpustakaan
2	Ketersediaan Tenaga Perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya	Personil	90	91	92	93	94	95	96	Dinas Perpustakaan
3	Koleksi Perpustakaan yang Tersedia di Berbagai Perpustakaan Di Wilayahnya (Dalam Eksemplar)	Eksemplar	400.000	401.000	402.000	403.000	404.000	405.000	406.000	Dinas Perpustakaan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
4	jumlah Kunjungan Pemustaka yang Memanfaatkan Perpustakaan Secara Online maupun Onsite	Orang	14.863	16.000	16.200	16.400	16.600	16.800	17.000	Dinas Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persentase	85,88	85,92	86	86,5	87	87,5	88	Dinas Perpustakaan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
1	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	90	90,5	91	91,5	92	92,5	93	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Persentase	2,64	8,77	10,27	11,77	13,27	14,77	16,27	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	90	91	92	93	94	95	96	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
1	Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota	%	22	5	6	7	8	9	10	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Kebangsaan	%	-75	2	2	2	2	2	2	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3	Tingkat hunian akomodasi	%	15,3	15,5	16	16,5	16,75	17,25	17,5	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
4	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	%	2.36%	2.38%	2.41%	2.43%	2.46%	2.48%	2.51%	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
1	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persentase	33,33	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	84	80	80	80	80	80	80	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Informal	%	50	50	55	61	67	73	81	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase	6,12	6	6	6	6	6	6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	48	48	52	56	60	60	60	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persentase	36	30	40	40	40	40	40	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
1	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Persentase	40	45	46	47	48	49	50	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persentase	0	25	30	35	40	45	50	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Persentase	9,80	100	100	100	100	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH										
1	Jumlah Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Angka	12	12	12	12	12	12	12	Sekretariat Daerah
2	Jumlah Kegiatan Hari - Hari Besar Keagamaan	Angka	10	10	12	12	14	14	16	Sekretariat Daerah
3	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
4	Jumlah Kerjasama antar Pemerintah	Dokumen	8	8	8	8	8	8	8	Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD										
1	Persentase Tersusunnya dan Terintegrasinya Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pembentukan PERDA dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Perencanaan	%	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	5.01 – PERENCANAAN									
1	Dokumen RKPD yang Ditetapkan dengan Perkada	Dokumen	1	2	2	2	2	2	2	Bappeda
2	Dokumen RPJMD yang Ditetapkan dengan Perda	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Bappeda
3	Dokumen RPJPD yang Ditetapkan dengan Perda	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Bappeda
4	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	Bappeda
5	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	Bappeda
6	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	Bappeda
7	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	Bappeda
8	Persentase Keselarasan RKPD	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	Bappeda

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA									
	5.02 – KEUANGAN									
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	0,2	0,3	0,4	0,42	0,45	0,47	0,48	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah
2	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah
3	Persentase Penurunan SILPA	Persentase	5	4,7	4,5	4,3	4,2	4,1	4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persentase	0	6,46	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah
	5.03 – KEPEGAWAIAN									
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah (AKIP)	Angka	86	87	87	87	87	87	87	Badan Kepegawaian Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah	Angka	1.571	1.571	1.571	1.571	1.571	1.571	1.571	Badan Kepegawaian Daerah
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
1	Rata - Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Skor	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	Badan Kepegawaian Daerah
2	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	3,37	4	4,50	5	5,50	6	6,50	Badan Kepegawaian Daerah
3	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	0	14,08	14,08	14,08	14,08	14,08	14,08	Badan Kepegawaian Daerah
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
1	Persentase hasil Kelitbangan yang ditindaklanjuti	%	20	20	20	20	20	20	20	Bappeda
2	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	%	5	5	5	5	5	10	10	Bappeda
3	Persentase Penelitian / Kajian yang Didiseminasikan	%	20	20	20	20	20	20	20	Bappeda

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH									
1	Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat	%	80	81	82	83	84	85	86	Inspektorat
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Infrastruktur (Infrastructure)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Inspektorat
3	Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	%	92	93	94	95	96	97	98	Inspektorat
4	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Indeks	57	60	65	70	75	77	80	Inspektorat
	7.01 - KECAMATAN									
1	Jumlah Kegiatan Hari - Hari Besar Keagamaan	Angka	0	4	4	4	4	4	4	Kecamatan Sibolga Utara
2	Persentase Menyusun Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Sibolga Utara
3	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Gotong Royong	Kegiatan	0	12	12	12	12	12	12	Kecamatan Sibolga Utara
4	Jumlah Kegiatan Hari - Hari Besar Keagamaan	Angka	0	2	2	2	2	2	2	Kecamatan Sibolga Kota

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5	Persentase Menyusun Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu	%	90	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Sibolga Kota
6	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Gotong Royong	Kegiatan	0	12	12	12	12	12	12	Kecamatan Sibolga Kota
7	Jumlah Kegiatan Hari - Hari Besar Keagamaan	Angka	0	2	2	2	2	2	2	Kecamatan Sibolga Sambas
8	Persentase Menyusun Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu	%	90	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Sibolga Sambas
9	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Gotong Royong	Kegiatan	0	12	12	12	12	12	12	Kecamatan Sibolga Sambas
10	Jumlah Kegiatan Hari - Hari Besar Keagamaan	Angka	0	4	4	4	4	4	4	Kecamatan Sibolga Selatan
11	Persentase Menyusun Dokumen Administrasi	%	90	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Sibolga Selatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Pemerintahan Tepat Waktu									
12	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Gotong Royong	Kegiatan	0	12	12	12	12	12	12	Kecamatan Sibolga Selatan
	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
1	Persentase Peserta yang Memahami Kehidupan Masyarakat yang Harmonis antar Suku Umat Beragama dan Golongan	%	0	0	72	74	76	78	80	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Persentase Masyarakat yang Paham Akan Nilai- Nilai Ideologi Pancasila	%	0	0	72	74	76	78	80	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Persentase Masyarakat Dapat Mengaktualisasikan Pendidikan Etika dan Budaya Politik	%	0	0	72	74	76	78	80	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: Data diolah

Tabel 4. 9 Penyelarasan Indikator Kinerja Utama Pembangunan RPJMD Kota Sibolga dengan Sasaran Pembangunan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera

No	RPJMN tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029			No	RPJMD Kota Sibolga tahun 2025-2029							
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029		Indikator Utama Pembangunan	Data Awal 2024	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73.73	74.54	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73.73	74.54	1	Usia Harapan Hidup (tahun)	74.19	74.56	75.02	75.29	75.56	76.02	76.29
2	Kesehatan Ibu dan Anak:			Kesehatan Ibu dan Anak:			2	Kesehatan Ibu dan Anak:							
	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	146	94	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	146	94		a) Jumlah Kematian Ibu	2	2	2	2	2	2	2
	b) Pravelensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16.4	12.3	b) Pravelensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16.4	12.3		b) Pravelensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18.1	16.4	14.7	12.9	11.1	9.3	7.7
3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)			Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)			3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)							
	a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)(%)	90	90	a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)(%)	90	90		a) Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC (%)	100	100	100	100	100	100	100

No	RPJMN tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029			No	RPJMD Kota Sibolga tahun 2025-2029							
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029		Indikator Utama Pembangunan	Data Awal 2024	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)(%)	90	90	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)(%)	90	90		b)Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	10	90	90	90	90	90	90
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98.6	99	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98.6	99	4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	100	100	100	100	100	100	100
5	Hasil Pembelajaran:			Hasil Pembelajaran:			5	Hasil Pembelajaran:							
	a) Persentase Kab/ Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			a) Persentase Kab/ Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi membaca - Numerasi				a) Persentase Kab/ Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi membaca - Numerasi							
	Literasi membaca	6,06 - 12,12	27,27 - 30,30		6,06 - 12,12	27,27 - 30,30		Kemampuan Literasi SD	60.05	62.55	65.05	67.55	70.05	72.55	75.05
	Numerasi	00,00 - 3,03	6,06 - 9,09		00,00 - 3,03	6,06 - 9,09		Kemampuan Numerasi SD	54.9	70.89	60.7	63.6	66.5	69.4	72.3

No	RPJMN tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029			No	RPJMD Kota Sibolga tahun 2025-2029							
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029		Indikator Utama Pembangunan	Data Awal 2024	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi membaca - Numerasi				b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi membaca - Numerasi							
	Literasi membaca	35,99 - 38,49	41,53 - 44,03		35,99 - 38,49	41,53 - 44,03		Kemampuan Literasi SMP	68.93	70.03	71.13	72.23	73.33	74.43	75.53
	Numerasi	33,70 - 36,20	37,70 - 40,20		33,70 - 36,20	37,70 - 40,20		Kemampuan Numerasi SMP	62.92	69.87	65.92	67.42	68.92	70.42	71.92
	c) Rata - rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun (tahun)	10,3 - 10,33	10,3 - 10,33		10,3 - 10,33	10,3 - 10,33		c) Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	10.4	10.54	10.68	10.82	10.96	11.1	11.24
	d) Harapan Lama Sekolah	13,61 - 13,63	13,86 - 13,87		13,61 - 13,63	13,86 - 13,87		d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	13.16	13.18	13.2	13.22	13.24	13.26	13.28
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi(%)	11.12	11,12 - 11,40	Proporsi Penduduk Berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi(%)	11.12	11,12 - 11,40	6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	N/A	34.43	35.33	36.23	37.13	38.03	38.93

No	RPJMN tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029			No	RPJMD Kota Sibolga tahun 2025-2029							
	Indikator Utama Pembangunan	Baseli ne 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseli ne 2025	Target 2029		Indikator Utama Pembangunan	Data Awal 2024	Baseli ne 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja dibidang keahlian menengah tinggi(%)	71.1	76.59	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja dibidang keahlian menengah tinggi(%)	71.1	76.59	7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)		59.1	60	60.9	61.8	62.7	63.6
8	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96 - 7,46	2,82 - 3,82	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96 - 7,46	2,82 - 3,82	8	Tingkat Kemiskinan (%)	11.39	10.5	9.85	9.2	8.55	7.9	7.25
9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	29.27	40.61	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	29.27	40.61	9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Badan Usaha dan Non ASN (%)	52.84	67.24	54.97	56.49	58.32	60.46	62.89
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja disektor formal (%)			Persentase penyandang disabilitas bekerja disektor formal (%)			10	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	N/A	3	3	5	5	5	5
11	a) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	19 - 19,5	15,4 - 15,1	a) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	19 - 19,5	15,4 - 15,1	11	a)Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	5.06	5.11	5.17	5.26	5.18	5.28	5.33
	b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.2	7.8	b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.2	7.8		b) Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.48	0.49	0.50	0.51	0.52	0.53	0.54

No	RPJMN tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029			No	RPJMD Kota Sibolga tahun 2025-2029							
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029		Indikator Utama Pembangunan	Data Awal 2024	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
12	Pegembangan Pariwisata			Pegembangan Pariwisata			12	Pegembangan Pariwisata							
	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2.42	2.47	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2.42	2.47		a) Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	5	5.07	5.14	5.21	5.28	5.32	5.39
	b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	300,00 - 350,00	421.14	b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	300,00 - 350,00	421.14		b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (orang)	116	756	118	115	120	121	122
13	Proporsi PDB Ekonomi Kratif (%)*	5.45	5.43	Proporsi PDB Ekonomi Kratif (%)*	5.45	5.43	13	Proporsi PDB Ekonomi Kratif (%)*							
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN							
	a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	3.20%	3.51%	a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	3.20%	3.51%		Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah, UKM		20.98	21.88	22.78	23.68	24.58	25.48
	b) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3.63%	4.06%	b) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3.63%	4.06%		b) Rasio Kewirausahaan Daerah	0.25	0.28	0.31	0.34	0.37	0.4	0.43
								Proporsi jumlah Industri Kecil		53.69	54.59	55.49	56.39	57.29	58.19

No	RPJMN tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029			No	RPJMD Kota Sibolga tahun 2025-2029							
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029		Indikator Utama Pembangunan	Data Awal 2024	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
								Menengah (IKM) pada level Kabupaten/Kota (%)							
	c) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0.79%	0.81%	c) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0.79%	0.81%		c) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)							
	d) <i>Return on Asset</i> (ROA) BUMD (%)	1.24	1.97	d) <i>Return on Asset</i> (ROA) BUMD (%)	1.24	1.97		d) <i>Return on Asset</i> (ROA) BUMD (%)							
15	Penciptaan Lapangan Kerja yang baik			Penciptaan Lapangan Kerja yang baik			15	Penciptaan Lapangan Kerja yang baik							
	a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 - 5,56	4,74 - 5,20	a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 - 5,56	4,74 - 5,20		a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6.52	6.48	6.06	5.8	5.54	5.28	5.02
	b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	43	50.4	b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	43	50.4		b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	27.63	28.03	28.43	28.83	29.23	29.63	30.03
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,29 - 61,67	59,48 - 63,87	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,29 - 61,67	59,48 - 63,87	16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)		58.03	58.33	58.63	58.93	59.23	59.53
17	Tingkat Penguasaan IPTEK			Tingkat Penguasaan IPTEK			17	Tingkat Penguasaan IPTEK							
	Disesuaikan dengan			Disesuaikan dengan				Indeks Inovasi Daerah	38,64	40.2	42.5	44.3	45	48	50.2

No	RPJMN tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029			No	RPJMD Kota Sibolga tahun 2025-2029							
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029		Indikator Utama Pembangunan	Data Awal 2024	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	karakteristik daerah			karakteristik daerah											
18	Tingkat penerapan Ekonomi Hijau			Tingkat penerapan Ekonomi Hijau			18	Tingkat penerapan Ekonomi Hijau							
	a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	51.12	51.18	a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	51.12	51.18		Kontribusi PDRB Perikanan	2.64	8.77	10.27	11.77	13.27	14.77	16.27
19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	6.9	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	6.9	19	Indeks masyarakat digital indonesia		n/a					
								a.) Indeks SPBE	2.41	2.5	2.6	2.75	2.8	2.85	3
20	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	10.1	9.5	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	10.1	9.5	20	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi							
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29.7	29,76 - 30,04	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29.7	29,76 - 30,04	21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)		18	18.25	18.2	18.28	18.3	18.33
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,45 - 16,54	17,13 - 17,41	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,45 - 16,54	17,13 - 17,41	22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)		7.15	7.3	7.45	7.6	7.75	7.9
23	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan			Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan			23	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan							

No	RPJMN tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029			No	RPJMD Kota Sibolga tahun 2025-2029							
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029		Indikator Utama Pembangunan	Data Awal 2024	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	2.26%	2.33%	a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	2.26%	2.33%		a) Proporsi kontribusi PDRB Kota sibolga terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara (%)		0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
	b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	74.36	81.01	b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	74.36	81.01		b) Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau dan berkelanjutan		77%	79%	81%	83%	85%	87%
	c) Persentase Desa Mandiri (%)	8.44%	8.93%	c) Persentase Desa Mandiri (%)	8.44%	8.93%		c) Persentase Desa/Kelurahan Mandiri (%)		0	2	4	6	8	10
24	Indeks Materi Hukum Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	70	71.5	Indeks Materi Hukum Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	70	71.5	24	Indeks Reformasi Hukum	N/A	75.3	76.8	78.3	79.8	80.83	82
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.45	3.71	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.45	3.71	25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.41	2.5	2.6	2.75	2.8	2.85	3
26	Indeks Pelayanan Publik	3.57	3.69	Indeks Pelayanan Publik	3.57	3.69	26	Indeks Pelayanan Publik	3.75	3.85	3.95	4.05	4.1	4.15	4.2

No	RPJMN tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029			No	RPJMD Kota Sibolga tahun 2025-2029							
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029		Indikator Utama Pembangunan	Data Awal 2024	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
27	Indeks Integritas Nasional	66.78	69.51	Indeks Integritas Nasional	66.78	69.51	27	Survey Penilaian Integritas		72.61	73.41	74.21	75.01	75.81	76.61
								Indeks Prilaku Anti Korupsi/Indeks Persepsi Korupsi	57	60	65	70	75	77	80
28	Disesuaikan dengan karakteristik daerah usulan proksi:			Disesuaikan dengan karakteristik daerah usulan proksi:			28	Disesuaikan dengan karakteristik daerah usulan proksi:							
	a) Persentase Penegakan hukum Peraturan Daerah	70	75.7	a) Persentase Penegakan hukum Peraturan Daerah	70	75.7		a) Persentase Penegakan hukum Peraturan Daerah	54.55	63.64	72.73	81.82	90.91	100	100
	b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	60	70	b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	60	70		b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	90	91	92	93	94	95	96
29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	58.5	62	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	58.5	62	29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)							
								Indeks Rasa Aman	N/A	62	65	67	69	71	73

No	RPJMN tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029			No	RPJMD Kota Sibolga tahun 2025-2029							
	Indikator Utama Pembangunan	Baseli ne 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseli ne 2025	Target 2029		Indikator Utama Pembangunan	Data Awal 2024	Baseli ne 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
30	Indeks Demografi Indonesia	82,58 - 85,83	86,83 - 90,08	Indeks Demografi Indonesia	82,58 - 85,83	86,83 - 90,08	30	Indeks Harmoni Indonesia	0	71	72	74	76	78	80
31	Rasio Pajak terhadap PDB (%)			Rasio Pajak terhadap PDB (%)			31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ADHB		0,32	0.4	0.42	0.44	0.46	0.48
32	Tingkat Inflasi (%)	1,8 - 3,8	1,4 - 3,7	Tingkat Inflasi (%)	1,8 - 3,8	1,4 - 3,7	32	Tingkat Inflasi (%)		2	2	2	2	2	2
33	Pendalaman/ Intermediasi Sektor Keuangan			Pendalaman/ Intermediasi Sektor Keuangan			33	Pendalaman/ Intermediasi Sektor Keuangan							
	a) Total Dana Pihak Ketiga/ PDRB (%)	28.77	33.92	a) Total Dana Pihak Ketiga/ PDRB (%)	28.77	33.92		a)Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (ADHB)		0.35	0.45	0.55	0.65	0.75	0.85
	b) Aset Dana Pensiun/ PDRB (%)	0.13	0.14	b) Aset Dana Pensiun/ PDRB (%)	0.13	0.14		b) Aset Dana Pensiun/ PDRB (%)							
	c) Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	81030 64,03, 00	104020 72,39	c) Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	81030 64,03, 00	10402072,39		c) Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)							
	d) Total Kredit / PDRB (%)	25.7	31.49	d) Total Kredit / PDRB (%)	25.7	31.49		d) Total Kredit / PDRB (%)		31.42	38.42	45.42	52.42	59.42	66.42
34	Inklusi Keuangan (%)	97.52	97.88	Inklusi Keuangan (%)	97.52	97.88	34	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)		6.37	6.87	7.37	7.87	8.37	8.87
								Indeks Keuanga n Akses Daerah	4.27	4.31	4.33	4.35	4.37	4.39	4.41

No	RPJMN tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029			No	RPJMD Kota Sibolga tahun 2025-2029							
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029		Indikator Utama Pembangunan	Data Awal 2024	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
35	Disesuaikan dengan karakteristik daerah usulan proksi:			Disesuaikan dengan karakteristik daerah usulan proksi:			35	Disesuaikan dengan karakteristik daerah usulan proksi:							
	Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kab/Kota Kembar / Bersaudara (Sister Province/ Sister City)			Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kab/Kota Kembar / Bersaudara (Sister Province/ Sister City)				Jumlah kerjasama antar pemerintah	8	8	8	8	8	8	8
								Indeks Daya Saing Daerah	3.55	3.85	3.95	4.05	4.15	4.25	4.5
36	Disesuaikan dengan karakteristik daerah (Asia Power Indeks - Military Capability)			Disesuaikan dengan karakteristik daerah (Asia Power Indeks - Military Capability)			36	Persentase konflik sosial yang diselesaikan		75	76.5	78	79.5	81	82.5
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,44 - 55,48	57,56 - 57,67	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,44 - 55,48	57,56 - 57,67	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)		40	42	44	46	48	50
								Terlestarikannya cagar budaya	N/A	14	14	14	14	14	14
38	Indeks Kerukunan	81,17 - 81,2	82,62 - 82,79	Indeks Kerukunan	81,17 - 81,2	82,62 - 82,79	38	Indeks Kerukunan	N/A	78	80	82	84	86	87

No	RPJMN tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029			No	RPJMD Kota Sibolga tahun 2025-2029							
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029		Indikator Utama Pembangunan	Data Awal 2024	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Umat Beragama (IKUB)			Umat Beragama (IKUB)				Umat Beragama (IKUB)							
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71.04	73.67	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71.04	73.67	39	Indeks Pembangunan Keluarga	60.44	61.94	63.44	64.94	66.44	67.94	69.44
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.407	0.37	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.407	0.37	40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.146	0.144	0.142	0.14	0.138	0.136	0.134
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0.562	0.581	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0.562	0.581	41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati							
								Indeks Kualitas Tutupan Lahan	49.14	49.2	49.3	49.5	49.8	49.9	50
42	Kualitas Lingkungan Hidup			Kualitas Lingkungan Hidup			42	Kualitas Lingkungan Hidup							
	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77.2	77.87	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77.2	77.87		a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	47.42	73.48	73.63	73.84	73.99	74.16	74.3
	b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10%	15%	b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10%	15%		b) Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%)	37.25	40	42.25	45	47.25	50	52.25
	c) Pengelolaan Sampah			c) Pengelolaan Sampah				c) Pengelolaan Sampah							
	- Timbulan sampah terolah	16%	28%	- Timbulan sampah terolah	16%	28%		Timbulan Sampah Terolah	N/A	4.39	4.42	4.45	4.48	4.51	4.54

No	RPJMN tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029			No	RPJMD Kota Sibolga tahun 2025-2029							
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029		Indikator Utama Pembangunan	Data Awal 2024	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	difasilitas pengolahan sampah "%"			difasilitas pengolahan sampah "%"				Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)							
	- Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	62%	100%	- Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	62%	100%		Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah		100	100	100	100	100	100
43	Ketahanan energi, air, dan pangan			Ketahanan energi, air, dan pangan			43	Ketahanan energi, air, dan pangan							
	a) Ketahanan Energi			a) Ketahanan Energi				a) Ketahanan Energi							
	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	850	1282	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	850	1282		Konsumsi listrik per kapita (KWh)		847 - 1.046	1023	1048	1073	1098	1123
	- Intensitas energi primer (SBM/ Rp Milyar)	170.57	141.175	- Intensitas energi primer (SBM/ Rp Milyar)	170.57	141.175		- Intensitas energi primer (SBM/ Rp Milyar)							
	b) Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Pravelance of Undernourishment</i>) (%)	7.35	4.48	b) Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Pravelance of Undernourishment</i>) (%)	7.35	4.48		b) Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Pravelance of Undernourishment</i>) (%)	8.53	7.21	6.55	5.84	5.11	4.41	4.1
								Indeks Ketahanan Pangan	81.03	82.21	83.39	84.57	85.75	86.93	88.11

No	RPJMN tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029			No	RPJMD Kota Sibolga tahun 2025-2029							
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029		Indikator Utama Pembangunan	Data Awal 2024	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	c) Ketahanan Air			c) Ketahanan Air				c) Ketahanan Air							
	- Kapasitas tampungan air (m ³ /kapita)			- Kapasitas tampungan air (m ³ /kapita)				Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)-berkoordinasi dengan provinsi)		0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	40.95	53	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	40.95	53		Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman	100	100	100	100	100	100	100
44	Indeks Resiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	157.53	152,55 - 147,69	Indeks Resiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	157.53	152,55 - 147,69	44	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	165.92	165	164.5	164	163.5	163	162
45	persentase penurunan Emisi GRK (%)			persentase penurunan Emisi GRK (%)			45	Penurunan Angka Emisi GRK (CO2 Ekuivalen)	N/A	80777.69	93868.45	107789.67	121507.77	133701.8	136051.8
	a) Kumulatif	10.06 %	12.92%	a) Kumulatif	10.06 %	12.92%									
	b) Tahunan	19.04 %	25.38%	b) Tahunan	19.04 %	25.38%									

Sumber: Data Diolah

BAB V

PENUTUP

Bagian ini berfungsi untuk menyajikan kesimpulan substantif atas keseluruhan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program prioritas pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan ini. Kesimpulan tersebut menjadi rujukan utama dalam mengarahkan pelaksanaan pembangunan daerah secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Selain itu, bagian ini menguraikan kaidah pelaksanaan pembangunan yang mencakup prinsip-prinsip umum, pendekatan strategis, serta tata kelola implementasi program dan kegiatan berdasarkan urusan pemerintahan daerah. Untuk menjamin akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan, bagian ini juga mengatur sistem pengendalian dan evaluasi yang dilakukan secara periodik. Pengendalian dan evaluasi diarahkan untuk memantau kemajuan capaian kinerja pembangunan, menilai kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, serta mengidentifikasi permasalahan dan peluang perbaikan. Seluruh proses ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai upaya untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat.

5.1 Kesimpulan Substantif

1. Isu strategis telah diidentifikasi berdasarkan berbagai persoalan yang muncul di Kota Sibolga berdasarkan data dan informasi yang dianalisis, dokumen perencanaan lain baik di tingkat Kota, provinsi, maupun nasional, serta hasil masukan dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan Kota Sibolga.
2. Visi pembangunan daerah yang diusung adalah *"Mewujudkan Sibolga Peduli, Amanah, Setia Untuk*

Masyarakat Yang Sejahtera." Visi ini mencerminkan komitmen untuk membangun keselarasan pembangunan antara Lingkungan dan kota, memperkuat kolaborasi lintas sektor, mendorong inovasi dalam tata kelola dan pelayanan publik, menghasilkan karya pembangunan nyata, serta memastikan kesinambungan capaian pembangunan yang telah dirintis sebelumnya.

3. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan tujuh misi pembangunan yang secara substantif yaitu: pertama Mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan dan efisien berorientasi pelayanan yang profesional dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan yang berbasis teknologi informasi.. Kedua, Mengembangkan sistem pendidikan dan pengembangan SDM yang berorientasi pada keahlian dan keterampilan dengan dilandasi nilai-nilai agama, budaya dan berahlak mulia yang mampu berdaya saing Ketiga, Meningkatkan kualitas kesehatan dan pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, terutama untuk masyarakat tidak mampu. Keempat, Menciptakan peluang ekonomi berbasis wirawasta dan ekonomi kreatif bagi masyarakat, melalui pemanfaatan sumberdaya alam Kota Sibolga khususnya perikanan dan pariwisata serta potensi perbukitan. Kelima, Mewujudkan Sibolga yang nyaman melalui perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan unsur-unsur sejarah dan kebudayaan dengan melibatkan berbagai pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan. Keenam Mewujudkan kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang berbasis kearifan lokal dan karakter budaya serta adat istiadat daerah. Ketujuh, Melaksanakan berbagai upaya dalam menyelamatkan masyarakat dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, serta penyakit masyarakat lainnya.

4. Setiap misi dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang jelas dan terukur. Sasaran-sasaran tersebut dilengkapi dengan indikator kinerja utama, seperti peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi, Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, pertumbuhan Kenaikan Usia Harapan Hidup, Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, Gini Rasio, Peningkatan Indeks Infrastruktur, Indeks Kerukunan Umat Beragama serta perhitungan Rasa Aman. Target indikator ini ditetapkan secara tahunan untuk memastikan kemajuan pembangunan dapat dimonitor dan dievaluasi secara objektif sepanjang periode 2025–2029.
5. Strategi pembangunan daerah dirancang untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal melalui penerapan teknologi inovatif, penguatan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta pendekatan berbasis keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya. Strategi ini juga dirancang fleksibel agar dapat disesuaikan dengan dinamika perubahan eksternal maupun internal daerah. Untuk mendukung implementasi strategi, dirancang berbagai program prioritas, antara lain penguatan fasilitas layanan dan sistem penyelenggaraan pendidikan, akses pendidikan bagi anak kurang mampu yang berprestasi, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, peningkatan seni budaya dan karakter; penyelenggara fasilitas dan sistem penyelenggaraan kesehatan yang merata, percepatan penurunan stunting, peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, peningkatan pemberdayaan anak dan perempuan. upaya peningkatan investasi daerah, pengembangan potensi unggulan daerah, pengembangan sarana dan prasarana perdagangan dan UMKM, pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Penurunan angka pengangguran dan angka kemiskinan. optimalisasi kualitas layanan infrastruktur daerah. Prioritas pada mendorong harmonisasi dalam kehidupan, beragama, masyarakat dalam penguatan SDM dan fasilitasi sarana dan

prasarana keagamaan. percepatan proses transparansi birokrasi, peningkatan kualitas SDM. Penguatan gerakan keberlanjutan lingkungan dan penguatan tangguh bencana serta meningkatnya rasa aman di wilayah Kota Sibolga.

6. Dalam implementasinya, pembangunan Kota Sibolga dirancang bertahap melalui pentahapan tahunan yang sistematis. Tahap pertama (2026) fokus pada konsolidasi dan penguatan infrastruktur dasar, dilanjutkan dengan penguatan ekonomi lokal, pengembangan ekonomi kreatif, dan perluasan transformasi digital dalam pelayanan publik pada tahap-tahap berikutnya (2027) Fokus Pada Peningkatan daya saing dan inovatif dengan penguatan antara lain adalah kualitas SDM yang kompeten dan tangguh, meningkatnya kinerja tata kelola Pemerintahan yang bersih, meningkatnya sistem pelayanan public yang inovatif, digitalisasi pelayanan public kualitas SDM yang kompeten dan tangguh. Pada tahap berikutnya (2028) Fokus Pada Peningkatan Produktifitas dan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan langkah-langkah tahapan antara lain penguatan sektor perikanan dan ketahanan pangan, pengembangan industry kreatif dan pariwisata, penguatan kapasitas usaha mikro dan sektor informal, implementasi ekonomi berkelanjutan, pembangunan infrasturktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi . Tahap konsolidasi hasil pembangunan dan evaluasi menyeluruh akan dilaksanakan pada tahun 2029 peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Perlindungan sosial yang inklusif dan berkeadilan.
7. Sebagai bagian dari siklus perencanaan pembangunan, mekanisme pengendalian dan evaluasi dilaksanakan secara periodik. Pengendalian bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan implementasi, sedangkan evaluasi digunakan untuk menilai tingkat pencapaian sasaran, efektivitas program, serta mengidentifikasi hambatan dan memberikan rekomendasi

perbaikan. Seluruh proses ini dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), akuntabilitas publik, dan transparansi, guna memastikan pembangunan berjalan efektif, berdaya guna, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Kota Sibolga.

8. Program perangkat daerah, alokasi pendanaan indikatif, serta mekanisme pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah diuraikan secara komprehensif. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, disusun kerangka pendanaan pembangunan yang mempertimbangkan proyeksi kemampuan keuangan daerah, termasuk sumber pendapatan, belanja, serta pembiayaan alternatif. Keselarasan antara ketersediaan anggaran dan target pembangunan menjadi prinsip utama dalam perumusan program-program daerah, guna memastikan bahwa setiap program yang direncanakan dapat diimplementasikan secara realistis, efektif, dan berkelanjutan.
9. Program-program perangkat daerah beserta indikator kinerja, target tahunan, dan pagu anggaran indikatif untuk periode 2026–2030 telah diuraikan secara rinci. Setiap perangkat daerah bertanggung jawab dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan melalui program prioritas masing-masing, dengan tetap berpedoman pada visi, misi, dan arah kebijakan daerah. Penetapan indikator kinerja yang terukur dan target yang spesifik menjadi instrumen penting untuk menjaga akuntabilitas, efektivitas, serta kesinambungan pembangunan.
10. Selain itu, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur melalui penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang masing-masing mencerminkan tingkat keberhasilan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator

Kinerja Kunci (IKK) disusun untuk memastikan kinerja outcome atas setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam regulasi nasional.

11. Melalui sistem perencanaan program, alokasi anggaran, serta pengukuran kinerja yang terpadu dan berbasis data, Kota Sibolga menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil nyata yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengendalian dan evaluasi kinerja akan menjadi instrumen kunci dalam mengawal implementasi RPJMD ini, guna memastikan tercapainya pembangunan daerah yang inklusif, berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah Pelaksanaan berfungsi sebagai panduan teknis yang harus diperhatikan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, terutama bagi perangkat daerah. Kaidah ini mencakup prinsip, mekanisme, dan standar operasional yang harus diikuti dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing instansi. Dengan adanya kaidah ini, diharapkan setiap perangkat daerah dapat mengarahkan program dan kegiatannya agar selaras dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, dan terukur.

Kaidah pelaksanaan RPJMD bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan program pembangunan daerah serta menciptakan koordinasi yang efektif diantara seluruh pemangku kepentingan. Dengan adanya kaidah ini, diharapkan tercipta efisiensi dalam penggunaan anggaran dan waktu pelaksanaan program, sehingga setiap target pembangunan dapat dicapai secara optimal. Kaidah pelaksanaan RPJMD Kota Sibolga Tahun 2025–2029 ditetapkan sebagai berikut:

1. Penyesuaian Nomenklatur Perangkat Daerah

Jika dalam periode pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah (SOTK) di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga, maka penyesuaian pengampunan harus dilakukan dengan tetap mempertahankan indikator tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

2. Penyesuaian Nomenklatur Program

Jika terdapat perubahan nomenklatur program Perangkat Daerah, namun tidak mengubah substansi pada Program Perangkat Daerah tersebut, akibat kebijakan dari Pemerintah Pusat selama periode RPJMD, maka penyesuaian dilakukan tanpa mengubah target indikator program sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

3. Koordinasi Lintas Perangkat Daerah

Seluruh Perangkat Daerah atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga wajib menjalin koordinasi dalam melaksanakan program dan kegiatan, baik dalam satu rumpun maupun lintas rumpun (*cross cutting program*). Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pencapaian outcome RPJMD berjalan secara efektif dan efisien.

4. Penyesuaian Target RKPD terhadap RPJMD

Jika dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terjadi perubahan asumsi atau faktor eksternal yang menyebabkan target kinerja RKPD lebih tinggi atau lebih rendah dari target RPJMD, maka upaya tetap harus dilakukan untuk mempertahankan target agregat pada akhir periode RPJMD.

5. Sinkronisasi RKPD dengan APBD

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), RKPD Kota Sibolga menjadi dasar dalam penyusunan

Kebijakan Umum (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Semua perencanaan anggaran harus tetap mengacu pada target tahunan dan arah kebijakan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian Dan Evaluasi Terhadap Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Pengendalian dan Evaluasi merupakan tahapan yang perlu dilaksanakan untuk memastikan bahwa target yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Mekanisme pengendalian dan evaluasi sebagaimana telah diatur dalam pasal 299 - 300 Permendagri Nomor 86 tahun 2017.

Mengacu pada Pasal 265 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah lingkup Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf a meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan Daerah. Apabila terdapat situasi dan kondisi yang memenuhi syarat sebagaimana diatur di atas, maka dapat dilakukan pengendalian dan evaluasi yang bertujuan untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan. Perubahan RPJMD akibat adanya proses pengendalian dan evaluasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah merupakan aspek krusial untuk memastikan bahwa tujuan yang tercantum dalam dokumen perencanaan, seperti RPJMD atau RKPD, tercapai dengan efektif dan efisien. Pengendalian dimulai dengan penyusunan indikator kinerja yang jelas untuk setiap program dan kegiatan, diikuti dengan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan proyek untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai jadwal, anggaran, dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan internal dan eksternal, melalui sistem pengendalian internal dan lembaga

pengawas seperti BPK, membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas. Jika ditemukan penyimpangan, langkah-langkah perbaikan perlu diambil, seperti penyesuaian anggaran atau revisi kebijakan.

Sementara itu, evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana hasil pembangunan telah mencapai tujuan yang diinginkan. Langkah pertama dalam evaluasi adalah pengumpulan data yang relevan, diikuti dengan analisis kinerja untuk menilai efektivitas dan efisiensi program. Penilaian ini mencakup tiga aspek utama: output, outcome, dan impact dari setiap kegiatan pembangunan. Evaluasi juga melibatkan pemangku kepentingan untuk mendapatkan pandangan objektif. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan yang memuat temuan, analisis, serta rekomendasi perbaikan. Tindak lanjut dari hasil evaluasi penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan dimasa depan dapat lebih baik. Dengan pengendalian yang baik dan evaluasi yang menyeluruh, pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

5.4 Pedoman Transisi

Dalam rangka memastikan kesinambungan pembangunan daerah serta memberikan acuan yang jelas ketika periode RPJMD ini berakhir, ditetapkan pedoman transisi yang bertujuan untuk mengakomodasi berbagai aspek pembangunan yang masih memerlukan perhatian. Pedoman ini dirancang agar pencapaian dan perencanaan pembangunan dapat berlanjut secara sistematis tanpa menghambat proses pembangunan daerah dimasa mendatang. Adapun pedoman transisi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Penanganan terselesaikan permasalahan pembangunan yang belum terselesaikan.

Jika hingga akhir periode RPJMD masih terdapat permasalahan pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani, maka permasalahan tersebut akan menjadi bagian

dari agenda pembangunan dalam RPJMD periode berikutnya. Dengan demikian, program dan kebijakan yang disusun untuk periode mendatang dapat mengakomodasi solusi yang lebih komprehensif guna mengatasi kendala yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya.

2. Keberlanjutan program prioritas dan proyek strategis daerah.

Program prioritas serta proyek strategis daerah yang telah dijalankan selama periode RPJMD ini dan masih relevan dengan kebutuhan pembangunan dimasa mendatang direkomendasikan untuk dilanjutkan pada periode RPJMD berikutnya. Keberlanjutan ini bertujuan untuk memastikan bahwa investasi pembangunan yang telah dilakukan tetap memberikan manfaat jangka panjang dan tidak terputus sebelum mencapai hasil yang optimal. Dengan adanya pedoman transisi ini, diharapkan proses pembangunan daerah dapat berjalan lebih terarah dan berkesinambungan, sehingga setiap pencapaian yang telah diraih dalam periode ini dapat menjadi landasan bagi pembangunan yang lebih maju dan berkelanjutan di masa mendatang.

Berbagai ketentuan di atas menjadi acuan utama dalam pelaksanaan RPJMD Kota Sibolga Tahun 2025–2029. Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen ini akan disesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku guna memastikan kelancaran implementasi kebijakan pembangunan daerah.

Sibolga , 20 Agustus 2025

WALI KOTA SIBOLGA

dto.

AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.

NIP.19810705 200804 1 001

RPJMD Kota Sibolga Tahun 2025-2029

V | 10